

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (RPKD) TAHUN 2021-2026

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR



DR. YANSEN TP, M.Si
Wakil Gubernur Kaltara

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Taufik dan Hidayah-Nya, maka penyusunan draf akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini telah selesai disusun. Ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

RPKD ini adalah "rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun" yang merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum dan DR. Yansen TP, M.Si pada bidang penanggulangan kemiskinan, yaitu pada visi tiga "Kaltara Sejahtera" dan misi tiga "mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan Wajib 16 Tahun dan berwawasan".

RPKD ini disusun oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara (TKPK) parelal dengan penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021--2026 di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021.

RPKD ini terdiri atas enam Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Umum Daerah, Bab III Profil Kemiskinan Daerah, Bab IV Prioritas Program, Bab V Lokasi Prioritas, Bab VI Penutup. Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah secara *offline* yang dikembangkan oleh Tim Nasional Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menjadi acuan dan tool dalam menyusun dokumen ini.

Data dan informasi yang ada dalam RPKD ini dianalisis dengan pendekatan statistik deskriptif, agar dapat diketahui dan dipahami secara komprehensif dan detail kebijakan pada bidang penanggulangan kemiskinan (kesejahteraan masyarakat) secara efektif, efisien, relevan dan akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan/keputusan bagi Kepala Daerah dan parapihak terkait lainnya.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam RPKD ini, maka saran dan kritik konstruktif sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen RPKD.

Semoga RPKD ini bermanfaat bagi yang memerlukan, dan menjadi acuan bagi parapihak yang bergerak bersama dibidang penanggulangan kemiskinan, terutama dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra .

Akhirnya, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada parapihak yang berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini dan yang telah bergerak bersama-sama mewujudkan "Kaltara Sejahtera".

Tanjung Selor, April 2021
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
selaku
KETUA TKPK



DR. YANSEN TP, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK xvii
DAFTAR GAMBAR l

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 5
1.3 Manfaat 3
1.4 Indikator Penanggulangan Kemiskinan 6
1.5 Metode Analisis 7
1.6 Hasil Analisis dan Penyajiannya 7
1.7 Dasar Hukum 11
1.8 Sistematika Penulisan 12

BAB II KONDISI UMUM DAERAH 14
2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi 14
2.2 Demografi 16

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH 25
3.1 Analisis Situasi Kemiskinan 25
3.2 Analisis Profil APBD Provinsi 265

BAB IV PRIORITAS PROGRAM 276

BAB V LOKASI PRIORITAS 323

BAB VI PENUTUP 338

DAFTAR PUSTAKA li

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026	4
Tabel 1.2	Hasil Analisis Kuadran Importance Performance Analysis (IPA) antara Performance (X) dan Importance (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	10
Tabel 2.1	Keadaan Geografi Provinsi Kalimantan Utara	15
Tabel 2.2	Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara	15
Tabel 2.3	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	16
Tabel 2.4	Kepadatan Penduduk Tahun 2010 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	17
Tabel 2.5	Jumlah Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 dan Rata-rata Persentasenya Provinsi Kalimantan Utara	18
Tabel 2.6	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	19
Tabel 2.7	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	20
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	20
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Keatas Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	21
Tabel 2.10	Presentase Penduduk Menurut Agama yang dianut tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara	21
Tabel 2.11	Nilai Tukar Petani bulan Januari s/d April 2021 di Provinsi Kalimantan Utara	22
Tabel 2.12	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan bulan Januari s/d April 2021 di Provinsi Kalimantan Utara	22
Tabel 2.13	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan I, 2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (c-to-c) (Persen)	23

Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan I, 2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (y-to-y) (Persen)	24
Tabel 3.1	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Persentase Penduduk Miskin (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	33
Tabel 3.2	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Persentase Penduduk Miskin (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	34
Tabel 3.3	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Persentase Penduduk Miskin (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	35
Tabel 3.4	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	35
Tabel 3.5	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Jumlah Penduduk Miskin Kota (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	44
Tabel 3.6	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Jumlah Penduduk Miskin desa (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	45
Tabel 3.7	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	46
Tabel 3.8	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	47
Tabel 3.9	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Indeks Kedalaman Desa (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	48
Tabel 3.10	Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	48

Tabel 3.11 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 51
Tabel 3.12 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Garis Kemiskinan (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan Desa (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 52
Tabel 3.13 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angkatan Kerja (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 103
Tabel 3.14 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angkatan Kerja (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 104
Tabel 3.15 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angkatan Kerja (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 105
Tabel 3.16 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angkatan Kerja (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 106
Tabel 3.17 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angkatan Kerja (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 107
Tabel 3.18 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 115
Tabel 3.19 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 117
Tabel 3.20 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 . 118
Tabel 3.21 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkatan Partisipasi Angkatan Kerja (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 118

Tabel 3.22 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Pengangguran Terbuka (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 123
Tabel 3.23 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Pengangguran Terbuka (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 123
Tabel 3.24 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Pengangguran Terbuka (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 125
Tabel 3.25 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Pengangguran Terbuka (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 125
Tabel 3.26 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Pengangguran Terbuka (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 128
Tabel 3.27 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Kesempatan Kerja (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 131
Tabel 3.28 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Kesempatan Kerja (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 131
Tabel 3.29 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Kesempatan Kerja (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 133
Tabel 3.30 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Kesempatan Kerja (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 134
Tabel 3.31 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Tingkat Kesempatan Kerja (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 135
Tabel 3.32 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 138

Tabel 3.33 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 139
Tabel 3.34 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 140
Tabel 3.35 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 140
Tabel 3.36 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 142
Tabel 3.37 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 145
Tabel 3.38 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 145
Tabel 3.39 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 146
Tabel 3.40 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 148
Tabel 3.41 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 . 149
Tabel 3.42 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 149

Tabel 3.43 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 153
Tabel 3.44 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 153
Tabel 3.45 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 155
Tabel 3.46 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 155
Tabel 3.47 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Morbilitas (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 159
Tabel 3.48 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Morbilitas (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 160
Tabel 3.49 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Morbilitas (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 160
Tabel 3.50 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Morbilitas (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 161
Tabel 3.51 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Morbilitas (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 162
Tabel 3.52 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Kematian Bayi (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 167

Tabel 3.53 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Kematian Bayi (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 168
Tabel 3.54 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Kematian Bayi (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 169
Tabel 3.55 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Kematian Bayi (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 170
Tabel 3.56 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Kematian Bayi (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 171
Tabel 3.57 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) antara Angka Kematian Ibu Melahirkan (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 177
Tabel 3.58 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Kematian Ibu Melahirkan (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 177
Tabel 3.59 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Kematian Ibu Melahirkan (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 177
Tabel 3.60 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Kematian Ibu Melahirkan (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 180
Tabel 3.61 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Kematian Ibu Melahirkan (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 181
Tabel 3.62 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SD/MI(X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 188
Tabel 3.63 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SD/MI(X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 189

Tabel 3.64 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SD/MI(X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 190
Tabel 3.65 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SD/MI(X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 191
Tabel 3.66 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SD/MI(X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y)Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 192
Tabel 3.67 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMP/MTs(X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y)Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 197
Tabel 3.68 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMP/MTs(X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 198
Tabel 3.69 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMP/MTs(X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 199
Tabel 3.70 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMP/MTs(X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y)Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 200
Tabel 3.71 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMP/MTs(X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 201
Tabel 3.72 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 207
Tabel 3.73 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 208
Tabel 3.74 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 208

Tabel 3.75 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Angka Partisipasi Murni SMA/MA (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 210
Tabel 3.76 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 217
Tabel 3.77 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 218
Tabel 3.78 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 219
Tabel 3.79 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 220
Tabel 3.80 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 221
Tabel 3.81 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 227
Tabel 3.82 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 228
Tabel 3.83 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 229

Tabel 3.85 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 231
Tabel 3.86 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 237
Tabel 3.87 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 238
Tabel 3.88 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 238
Tabel 3.89 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 239
Tabel 3.90 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 240
Tabel 3.91 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Perkembangan Harga Beras (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 245
Tabel 3.92 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Perkembangan Harga Beras (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 246
Tabel 3.93 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Perkembangan Harga Beras (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 248
Tabel 3.94 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Perkembangan Harga Beras (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 249

Tabel 3.95 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Tingkat Inflasi (X) dan Persentase Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 260
Tabel 3.96 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Tingkat Inflasi (X) dan Garis Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 261
Tabel 3.97 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Tingkat Inflasi (X) dan Jumlah Penduduk Miskin (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 262
Tabel 3.98 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Tingkat Inflasi (X) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 263
Tabel 3.99 Hasil Analisis Kuadran *Importance Performance Analysis* (*IPA*) Antara Tingkat Inflasi (X) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Y) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 264
Tabel 3.100 Rincian Pendapatan Murni dan Perubahan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 268
Tabel 3.101 Rincian Pendapatan Perubahan (Rp) dan Perubahan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 269
Tabel 3.102 Rincian Belanja Murni dan Perubahan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 272
Tabel 4.1 Realisasi Pencairan Dana PKH di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 menurut Kabupaten/Kota dan Rata-ratanya 281
Tabel 4.2 Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 menurut Kabupaten/Kota dan Rata-ratanya 282
Tabel 4.3 Data Realisasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 290
Tabel 4.4 Data Realisasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) di Provinsi Kalimantan Utara bulan Januari tahun 2021 290
Tabel 4.5 Data Realisasi Bantuan Sosial Pangan (BPNT) di Provinsi Kalimantan Utara bulan Februari tahun 2021 291
Tabel 4.6 Data Realisasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi Siswa SD s/d SLTA di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 s/d Maret tahun 2021 293

Tabel 4.7 Data Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 s/d 2020 yang bersumber dari APBN 296
Tabel 4.8 Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 302
Tabel 4.9 Data Realisasi Pelaksanaan Program Sipelandukilat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 306
Tabel 4.10 Data Realisasi Pelaksanaan Program Dokter Terbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014-2020 308
Tabel 4.11 Pelaksanaan Program Sijempol di RSUD Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014-2020 309
Tabel 4.12 Efisiensi Biaya (Rp) atas Pelaksanaan Program Sijempol di RSUD Tarakan Apabila Pasien Memiliki Identitas Diri dan KIS 311
Tabel 4.13 Data Realisasi Program Bantuan Biaya Akomodasi Dan Transportasi (Rp) Berobat Bagi Keluarga Miskin Dan Kurang Mampu Yang Dirujuk Berobat/Dirawat Ke Rumah Sakit Di Luar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 311
Tabel 4.14 Data Daerah Asal Penerima Manfaat Dari Program Rujukan Berobat/Dirawat Ke Rumah Sakit Di Luar Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2021 312
Tabel 4.15 Data Rekapan Program Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020 312
Tabel 4.16 Data Realisasi Program Bantuan Peningkatan Kualitas Sanitasi yang dibiayai APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020 315
Tabel 4.17 Data Jumlah Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program KUBE dari APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020 menurut Daerah, Jumlah Kelompok Penerima Manfaat dan Rata-ratanya 315

Tabel 4.18 Data Realisasi Program Beasiswa Kaltara Cerdas bagi Pelajar dan Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara Tahun menurut tahun, Jumlah Penerima/KPM, Rata-rata per Tahun dan Persentase 315
Tabel 4.19 Data Realisasi Program Beasiswa Kaltara Cerdas Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 menurut Pendidikan, Tempat Kuliah, Jumlah KPM dan Persentasenya 316
Tabel 4.20 Data Realisasi Anggaran Program KUBE Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2020 dan Persentasenya 317
Tabel 4.21 Target Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 318

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Analisis Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	25
Grafik 3.2	Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	26
Grafik 3.3	Analisis Efektifitas Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	26
Grafik 3.4	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	27
Grafik 3.5	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Persentase Penduduk Miskin-Kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	27
Grafik 3.6	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Persentase Penduduk Miskin-Desa (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	28
Grafik 3.7	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin-Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	28
Grafik 3.8	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin-Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	28
Grafik 3.9	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	29
Grafik 3.10	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	29
Grafik 3.11	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	29
Grafik 3.12	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	30
Grafik 3.13	Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	30

Grafik 3.14 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 30
Grafik 3.15 Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 31
Grafik 3.16 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 32
Grafik 3.17 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 33
Grafik 3.18 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 34
Grafik 3.19 Analisis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 35
Grafik 3.20 Analisis Posisi Relatif Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 36
Grafik 3.21 Analisis Perkembangan Antar Waktu Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 36
Grafik 3.22 Analisis Efektivitas Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 37
Grafik 3.23 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 37
Grafik 3.24 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 38
Grafik 3.25 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin – Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 38
Grafik 3.26 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 38
Grafik 3.27 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 39

Grafik 3.28 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 39
Grafik 3.29 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 39
Grafik 3.30 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 40
Grafik 3.31 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 40
Grafik 3.32 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 40
Grafik 3.33 Analisis Identifikasi Masalah Garis Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 41
Grafik 3.34 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 42
Grafik 3.35 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 43
Grafik 3.36 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin-Kota (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 43
Grafik 3.37 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 45
Grafik 3.38 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 46
Grafik 3.39 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 47

Grafik 3.40 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 48
Grafik 3.41 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 49
Grafik 3.42 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 50
Grafik 3.43 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 51
Grafik 3.44 Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin – Kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 52
Grafik 3.45 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 53
Grafik 3.46 Analisis Relevansi Penduduk Miskin – Kota (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 53
Grafik 3.47 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 54
Grafik 3.48 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Jumlah Penduduk Miskin-Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 54
Grafik 3.49 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 55
Grafik 3.50 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 55
Grafik 3.51 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 55

Grafik 3.52 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 56
Grafik 3.53 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 56
Grafik 3.54 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Kota (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 56
Grafik 3.55 Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin - Kota (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 57
Grafik 3.56 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 58
Grafik 3.57 Analisis Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 58
Grafik 3.58 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 59
Grafik 3.59 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 59
Grafik 3.60 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) dan Jumlah Penduduk Miskin – Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 60
Grafik 3.61 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) dan Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 60
Grafik 3.62 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 61
Grafik 3.63 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 61
Grafik 3.64 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 61

Grafik 3.65 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 62
Grafik 3.66 Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin – Desa (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 62
Grafik 3.67 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 63
Grafik 3.68 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 63
Grafik 3.69 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 64
Grafik 3.70 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 64
Grafik 3.71 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Jumlah Penduduk Miskin – Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 64
Grafik 3.72 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 65
Grafik 3.73 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 66
Grafik 3.74 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 66
Grafik 3.75 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 66
Grafik 3.76 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 67
Grafik 3.77 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 67
Grafik 3.78 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 67

Grafik 3.79 Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 68
Grafik 3.80 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 69
Grafik 3.81 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 69
Grafik 3.82 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 70
Grafik 3.83 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 70
Grafik 3.84 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 71
Grafik 3.85 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 71
Grafik 3.86 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 71
Grafik 3.87 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 72
Grafik 3.88 Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 72
Grafik 3.89 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 73
Grafik 3.90 Analisis Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 73
Grafik 3.91 Analisis Efektivitas Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 74
Grafik 3.92 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 74

Grafik 3.93 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 75
Grafik 3.94 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 75
Grafik 3.95 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 76
Grafik 3.96 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 76
Grafik 3.97 Analisis Identifikasi Masalah Jumlah Penduduk Miskin – Desa (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 77
Grafik 3.98 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 78
Grafik 3.99 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 78
Grafik 3.100 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 79
Grafik 3.101 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 79
Grafik 3.102 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 80
Grafik 3.103 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 80
Grafik 3.104 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 80
Grafik 3.105 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 81

Grafik 3.106 Analisis Identifikasi Masalah Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 81
Grafik 3.107 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 82
Grafik 3.108 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 82
Grafik 3.109 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 83
Grafik 3.110 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 83
Grafik 3.111 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 84
Grafik 3.112 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 84
Grafik 3.112 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 84
Grafik 3.113 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 84
Grafik 3.114 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Kota (Indeks) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 85
Grafik 3.115 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020..... 86
Grafik 3.116 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)-Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 86
Grafik 3.117 Analisis Efektivitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)-Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 87
Grafik 3.118 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)-Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 87

Grafik 3.119 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)-Desa (Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 88
Grafik 3.120 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)-Desa (Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 88
Grafik 3.121 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 88
Grafik 3.122 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 89
Grafik 3.123 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 90
Grafik 3.124 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 90
Grafik 3.125 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 91
Grafik 3.126 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 91
Grafik 3.127 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 92
Grafik 3.128 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 92
Grafik 3.129 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 93
Grafik 3.130 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 93
Grafik 3.131 Analisis Efektivitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 94
Grafik 3.132 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 94

Grafik 3.133 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 95
Grafik 3.134 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Kota (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 95
Grafik 3.135 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)-Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 96
Grafik 3.136 Analisis Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)-Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 96
Grafik 3.137 Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 96
Grafik 3.138 Analisis Identifikasi Masalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) – Desa (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2020 98
Grafik 3.139 Analisis Posisi Relatif Angkatan Kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 98
Grafik 3.140 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angkatan Kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 99
Grafik 3.141 Analisis Efektivitas Angkatan Kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 99
Grafik 3.142 Analisis Relevansi Angkatan Kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 99
Grafik 3.143 Analisis Relevansi Angkatan Kerja (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 99
Grafik 3.144 Analisis Relevansi Angkatan Kerja (Jiwa) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 99
Grafik 3.145 Analisis Relevansi Angkatan Kerja (Jiwa) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 100
Grafik 3.146 Analisis Relevansi Angkatan Kerja (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 101
Grafik 3.147 Analisis Identifikasi Masalah Angkatan Kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 102
Grafik 3.148 Analisis Prioritas Intervensi Angkatan Kerja (Jiwa) terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 102

Grafik 3.149 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angkatan Kerja (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 102
Grafik 3.150 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angkatan Kerja (Jiwa) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 102
Grafik 3.151 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angkatan Kerja (Jiwa) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 105
Grafik 3.152 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angkatan Kerja (Jiwa) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 106
Grafik 3.153 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angkatan Kerja (Jiwa) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 107
Grafik 3.154 Analisis Perkembangan Antar Waktu Setengah Pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 108
Grafik 3.155 Analisis Efektivitas Setengah Pengangguran (%) Provinsi Kalimantan UtaraTahun 2016-2020 108
Grafik 3.156 Analisis Relevansi Setengah Pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 108
Grafik 3.157 Analisis Relevansi Setengah Pengangguran (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 108
Grafik 3.158 Analisis Relevansi Setengah Pengangguran (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 109
Grafik 3.159 Analisis Relevansi Setengah Pengangguran (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 110
Grafik 3.160 Analisis Identifikasi Masalah Setengah Pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 110
Grafik 3.161 Analisis Prioritas Intervensi Setengah Pengangguran terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 111
Grafik 3.162 Analisis Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 111

Grafik 3.163 Analisis Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 112
Grafik 3.164 Analisis Efektivitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 112
Grafik 3.165 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 112
Grafik 3.166 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 112
Grafik 3.167 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 113
Grafik 3.168 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 114
Grafik 3.169 Analisis Prioritas Intervensi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 114
Grafik 3.170 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 115
Grafik 3.171 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 116
Grafik 3.172 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 117
Grafik 3.173 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 117
Grafik 3.174 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 119
Grafik 3.175 Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 120
Grafik 3.176 Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 120

Grafik 3.177 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 120
Grafik 3.178 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 120
Grafik 3.179 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 120
Grafik 3.180 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 122
Grafik 3.181 Analisis Prioritas Intervensi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 123
Grafik 3.182 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020..... 123
Grafik 3.183 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 124
Grafik 3.184 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 125
Grafik 3.185 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 126
Grafik 3.186 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 127
Grafik 3.187 Analisis Posisi Relatif Tingkat Kesempatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 128
Grafik 3.188 Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kesempatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 129
Grafik 3.189 Analisis Efektivitas Tingkat Kesempatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 129
Grafik 3.190 Analisis Relevansi Tingkat Kesempatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 129

Grafik 3.191 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Kesempatan Kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 130
Grafik 3.192 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020..... 131
Grafik 3.193 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 132
Grafik 3.194 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 132
Grafik 3.195 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 134
Grafik 3.196 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 135
Grafik 3.197 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 136
Grafik 3.198 Analisis Perkembangan Antar Waktu Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 136
Grafik 3.199 Analisis Efektivitas Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 136
Grafik 3.200 Analisis Relevansi Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 136
Grafik 3.201 Analisis Identifikasi Masalah Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 137
Grafik 3.202 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019..... 138
Grafik 3.203 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 139

Grafik 3.204 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 140
Grafik 3.205 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 141
Grafik 3.206 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 142
Grafik 3.207 Analisis Posisi Relatif Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 143
Grafik 3.208 Analisis Perkembangan Antar Waktu Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 143
Grafik 3.209 Analisis Efektivitas Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 143
Grafik 3.210 Analisis Relevansi Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 144
Grafik 3.211 Analisis Identifikasi Masalah Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 144
Grafik 3.212 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 145
Grafik 3.213 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 145
Grafik 3.214 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 147
Grafik 3.215 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 148
Grafik 3.216 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 149

Grafik 3.217 Analisis Posisi Relatif Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 150
Grafik 3.218 Analisis Perkembangan Antar Waktu Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 150
Grafik 3.219 Analisis Efektivitas Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 150
Grafik 3.220 Analisis Relevansi Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 151
Grafik 3.221 Analisis Identifikasi Masalah Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 151
Grafik 3.222 Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019..... 152
Grafik 3.223 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 153
Grafik 3.224 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 154
Grafik 3.225 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 155
Grafik 3.226 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 156
Grafik 3.227 Analisis Posisi Relatif Angka Morbiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 157
Grafik 3.228 Analisis Perkembangan Antar Waktu Angka Morbiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 157
Grafik 3.229 Analisis Efektivitas Angka Morbiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 157
Grafik 3.230 Analisis Relevansi Angka Morbiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 158

Grafik 3.231 Analisis Identifikasi Masalah Angka Morbiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 158
Grafik 3.232 Analis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Morbiditas (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 159
Grafik 3.233 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Morbiditas (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 160
Grafik 3.234 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Morbiditas (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 160
Grafik 3.235 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Morbiditas (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 161
Grafik 3.236 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Morbiditas (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 162
Grafik 3.237 Analisis Posisi Relatif Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 162
Grafik 3.238 Analisis Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015-2019 163
Grafik 3.239 Analisis Efektivitas Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 164
Grafik 3.240 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 164
Grafik 3.241 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 164
Grafik 3.242 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 165
Grafik 3.243 Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 165

Grafik 3.244 Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 166
Grafik 3.245 Analisis Prioritas Bidang Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 166
Grafik 3.246 Analis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 167
Grafik 3.247 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Garis Kemiskinan (Rp) Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 168
Grafik 3.248 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 169
Grafik 3.249 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 170
Grafik 3.250 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1.000 Kelahiran Hidup) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 171
Grafik 3.251 Analisis Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 172
Grafik 3.252 Analisis Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 172
Grafik 3.253 Analisis Efektivitas Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 172
Grafik 3.254 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 173
Grafik 3.255 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 173
Grafik 3.256 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 174

Grafik 3.257 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 174
Grafik 3.258 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 174
Grafik 3.259 Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 175
Grafik 3.260 Analisis Identifikasi Masalah Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 175
Grafik 3.261 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kesehatan AKI Terhadap Bidang Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 176
Grafik 3.262 Analisis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 177
Grafik 3.263 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 178
Grafik 3.264 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 179
Grafik 3.265 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 180
Grafik 3.266 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 181
Grafik 3.267 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 182
Grafik 3.268 Analisis Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 182

Grafik 3.269 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 183
Grafik 3.270 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 183
Grafik 3.271 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 183
Grafik 3.272 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 184
Grafik 3.273 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 184
Grafik 3.274 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 185
Grafik 3.275 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 185
Grafik 3.276 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 186
Grafik 3.277 Analisis Prioritas Intervensi APM SD/MI Terhadap Bidang Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 187
Grafik 3.278 Analisis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019..... 187
Grafik 3.279 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 188
Grafik 3.280 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 189
Grafik 3.281 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 190

Grafik 3.282 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 191
Grafik 3.283 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 192
Grafik 3.284 Analisis Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 193
Grafik 3.285 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 193
Grafik 3.286 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 193
Grafik 3.288 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 194
Grafik 3.289 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 194
Grafik 3.290 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 195
Grafik 3.291 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 195
Grafik 3.292 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 196
Grafik 3.293 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan APM SMP/MTs Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 196
Grafik 3.294 Analisis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019..... 197
Grafik 3.295 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 198
Grafik 3.296 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 199

Grafik 3.297 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 200
Grafik 3.298 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 201
Grafik 3.299 Analisis Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 202
Grafik 3.300 Analisis Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 202
Grafik 3.301 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 203
Grafik 3.302 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 203
Grafik 3.303 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 204
Grafik 3.304 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 204
Grafik 3.305 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 204
Grafik 3.306 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 205
Grafik 3.307 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 205
Grafik 3.308 Analisis Identifikasi Masalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 206
Grafik 3.309 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan APM SMA/MA Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 207
Grafik 3.310 Analisis Kuadran Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019..... 207

Grafik 3.311 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 208
Grafik 3.312 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 209
Grafik 3.313 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 210
Grafik 3.314 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 211
Grafik 3.315 Analisis Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 212
Grafik 3.316 Analisis Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 212
Grafik 3.317 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 213
Grafik 3.318 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 213
Grafik 3.319 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 213
Grafik 3.320 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 214
Grafik 3.321 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 214
Grafik 3.322 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 214
Grafik 3.323 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 215

Grafik 3.324 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 215
Grafik 3.325 Analisis Prioritas Intervensi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Terhadap Bidang Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 216
Grafik 3.326 Analisis Kuadran Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 216
Grafik 3.327 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 217
Grafik 3.312 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 209
Grafik 3.313 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 210
Grafik 3.314 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 211
Grafik 3.315 Analisis Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 212
Grafik 3.316 Analisis Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 212
Grafik 3.317 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 213
Grafik 3.318 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 213
Grafik 3.319 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 213
Grafik 3.320 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 214

Grafik 3.321 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 214
Grafik 3.322 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 214
Grafik 3.323 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 215
Grafik 3.324 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 215
Grafik 3.325 Analisis Prioritas Intervensi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Terhadap Bidang Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 216
Grafik 3.326 Analisis Kuadran Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 216
Grafik 3.327 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 217
Grafik 3.328 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 218
Grafik 3.329 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 219
Grafik 3.330 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 220
Grafik 3.331 Analisis Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 221
Grafik 3.332 Analisis Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 222

Grafik 3.333 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 222
Grafik 3.334 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 223
Grafik 3.335 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 223
Grafik 3.336 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 224
Grafik 3.337 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 224
Grafik 3.338 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 224
Grafik 3.339 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 225
Grafik 3.340 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 226
Grafik 3.341 Analisis Prioritas Intervensi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 226
Grafik 3.342 Analisis Kuadran Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 227
Grafik 3.343 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 228
Grafik 3.344 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 229

Grafik 3.345 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 230
Grafik 3.346 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 231
Grafik 3.347 Analisis Posisi Relatif Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 232
Grafik 3.348 Analisis Perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 232
Grafik 3.349 Analisis Efektivitas Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 232
Grafik 3.350 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 233
Grafik 3.351 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 233
Grafik 3.352 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 233
Grafik 3.353 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 234
Grafik 3.354 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 234
Grafik 3.355 Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 234
Grafik 3.356 Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 235

Grafik 3.357 Analisis Prioritas Intervensi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 236
Grafik 3.358 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 236
Grafik 3.359 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 237
Grafik 3.360 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 238
Grafik 3.361 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 239
Grafik 3.362 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 240
Grafik 3.363 Analisis Perkembangan Antar Waktu Harga Beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 241
Grafik 3.364 Analisis Efektivitas Perkembangan Harga Beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 241
Grafik 3.365 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 241
Grafik 3.366 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 242
Grafik 3.367 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 242
Grafik 3.368 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 242
Grafik 3.369 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 243

Grafik 3.370 Analisis Relevansi Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 243
Grafik 3.371 Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Harga Beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 243
Grafik 3.372 Analisis Prioritas Intervensi Perkembangan Harga Beras (Rp) dan terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 244
Grafik 3.373 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 245
Grafik 3.374 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 246
Grafik 3.375 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 247
Grafik 3.376 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 248
Grafik 3.377 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan berdasarkan Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 249
Grafik 3.378 Analisis Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 250
Grafik 3.379 Analisis Perkembangan Antar Waktu Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 250
Grafik 3.380 Analisis Efektivitas Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 251
Grafik 3.381 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 251
Grafik 3.382 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 252
Grafik 3.383 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 252

Grafik 3.384 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 252
Grafik 3.385 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 253
Grafik 3.386 Analisis Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 253
Grafik 3.387 Analisis Identifikasi Masalah Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 254
Grafik 3.388 Analisis Prioritas Intervensi Pertumbuhan Ekonomi (%) terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 255
Grafik 3.389 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020..... 255
Grafik 3.390 Analisis Posisi Relatif Tingkat Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 256
Grafik 3.391 Analisis Perkembangan Antar Waktu Tingkat Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 256
Grafik 3.392 Analisis Efektivitas Tingkat Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 257
Grafik 3.393 Analisis Relevansi Tingkat Inflasi (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 257
Grafik 3.394 Analisis Relevansi Tingkat Inflasi (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 257
Grafik 3.395 Analisis Relevansi Tingkat Inflasi (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 258
Grafik 3.396 Analisis Relevansi Tingkat Inflasi (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 258
Grafik 3.397 Analisis Relevansi Tingkat Inflasi (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 258
Grafik 3.398 Analisis Relevansi Tingkat Inflasi (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 259
Grafik 3.399 Analisis Identifikasi Masalah Tingkat Inflasi (Rp) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 259

Grafik 3.400 Analisis Prioritas Intervensi Tingkat Inflasi (%) dan terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 260
Grafik 3.401 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Inflasi (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 260
Grafik 3.402 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Inflasi (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 261
Grafik 3.403 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Inflasi (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 262
Grafik 3.404 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Inflasi (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 263
Grafik 3.405 Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokkan Wilayah berdasarkan Tingkat Inflasi (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)(Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 264
Grafik 3.406 Rincian Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 265
Grafik 3.407 Rincian Pendapatan (Dana Perimbangan) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 267
Grafik 3.408 Rincian Pendapatan (Dana Perimbangan) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 267
Grafik 3.409 Rincian Pendapatan (Semua Pendapatan) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 (Rp Juta) 268
Grafik 3.410 Rincian Belanja Tidak Langsung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 (Rp Juta) 271
Grafik 3.411 Rincian Belanja Langsung Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 (Rp Juta) 271
Grafik 3.412 Rincian Pendapatan (Semua Belanja) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Rp Juta) 272
Grafik 3.413 Komposisi Menurut Jenis Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020 (Rp Juta) 275

Grafik 4.414 Distribusi Persentase Jumlah Program Peningkatan Kualitas Bantuan RUmah Swadaya APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020 ke Kabupaten/Kota 314

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Strategi dan Kebijakan Percepatan Penurunan Kemiskinan	2
Gambar 1.2	Diagram *Importance Performance Analysis*	9
Gambar 2.1	Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara	14
Gambar 3.4	Program Sipelanduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	22
Gambar 3.5	Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020	24
Gambar 3.6	Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014-2020	28
Gambar 3.7	Program BLT Dana Desa yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	33
Gambar 3.8	Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020	36
Gambar 3.9	Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	40
Gambar 3.10	Program Penanggulangan Kemiskinan yang difasilitasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	43
Gambar 3.11	Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020	45
Gambar 3.12	Program Penanggulangan Kemiskinan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020	47
Gambar 4.1	SIKS_NG dan DTKS	278
Gambar 4.2	Program Keluarga Harapan	279
Gambar 4.3	Kartu Indonesia Sehat	279
Gambar 4.4	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	287
Gambar 4.5	Terbangunnya SPBU di Krayan	298
Gambar 4.6	Program Bantuan DKP 2015-2020	318

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan bukan saja menjadi prioritas pembangunan di daerah, tetapi prioritas nasional bahkan global yaitu pencapaian pelaksanaan Tujuan *Sustainable Development Goald (SDG's)* atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2015-2030 pada Pilar Pembangunan Sosial yaitu Tujuan 1 tanpa kemiskinan dan Tujuan 2 tanpa kelaparan (Perpres. Nomor 59 tahun 2017).

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 sebelum Amandemen berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan Pasal 34 setelah amandemen berbunyi:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Kurang Mampu[1]. Pasal 1 ayat 1 berbunyi "Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah". Ayat 2 berbunyi: "Sistem Informasi Kesejahteraan *Sosial-Next Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan diseminasi data kesejahteraan sosial terpadu yang dilaksanakan

secara berjenjang dan berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi".

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Penanggulangan kemiskinan bersifat tematik sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi untuk menjembatani pelaksanaan program/kegiatan lintas K/L dan lintas OPD. Kementeraian Dalam Negeri sebagai Pembina Pemerintah Daerah perlu mengoordinasikan penanggulangan kemiskinan di daerah dan antar kementerian/lembaga terkait[1].

Gambar 1.1 merupakan strategi dan kebijakan percepatan penurunan kemiskinan (Paparan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemen PPN/ Bappenas RI disampaikan oleh Dinar Dana Kharisma, SE, MALD, Ph.D pada Rakor Pelaksanaan SLRT se-Kaltara tahun 2021, *virtual meeting* 29 Maret 2021[2]).

Gambar 1.1. Strategi dan Kebijakan Percepatan Penurunan Kemiskinan



Diketahui bersama, bahwa ditengah masa pandemi covid-19 hingga saat ini tahun 2021 yang melanda seluruh negara termasuk Indonesia telah mengalami *recovery*, maka tidak berlebihkan penurunan angka kemiskinan diprediksi akan turut berpengaruh, apakah naik, melambat, stagnan, ataukah justru turun. Karena aktivitas kegiatan pembangunan, sosial, ekonomi, dan aktivitas lainnya, juga tentunya berpengaruh. Di Provinsi Kalimantan Utara, tercatat bahwa pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 6,80% naik sebesar 0,32% dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 6,49%, sementara target angka kemiskinan dalam RPJMD tahun 2020 adalah sebesar 5,84%, berarti tidak tercapai.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya komitmen kepala daerah dalam melaksanakan peran dan fungsi SLRT dan Puskesos, terkait pelaksanaan pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Tercatat bahwa di Kabupaten Tana Tidung 43,68%, di Kabupaten Bulungan 8,02%, di Kabupaten Nunukan 6,77%, di Kabupaten Malinau 5,43%, di Kota Tarakan 4,92% sehingga untuk Provinsi Kalimantan Utara hanya sebesar 13,76%, sedangkan cakupan DTKS nasional sebesar 40%. Pengembangan registrasi sosial ekonomi sudah dimulai tahun 2020 yang lalu, dilanjutkan pada tahun 2021 dengan cakupan DTKS sebesar 60%, kemudian tahun 2022 transportasi registrasi sosial ekonomi sebesar 80%, dan di akhiri registrasi sosial ekonomi sebesar 100% pada tahun 2023 dan 2024[2].

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS meliputi 1) Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); 2) Data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan 3) Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) termasuk di dalamnya data lembaga di bidang kesejahteraan sosial seperti LKS, panti dan balai kesejahteraan sosial.

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilakukan secara terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan oleh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/atau masyarakat. Basis data ini berisi informasi sosial-ekonomi dan demografi dari sekitar 40% (empat puluh persen) penduduk di Indonesia yang paling rendah status

kesejahteraannya. Rumah tangga yang ada dalam DTKS dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.

Data ini bertujuan sebagai database calon penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Intervensi yang diberikan berdasarkan kondisi yang dialami oleh setiap penduduk seperti kemiskinan, keterlantaran, kondisi disabilitas, keadaan terpencil, kondisi tuna sosial, korban bencana, atau korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi (Renstra Kemensos RI tahun 2020-2024).

Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH. M.Hum selaku Gubernur bersama Dr. Yansen TP, M.Si selaku Wakil Gubernur definitif kedua masa bakti 2021-2024, yang dilantik tanggal 15 Februari 2021 di istana Negara oleh Presiden RI Bapak Ir. H. Joko Widodo, untuk menjawab tantangan kemiskinan di Kalimantan Utara sebagaimana dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Visi 3 : Sejahtera Sejahtera yaitu suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan taraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan pembangunan Misi 3: Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan Wajib 16 Tahun dan berwawasan;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	4. Berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah	1. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja baru 2. Penurunan penduduk miskin	1. Menciptakan lapangan kerja baru 2. Menurunkan jumlah penduduk miskin

Sumber: Draf Ranwal RPJMD Provinsi Kaltara tahun 2021-2026. Bappeda dan Litbang bekerjasama dengan UBT, 2021.

Sebagai komiten Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terhadap penanggulangan kemiskinan maka disusunlah dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 yang berpedoman Permendagri Nomor 53 Tahun 2020[1]. Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

Penjabaran dari pelaksanaan RKPD ini terdapat dalam ayat (4) berbunyi: Rencana Aksi Tahunan (RAT) adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. Pasal 24 berbunyi (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan ini disampaikan ke Wakil Presiden RI selaku Ketua TNP2K cq. Menteri Dalam Negeri RI dan ditembuskan ke kementerian dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen RPKD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini disusun paralel dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 yang sedang saat ini berproses. Diharapkan dengan disusunnya dokumen RPKD ini bagian yang tidak terpisahkan dan substansi dari dokumen RPJMD. Dengan ditetapkannya dokumen RPKD ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen RPKD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dengan memperhatikan kondisi empiris, kemampuan, dan kewenangan daerah.
2. untuk menetapkan rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.
3. untuk penargetan indikator penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026.
4. untuk mengoperasionalisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih masa bakti 2021-2024 pada bidang penanggulangan kemiskinan.

1.3. Manfaat

Manfaat disusunnya dokumen RPKD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai standar pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara.
2. sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara khususnya bagi Kepala Daerah bersama stakeholder terkait.
3. sebagai refrensi bagi Kepala Daerah bersama stakeholder terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan kurang mampu di Provinsi Kalimantan Utara.
4. sebagai operasional Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih masa bakti 2021-2024 pada bidang penanggulangan kemiskinan.

1.4. Indikator Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Buku Panduan Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah yang disusun oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)[3], terdapat 8 indikator bidang yaitu bidang konsumsi/pengeluaran, bidang tenaga kerja, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi dan bidang fiskal. Kedelapan bidang ini terdiri atas 127 indikator penanggulangan kemiskinan, detail indikator dimaksud dapat dilihat pada lampiran 1.1.

Dari indikator tersebut, indikator yang dianalisis adalah indikator yang tersedia data *timeseries nya*, sekurang-kurangnya adalah data *timeseries* untuk indikator bidang konsumsi (Bimtek Penguatan Kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota, 2020).

1.5. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam menyusun dokumen RPKD ini adalah analisis deskriptif, dengan menggunakan aplikasi analisis situasi kemiskinan dan anggaran daerah secara *offline*[3], meliputi:

1. Analisis situasi kemiskinan mencakup :
   a) Analisis perkembangan antar waktu
   b) Analisis posisi relatif antar daerah
   c) Analisis efektivitas
   d) Analisis relevansi
   e) Analisis keterkaitan
   f) Analisis identifikasi masalah
   g) Analisis prioritas intervensi
   h) Analisis intervensi wilayah
2. Analisis APBD mencakup :
   a) Analisis pendapatan
   b) Analisis belanja
3. Analisis belanja program/kegiatan mencakup :
   a) Analisis komposisi belanja
   b) Analisis relevansi belanja

1.6. Hasil Analisis dan Penyajiannya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Utara dianalisis sebagaimana disajikan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3. Hasil analisis indikator penanggulangan kemiskinan

No	Analisis	Hasil analisis/penjelasan

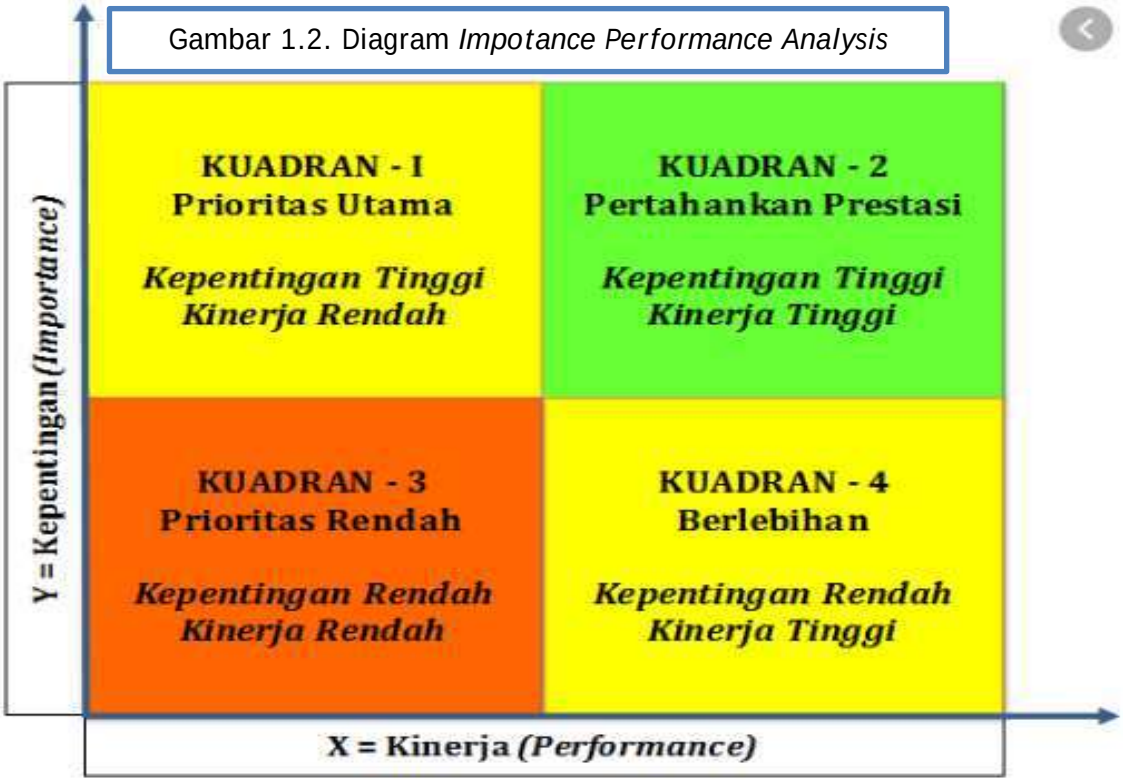
1.	Posisi relatif[3]	Apakah pencapaian suatu indikator di tahun analisis lebih baik, sama, atau lebih buruk jika dibandingkan dengan pencapaian provinsi dan nasional ? Apakah pencapaian terakhir suatu indikator lebih baik, sama, atau lebih buruk jika dibanding dengan indkator kinerja/target RPJMD ?
2.	perkembangan antar waktu[3]	Apakah pencapaian suatu indikator di tahun terakhir lebih baik, sama, atau lebih buruk jika dibandingkan pencapaian pada tahun sebelumnya terutama dalam tiga hingga lima tahun terakhir ?
3.	Efektivitas intervensi[3]	Apakah perubahan capaian indikator secara keseluruhan dalam periode yang dianalisis menunjukan perbaikan, tetap atau memburuk ? Apakah perubahan capaian indikator antar tahun dalam periode yang dimaksud mengalami percepatan, tetap atau perlambatan ?
4.	relevansi perkembangan[3]	Apakah kecenderungan perubahan yang terjadi di tingkat kabupaten/kota sejalan dengan yang terjadi di tingkat provinsi dan nasional ?
5.	relevansi antar indikator[3]	Membandingkan antar dua indikator, apakah perubahan dalam suatu indikator saling mendukung/mempengaruhi oleh perubahan indikator lain ?
6.	keterkaitan (prioritas intervensi) [3]	Apakah perubahan/perkembangan dalam suatu indikator utama/dipengaruhi oleh perubahan indikator pendukung lainnya yang secara teoritis/empiris berkaitan ?
7.	kuadran prioritas wilayah[3]	Apakah memiliki pengaruh terhadap capaian indikator utama untuk kemudian bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa penyebab buruknya capaian indikator utama pada grafik diatas adalah indikator pendukung yang mempengaruhinya ?

		PRIORITAS 1 2 3 4
8	Kuadran IPA[4]	analisis kuadran IPA *(importance and performance analysis)* bermanfaat untuk mengidentifikasi prioritas atribut-atribut atau indikator-indikator kualitas yang harus segera diperbaiki, dipertahankan, diabaikan atau berlebihan, serta menghasilkan formula perbaikan kualitas produk jasa.

Sumber: Buku Panduan Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah, 2020[3].

Shia et.al. (2016:123)[4] *dalam* Rangkuti, 2006:111 (http://masyono.staff.ugm) menjelaskan *Importance Performance Analysis* (IPA) adalah teknis untuk mengidentifikasi atribut-atribut jasa *(service)* yang perlu diperbaiki *(improvement)* dan juga mengidentifikasi atribut-atribut yang perlu dikurangi prioritasnya, sebagaimana disajikan pada gambar 1.2.

Gambar 1.2. Diagram *Impotance Performance Analysis*



Tabel 1.2 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara *performance* (X) dan *importance* (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Hasil analisis/penjelasan	Kabupaten/Kota (ada/tidak ada)
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	

Sumber : Shia et.al. (2016:123)[4] *dalam* Rangkuti, 2006:111

Hasil analisis dari pelaksanaan penanggulangan kemiskinan disajikan dalam bentuk grafik maupun tabulasi, yang selanjutnya diinterprestasi secara statistika deskriptif yang detail pembahasannya terdapat pada Bab III, sedangkan terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan/program kegiatan prioritas penanggulangan kemiskinan pembahasannya terdapat pada Bab IV dalam dokumen RPKD ini.

Statistika adalah cabang dari ilmu matematika yang berhubungan dengan bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Memahami statistika membuat pemahaman kita terhadap data dan informasi lebih terstruktur.

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan, meringkas *(summary)* data agar lebih mudah dibaca dan digunakan. Statistika deskriptif merupakan proses melakukan kategorisasi dan pendeskripsian informasi. Statistika deskriptif merupakan metode untuk merangkum informasi yang telah kita kumpulkan. Rangkuman informasi biasa ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk nilai rata-rata, persentase dan yang lainnya.

Statistika deskriptif sangat bermanfaat yaitu pertama menyediakan informasi dasar tentang variabel dalam dataset, dan kedua menonjolkan potensi hubungan antar variabel (https://geospasialis.com/statistika-deskriptif).

1.7. Dasar Hukum

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan amandemennya;
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RT Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.236/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
14. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K...../2021 tentang Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Manfaat
- 1.4. Indikator Penanggulangan Kemiskinan
- 1.5. Metode Analisis
- 1.6. Konsep Memahami Hasil Analisis dan Penyajiannya
- 1.7. Landasan Hukum
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
- 2.2. Demografi
  - 2.2.1. Jumlah, kepadatan dan distribusi penduduk
  - 2.2.2. Pertumbuhan Penduduk
  - 2.2.3. Rasio Jenis Kelamin

2.2.4. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan tahun 2019 dan 2020
2.2.5. Persentase Penduduk Menurut Agama yang dianut
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
3.1. Analisis situasi kemiskinan
3.1.1. Analisis bidang konsumsi
3.1.2. Analisis bidang tenaga kerja
3.1.3. Analisi bidang kesehatan
3.1.4. Analisis bidang pendidikan
3.1.5. Analisi bidang infrastruktur dasar
3.1.6. Analisis bidang ketahanan pangan
3.1.7. Analisis bidang ekonomi
3.2. Analisis APBD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021
3.2.1. Analisis pendapatan
3.2.2. Analisis belanja
BAB IV PRIORITAS PROGRAM
4.1. Pengertian Prioritas Program
4.2. Prioritas program dan sasaran penerima program
4.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional
4.3.1. Program Keluarga Harapan (PKH)
4.3.2. Program Indonesia Sehat
4.3.3. Program Bantuan Sosial Pangan
4.3.4. Program Indonesia Pintar (PIP)
4.4. Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN tahun 2020-2024
4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Renstra Kemensos RI 2020-2024
4.6. Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD tahun 2016-2021
4.7. Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021-2026
4.8. Kaloborasi Parapihak
BAB V LOKASI PRIORITAS

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

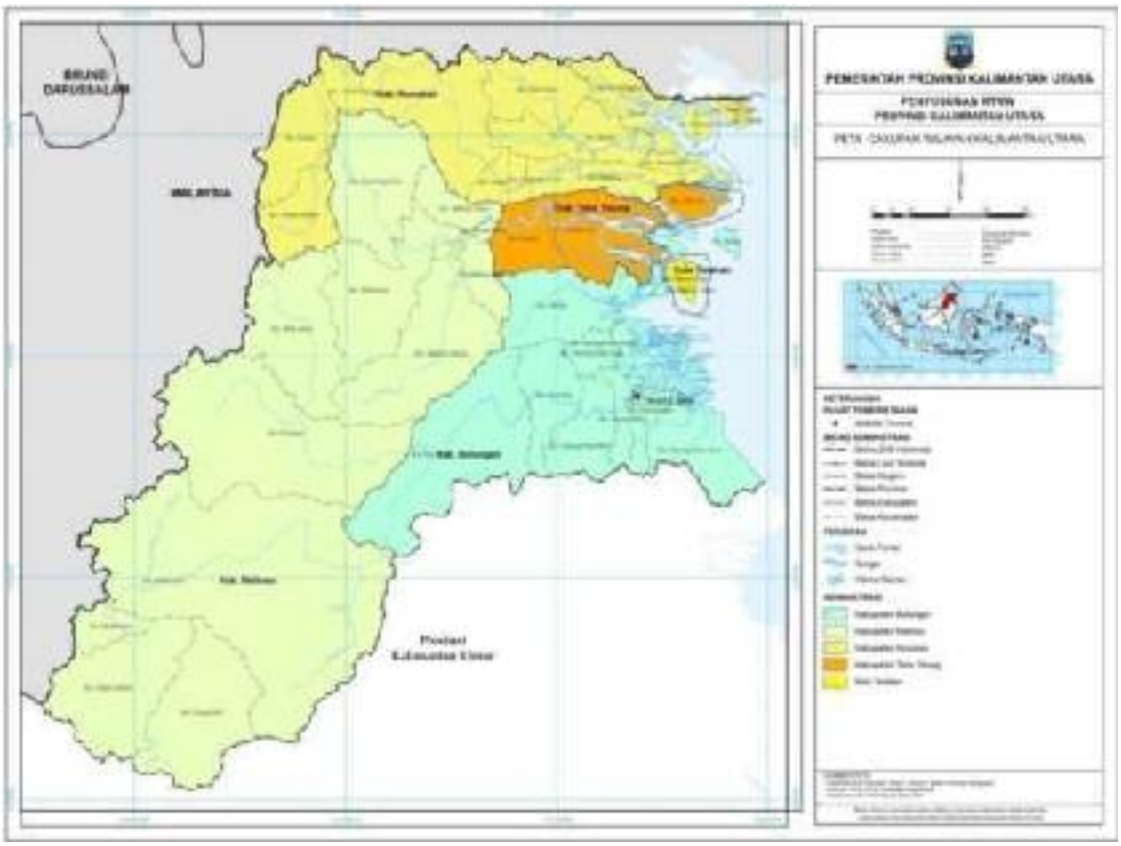
6.2. Rekomendasi

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas ± 75.467,70 km^2 dan berdasarkan batas kewenangan provinsi memiliki luas lautan seluas 11.579 km^2 (13% dari luas wilayah total). Terletak pada posisi antara $114^0$35'22" – $118^0$03'00" Bujur Timur dan antara $1^0$21'36" - $4^0$24'55" Lintang Utara, dan berbatasan dengan negara Malaysia, yaitu pada sebelah Utara dengan Sabah dan sebelah Barat dengan Sarawak. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kutai Timur, Kutai, dan Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur).

Gambar 2.1 Peta Cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037

Posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuat Provinsi Kalimantan Utara berada di lokasi strategis terutama dalam pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan juga bahwa provinsi ini berada di jalur pelayaran internasional (Alur Laut Kepulauan Indonesia/*Archipelagic Sea Lane Passage*) dan merupakan pintu keluar/*outlet* ke Asia Pasifik.

Tabel 2.1. Keadaan Geografi Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota/ Provinsi	Ibukota	Luas Total Area (Km^2)	Persentase terhadap Luas Provinsi (%)
Bulungan	Tanjung Selor	13.925,72	18,45
Malinau	Malinau	42.620,70	56,48
Nunukan	Nunukan	13.841,90	18,34
Tana Tidung	Tideng Pale	4.828,58	6,40
Tarakan	Tarakan	250,80	0,33
Kalimantan Utara	Tanjung Selor	75.467,70	100

Sumber: Kaltara Dalam Angka 2020

Kabupaten Malinau merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Provinsi Kalimantan Utara (>56% dari total luasan), sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota Tarakan (<1% dari total luasan Provinsi Kalimantan Utara).

Pembagian wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 4 Kabupaten dan 1 Kota yakni Bulungan sebagai Ibukota Provinsi, Malinau, Nunukan, Tana Tidung dan Tarakan. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintahan atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administratif sering disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 2.2. Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota/ Provinsi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
Bulungan	10	74	7
Malinau	15	109	-
Nunukan	21	232	8

Tana Tidung	5	32	-
Tarakan	4	0	20
Kalimantan Utara	55	467	35

Sumber: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2020

2.2. Demografi

2.2.1. Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Suatu wilayah tumbuh lebih padat dibanding daerah lain karena didorong beberapa faktor. Selain karena pertumbuhan alami, pemusatan penduduk di suatu wilayah juga didorong oleh faktor : Fisiografis, ekonomi, sosial dan budaya. Faktor fisiografis meliputi bentuk permukaan bumi, kondisi perairan, dan kondisi iklim. Kondisi alam berpengaruh terhadap kepadatan penduduk karena sumber daya yang dimiliki dan dihasilkan. Misalnya, Indonesia mengandung banyak sumber daya alam. Selain itu, iklimnya menghasilkan berbagai jenis makanan.

Menurut data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalimantan Utara pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 680,894 ribu jiwa. Dengan kepadatan penduduk sebesar 9,02 jiwa/km^2. Yang terpadat terdapat di Kota Tarakan dengan kepadatan sebesar 946,62 jiwa/km^2. Terendah di Kabupaten Malinau dengan kepadatan sebesar 1,91 jiwa/km^2.

Tabel 2.3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk ribu (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km2)
1	Malinau	81,243	1,91
2	Bulungan	148,452	10,66
3	Tana Tidung	25,352	5,25

4	Nunukan	188,246	13,60
5	Tarakan	237,601	946,62
	Kalimantan Utara	680,894	9,02

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri

2.2.2. Distribusi Penduduk

Kesenjangan persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 2.29, terutama antar kabupaten dengan kota. Kepadatan penduduk di Kota Tarakan mencapai 771 jiwa/km^2 pada tahun 2010, akan tetapi berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang memiliki kepadatan hanya 1-10 jiwa/km^2. Sedangkan kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk paling rendah adalah Kabupaten Malinau, yakni 1 jiwa/km^2. Dan angka ini terus berlangsung hingga tahun 2020, Kota Tarakan masih menempati kota dengan persebaran penduduk tertinggi yakni 946,62 jiwa/km^2 sedangkan Malinau menempati posisi terendah dengan angka persebaran kepadatan penduduk hanya 1,91 jiwa/km^2.

Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Tahun 2010 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk Per km^2	
	2010	2020
Bulungan	8	10,66
Malinau	1	1,91
Nunukan	10	13,60
Tana Tidung	3	5,25
Tarakan	771	946,62
Kalimantan Utara	7	9,02

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri

Salah satu faktor yang menarik penduduk untuk lebih memilih tinggal di Kota Tarakan, sementara luas kota ini yang sangat sempit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya adalah sarana prasarana perkotaan di daerah tersebut relatif lebih lengkap. Selain itu faktor lainnya adalah kondisi geografis Kota Tarakan yang memiliki topografi yang landai sehingga lebih mudah untuk pengembangan permukiman sedangkan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan yang mempunyai kondisi topografi bergunung dengan kemiringan lereng sebagian besar di atas 40%, sehingga cukup sulit untuk pengembangan

permukiman. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara harus segera melakukan tindakan untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah agar dapat mengurangi tekanan penduduk di satu daerah.

2.2.3. Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu 2010-2020 rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Tana Tidung tertinggi yakni 5,17 persen per tahun dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten/kota lainnya. Tingginya rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tana Tidung dimungkinkan karena kabupaten tersebut adalah kabupaten termuda, pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Sebagai kabupaten yang relatif baru dibandingkan dengan kabupaten lainnya, kabupaten tersebut mengundang para pendatang dari luar untuk tinggal dan menetap seiring dengan berkembangnya kegiatan jasa dan perdagangan.

Sedangkan di Kabupaten Bulungan selama kurun waktu yang sama menunjukkan rata-rata pertumbuhan penduduk yang terendah yakni 2,93 persen per tahun. Kabupaten Bulungan adalah kabupaten yang dipilih sebagai ibukota provinsi, namun pemilihan lokasi ibukota provinsi tersebut tidak seiring dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini mengisyaratkan bahwa hingga tahun 2020 belum banyak kegiatan jasa dan perdagangan yang berlangsung di ibukota provinsi tersebut sehingga belum banyak mengundang para pendatang untuk tinggal dan menetap di kabupaten tersebut.

Tabel 2.5. Jumlah Pertumbuhan Penduduk tahun 2015-2020 dan Rata-rata Persentasenya Provinsi Kalimantan Utara.

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan 2015-2020 (%)	Persentase penduduk
1	Malinau	81,243	11,93
2	Bulungan	148,452	21,80
3	Tana Tidung	25,352	3,72
4	Nunukan	188,246	27,65
5	Tarakan	237,601	34,90
	Kalimantan Utara	680,894	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri

2.2.4. Rasio Jenis Kelamin

Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin penduduk di Kabupaten Bulungan tertinggi dibandingkan dengan rasio jenis kelamin penduduk di kabupaten/kota lainnya yakni 111,44. Kota Tarakan sebaliknya menunjukkan rasio jenis kelamin yang terendah yakni 107,6. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa tahun 2020 diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 111 orang penduduk laki-laki di Kabupaten Bulungan. Sebaliknya di Kota Tarakan, diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 107 orang penduduk laki-laki.

Tabel 2.6. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

No	Kabupaten/Kota	Rasio Sex 2010	Rasio Sex 2020
1	Malinau	117,1	111,44
2	Bulungan	114,3	111,12
3	Tana Tidung	122,9	110,58
4	Nunukan	113,7	110,23
5	Tarakan	110,1	107,60
	Kalimantan Utara	113,2	109,77

Sumber: Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2021 dan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020 Dtjen Dukcapil Kemendagri

Selama kurun waktu 2010-2020 rasio jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan sedikit penurunan dari 113,2 tahun 2010 menjadi 109,77 tahun 2020. Pada tahun 2010 dari 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 113 orang penduduk laki-laki, dan tahun 2020 dari 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 109 orang penduduk laki- laki. Hal ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir terdapat kecenderungan berkurangnya penduduk laki-laki.

2.2.5. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan tahun 2019 dan 2020

Dari data tabel 2.7 terlihat bahwa di Provinsi Kalimantan Utara persentase penduduk usia 10 tahun ke atas pada tahun 2019 dengan status kawin, lebih besar dengan angka 52.52% dan status belum kawin sebanyak 43.34%.Tahun 2020 dengan status kawin lebih besar yaitu 53.24% dibandingkan dengan status belum kawin sebanyak 42.44%.Dengan angka cerai hidup meningkat dari 1.36% pada tahun 2019 menjadi 1.44% pada tahun 2020. Sedangkan angka cerai mati meningkat dari 2.77% pada tahun 2019 menjadi 2.87% pada 2020.

Tabel 2.7. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan (Persen)							
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Malinau	46.79	46.78	50.19	50.00	0.58	0.69	2.44	2.54
Bulungan	43.50	39.78	51.75	55.65	1.58	1.46	3.17	3.10
Tana Tidung	41.87	40.66	54.84	55.77	1.09	1.14	2.19	2.43
Nunukan	43.55	43.38	52.97	52.91	1.00	1.11	2.49	2.59
Tarakan	42.03	42.01	53.19	52.89	1.83	1.99	2.95	3.12
Kalimantan Utara	43.34	42.44	52.52	53.24	1.36	1.44	2.77	2.87

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2019 dan Tahun 2020

Dari data tabel 2.8 terlihat bahwa di Provinsi Kalimantan Utara persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas tahun 2019 dengan status kawin lebih besar dengan angka 55.89% dan status belum kawin sebanyak 37.74%. Tahun 2020 dengan status kawin lebih besar yaitu 55.77% dibandingkan dengan status belum kawin sebanyak 37.58%.Dengan angka cerai hidup meningkat dari 1.72% pada tahun 2019 menjadi 1.83% pada tahun 2020. Sedangkan angka cerai mati meningkat dari 4.66% pada tahun 2019 menjadi 4.83% pada 2020.

Tabel 2.8. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan (Persen)							
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Malinau	41.73	41.85	53.35	52.99	0.75	0.86	4.17	4.31
Bulungan	34.84	34.47	58.35	58.61	1.77	1.82	5.03	5.11
Tana Tidung	37.31	36.12	57.76	58.63	1.37	1.36	3.56	3.89
Nunukan	38.72	38.54	55.62	55.54	1.37	1.50	4.28	4.42
Tarakan	37.38	37.39	55.29	54.88	2.32	2.47	5.00	5.26
Kalimantan Utara	37.74	37.58	55.89	55.77	1.72	1.83	4.66	4.83

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Ditjen Dukcapil Kemendagri Tahun 2019 dan Tahun 2020

Dari data tabel 2.9 terlihat bahwa di Provinsi Kalimantan Utara persentase penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas tahun 2019 dengan status kawin lebih besar yaitu 49.39% dan status belum kawin sebanyak 48.57%. Tahun 2020 dengan

status kawin lebih besar yaitu 50.96% dibandingkan status belum kawin sebanyak 46.85%.Dengan angka cerai hidup meningkat dari 1.03% pada tahun 2019 menjadi 1.10% pada tahun 2020. Sedangkan angka cerai mati meningkat dari 1.02% pada tahun 2019 menjadi 1.10% pada 2020.

Tabel 2.9. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan Tahun 2019 dan 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Status Perkawinan (Persen)							
	Belum Kawin		Kawin		Cerai Hidup		Cerai Mati	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Malinau	51.34	51.21	47.34	47.31	0.44	0.53	0.88	0.94
Bulungan	52.53	44.52	44.87	53.01	1.37	1.15	1.23	1.32
Tana Tidung	45.93	44.74	52.24	53.21	0.84	0.94	0.98	1.12
Nunukan	47.85	47.72	50.60	50.57	0.66	0.77	0.90	0.94
Tarakan	46.32	46.29	51.25	51.03	1.38	1.54	1.05	1.14
Kalimantan Utara	48.57	46.85	49.39	50.96	1.03	1.10	1.02	1.10

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri

2.2.6. Persentase Penduduk Menurut Agama yang dianut

Dari tabel 2.10 terlibat bahwa penduduk di Provinsi Kalimantan Utara yang terbesar adalah beragama islam sebesar 73,06 persen, dan terkecil adalah lainnya 0,02 persen.

Tabel 2.10. Persentase Penduduk Menurut Agama yang dianut tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

Kab/Kota/Prov	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Malinau	33,47	57,43	8,69	0,10	0,31	0.0012
Bulungan	73,52	20,27	5,76	0,06	0,40	0.0040
Tana Tidung	78,80	12,90	8,15	0,01	0,14	-
Nunukan	74,35	17,34	8,13	0,04	0,10	0,04
Tarakan	85,43	9,75	3,44	0,04	1,31	0,03
Kalimantan Utara	73,32	19,95	6,04	0,05	0,61	0,02

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2020 Ditjen Dukcapil Kemendagri

2.2.7. Potensi sumber daya alam

Provinsi Kalimantan Utara dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya sumberdaya alamnya. Potensinya diprediksi jauh lebih besar dibanding provinsi lainnya. Sumberdaya ini, dikelola dengan baik, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan

masyakatnya. Keanekaragaman sumberdayanya tak perlu diragukan lagi. Oleh sebab itu, wajar provinsi ini menjadi salah satu provinsi yang diunggulkan untuk ditumbuhkembangkan perekonomian daerahnya. Sektor energi baru terbarukan, adalah salah satu contohnya. Proses kegiatan pembangunan dimaksud yaitu untuk kegiatan pembangunan listrik ramah lingkungan/PLTA. Melalui kegiatan ini, diharapkan ekonomi dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyakat juga bertumbuh, dan merata hingga sampai ke perdesaan sangat tertinggal, terisolir, terpencil dan terluar.

Pada umumnya masyarakat miskin dan kurang mampu di Kalimantan Utara bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Oleh karenanya, profesi ini perlu dikembangkan agar mereka bukan saja menjadi objek dari kegiatan pembangunan tetapi lebih dari itu yaitu subyek pembangunan itu sendiri. Keterbatsan mereka bukan hanya pengetahuan dan skill saja, tetapi akses mereka tehadap faktor-faktor produksi yang mengakibatkan percepatan peningkatan kesejahteraan masih menjadi tantangan kedepannya. Tabel 2.11 dan tabel 2.12 menunjukkan bahwa mereka telah mengalami peningkatan kesejahteraannya.

Tabel 2.11. Nilai tukar petani bulan Januari s/d April 2021
di Provinsi Kalimantan Utara

Bulan	Januari	Februari	Maret	April
Nilai tukar petani	103,62	103,92	104,30	104,86

Sumber: https://kaltara.bps.go.id/

Tabel 2.12. Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan bulan Januari s/d April 2021
di Provinsi Kalimantan Utara

Bulan	Januari	Februari	Maret	April
Nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan	101,20	101,42	101,03	102,31

Sumber: https://kaltara.bps.go.id/

Perlu disyukuri bahwa, dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara jika dibanding masih menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, maka geliat perekonomian daerah akibat pemajuan kegiatan pembangunan di segala sektor sudah terlihat dan dinikmati oleh komponen masyarakat di daerah. Kegiatan pembangunan jalan baik di perbatasan, antar kabupaten kota, antar provinsi adalah salah satu contohnya. Berbagai upaya yang telah dilaksanakan tersebut, bukanlah menjadi suatu kebanggaan, tetapi sudah menjadi kewajiban pemerintah

daerah untuk melaksanakan dan mewujudkannya, yang pada akhir dari tujuan proses kegiatan pembangunan itu adalah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan yang proforsional, adil dan merata.

2.2.8. Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan I, 2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (c-to-c) (Persen)

Berdasarkan tabel 2.13 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB triwulan I tahun 2021 c-to-c di Provinsi Kalimantan Utara terkontraksi sebesar 1,91 persen, dan tanpa Migas terkontraski sebesar 1,98 persen. Adapun dilihat dari lapangan usahanya c-to-c, maka yang tertinggi PDRB nya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,17 persen, dan terkontraksi tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yaitu -14,02 persen.

Tabel 2.13. Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan I, 2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (c-to-c) (Persen)

Kategori/Lapangan Usaha	Triwulan I
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,70
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,49
C. Industri Pengolahan	-0,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01
F. Konstruksi	-0,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,41
H. Transportasi dan Pergudangan	-14,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,64
J. Informasi dan Komunikasi	6,50
K. Jasa Keuangan	4,31
L. Real Estate	0,28
M,N. Jasa Perusahaan	-4,51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,45
P. Jasa Pendidikan	1,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	-1,98

Sumber: https://kaltara.bps.go.id.2021

2.2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (y-o-y) (Persen)

Berdasarkan tabel 2.14 terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB triwulan I tahun 2021 (y-o-y) di Provinsi Kalimantan Utara terkontraksi sebesar 1,91 persen, dan tanpa Migas terkontraski sebesar 1,98 persen. Adapun dilihat dari lapangan usahanya c-(y-o-y), maka yang tertinggi PDRB nya adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 8,17 persen, dan terkontraksi tertinggi adalah transportasi dan pergudangan yaitu -14,02 persen.

Tabel 2.14. Laju Pertumbuhan PDRB Triwulan I, 2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (y-to-y) (Persen)

Kategori/Lapangan Usaha	Triwulan I
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2,70
B. Pertambangan dan Penggalian	-2,49
C. Industri Pengolahan	-0,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,01
F. Konstruksi	-0,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,41
H. Transportasi dan Pergudangan	-14,02
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-8,64
J. Informasi dan Komunikasi	6,50
K. Jasa Keuangan	4,31
L. Real Estate	0,28
M,N. Jasa Perusahaan	-4,51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4,45
P. Jasa Pendidikan	1,42
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,17
R,S,T,U. Jasa Lainnya	5,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	-1,98

Sumber: https://kaltara.bps.go.id.2021

BAB III
PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Analisis Situasi Kemiskinan

Pada menu profil kemiskinan dalam aplikasi ini terdapat 7 analisis terhadap data indikator kesejahteraan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu daerah diantaranya bidang konsumsi/pengeluaran, bidang tenaga kerja, bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketahanan pangan, bidang ekonomi.

Indikator kesejahteraan dimaksud dianalisis melalui delapan analisis yaitu analisis perkembangan antar waktu, analisis posisi relatif antar daerah, analisis efektivitas, analisis relevansi, analisis keterkaitan, analisis identifikasi masalah, analisis prioritas intervensi, analisis intervensi wilayah dan analisis kuadran IPA *(importance and performance analysis).* Indikator yang dianalisis dalam penyusunan RPKD ini adalah hanya indikator yang tersedia datanya dan dipaparkan secara detail dalam Bab III sebagai hasil analisis pencapaian indikator penanggulangan kemiksinan di Kalimantan Utara.

3.1.1. Analisis Bidang Konsumsi (Pengeluaran)

3.1.1.1. Hasil analisis indikator persentase penduduk miskin (%)

a. analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif capaian persentase penduduk miskin tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibanding capaian nasional berarti baik, begitu juga capaian Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau dibawah provinsi berarti baik, sedangkan Kabupaten Bulungan diatas provinsi berarti buruk (grafik 3.1). Capaian indikator bidang konsumsi untuk kategori nasional dan

provinsi adalah hasil susenas bulan september 2020, sedangkan kabupaten/kota adalah hasil susenas bulan maret 2020.

b. analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu capaian persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 naik sebesar 0,17% dibanding tahun 2019, dari periode tahun 2015-2020 terlihat tren grafiknya fluktuatif (grafik 3.2). dibanding target persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 5,84% maka realisasi tahun 2020 yakni sebesar 6,80% maka tidak tercapai.

c. analisis efektivitas

Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa capaian persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, walaupun masih berada dibawah garis linearnya dengan persamaan y= 0,0229x+6,6567, karena capaiannya naik sebesar 0,17% dibanding capaian tahun 2019. Sedangkan untuk periode tahun 2018-2019 turun sebesar 0,46%, 2017-2018 turun sebesar 0,13% (grafik 3.3).



d. analisis relevansi

Hasil analisis relevansi persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara dan nasional pada tahun 2020 terjadi, karena sama-sama naik, dan naiknya berada dibawah garis linearnya masing-masing (grafik 3.4).



e. analisis keterkaitan

Naiknya persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 juga diikuti naiknya persentase penduduk miskin kota provinsi (grafik 3.5), naiknya persentase penduduk miskin desa provinsi (grafik 3.6), naiknya jumlah penduduk miskin kota (grafik 3.7), naiknya jumlah penduduk miskin desa (grafik 3.8).



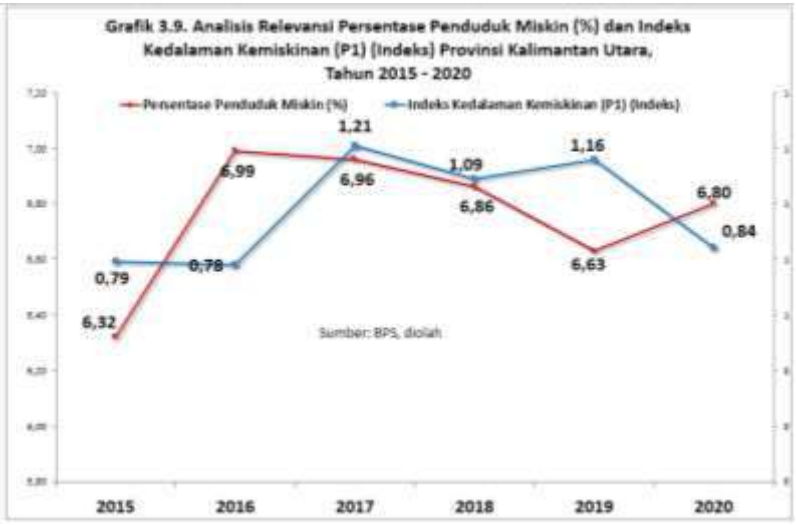






Tetapi dengan naiknya persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan provinsi (grafik 3.9), indeks kedalaman kemiskinan kota provinsi (grafik 3.10), indeks kedalaman kemiskinan desa provinsi (grafik 3.11), indeks keparahan kemiskinan provinsi (grafik 3.12), indeks

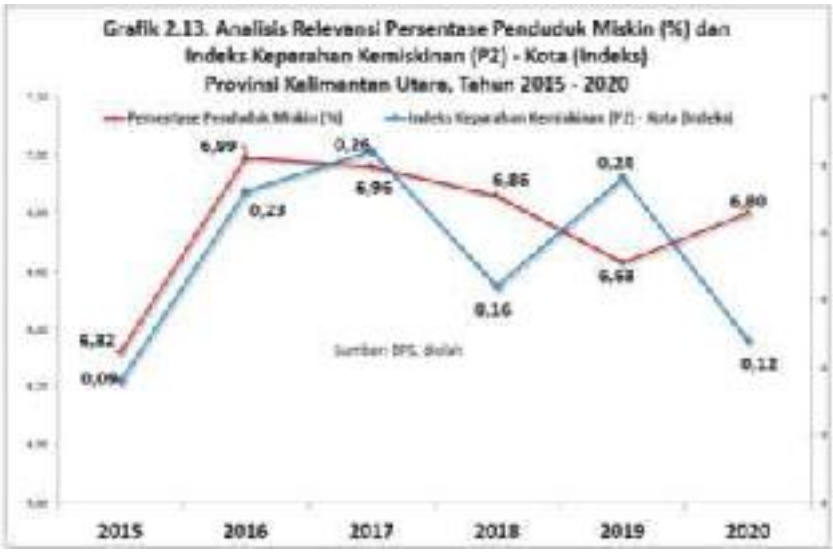
keparahan kemiskinan kota provinsi (grafik 3.13), indeks keparahan kemiskinan desa provinsi (grafik 3.14), indikatornya justru turun.







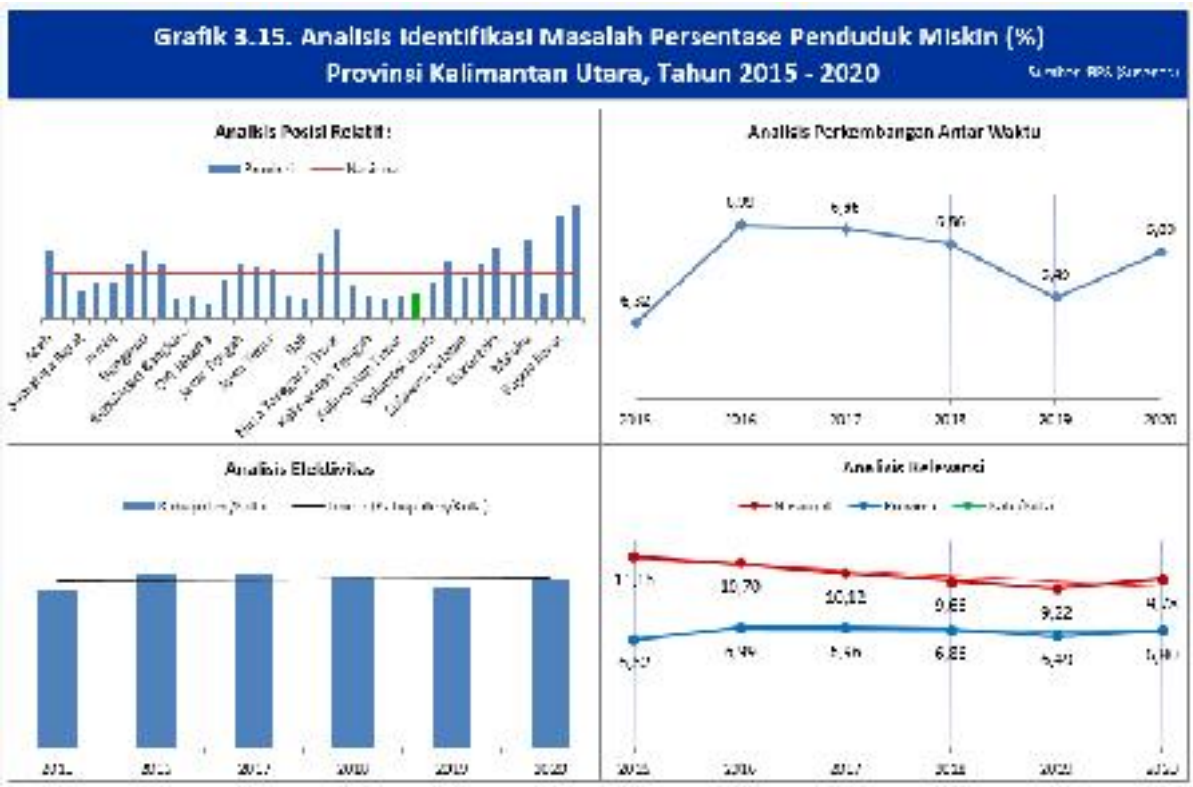

Grafik 3.12. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
6,99
6,86
6,63
6,80
6,32
0,17
0,17
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 2.13. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
6,99
6,95
6,86
6,68
6,80
6,32
0,16
0,12
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.14. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin (%) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
6,99
6,98
6,86
6,93
6,80
6,32
0,19
0,29
2015
2016
2017
2018
2019
2020

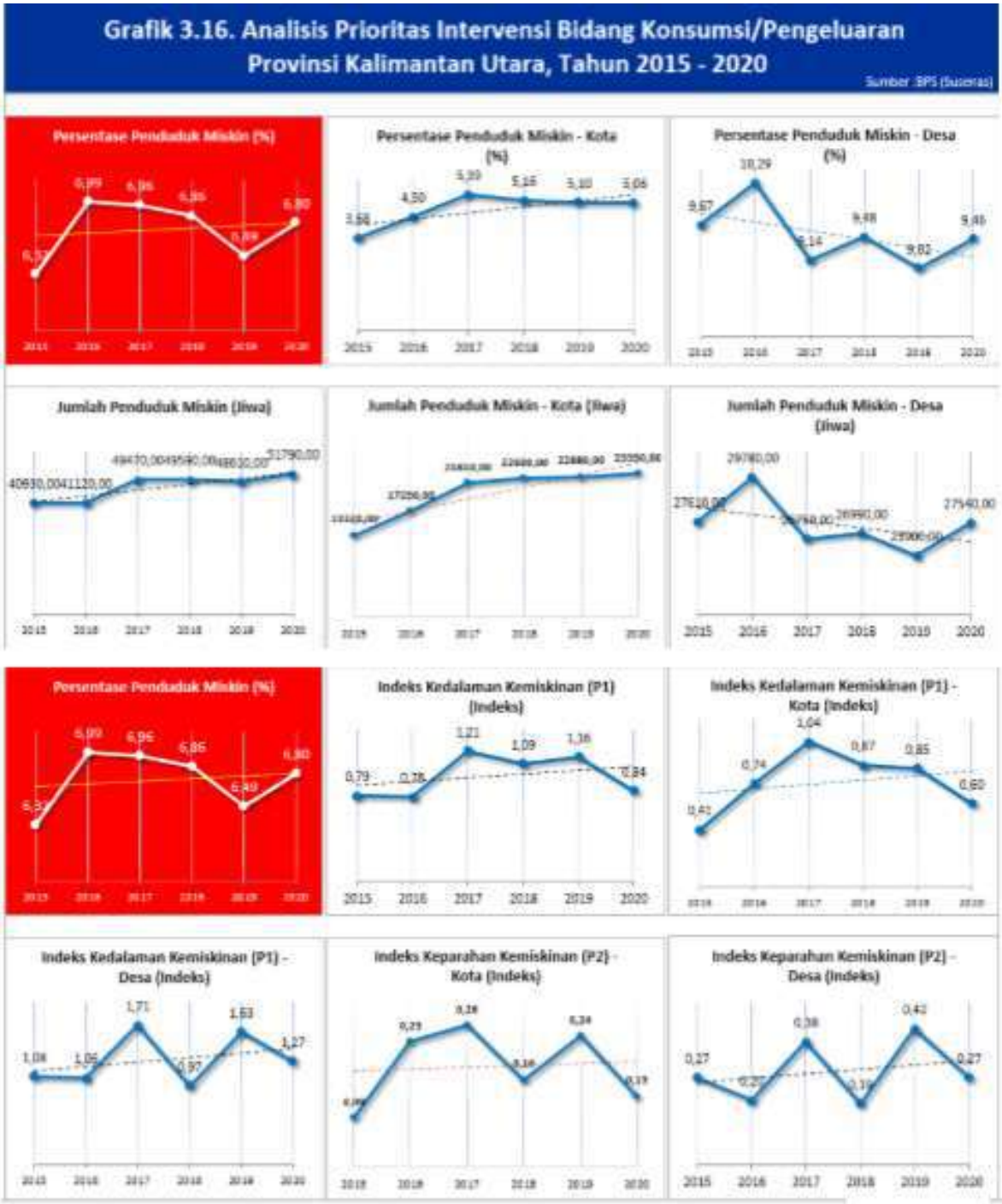
f. analisis identifikasi masalah

Grafik 3.15 menjelaskan bahwa identifikasi permasalahan pada capaian indikator persentase penduduk miskin terlihat pada hasil indikator analisis perkembangan antar waktu pada tahun 2020 naik menjadi 6,80% dari capaian tahun sebelumnya (2019) hanya 6,63%.



g. analisis prioritas intervensi

Grafik 3.16 juga menunjukkan bahwa untuk intervensi prioritas bidang konsumsi pada hasil analisis yang menunjukan indikatornya naik yakni pada indikator capaian persentase penduduk miskin desa provinsi dan persentase penduduk miskin kota provinsi.



h. analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Grafik 3.17 menunjukkan hasil analisis kuadran prioritas persentase penduduk miskin dan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang prioritas pertama diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Malinau dan prioritas empat terdapat di Kabupaten Tana Tidung.



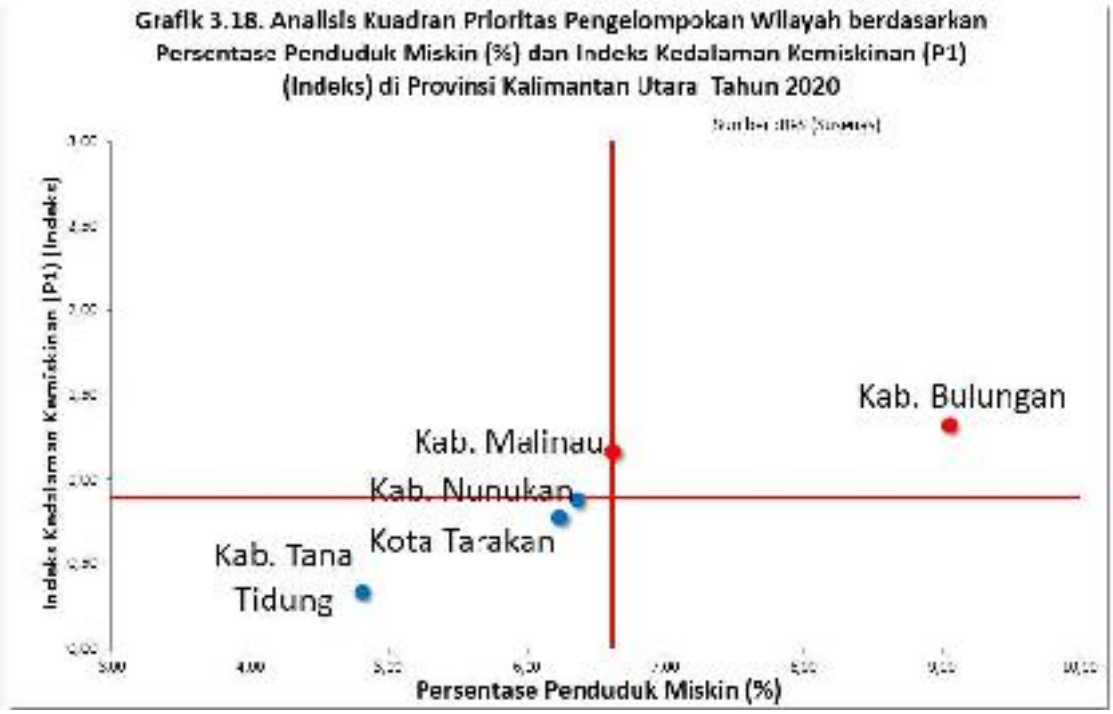
Grafik 3.17. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Tabel 3.1 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara persentase penduduk miskin (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Malinau

Sumber: hasil analisis, 2021, keterangan: Kab. Malinau diantara kuadran III dan IV

Hasil analisis kuadran prioritas persentase penduduk miskin dan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.18).



Tabel 3.2 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara persentase penduduk miskin (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber : hasil analisis, 2021
Keterangan : Kabupaten Malinau terletak diantara kuadran I dan II
Kabupaten Nunukan terletak diantara kuadran I dan III

Hasil analisis kuadran prioritas persentase penduduk miskin dan indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di

Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.19).

Grafik 3.19. Analisis Kuadran Pengelompokan Wilayah berdasarkan Persentase Penduduk Miskin (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



Tabel 3.3 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara persentase penduduk miskin (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber : hasil analisis, 2021

3.1.1.2. Hasil analisis indikator garis kemiskinan (%)

a. hasil analisis posisi relatif (Rp)



Hasil analisis posisi relatif capaian garis kemiskinan tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara lebih tinggi dibanding capaian nasional berarti buruk. Untuk capaian Kabupaten Tana Tidung saja yang lebih rendah dibanding capaian provinsi berarti baik, sedangkan capaian di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau lebih tinggi dibanding provinsi berarti buruk, terlebih capaian di Kota Tarakan lebih tinggi dibanding provinsi bahkan nasional berarti buruk (grafik 3.20).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu (Rp)



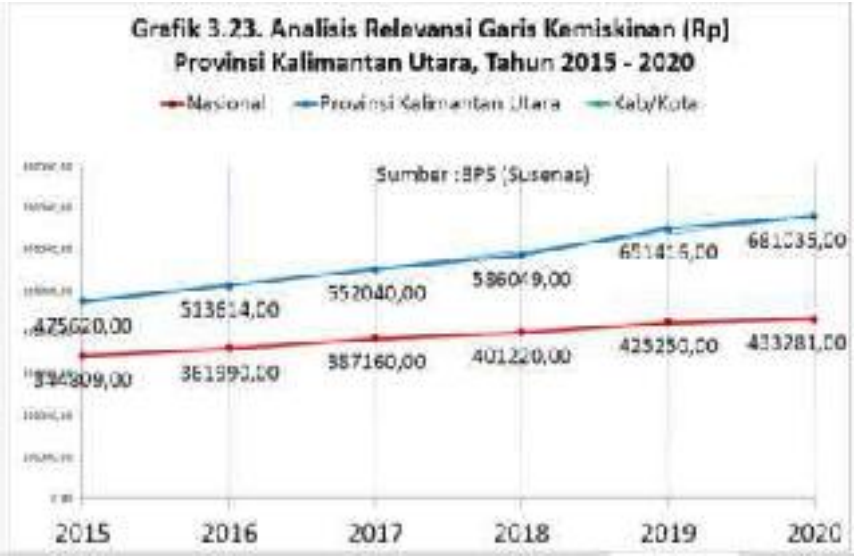
Hasil analisis perkembangan antar waktu capaian garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 naik sebesar Rp.22.123 dibanding capaian tahun 2019, dari periode tahun 2015-2020 terlihat trend grafiknya terus naik (grafik 3.21).

c. hasil analisis efektivitas (Rp)



Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa capaian garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, walaupun berada tepat pada garis linearnya dengan persamaan y= 42128x + 429180, dan capaiannya naik sebesar Rp.29.619,- dibanding capaian tahun 2019.

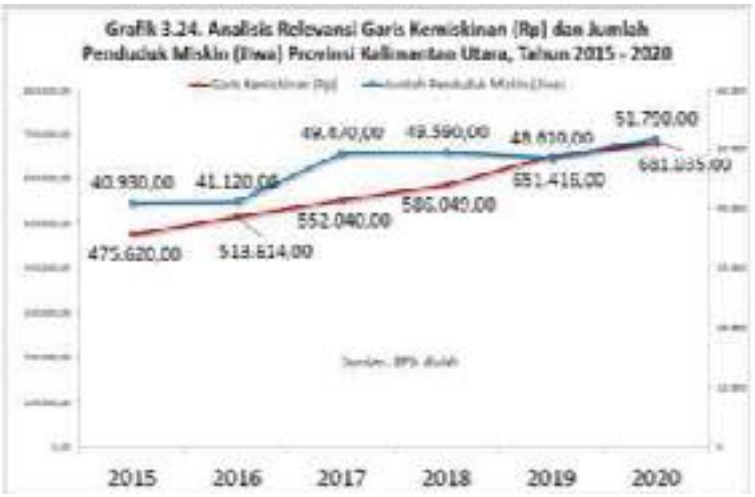
d. hasil analisis relevansi (Rp)



Hasil analisis relevansi garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara dan nasional pada tahun 2020 terjadi, karena sama-sama naik tetapi naiknya provinsi lebih tinggi dibanding nasional, dan naiknya juga berada diatas garis linearnya masing-masing baik provinsi maupun nasional (grafik 3.23).

e. hasil analisis keterkaitan (Rp)

Hasil analisis relevansi naiknya garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 juga diikuti naiknya capaian indikator jumlah penduduk miskin (grafik 3.24.), naiknya jumlah penduduk miskin kota (grafik 3.25), dan naiknya jumlah penduduk miskin desa provinsi (grafik 3.26).







Tetapi hasil analisis relevansi naiknya garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 dikaitkan dengan capaian indikator indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.27.), indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.28), indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.29), indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.30), indek

keparahan kemiskinan kota (grafik 3.31), dan indeks keparahan kemiskinan desa provinsi (grafik 3.32) justru capaian nilainya masing-masing turun.







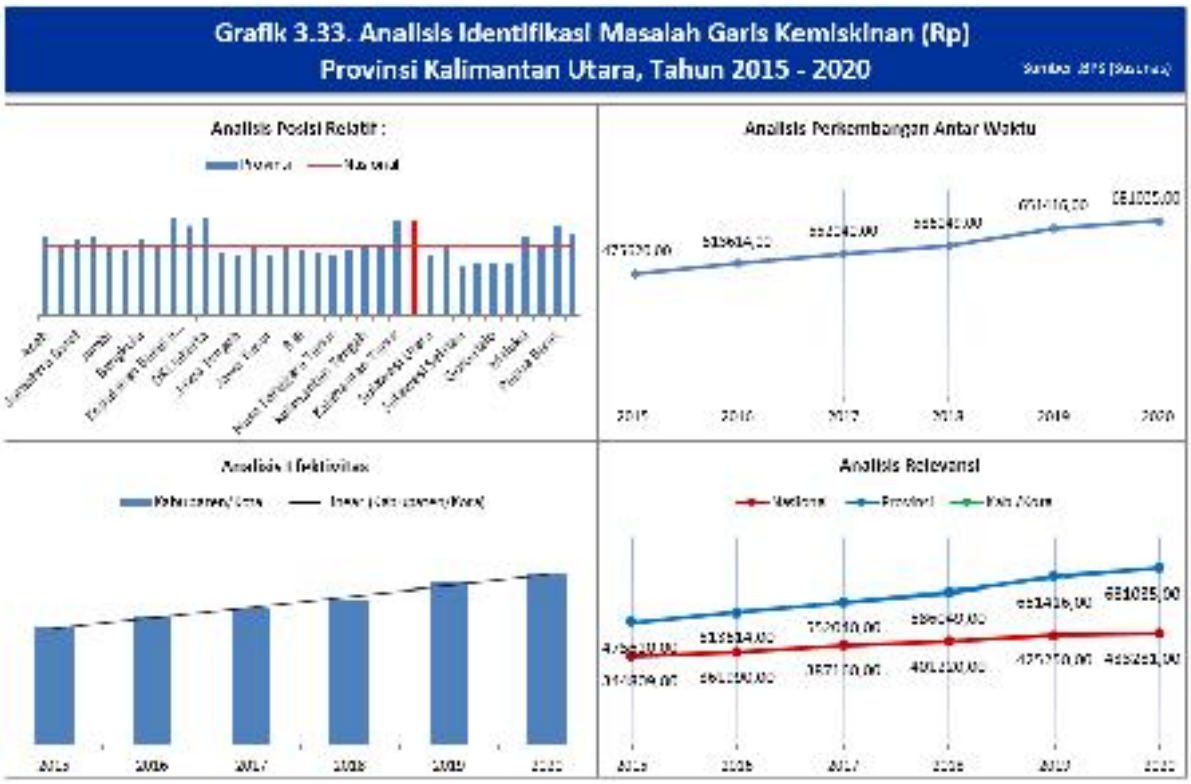






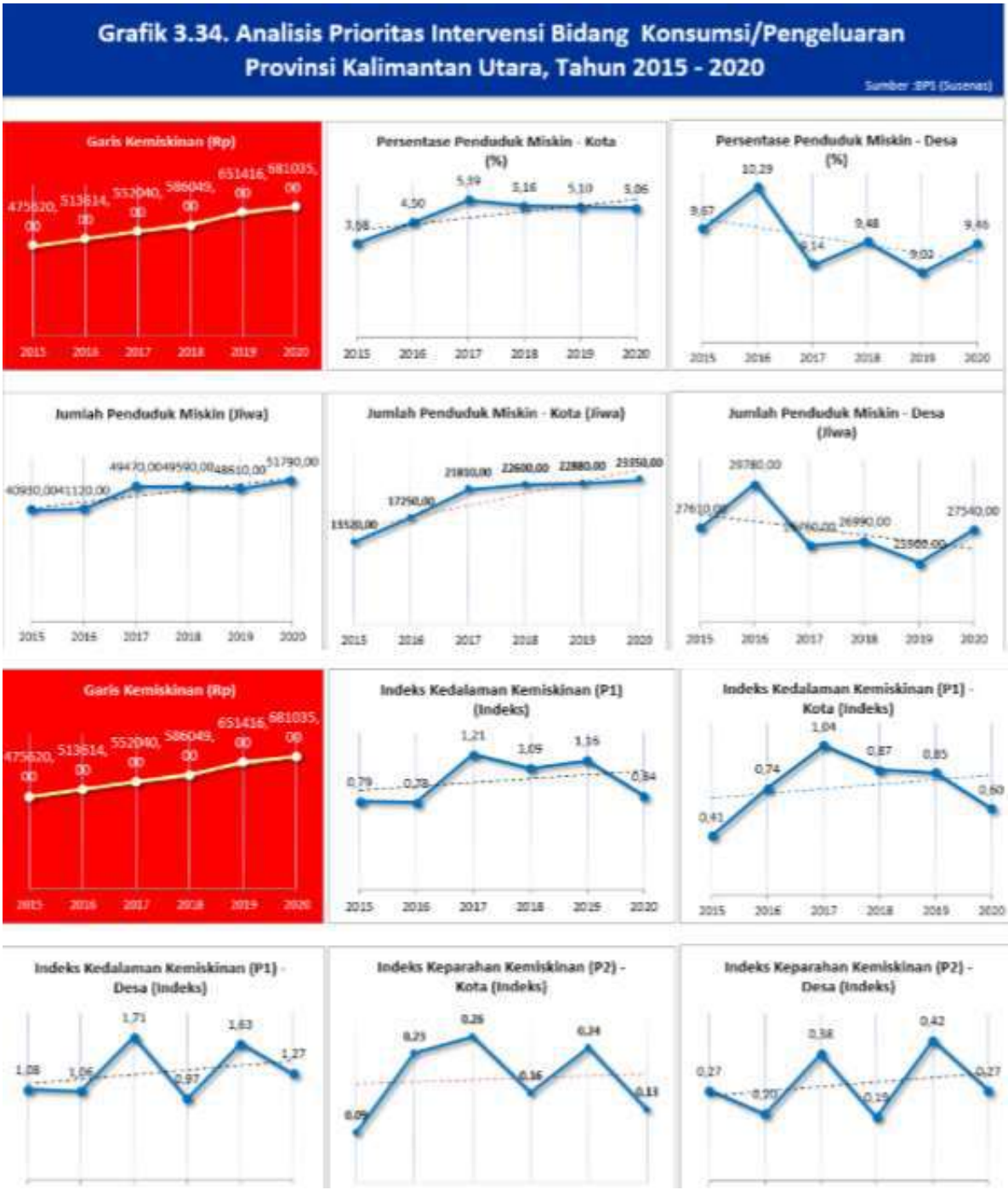
f. hasil analisis identifikasi masalah

Hasil analisis identifikasi masalah garis kemiskinan (Rp) menunjukan bahwa dengan naiknya garis kemiskinan provinsi pada tahun 2020 juga ditunjukkan oleh hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi juga turut naik (grafik 3.33).



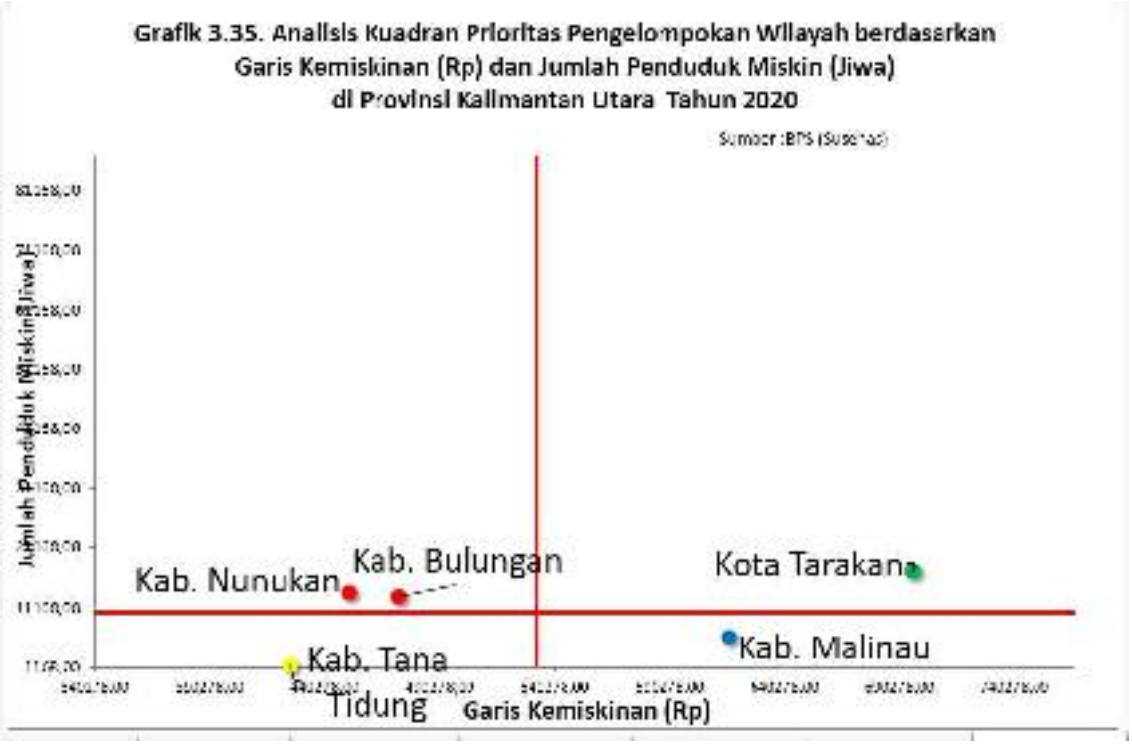
g. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.34 menunjukkan bahwa dengan naiknya garis kemiskinan provinsi pada tahun 2020 yang jadi prioritas untuk diintervensi pada tahun 2021 adalah pada indikator capaian persentase penduduk miskin baik kota dan desa, jumlah penduduk miskin baik kota maupun desa, karena indikator ini di tahun 2020 trennya juga naik.



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Tana Tidung, dan prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau (grafik 3.35).

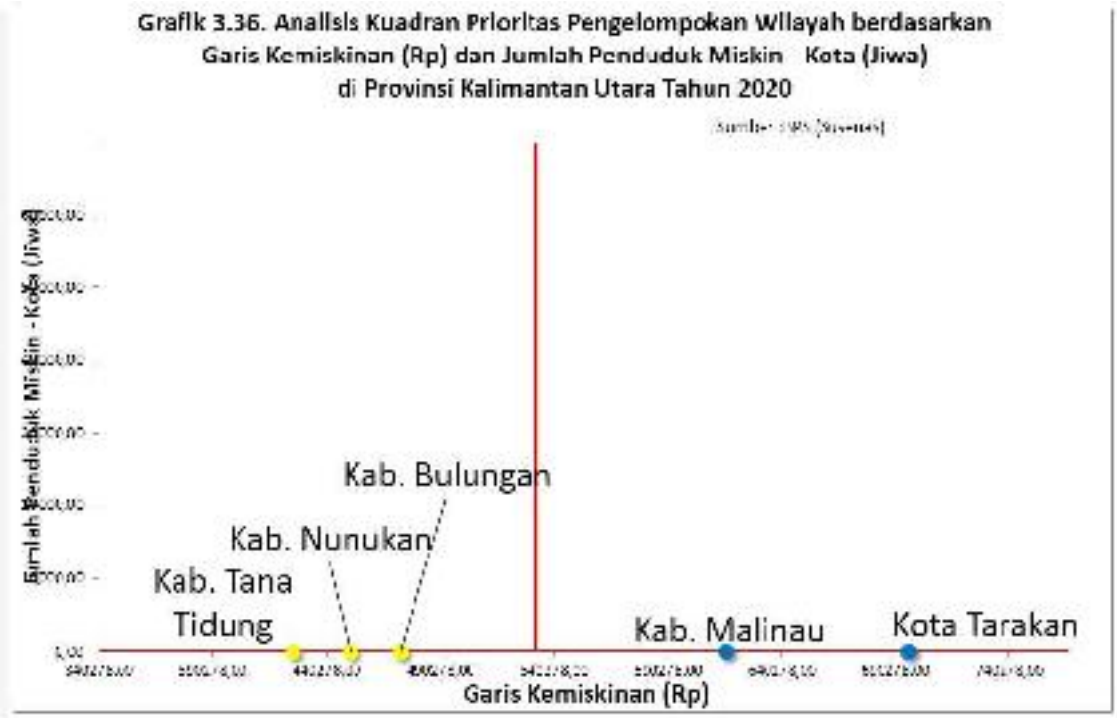


Tabel 3.4 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan. Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Malinau

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota pada tahun 2020 prioritas tiga yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.36).



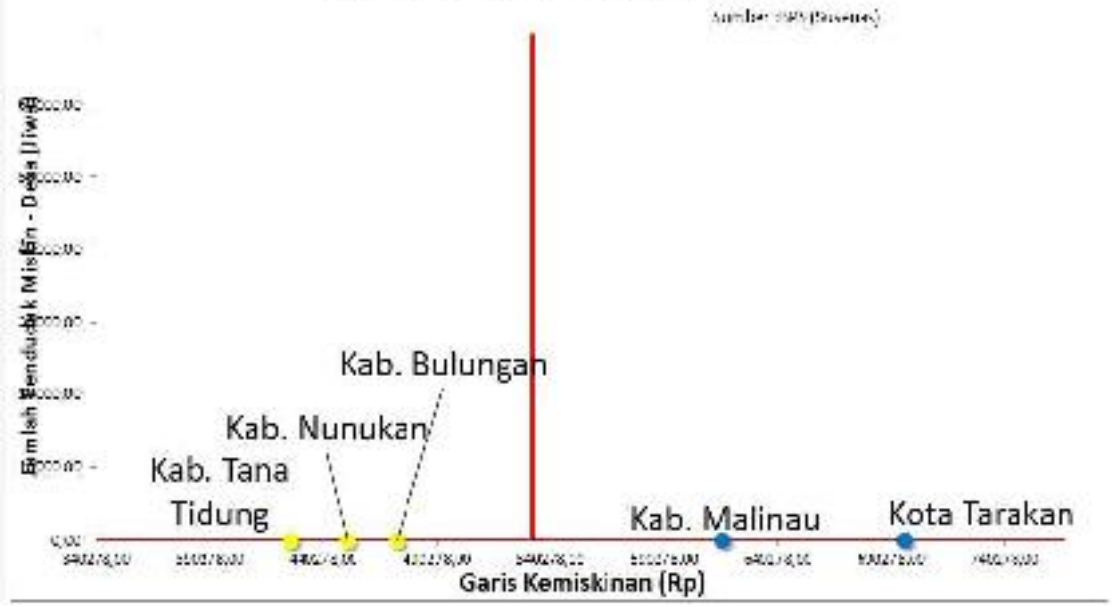
Tabel 3.5 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan jumlah penduduk miskin kota (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin desa pada tahun 2020 prioritas tiga yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.37).

Grafik 3.37. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Garis Kemiskinan (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



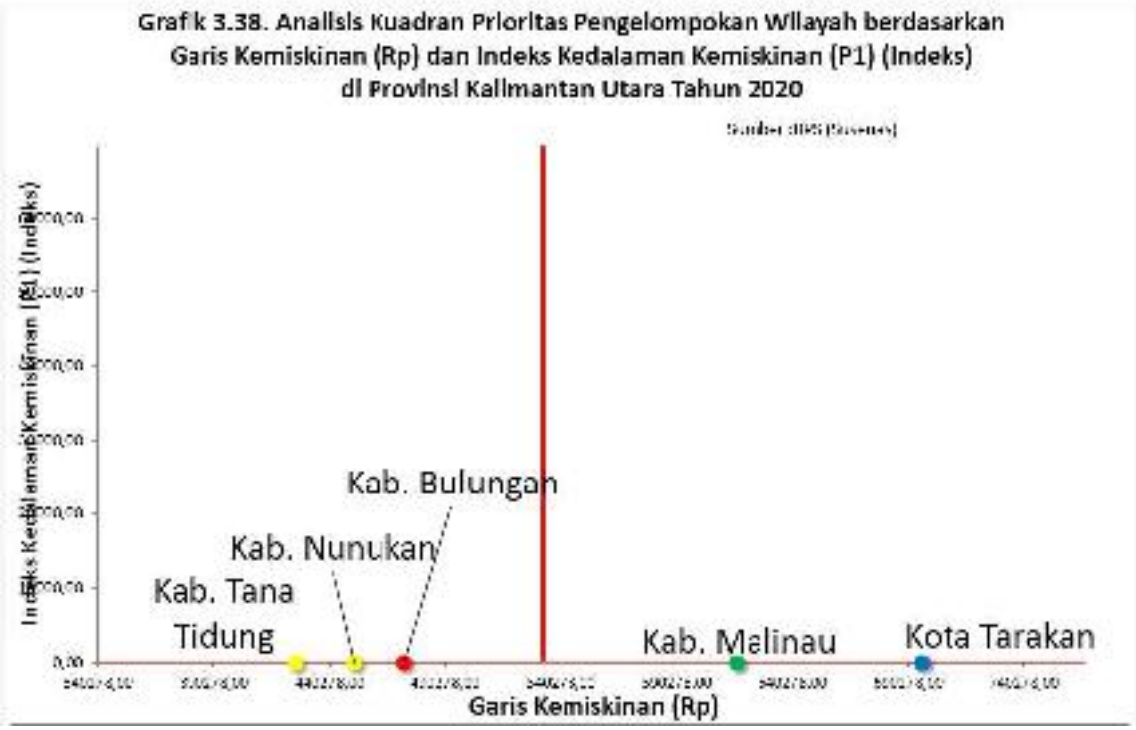
Tabel 3.6 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan jumlah penduduk miskin desa (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan,	Kota Tarakan dan Kabupaten

	karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Nunukan

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan (Rp) dan indeks kedalaman kemiskinan (%) pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 untuk prioritas pertama adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, prioritas tiga adalah di Kabupaten Malinau, dan prioritas empat adalah terdapat di Kota Tarakan (grafik 3.38).



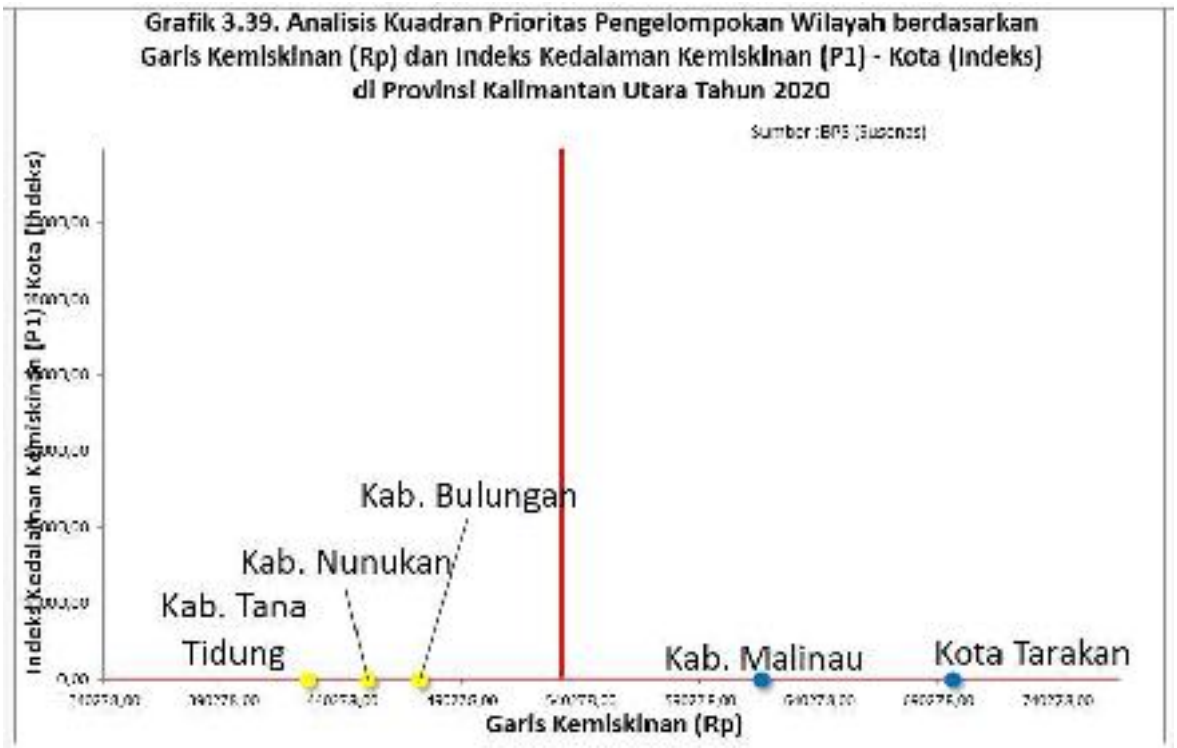
Tabel 3.7 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Malinau, Kota Tarakan

III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Malinau, Kota Tarakan

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan (Rp) dan indeks kedalaman kemiskinan kota (%) pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 untuk prioritas tiga adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.39).



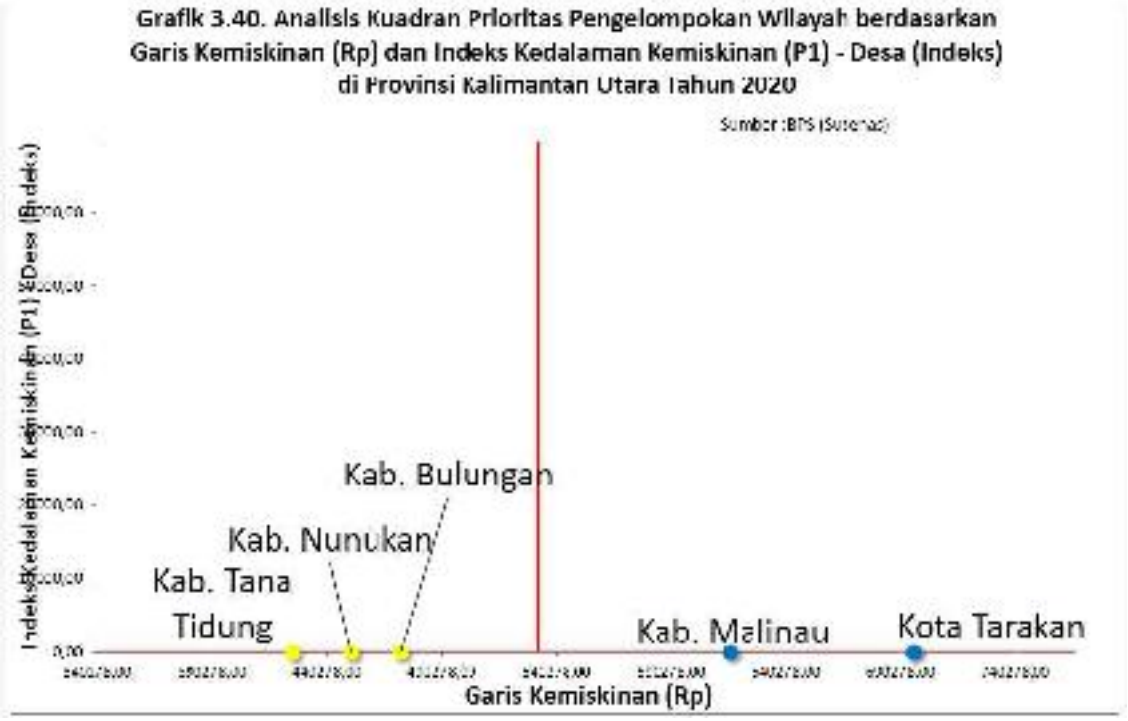
Tabel 3.8 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan indeks keparahaan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan

		Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan (Rp) dan indeks kedalaman kemiskinan desa (%) pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 untuk prioritas tiga adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.40).



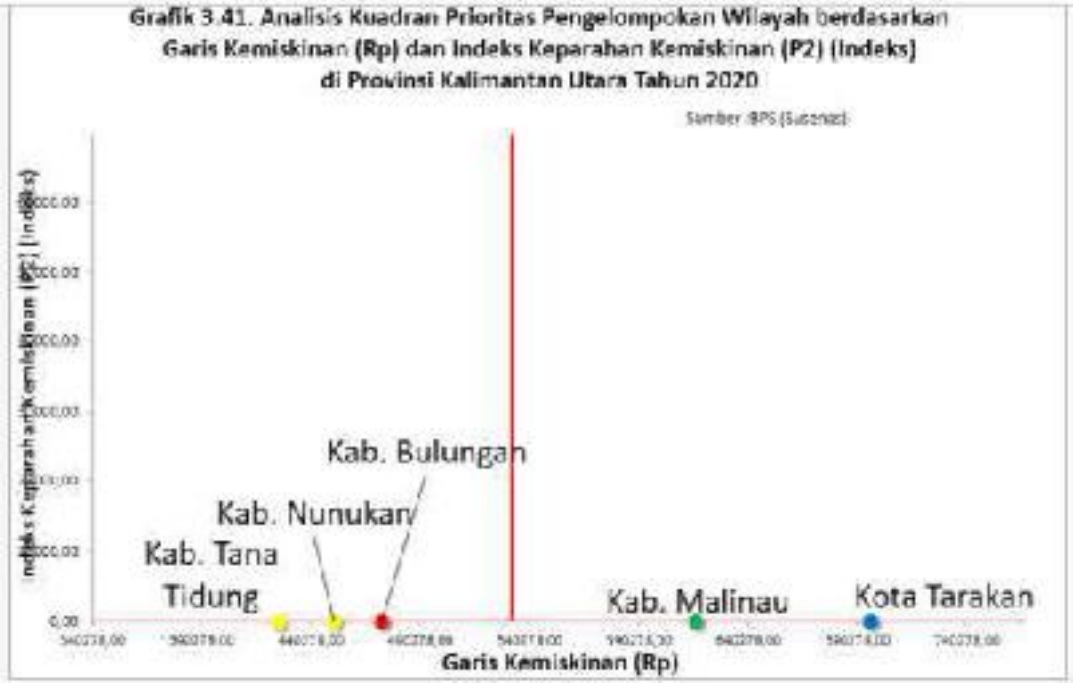
Tabel 3.9 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan indeks kedalaman kemiskinan desa (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh	Kabupaten Tana Tidung,

	pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Malinau

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan (Rp) dan indeks keparahan kemiskinan (%) pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 untuk prioritas pertama adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, prioritas tiga adalah terdapat di Kabupaten Malinau, dan prioritas empat adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.41).

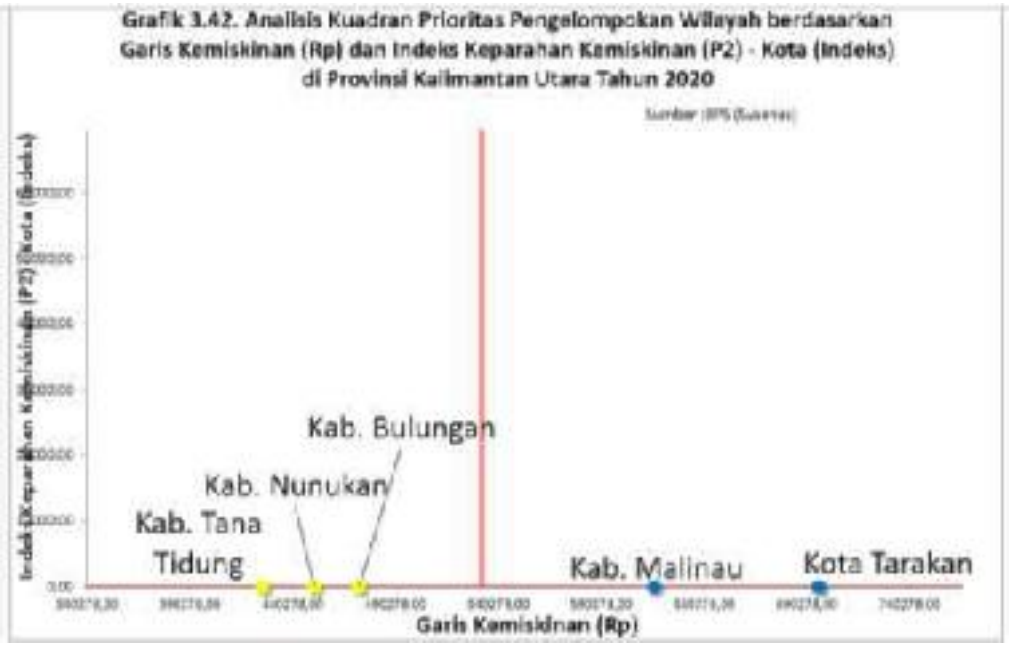


Tabel 3.10 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan (Rp) dan indeks keparahan kemiskinan kota (%) pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 untuk prioritas tiga adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan, serta prioritas keempat adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.42).

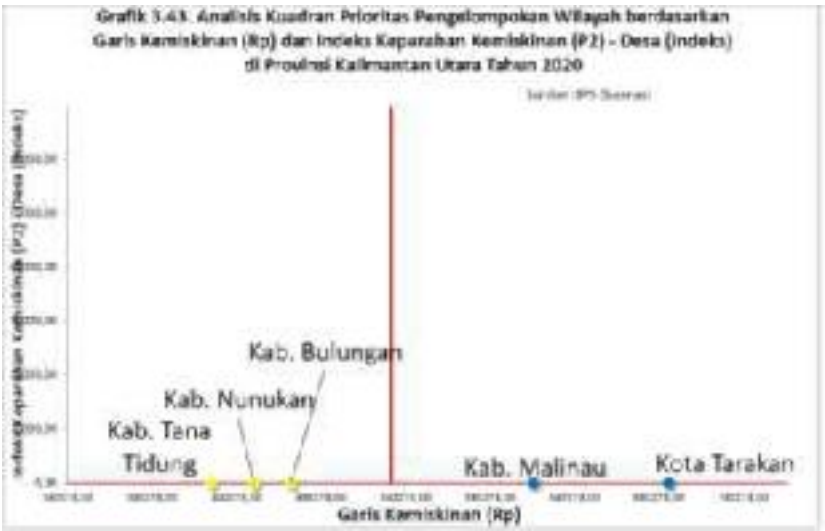


Tabel 3.11 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan indeks keparahan kemiskinan kota (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Malinau

Sumber : hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas berdasarkan garis kemiskinan (Rp) dan indeks keparahan kemiskinan desa (%) pada tahun 2020 yang diintervensi pada tahun 2021 untuk prioritas tiga adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Bulungan, serta prioritas keempat adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau (grafik 3.43).



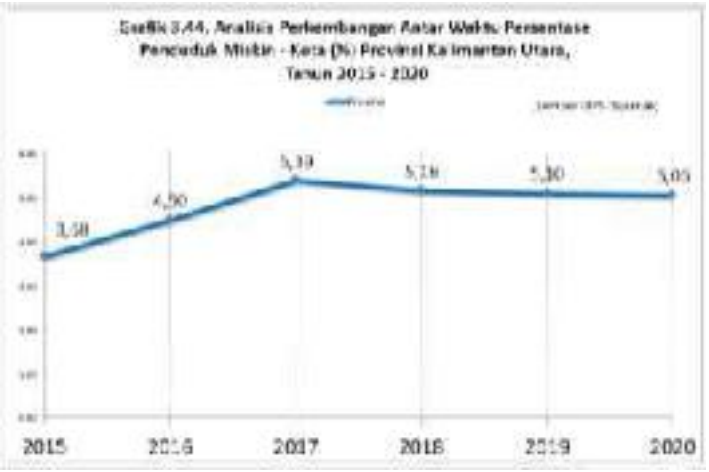
Tabel 3.12 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara garis kemiskinan (X) dan indeks keparahan kemiskinan desa (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber : hasil analisis, 2021

3.1.1.3. Hasil analisis persentase penduduk miskin kota (%)

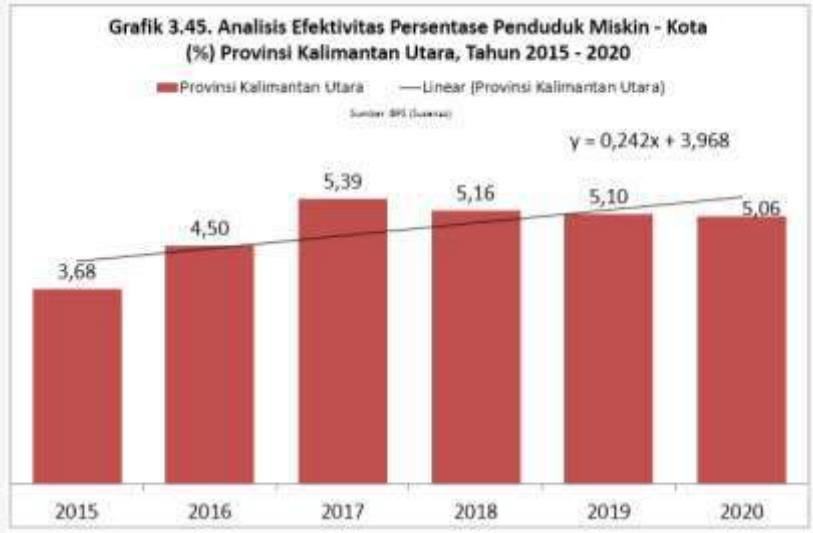
a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif dan pada tahun 2020 turun sebesar 0,04% dibanding tahun 2019. Hal ini mengindikasikan terjadi perbaikan (grafik 3.44).

b. hasil analisis efektivitas

Hasil analisis efektivitas persentase penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 terlihat untuk capaian tahun 2019 dan 2020 berada dibawah naiknya garis linearnya. Adapun persamaan statistiknya pada tahun 2020 adalah y = 0,242x + 3,968. Hal ini menunjukkan untuk capaian tahun 2020 efektif (grafik 3.45).



c. hasil analisis relevansi



Hasil analisis relevansi persentase penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 terhadap nasional khususnya capaian tahun 2020 tidak relevan, karena untuk provinsi turun sebesar 0,04% yang turunnya dibawah naiknya garis linier provinsi pada tahun 2020, sedangkan nasional naik sebesar 0,69% yang berada turunnya garis linier nasional pada tahun 2020 (grafik 3.46).

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

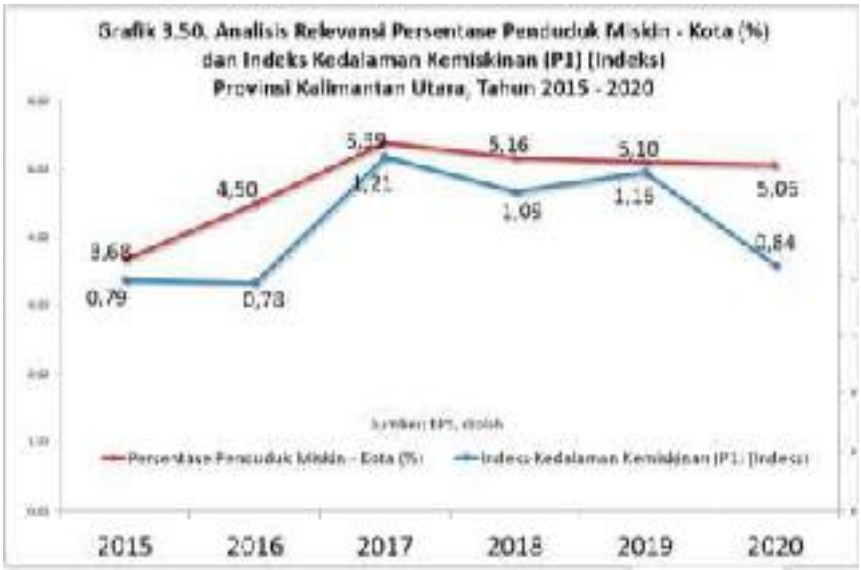
Grafik 3.47 s/d grafik 3.54 menjelaskan relevansi antar indikator. Terlihat bahwa dengan turunnya/membaiknya persentase penduduk miskin kota di daerah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020, juga diikuti turunnya/membaiknya beberapa indikator yaitu indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.50), indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.51), indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.52), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.53), dan

indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.54), tetapi tidak ikuti membaiknya atau dengan kata lainnya memburuknya/naiknya diantaranya yaitu indikator jumlah penduduk miskin (grafik 3.47), jumlah penduduk miskin kota (grafik 3.48), dan jumlah penduduk miskin desa (grafik 3.49).






Grafik 3.49. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
dan Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
29.780,00
5,39
5,10
5,16
5,06
4,50
3,68
27.540,00
27.610,00
26.990,00
26.750,00
25.900,00
Sumber: BPS, diolah
Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.50. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
5,39
5,16
5,10
4,50
1,21
1,16
1,09
5,06
3,68
0,84
0,79
0,78
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.51. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
5,39
5,16
5,10
4,50
5,06
3,68
0,87
0,85
0,74
0,60
0,41
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.52. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
3,68
4,50
5,16
5,06
1,08
1,06
0,97
1,27
2015
2016
2017
2018
2019
2020

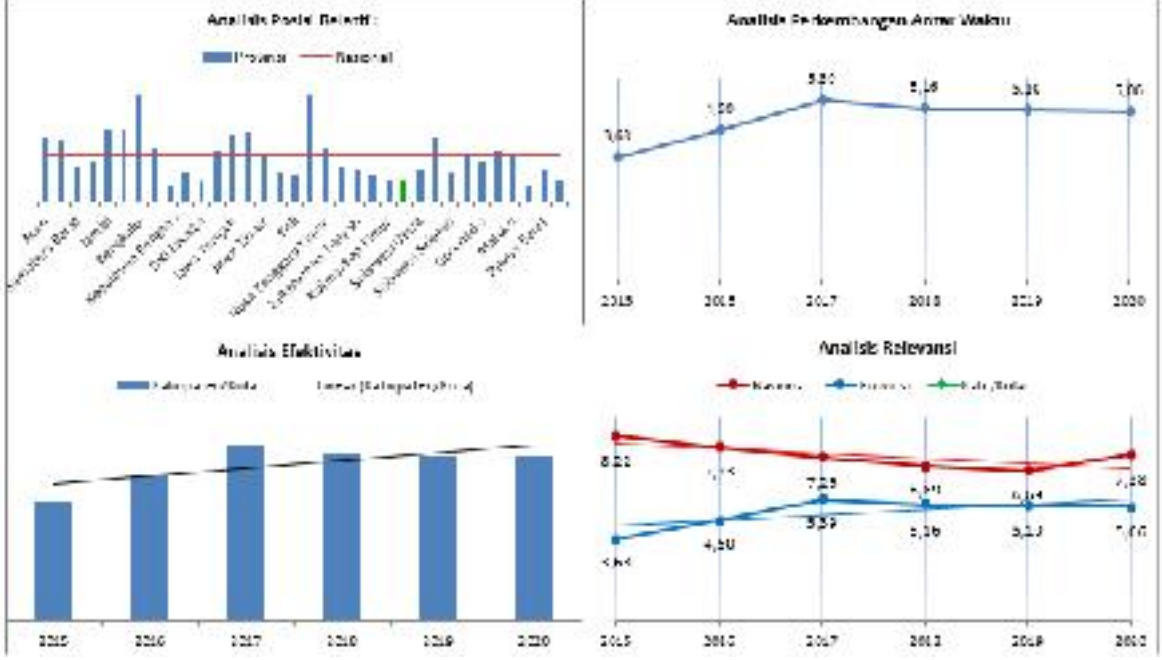

Grafik 3.53. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
3,68
0,26
5,16
5,10
5,06
0,09
0,16
0,24
0,12
Sumber: BPS, diolah
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.54. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
3,68
4,50
0,38
5,16
5,10
0,42
5,06
0,27
0,20
0,19
0,25
Sumber: BPS, diolah
Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

e. hasil analisis identifikasi masalah

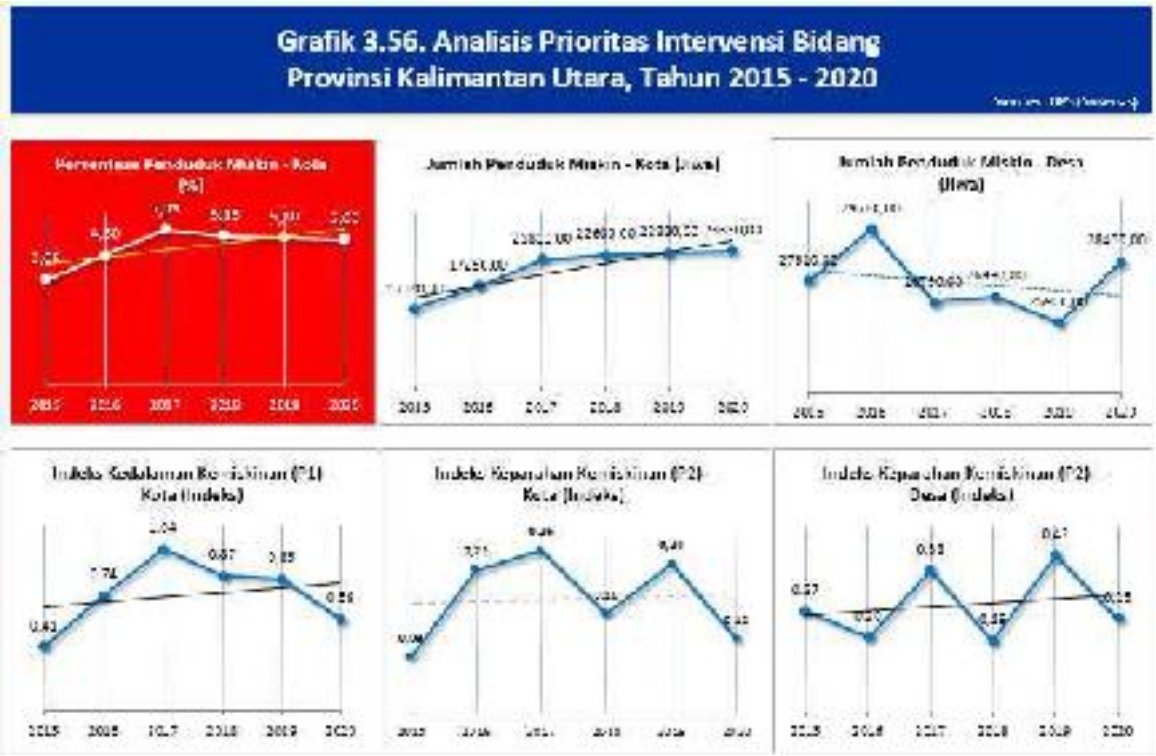
Berdasarkan hasil identifikasi masalah persentase penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya pada capaian tahun 2020 dikaitkan dengan analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak terlihat ada masalah (grafik 3.55).

Grafik 3.55. Analisis Identifikasi Masalah Persentase Penduduk Miskin - Kota (%)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020



f. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.56 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) turunnya persentase penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi adalah naiknya indikator capaian jumlah penduduk miskin kota dan capaian jumlah penduduk miskin desa.



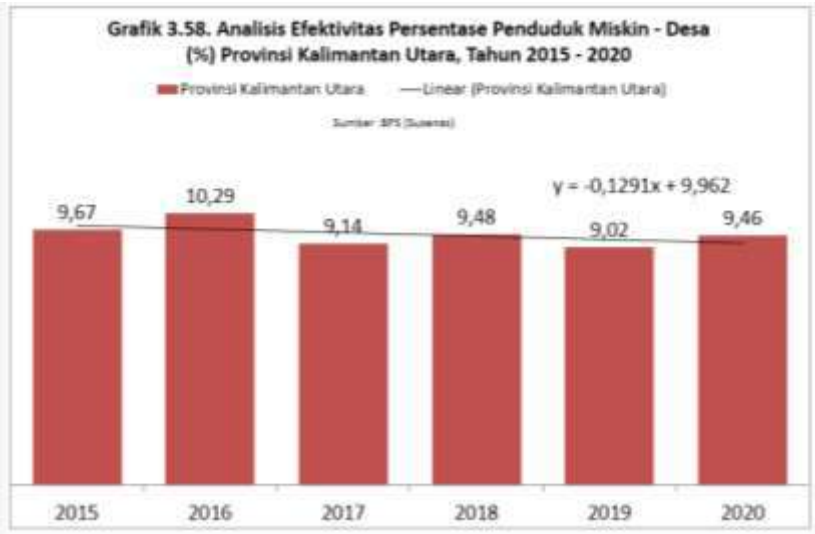
3.1.1.4. Hasil analisis persentase penduduk miskin desa (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu

Hasil analisis perkembangan antar waktu persentase penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif, khususnya pada capaian tahun 2020 naik sebesar 0,44% dibanding capaian tahun 2019. Hal ini menunjukkan trend naik dan perkembangan antar waktunya memburuk (grafik 3.57).



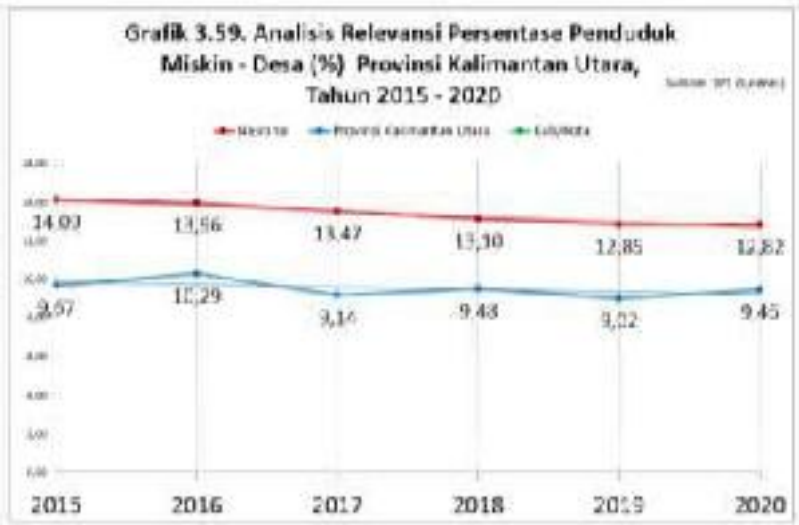
b. hasil analisis efektivitas



Hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa capaian persentase penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, karena naiknya capaian tahun 2020 ini berada diatas garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,1291x+9,962. Dibanding capaian tahun 2019 maka terjadi kenaikan sebesar 0,44%, sedangkan pada tahun 2019 justru turun sebesar 0,46% dibanding capaian tahun 2018 (grafik 3.58).

c. hasil analisis relevansi

Hasil analisis relevansi persentase penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak terjadi dibanding capaian nasional. Grafik menunjukkan angka bahwa provinsi naik sebesar 0,44% sedangkan nasional turun sebesar 0,03% dibanding capaian tahun 2019. Dan juga terlihat baik naiknya provinsi berada diatas garis linear provinsi, tetapi dilain sisi persentase capaian provinsi jauh lebih rendah dibanding nasional untuk tahun 2020 (garfik 3.59).

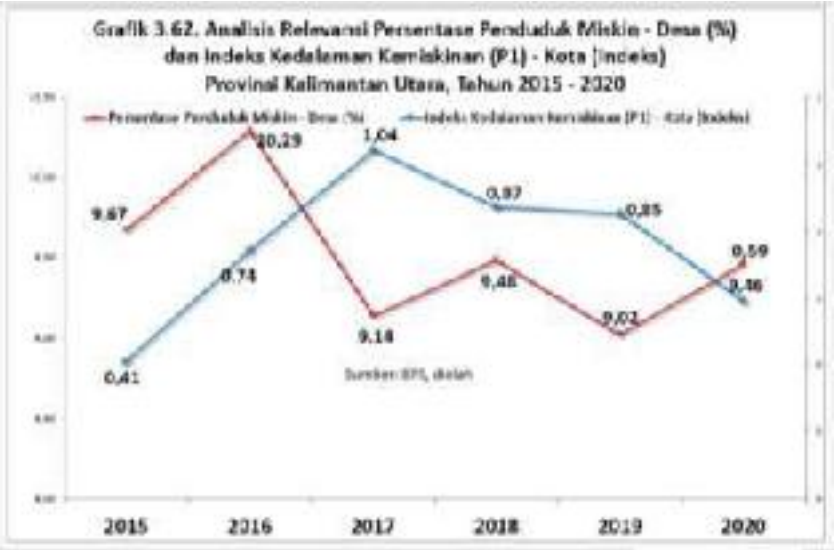


d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

Dengan naiknya capaian persentase penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020, dan dikaitkan dengan indikator lainnya juga mengalami kenaikan yaitu pada indikator capaian jumlah penduduk miskin kota (grafik 3.60), capaian jumlah penduduk miskin desa (grafik 3,61), hal ini menunjukkan ada relevansinya. Namun disisi lain, dengan naiknya persentase penduduk miskin desa jika dikaitkan dengan indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.62),indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.63), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.64), dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.65) justru sebaliknya yaitu capaiannya masing-masing turun. Hal ini menunjukkan tidak ada relevansi dan ini menunjukan terjadi perbaikan pada indikator yang mengalami penurunan.

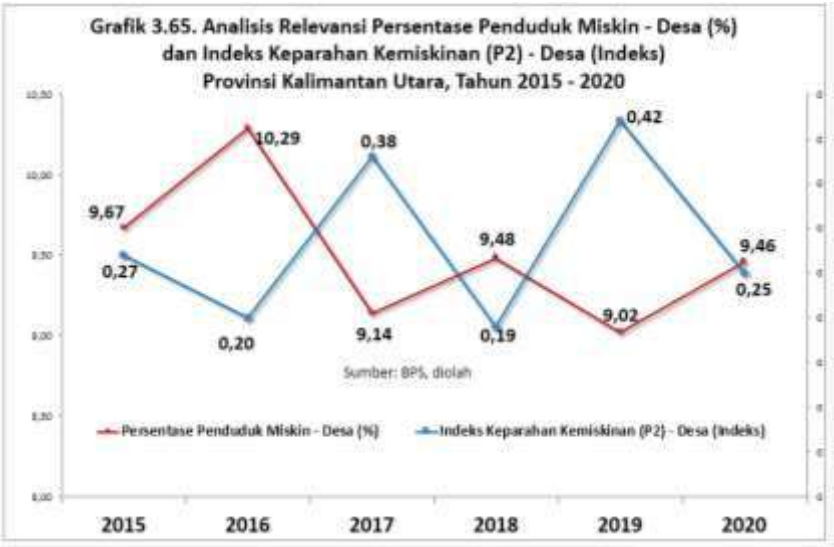





Grafik 3.62. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Desa (%)
dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
9,67
10,29
9,14
9,48
9,02
9,59
0,41
0,74
1,04
0,87
0,85
0,59
2015
2016
2017
2018
2019
2020

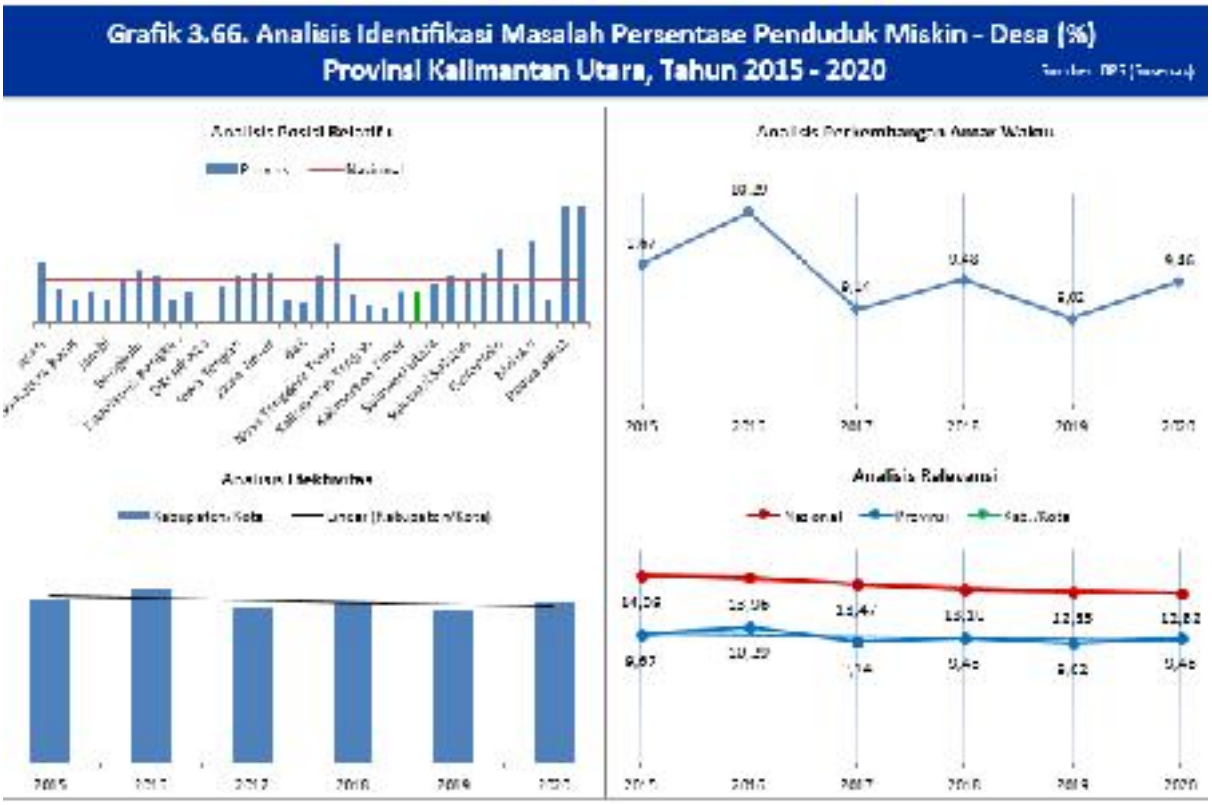

Grafik 3.63. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Desa (%)
dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
9,67
10,29
9,14
9,48
9,02
9,46
1,08
1,06
1,73
0,97
1,65
1,22
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.64. Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin - Desa (%)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
9,67
10,29
9,14
9,48
9,02
9,46
0,09
0,23
0,26
0,16
0,28
0,12
2015
2016
2017
2018
2019
2020



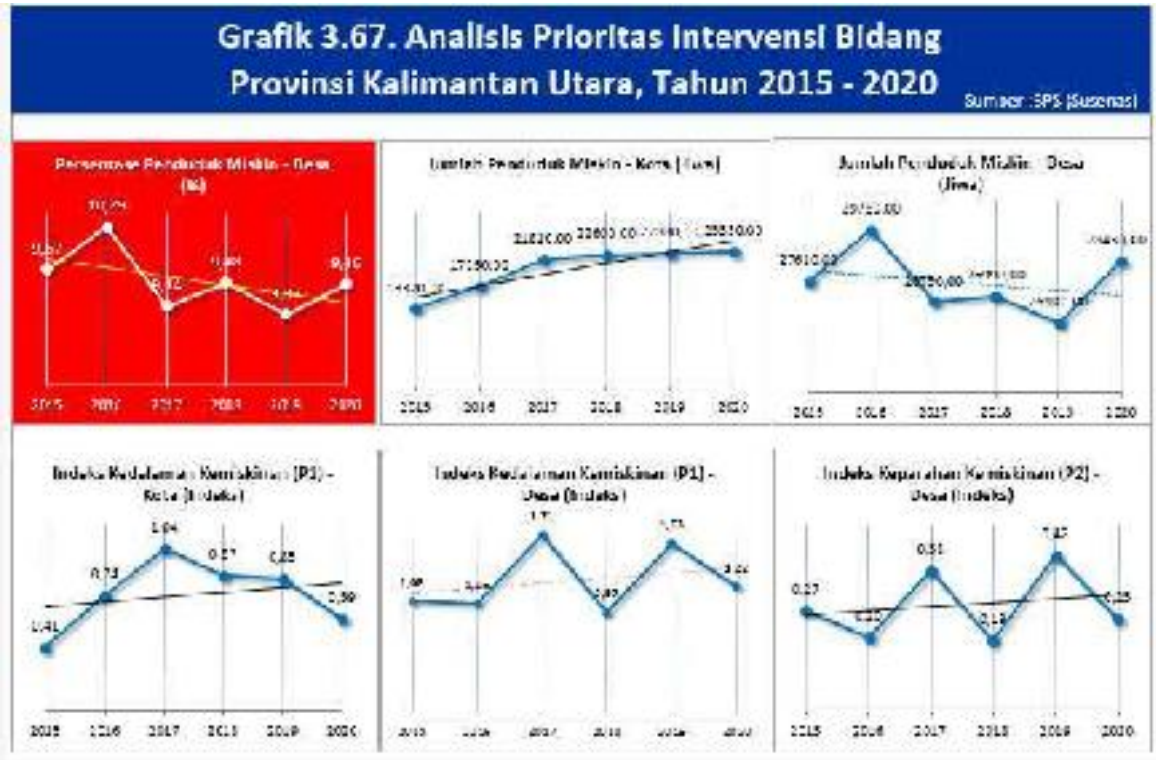
e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan naiknya persentase penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan ada masalah karena semua hasil analisis menunjukkan indikasi memburuk/naik (grafik 3.66).



f. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.67 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan naiknya persentase penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi pada tahun 2021 adalah naiknya indikator capaian jumlah penduduk miskin kota dan capaian jumlah penduduk miskin desa.



3.1.1.5. Hasil analisis jumlah penduduk miskin (jiwa)

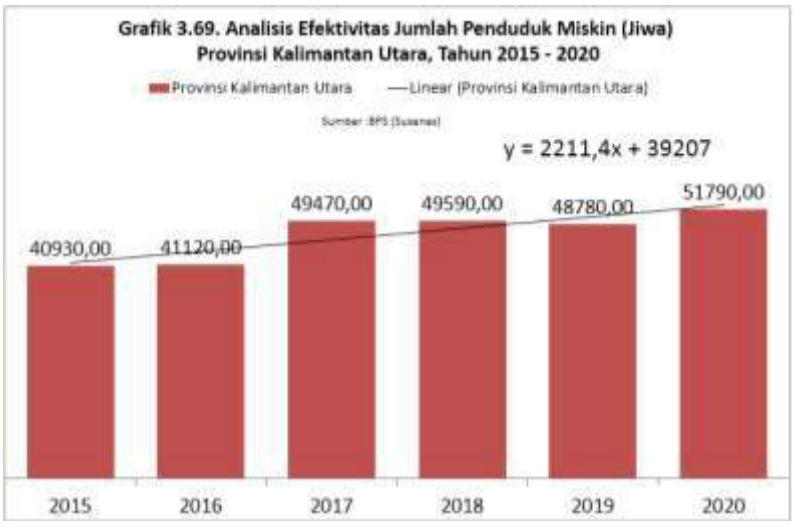
a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 menujukkan grafik yang berfluktuatif. Dan juga terlihat bahwa jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 naik sebanyak 3010 jiwa dibanding capaian tahun 2019, dan dilihat dari capaian tahun 2019 justru

sebaliknya yakni turun sebanyak 1570 jiwa dibanding capaian tahun 2018 (grafik 3.68).

b. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.69 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa naiknya capaian jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak efektif, karena masih berada dibawah garis linear provinsi dengan persamaan y= 2211,4x+39207. Walaupun diketahui bahwa capaian tahun 2019 terjadi penurunan sebanyak 1570 jiwa dibanding capaian tahun 2018.

c. hasil analisis relevansi

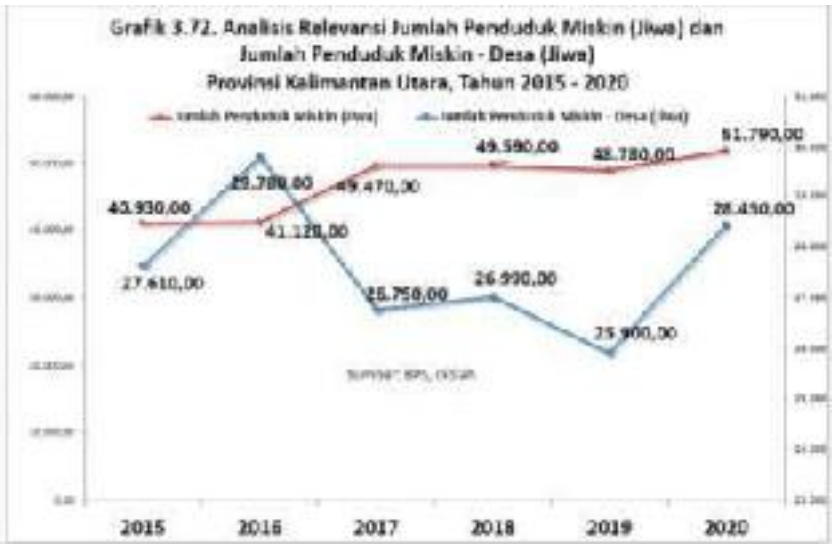
Grafik 3.70 menjelaskan hasil analisis relevansi naiknya jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 juga relevan dengan naiknya jumlah penduduk miskin nasional pada tahun yang sama, walaupun pada grafik ini tidak disajikan nilai statistiknya. Berdasarkan data yang dirilis BPS bahwa jumlah penduduk miskin nasional pada tahun 2020 sebanyak 26424,02 ribu jiwa dan tahun 2019 sebanyak 25 144,72 ribu jiwa atau terjadi kenaikan sebanyak 1279,3 ribu jiwa.



d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

Dengan naiknya capaian jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020, dan dikaitkan dengan indikator capaian lainnya juga mengalami kenaikan yaitu pada indikator capaian jumlah penduduk miskin kota (grafik 3.71), capaian jumlah penduduk miskin desa (grafik 3,72), hal ini menunjukkan ada relevansinya. Namun disisi lain, dengan naiknya jumlah penduduk miskin dikaitkan dengan indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.73), indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.74), indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.75), indeks keparahan kemiskinan (grafik 3,76), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.77), dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.78) justru sebaliknya yaitu capaiannya masing-masing turun. Hal ini menunjukkan tidak ada relevansi dan ini menunjukan terjadi perbaikan pada indikator yang mengalami penurunan tersebut.






Grafik 3.73. Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
40.930,00
41.120,00
49.470,00
49.590,00
48.780,00
51.790,00
0,79
0,78
1,23
1,06
1,16
0,84
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.74. Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
40.930,00
41.120,00
49.470,00
49.590,00
48.780,00
51.790,00
0,41
0,74
1,04
0,87
0,83
0,58
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.75. Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
40.930,00
41.120,00
49.470,00
49.590,00
48.780,00
51.790,00
1,08
1,16
1,73
0,97
1,22
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.76. Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
40.930,00
41.120,00
49.470,00
49.590,00
48.780,00
51.790,00
0,18
0,17
0,34
0,17
0,31
0,17
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.77. Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
40.930,00
41.120,00
49.470,00
49.590,00
48.780,00
51.790,00
0,09
0,23
0,25
0,16
0,24
0,12
2015
2016
2017
2018
2019
2020


Grafik 3.78. Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2015 - 2020
40.930,00
41.120,00
49.470,00
49.590,00
48.780,00
51.790,00
0,27
0,20
0,18
0,19
0,42
0,12
2015
2016
2017
2018
2019
2020

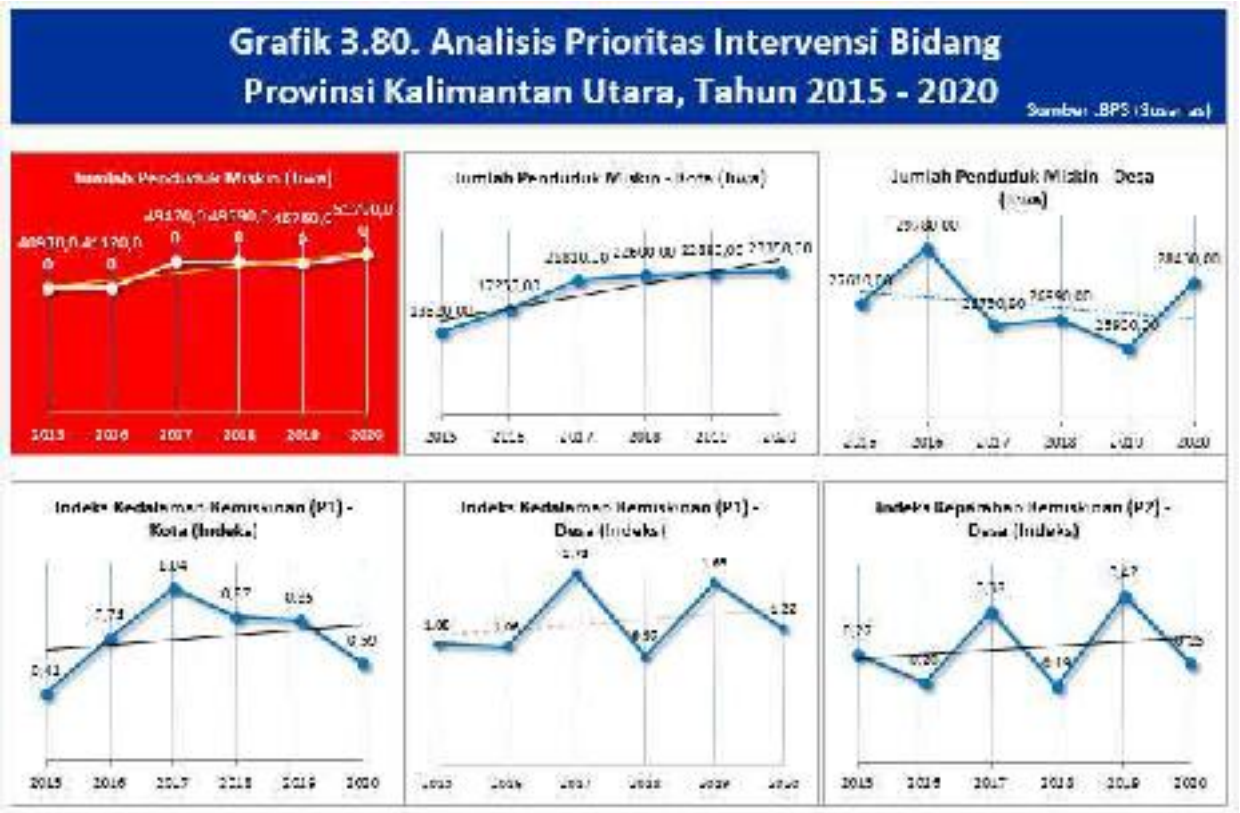
e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan naiknya jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan ada masalah karena semua hasil analisis menunjukkan indikasi memburuk/naik (grafik 3.79).



g. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.80 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan naiknya jumlah penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi adalah naiknya indikator capaian jumlah penduduk miskin kota dan capaian jumlah penduduk miskin desa.



3.1.1.6. Hasil analisis jumlah penduduk miskin kota (jiwa)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 menunjukkan grafik terus naik/memburuk. Dan juga terlihat bahwa jumlah penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 naik sebanyak 410 jiwa dibanding capaian tahun 2019, dan dilihat dari capaian tahun 2019 juga naik sebanyak 280 jiwa dibanding capaian tahun 2018 (grafik 3.81).

b. hasil analisis efektivitas

Grafik 3.82 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa naiknya capaian jumlah penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak efektif, karena masih berada dibawah garis linear provinsi dengan persamaan y= 1938x+13419. Dan terlihat juga capaian tahun 2019 naik sebanyak 280 jiwa dibanding capaian tahun 2018, sedangkan capaian tahun 2020 naik sebanyak 470 jiwa dibanding tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding kenaikan pada tahun 2019 sebesar 167,85%.



c. hasil analisis relevansi



Grafik 3.83 menjelaskan hasil analisis relevansi naiknya jumlah penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 juga relevan dengan naiknya jumlah penduduk miskin kota nasional pada tahun yang sama, walaupun pada grafik ini tidak disajikan nilai statistiknya.

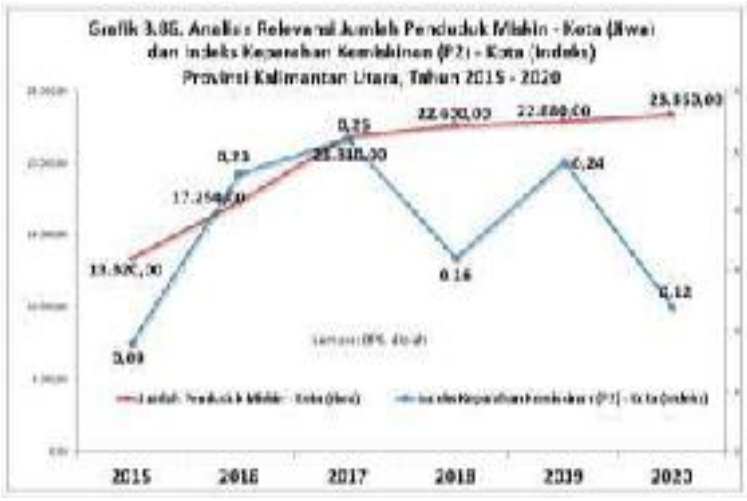
Berdasarkan data yang dirilis BPS tercatat bahwa jumlah penduduk miskin kota nasional pada tahun 2020 sebanyak 11161,96 ribu jiwa dan tahun 2019 sebanyak 9 994,80 ribu jiwa atau terjadi kenaikan sebanyak 1167,16 ribu jiwa.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Tetapi dengan naiknya capaian jumlah penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020, dan dikaitkan dengan indikator capaian lainnya justru mengalami penurunan yaitu pada indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.84), indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.85), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.86), dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.87). Hal ini menunjukkan tidak ada relevansi dan indikator capaian ini menunjukan terjadi perbaikan.







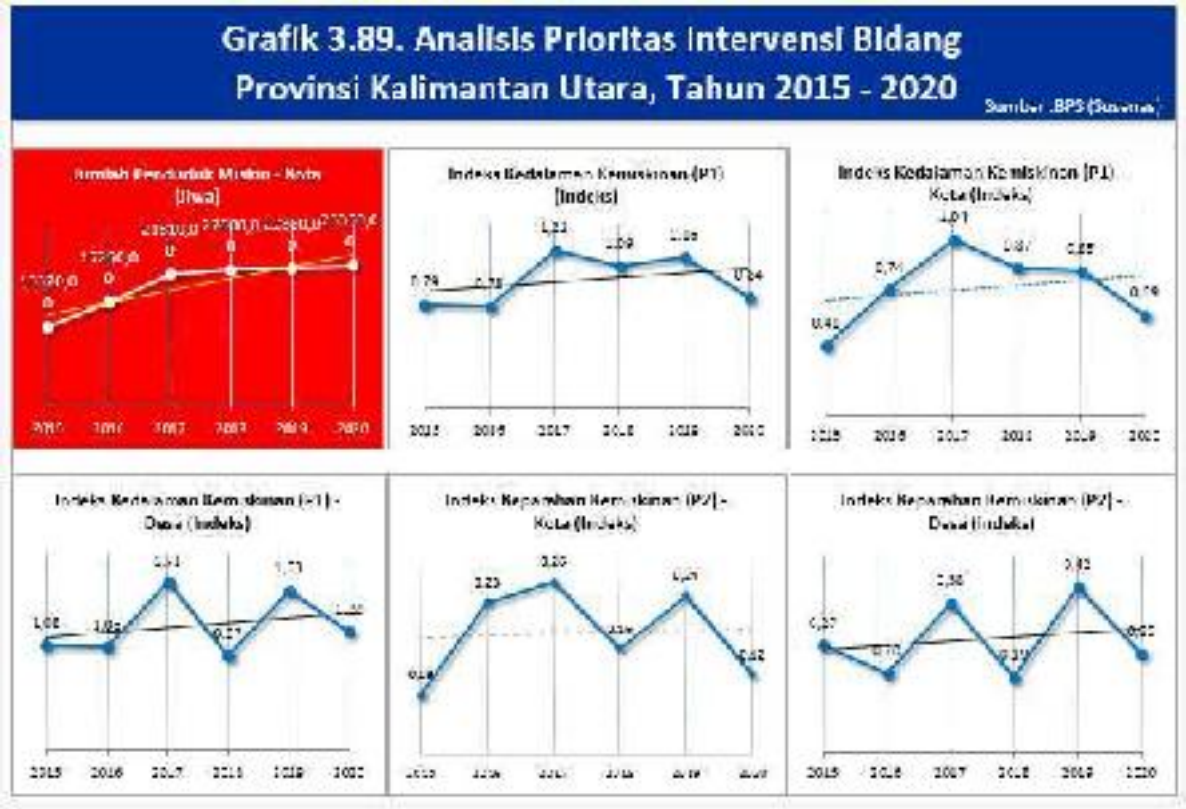
e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan naiknya jumlah penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan ada masalah karena semua hasil analisis menunjukkan indikasi memburuk/naik, walaupun terindikasi naiknya masih berada dibawah naiknya garis linear provinsi (grafik 3.88).



f. hasil analisis prioritas intervensi bidang

Dari grafik 3.89 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan naiknya jumlah penduduk miskin kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi tidak ada, karena hasil analisis grafiknya yang disajikan semua indikator menunjukkan trendnya turun dan berada dibawah naiknya garis linear provinsi.



3.1.1.7. Hasil analisis jumlah penduduk miskin desa (jiwa)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Grafik 3.90 menjelaskan hasil analisis perkembangan antar waktu penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif dan capaian tahun 2020 naik/memburuk. Adapun

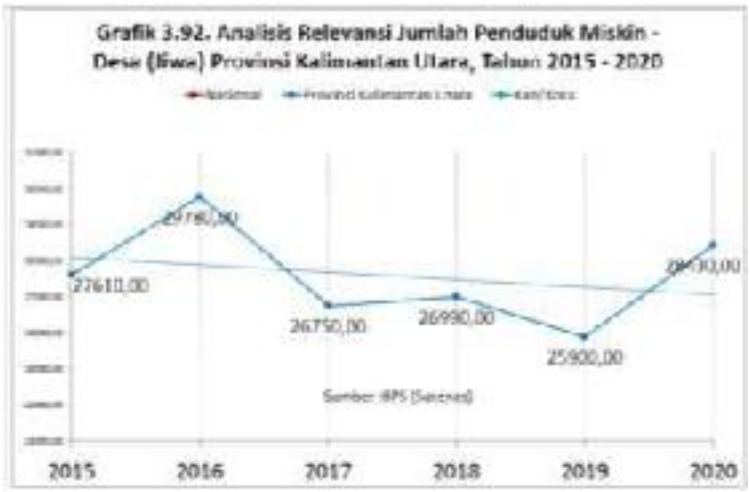
nilai naiknya untuk capaian tahun 2020 sebanyak 5550 jiwa dibanding capaian tahun 2019, sementara capaian tahun 2019 justru turun sebanyak 1090 jiwa dibanding capaian tahun 2018.

b. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.91 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa naiknya capaian jumlah penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak efektif, karena berada diatas garis linear provinsi dengan persamaan y= 208,57x+28307. Sementara capaian tahun 2019 justru turun sebanyak 1090 jiwa dibanding capaian tahun 2018 dan berada dibawah garis linear provinsi, dan sebaliknya capaian tahun 2020 naik sebanyak 5550 jiwa dibanding tahun 2019 dan berada diatas garis linear provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan pada tahun 2020 lebih tinggi dibanding turunnya capaian pada tahun 2019.

c. hasil analisis relevansi



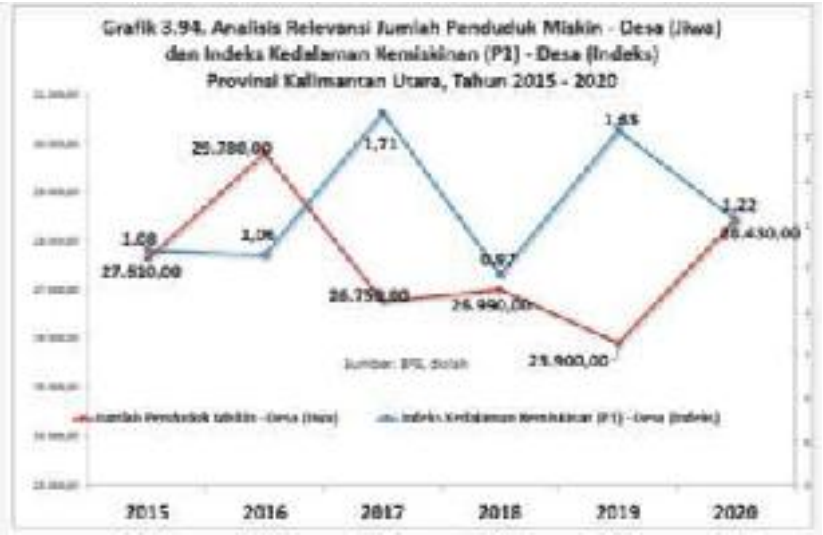
Grafik 3.92 menjelaskan hasil analisis relevansi naiknya jumlah penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 juga relevan dengan naiknya jumlah penduduk miskin kota nasional pada tahun yang sama, walaupun pada grafik ini tidak disajikan nilai statistiknya.

Berdasarkan data yang dirilis BPS tercatat bahwa jumlah penduduk miskin desa nasional pada tahun 2020 sebanyak 15262,06 ribu jiwa dan tahun 2019 sebanyak 15149,92 ribu jiwa atau terjadi kenaikan sebanyak 112,14 ribu jiwa.

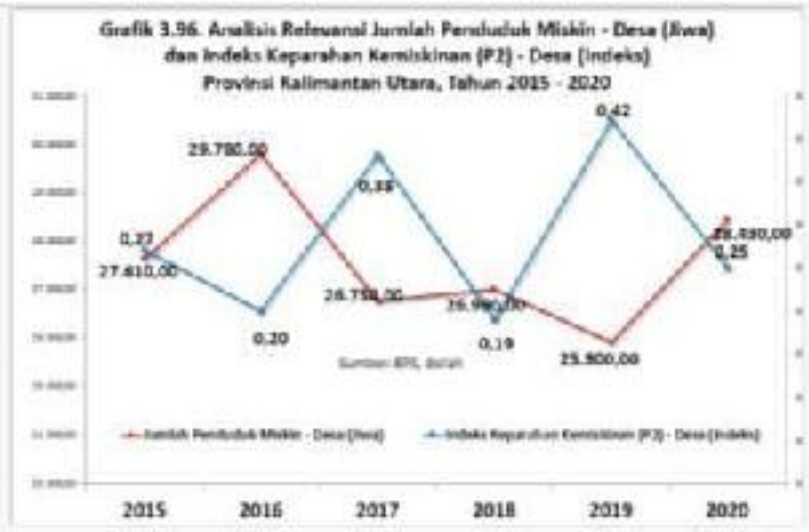
d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Tetapi dengan naiknya capaian jumlah penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020, dan dikaitkan dengan indikator capaian lainnya justru mengalami penurunan yaitu pada indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.93), indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.94), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.95) dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.96).







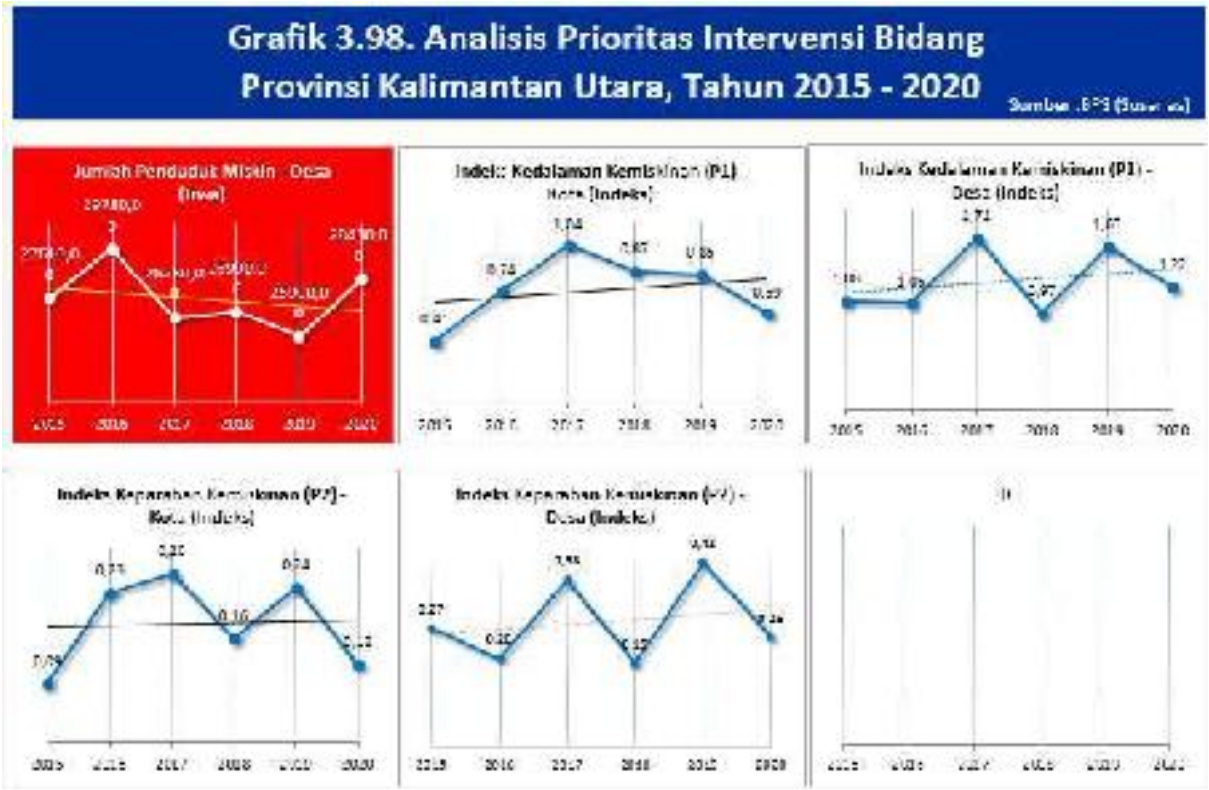
e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan naiknya jumlah penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan ada masalah karena semua hasil analisis menunjukkan indikasi memburuk/naik, dan naiknya masih berada diatas naiknya garis linear provinsi (grafik 3.97).



f. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.98 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan naiknya jumlah penduduk miskin desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi pada tahun 2021 tidak ada tetapi angka ini terus minimal dipertahan, karena hasil analisis grafik yang disajikan semua indikator capaian menunjukkan trend turun dan berada dibawah naiknya garis linear provinsi pada masing-masing indikator capaian pada tahun 2020.



3.1.1.8. Hasil analisis indeks kedalaman kemiskinan (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



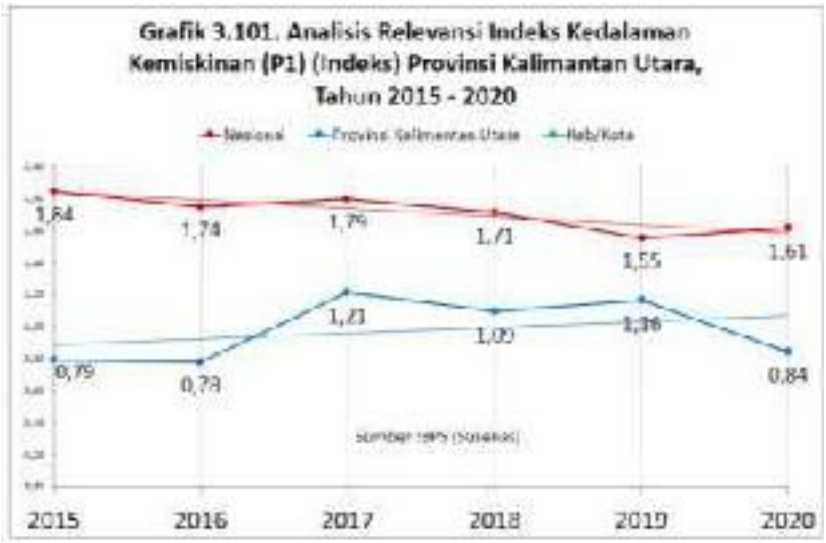
Grafik 3.99 menjelaskan hasil analisis perkembangan antar waktu indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif dan capaian tahun 2020 turun/membaik. Adapun nilai turunnya untuk capaian tahun 2020 sebesar 0,32% dibanding capaian tahun 2019, sementara capaian tahun 2019 naik sebesar 0,07% dibanding capaian tahun 2018.

b. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.100 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi, dan berada dibawah garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,0361x+0,8517. Sementara capaian tahun 2019 justru naik sebesar 0,07% dibanding capaian tahun 2018 dan berada diatas naiknya garis linear provinsi.

c. hasil analisis relevansi



Grafik 3.101 menjelaskan hasil analisis relevansi turunnya indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan dengan nasional karena nasional angkanya naik sebesar 0,06% dibanding capaian tahun 2019 dan juga terlihat naiknya berada diatas turunnya garis linear nasional pada tahun 2020.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa dengan turunnya indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dikaitkan dengan indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan kota (grafik 3.102), indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.103), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.104) dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.105) juga capaiannya masing-masing indikator turun.







e. hasil analisis identifikasi masalah

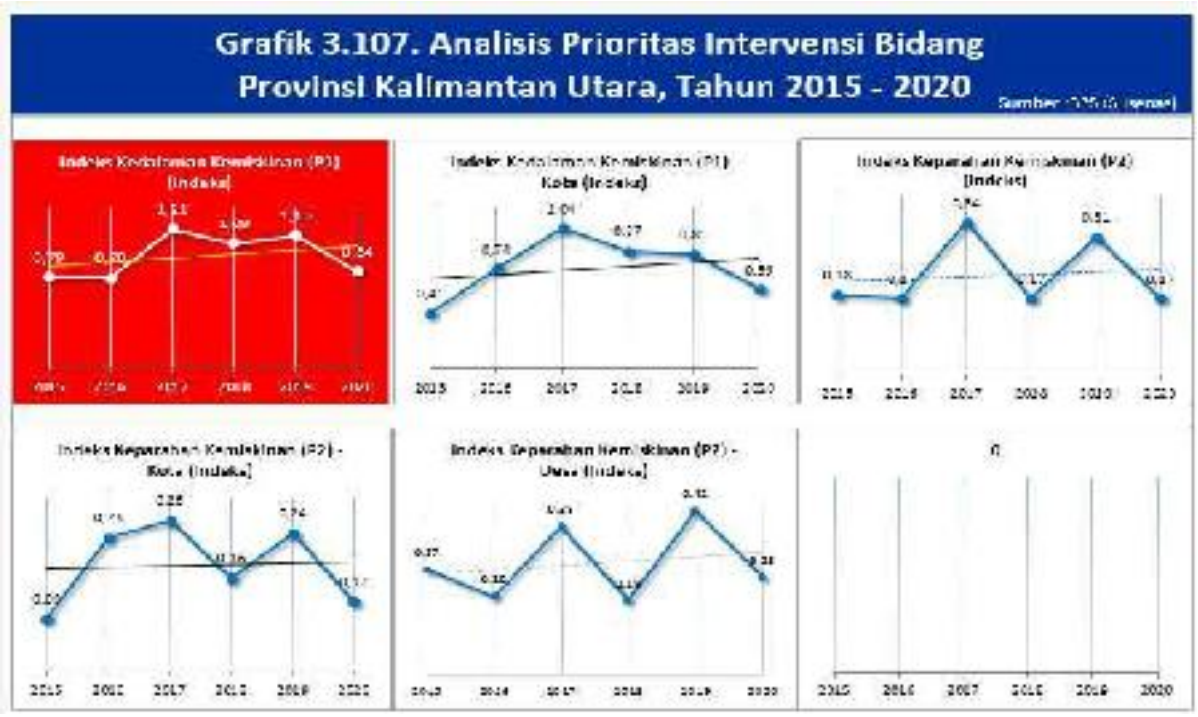
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak ada masalah karena semua hasil analisis menunjukkan indikasi membaik/turun, dan turunnya masih berada dibawah naiknya garis linear provinsi (grafik 3.106).



f. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.98 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu

diintervensi tidak ada, karena hasil analisis grafik yang disajikan terlihat semua indikator capaian menunjukkan trend turun dan berada dibawah naiknya garis linear provinsi pada masing-masing indikator capaiannya pada tahun 2020.



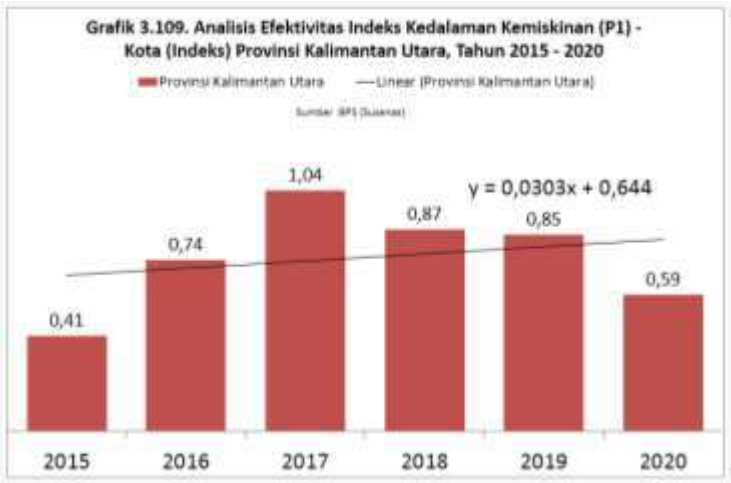
3.1.1.9. Hasil analisis indeks kedalaman kemiskinan kota (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Grafik 3.108 menjelaskan hasil analisis perkembangan antar waktu indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif dan capaian tahun 2020 turun/membaik. Adapun nilai turunnya untuk capaian tahun 2020 sebesar 0,26% dibanding tahun 2019, sementara turunnya capaian tahun 2019 hanya sebesar 0,02% dibanding capaian tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa capaian turunnya indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 jauh lebih baik dibanding capaian turunnya pada tahun 2019.

b. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.109 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi, dan berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,0303x+0,644. Dan begitu juga capaian tahun 2019 turun sebesar 0,02% dibanding capaian tahun 2018 tetapi turunnya capaian ini berada diatas naiknya garis linear provinsi pada tahun 2019.

c. hasil analisis relevansi



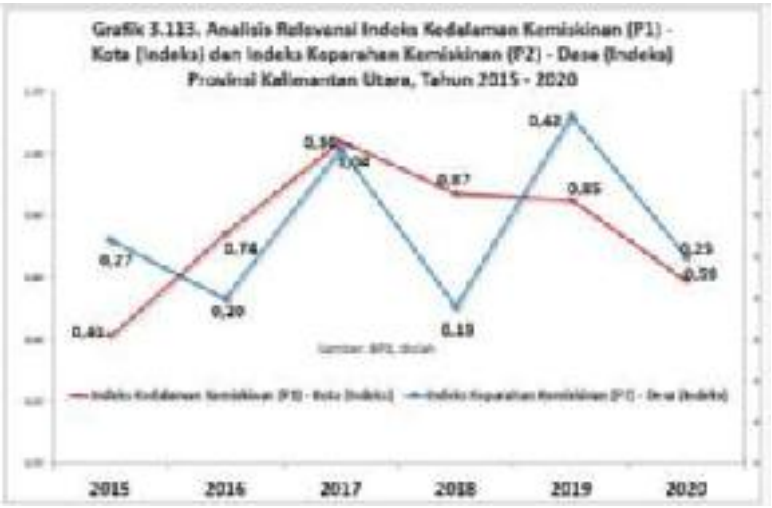
Grafik 3.110 menjelaskan hasil analisis relevansi turunnya indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan dengan nasional karena capaian nasional angkanya naik sebesar 0,08% dibanding capaian tahun 2019 dan juga terlihat naiknya capaian ini berada diatas turunnya garis linear nasional pada tahun 2020. Dan grafik kedua capaian ini juga fluktuatif serta capaian fluktuatifnya provinsi berada dibawah capaian nasional. Hal ini juga mengindikasikan bahwa capaian provinsi lebih baik dibanding nasional.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



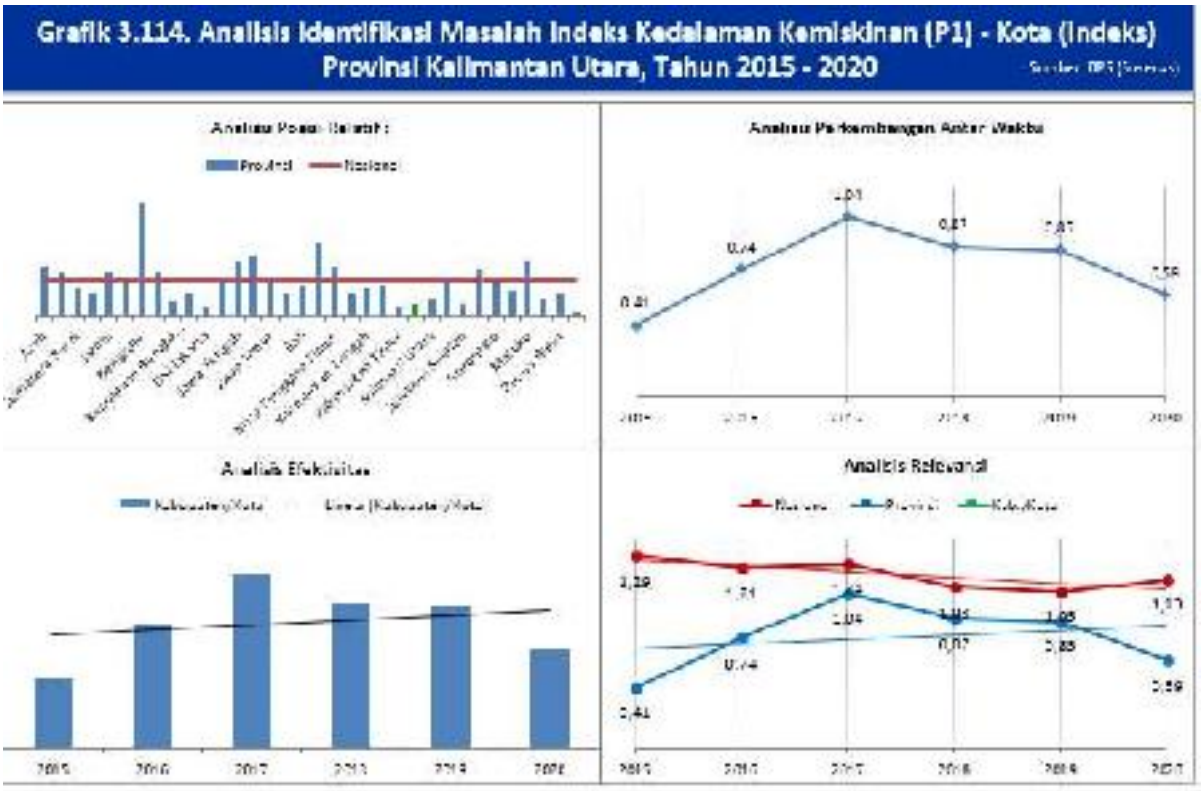
Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa dengan turunnya indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dikaitkan dengan indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan desa (grafik 3.111), indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.112) dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.113) juga capaiannya masing-masing indikator turun.





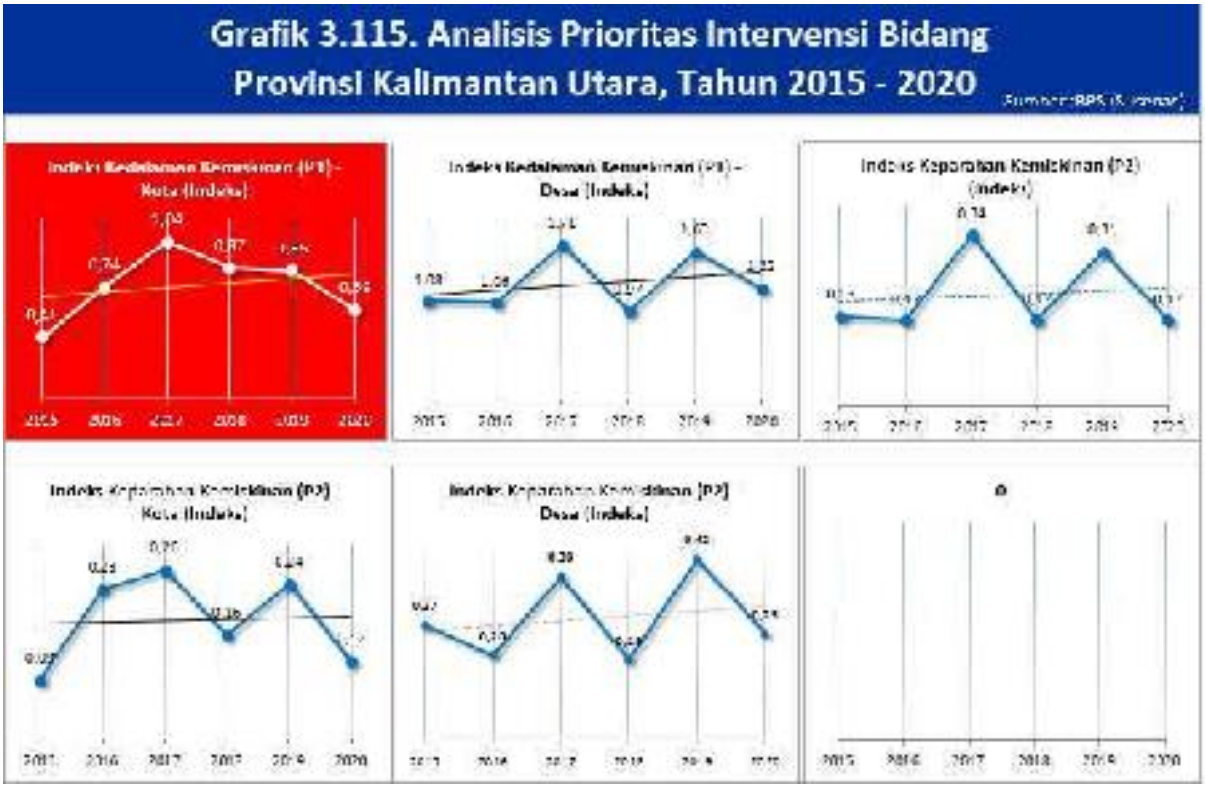
e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak ada masalah karena semua hasil analisis menunjukkan indikasi membaik/turun, dan turunnya masih berada dibawah naiknya garis linear provinsi (grafik 3.114).



f. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.115 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi tidak ada, karena hasil analisis grafik yang disajikan terlihat semua indikator capaian menunjukkan trend turun dan berada dibawah naiknya garis linear provinsi pada masing-masing indikator capaiannya pada tahun 2020.



3.1.1.10. Hasil analisis indeks kedalaman kemiskinan desa (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif, dan untuk capaian tahun 2020 turun sebesar 0,41% dan ini menunjukkan kinerjanya membaik. Membaiknya kinerja ini juga terlihat dari indikator capaian tahun 2019 yang nilainya naik sebesar 0,66% dibanding capaian tahun 2018 (grafik 3.116).

b. hasil analisis efektivitas

Grafik 3.117 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi, dan berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,0477x+1,1113. Tetapi untuk capaian tahun 2019 naik sebesar 0,66% dibanding capaian tahun 2018 dan naiknya berada jauh diatas naiknya garis linear provinsi pada tahun 2019.



c. hasil analisis relevansi



Grafik 3.118 menjelaskan hasil analisis relevansi turunnya indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan dengan nasional karena capaian nasional angkanya naik sebesar 0,03% dibanding capaian tahun 2019 nasional dan berada tepat pada garis linear nasional, sementara capaian turunnya provinsi berada dibawah naiknya garis linear provinsi pada tahun 2020.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

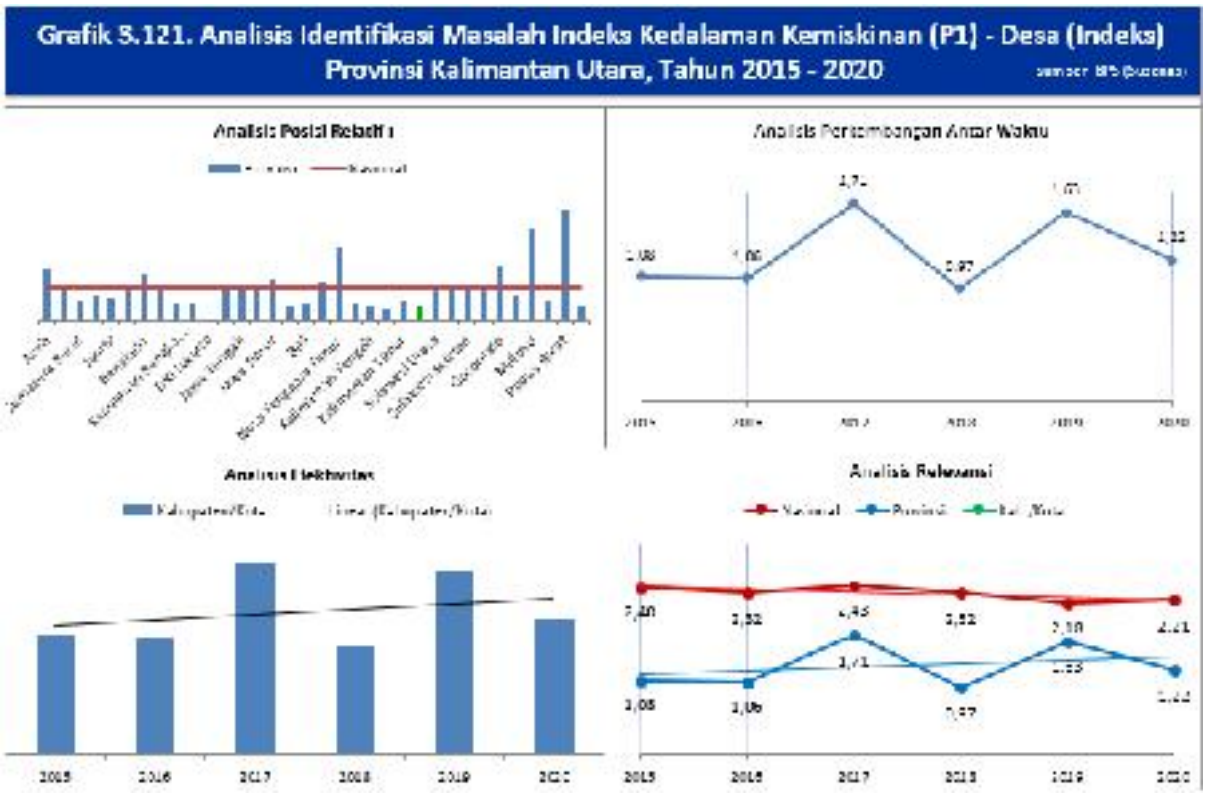
Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa dengan turunnya indikator capaian indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dikaitkan dengan indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.119) dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.120) juga capaiannya masing-masing indikator turun.





e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak ada masalah, karena semua indikator menunjukkan perbaikan/turun (grafik 3.121).



f. hasil analisis prioritas intervensi

Begitu juga grafik 3.122 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan turunnya capaian indeks kedalaman kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi tidak ada, karena hasil analisis grafik yang disajikan terlihat semua indikator capaian menunjukkan trend turun dan berada diatas naiknya garis linear provinsi pada masing-masing indikator capaiannya pada tahun 2020.



3.1.1.11. Hasil analisis indeks keparahan kemiskinan (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif, dan untuk capaian tahun 2020 turun sebesar 0,14% dan ini menunjukkan kinerjanya membaik. Walaupun grafik juga menunjukkan bahwa indikator capaian tahun 2019 nilainya naik sebesar 0,14% dibanding capaian tahun 2018 (grafik 3.123).

b. hasil analisis efektivtas

Grafik 3.124 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa turunnya



capaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi, dan nilai turunnya sebesar 0,14% dibanding capaian tahun 2019 serta berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,0056x+0,2035. Grafik ini juga menjelaskan bahwa capaian untuk tahun 2019 naik sebesar 0,14% dibanding capaian tahun 2018 dan naiknya berada jauh diatas naiknya garis linear provinsi pada tahun 2019.

c. hasil analisis relevansi



Grafik 3.125 menjelaskan hasil analisis relevansi turunnya indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan dengan nasional karena capaian nasional angkanya naik sebesar 0,01% dibanding capaian tahun 2019 nasional dan berada diatas turunnya garis linear nasional, sementara capaian provinsi turun dan berada dibawah naiknya garis linear provinsi pada tahun 2020.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

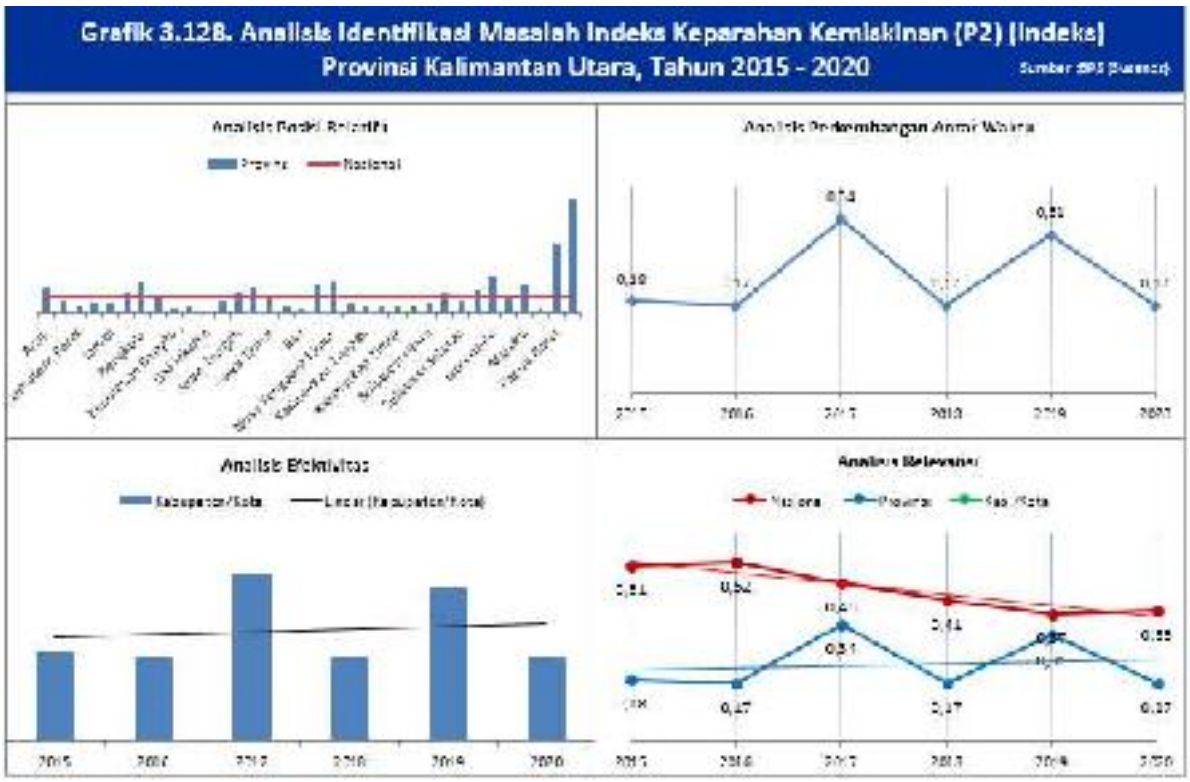
Hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa dengan turunnya indikator capaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 dikaitkan dengan indeks keparahan kemiskinan kota (grafik 3.126) dan indeks keparahan kemiskinan desa (grafik 3.127) juga capaiannya masing-masing indikator turun.





e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan turunnya capaian indeks keparahan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak ada masalah, karena semua indikator menunjukkan perbaikan/turun (grafik 3.128).



f. hasil analisis prioritas intervensi

Begitu juga grafik 3.129 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi bidang konsumsi (pengeluaran) dengan turunnya capaian indeks keparahan kemiskinan

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 khususnya capaian pada tahun 2020 yang perlu diintervensi tidak ada, karena hasil analisis grafik yang disajikan terlihat semua indikator capaian menunjukkan trend turun dan berada diatas naiknya garis linear provinsi pada masing-masing indikator capaiannya pada tahun 2020.



3.1.1.12. Hasil analisis indeks keparahan kemiskinan kota (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu indeks keparahan kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif, dan untuk capaian tahun 2020 turun sebesar 0,12% dan ini menunjukkan kinerjanya membaik. Walaupun grafik juga menunjukkan bahwa indikator capaian tahun 2019 nilainya naik sebesar 0,08% dibanding capaian tahun 2018 (grafik 3.130).

b. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.132 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa turunnya capaian indeks keparahan kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi, karena turun sebesar 0,12% dibanding capaian tahun 2019 serta berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,0023x+0,1753. Grafik ini juga menjelaskan bahwa indikator capaian untuk tahun 2019 naik sebesar 0,08% dibanding capaian tahun 2018 dan naiknya berada jauh diatas naiknya garis linear provinsi pada tahun 2018.

c. hasil analisis relevansi



Grafik 3.132 menjelaskan hasil analisis relevansi turunnya indeks keparahan kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan dengan nasional karena capaian nasional angkanya naik sebesar 0,01% dibanding capaian tahun 2019 nasional dan berada diatas turunnya garis linear nasional, sementara capaian provinsi turun sebesar 0,12% dibanding capaian tahun 2019 serta berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi pada tahun 2020.

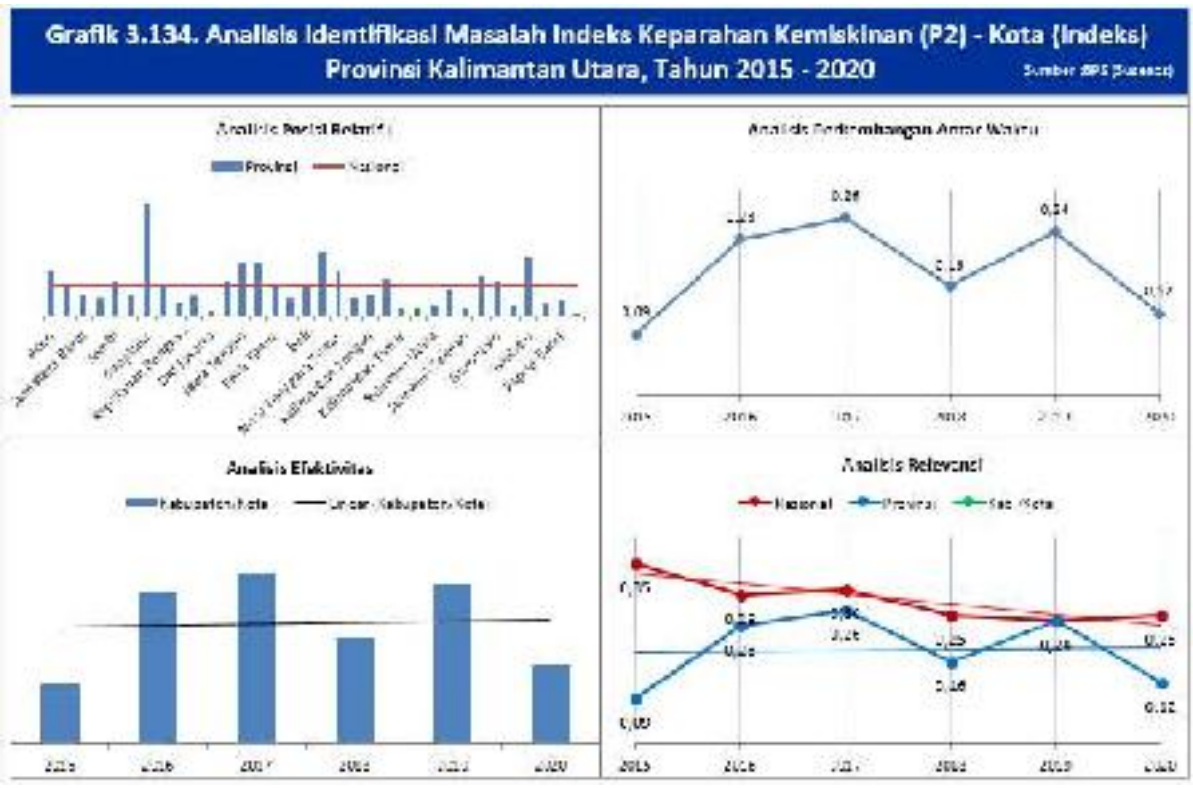
d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

Dan grafik 3.133 juga menunjukkan bahwa turunnya indeks keparahan kemiskinan kota provinsi pada tahun 2020 dikaitkan diikuti dengan turunnya indeks keparahan kemiskinan desa pada tahun 2020 yakni sebesar 0,17% dibanding capaian tahun 2019.



e. hasil analisis identifikasi masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan turunnya capaian indeks keparahan kemiskinan kota Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak ada masalah, karena semua indikator menunjukkan perbaikan/turun (grafik 3.134).



3.1.1.13. Hasil analisis indeks keparahan kemiskinan desa (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu indeks keparahan kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2020 grafiknya fluktuatif, dan untuk capaian tahun 2020 turun sebesar 0,17% dibanding capaian tahun 2019 dan ini menunjukkan kinerjanya membaik. Grafik juga menunjukkan bahwa indikator capaian tahun 2019 nilainya naik sebesar 0,23% dibanding capaian tahun 2018 yang nilainya 0,19% sehingga capaiannya menjadi 0.42% pada tahun 2019 (grafik 3.135).

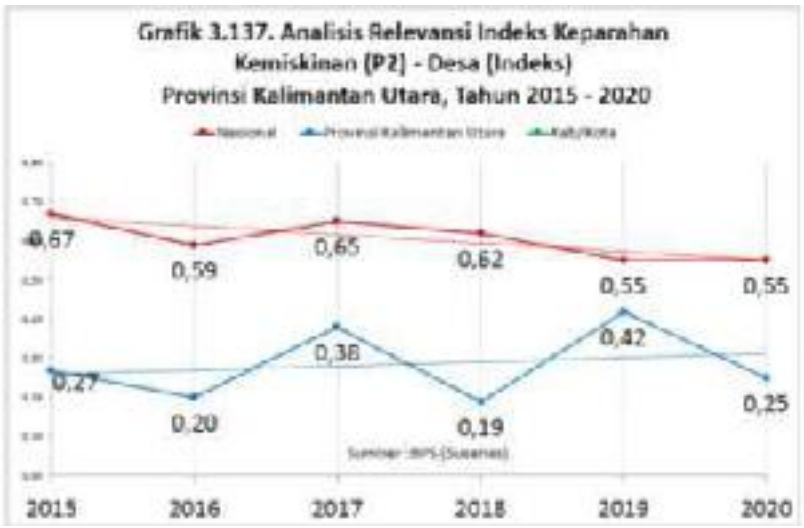
b. hasil analisis efektivitas

Grafik 3.136 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa turunnya capaian indeks keparahan kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi, yakni turun sebesar 0,17% dibanding capaian tahun 2019 serta berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,0106x+0,248. Grafik ini juga menjelaskan bahwa indikator capaian untuk tahun 2019 naik sebesar 0,23% dibanding capaian tahun 2018 dan berada jauh diatas naiknya garis linear provinsi tahun 2018.



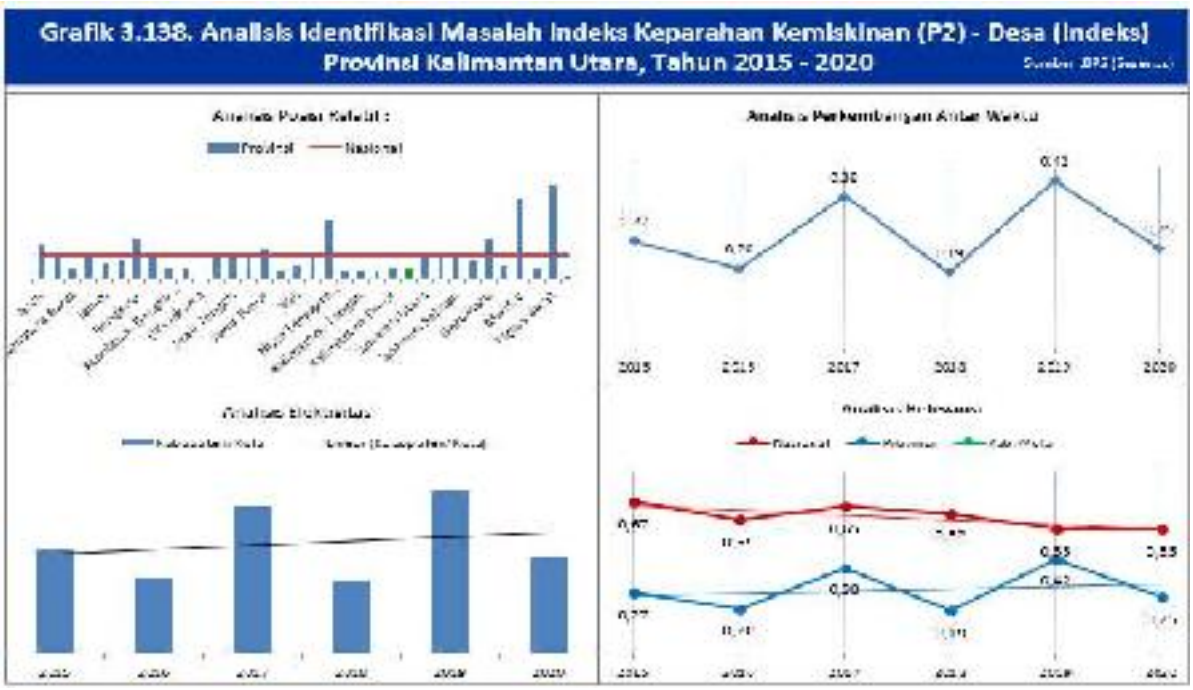
c. hasil analisis relevansi

Grafik 3.137 menjelaskan hasil analisis relevansi turunnya indeks keparahan kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan dengan nasional karena capaian nasional angkanya tetap dibanding capaian tahun 2019 nasional yakni nilainya masing-masing sebesar 0,55% dan berada tepat turunnya garis linear nasional pada tahun 2020, sementara untuk capaian provinsi turun sebesar 0,17% dibanding capaian tahun 2019 serta berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi pada tahun 2020.



d. hasil analisis identifikasi masalah

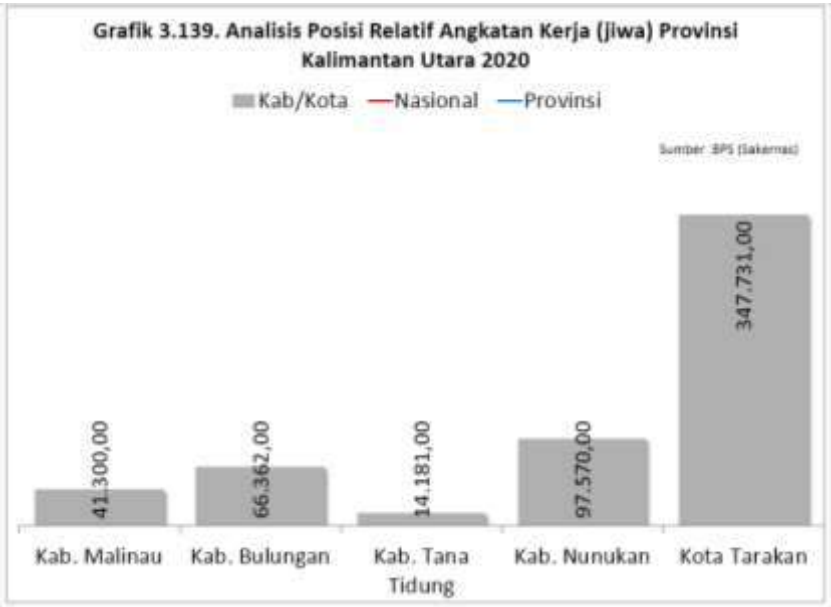
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan turunnya capaian indeks keparahan kemiskinan desa Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 dikaitkan dengan hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan tidak ada masalah, karena semua indikator menunjukkan perbaikan/turun (grafik 3.138).



3.1.2. Bidang Tenaga Kerja

3.1.2.1. Hasil analisis indikator angkatan kerja (jiwa)

a. hasil analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif angkatan kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 menunjukkan bahwa yang terbanyak terdapat di Kota Tarakan sebanyak 347.731 jiwa, kemudian Kabupaten Nunukan sebanyak 97.570 jiwa, Kabupaten Bulungan sebanyak 66.362 jiwa, Kabupaten Malinau sebanyak 41.300 jiwa dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 14.181 jiwa (grafik 3.139).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Grafik 3.140 menjelaskan hasil analisis perkembangan antar waktu angkatan kerja (jiwa) Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016 hingga 2020 grafiknya fluktuatif khususnya yang terjadi pada tahun 2020 karena mengalami penurunan sebanyak 1.426 jiwa dibanding tahun 2019.

c. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.141 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa naiknya capaian angkatan kerja (jiwa) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, karena turun sebanyak 1.426 jiwa dibanding capaian tahun 2019 dan turunnya berada dibawah naiknya garis linier provinsi tahun 2020, dengan persamaan y= 13684x+290414.

d. hasil analisis relevansi



Grafik 3.142 menjelaskan hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa naiknya capaian angkatan kerja (jiwa) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terjadi terjadi, karena turun sebanyak 1.426 jiwa dibanding capaian tahun 2019 dan turunnya berada dibawah

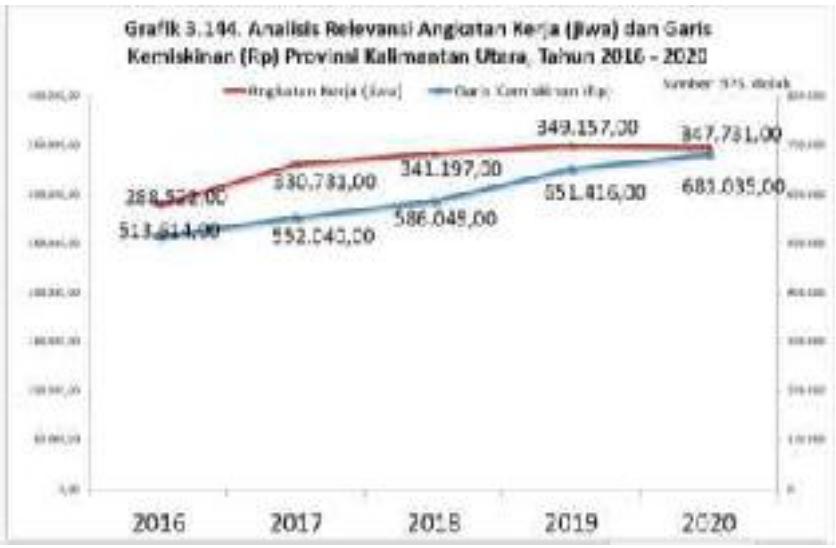
naiknya garis linier provinsi tahun 2020.

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

Grafik 3.143 menjelaskan hasil analisis relevansi menunjukkan bahwa turunnya capaian angkatan kerja (jiwa) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 relevan dengan indikator capaian naiknya persentase penduduk miskin (%) pada tahun 2020.



Walaupun angkatan kerja pada tahun 2020 turun, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tetap naik (grafik 3.144), termasuk jumlah penduduk miskin tetap naik (grafik 3.145), tetapi sebaliknya terhadap



indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.146) dan indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.147) justru masing-masing turun.

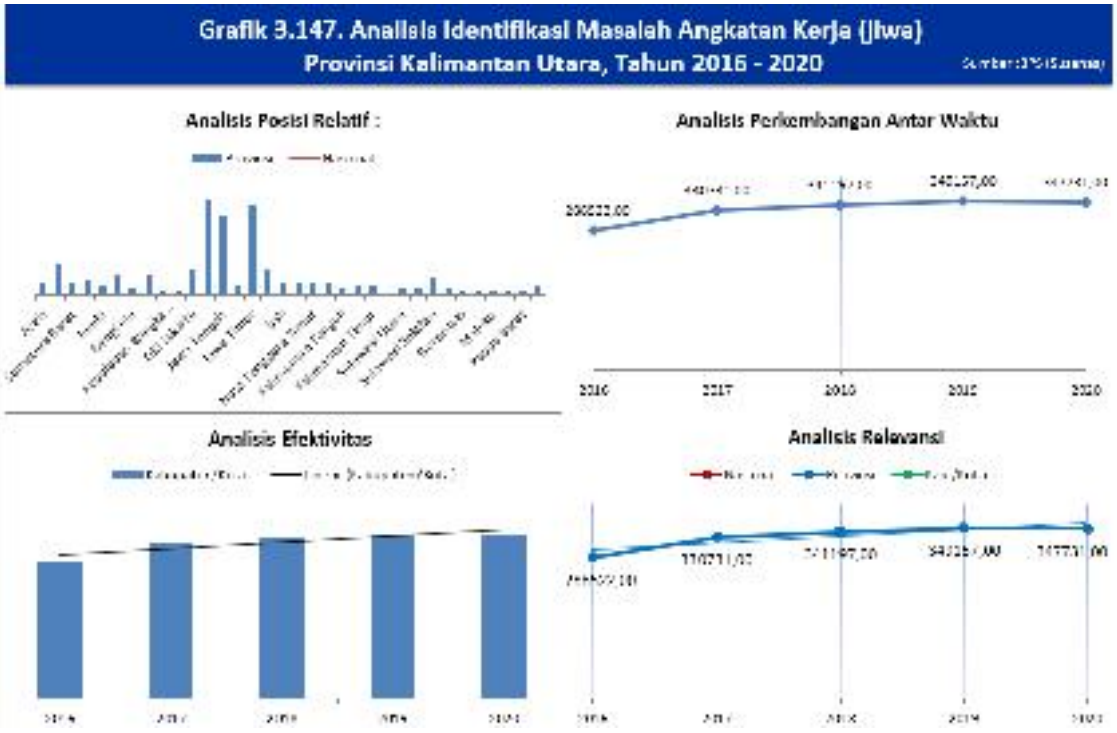






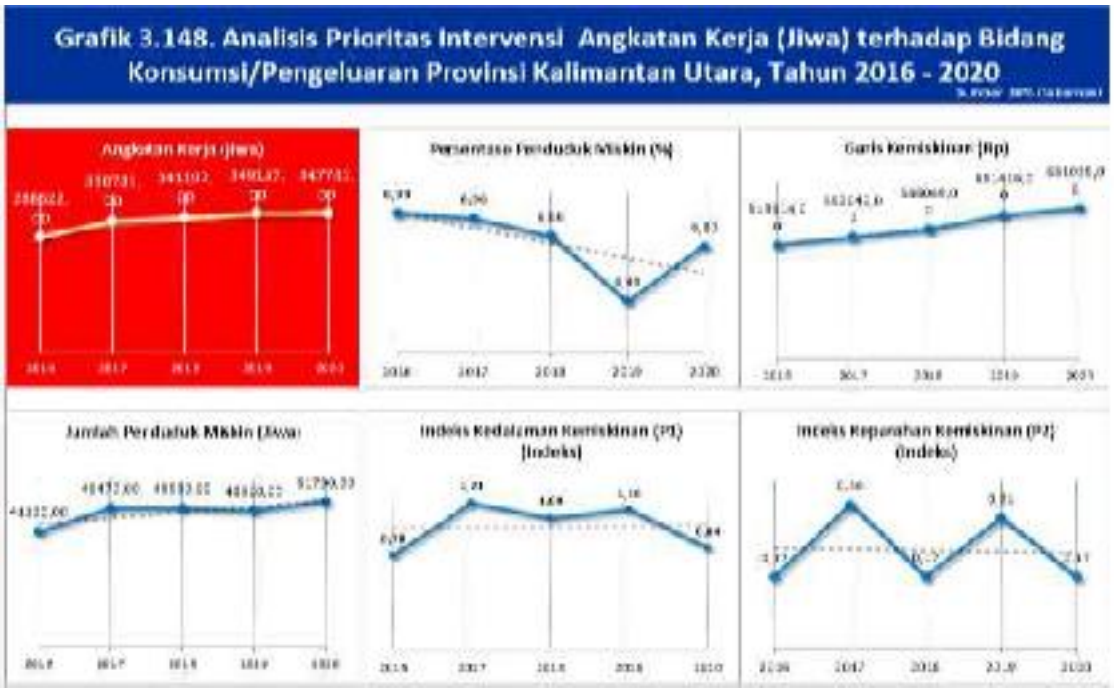
f. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.147 menjelaskan hasil identifikasi masalah dengan turunnya indikator capaian angkatan kerja (jiwa) Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 terlihat bahwa hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi menunjukkan ada masalah, karena semua indikator menunjukkan turun dan berada dibawah naiknya garis linier provinsi tahun 2020.



g. hasil analisis prioritas intervensi

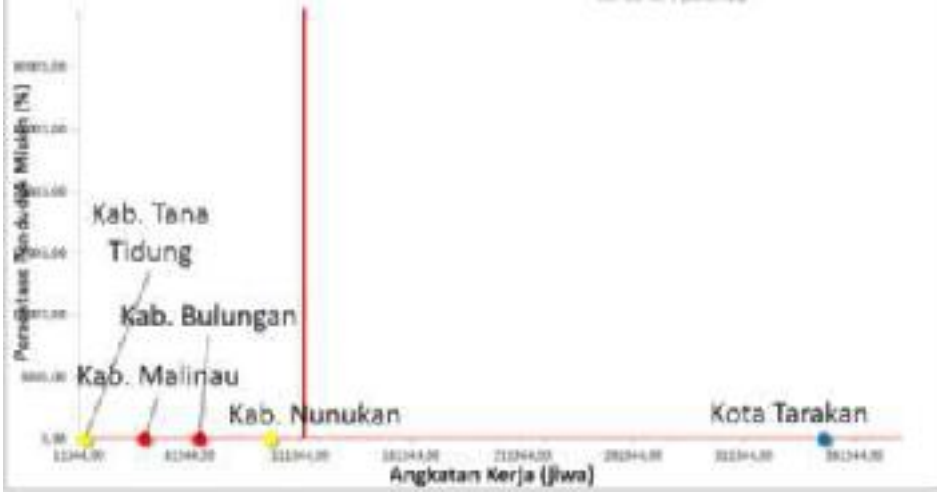
Begitu juga grafik 3.148 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi dengan turunnya indikator angkatan kerja (jiwa) tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran terlihat bahwa persentase penduduk miskin (%), garis kemiskinan (Rp), dan jumlah penduduk miskin (jiwa) semakin naik. Ketiga indikator ini perlu diintervensi di tahun 2021 jika dihubungkan dengan indikator angkatan kerja.



h. hasil analisis kuadran prioritas

Hasil analisis kuadran prioritas angkatan kerja (jiwa) terhadap persentase penduduk miskin (%) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prioritas pertama untuk diintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat adalah di Kota Tarakan (grafik 3.149).

Grafik 3.149. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angkatan Kerja (jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



i. hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA)

Tabel 3.13 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angkatan kerja (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan,	Tidak ada

	karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas angkatan kerja (jiwa) terhadap garis kemiskinan (Rp) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prioritas pertama untuk diintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kabupaten Malinau, prioritas empat adalah di Kota Tarakan (grafik 3.150).



Tabel 3.14 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angkatan kerja (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan,	Tidak ada

	karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas angkatan kerja (jiwa) terhadap jumlah penduduk miskin (jiwa) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prioritas pertama untuk diintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau, prioritas tiga adalah di Kota Tarakan (grafik 3.151).



Tabel 3.15 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angkatan kerja (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas angkatan kerja (jiwa) terhadap indeks kedalaman kemiskinan (%) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prioritas pertama untuk diintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat adalah di Kota Tarakan (grafik 3.152).



Tabel 3.16 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angkatan kerja (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas angkatan kerja (jiwa) terhadap indeks keparahan kemiskinan (%) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prioritas pertama untuk diintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat adalah di Kota Tarakan (grafik 3.153).



Tabel 3.17 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angkatan kerja (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

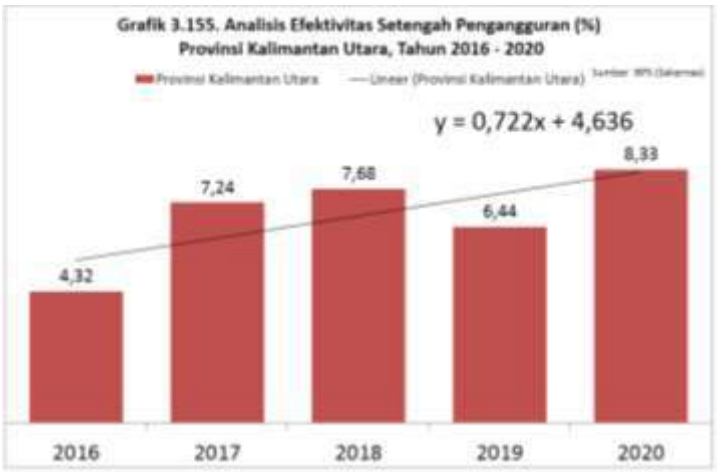
3.1.2.2. Hasil analisis indikator setengah pengangguran (%)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



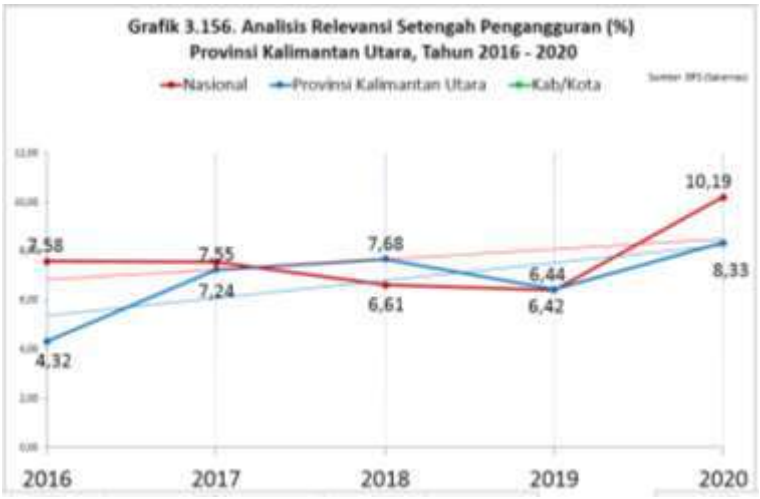
Grafik 3.154 menjelaskan hasil analisis perkembangan antar waktu setengah pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara sejak tahun 2016 hingga 2020 grafiknya fluktuatif. Untuk capaian tahun 2020 naik sebesar 1,89% dibanding capaian tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa belum mengalami perbaikan, dan di tahun 2021 perlu diantisipasi agar tidak terus naik.

b. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.155 menjelaskan hasil analisis efektivitas setengah pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, karena naik sebesar 1,89% dibanding capaian tahun 2019 serta naiknya berada tepat dengan naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y= 0,722x+4,636.

c. hasil analisis relevansi



Grafik 3.156 menjelaskan hasil analisis relevansi setengah pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terhadap nasional relevan, karena provinsi naik sebesar 1,89% begitu juga nasional naik sebesar 3,77% dibanding

tahun 2019. Dan naiknya capaian provinsi masih berada dibawah nasional berarti baik. Juga terlihat bahw naiknya capaian provinsi identik dengan naiknya garis linier provinsi sedangkan naiknya capaian nasional lebih tinggi dibanding naiknya garis linier nasional pada tahun 2020.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Selain itu juga indikator capaian setengah pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 yang naik sebesar 1,89% juga diikuti naiknya indikator persentase penduduk miskin sebesar 0,31% (grafik 3.157), naiknya garis kemiskinan sebesar Rp.29.679 (grafik 3.157), dan naiknya jumlah penduduk miskin sebanyak 3180 jiwa (grafik 3.158) dibanding capaian tahun 2019. Untuk itu, di tahun 2021 ketiga indikator tersebut perlu diantisipasi agar indikator ini dapat berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan di daerah Provinsi Kalimantan Utara.





e. hasil analisis identifikasi

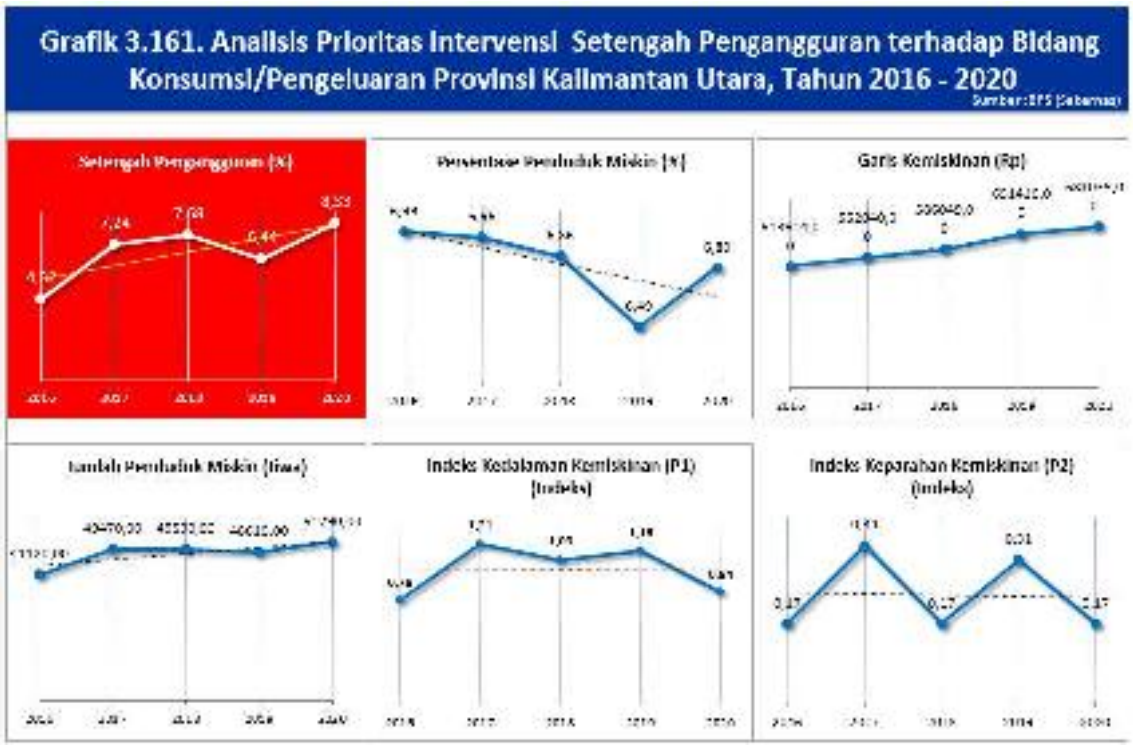
Berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan naiknya indikator capaian setengah pengangguran (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun tahun 2020 sebesar 1,89% dibanding tahun 2019, ditunjukkan oleh hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi, karena hasil indikator ini memburuk/naik dibanding tahun 2019 (grafik 3.160).



f. hasil analisis prioritas intervensi

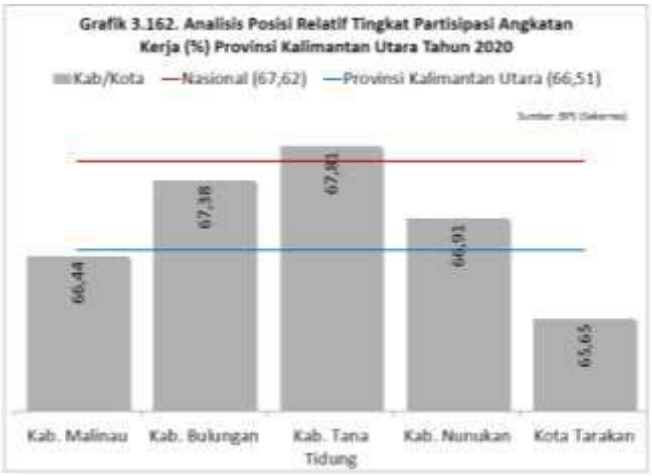
Grafik 3.161 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi indikator setengah pengangguran pada tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran pada analisis persentase penduduk miskin (%), garis kemiskinan (Rp), dan jumlah

penduduk miskin (jiwa) juga turut naik/memburuk. Untuk itu, pada tahun 2021 indikator tersebut perlu diantisipasi agar dapat diintervensi sehingga dapat membaik/turun.



3.1.2.3. Hasil analisis indikator partisipasi angkatan kerja (%)

a. hasil analisis posisi relatif



Grafik 3.162 menjelaskan hasil analisis posisi relatif indikator capaian partisipasi angkatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebesar 66,51% lebih rendah dibanding capaian nasional 67,62% berarti buruk. Begitu juga indikator capaian untuk di Kota Tarakan sebesar 65,65%, Kabupaten Malinau sebesar 66,44% berada dibawah provinsi berarti buruk. Sedangkan capaian di Nunukan sebesar 66,91%, di Kabupaten Bulungan sebesar 67,38% berada diatas capaian provinsi berarti baik, selanjut capaian Kabupaten Tana Tidung sebesar 67,81% berada diatas provinsi bahkan nasional berarti baik. Berdasarkan target RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 untuk TPAK tahun

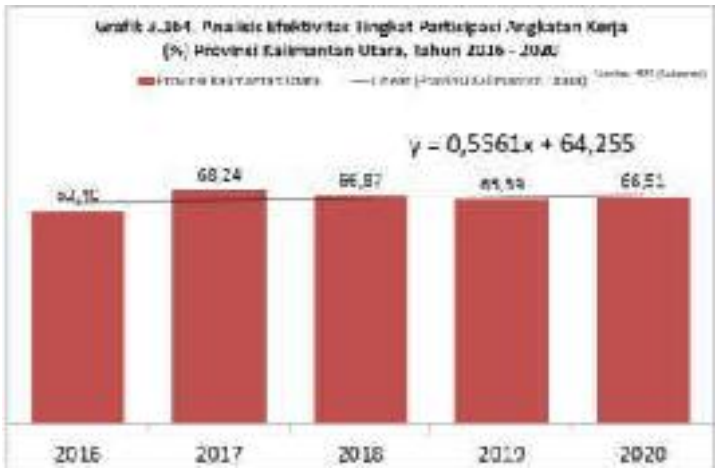
2020 sebesar 68,00% sedangkan target 2021 sebesar 69,50%, maka capaian provinsi sebesar 66,51% pada tahun 2020 tidak tercapai.

b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Grafik 3.163 menjelaskan hasil analisis perkembangan antar waktu tingkat partipasi angkatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 membaik, grafiknya fluktuatif, trennya di tahun 2020 naik sebesar 0,92% dibanding tahun 2019.

c. hasil analisis efektivitas



Grafik 3.164 menjelaskan hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa dengan turunnya capaian tingkat partispasi angkatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, karena berada dibawah naiknya garis linier provinsi tahun 2020 dengan persamaan y= 0,5561x+64,255. Dari data tersebut terlihat bahwa efektivitas hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2018 karena berada diatas garis linier provinsi.

d. hasil analisis relevansi



Hasil analisis relevansi tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya tahun 2020 terhadap nasional relevan, karena provinsi naik sebesar 0,91% tetapi naiknya masih berada dibawah naiknya

garis linier provinsi dan nasional naik sebesar 0,24% yang berada identik dengan naiknya garis linier nasional, di tahun 2019 (grafik 3.165).

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Grafik 3.166 menjelaskan relevansi antara tingkat partisipasi angkatan kerja (%) terhadap persentase penduduk miskin (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 terjadi, hal ini terlihat bahwa sama-sama naik yaitu untuk tingkat partisipasi angkatan kerja naik sehingga menjadi 66,51% begitu juga persentase penduduk miskin naik sehingga menjadi 6,80%, dibanding tahun 2019.



Begitu juga relevansi realiasi TPAK Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap jumlah penduduk miskin terjadi, karena sama-sama naik, sehingga jumlah penduduk miskin menjadi 51.790 jiwa pada tahun 2020 (grafik 3.168).

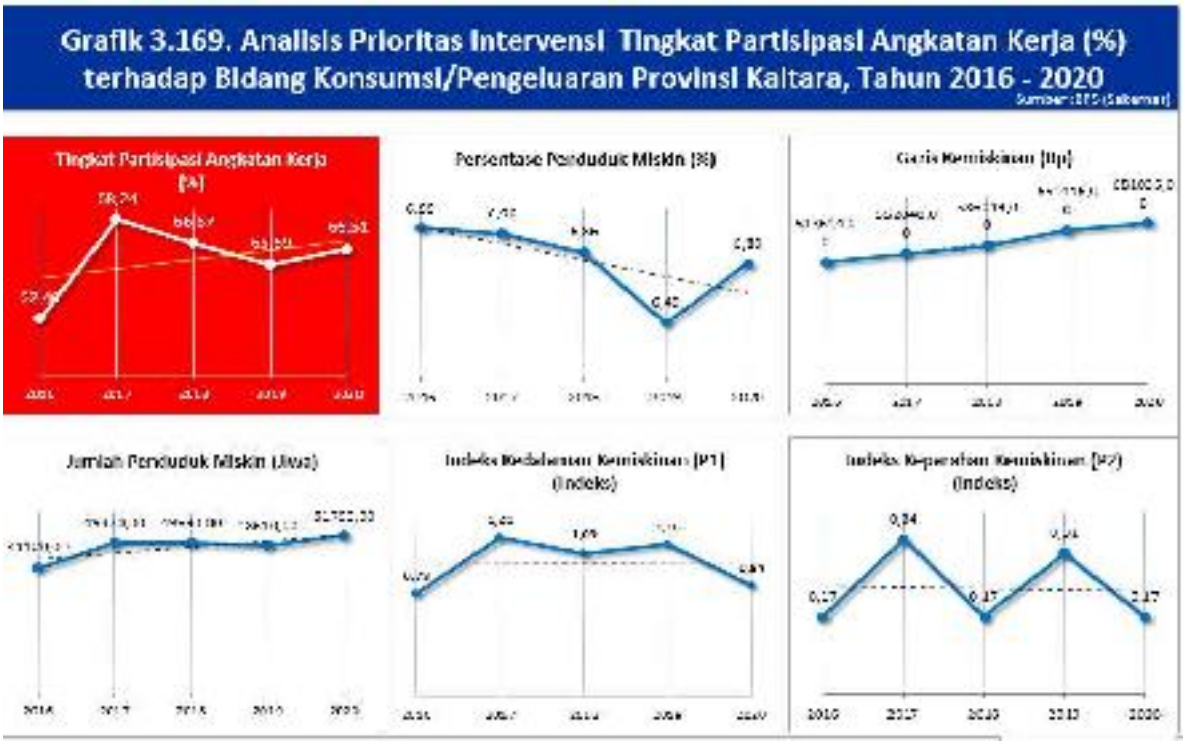
f. hasil analisis identifikasi

Dari grafik 3.168 menjelaskan hasil identifikasi masalah tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 ditunjukkan pada analisis posisi relatif dan analisis efektivitas, karena pada hasil analisis posisi relatif provinsi berada dibawah capaian nasional, dan efektivitasnya juga masih berada dibawah naiknya garis linier provinsi ditahun 2020.

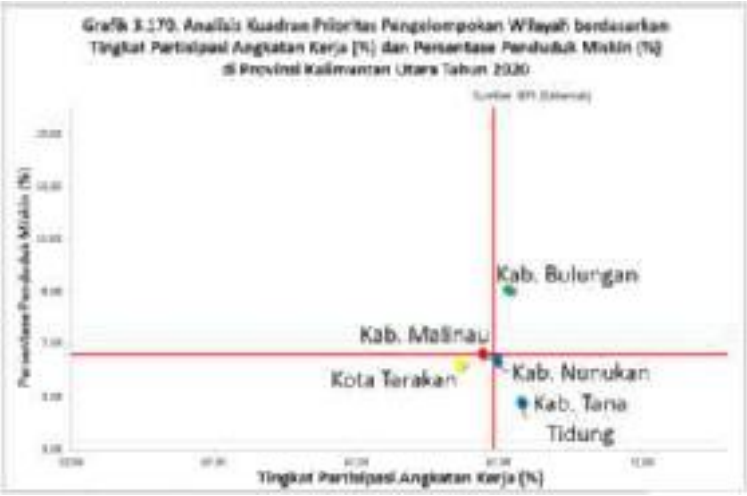


g. hasil analisis prioritas intervensi

Dari grafik 3.169 menjelaskan hasil analisis prioritas intervensi tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran, yaitu pada indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020, karena ketiga indikator ini juga naik, maka perlu diintervensi ditahun 2021 untuk diturunkan.



h. hasil analisis kuadran prioritas



Grafik 3.170 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (%) terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka intervensi prioritas pertama yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua di Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

i. hasil analisis kuadran Importance Performance Analysis (IPA)

Tabel 3.18 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat partisipasi angkatan kerja (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.171 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (%) terhadap garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka intervensi prioritas kedua yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.18 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat partisipasi angkatan kerja (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan

Sumber: hasil analisis, 2021.



Grafik 3.172 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (%) terhadap jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka intervensi prioritas pertama yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat di Kota Tarakan, prioritas dua di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.19 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat partisipasi angkatan kerja (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.173 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (%) terhadap indeks kedalaman kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka intervensi prioritas pertama yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua di Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.20 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat partisipasi angkatan kerja (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021.



Grafik 3.173 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (%) terhadap indeks keparahan kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka intervensi prioritas pertama yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua di Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.21 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat partisipasi angkatan kerja (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021.

3.1.2.4. Hasil analisis indikator tingkat pengangguran terbuka (%)

a. hasil analisis posisi relatif

Hasil analisis posisi relatif tingkat pengangguran terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebesar 4,97% lebih rendah dibanding nasional yang nilainya 5,28% berarti baik, sedangkan Kabupaten Nunukan 3,91%, dan Kabupaten Malinau 4,13% berada dibawah provinsi berarti baik, dan Kabupaten Bulungan 4,57%, Kabupaten Tana Tidung 4.59% dan Kota Tarakan 4,78% berada diatas provinsi



berarti buruk. Adapun target tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sesuai RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 adalah sebesar 4,44% sedangkan target tahun 2021 sebesar 4,26%, maka capaian provinsi tahun 2020 sebesar 4,97% dibanding target tahun 2020 tidak tercapai karena realisasi tahun 2020 lebih besar dibanding target tahun 2020. Untuk itu, di tahun 2021 indikator ini perlu diintervensi sehingga bisa tercapai dan atau target di tahun 2021 perlu dikaji ulang yang menyesuaikan hasil analisis dari realisasi indikator ini serta menyiapkan program/kegiatan yang dapat memperbaiki indikator ini (grafik 3.175).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu

Hasil analisis perkembangan antar waktu tingkat pengangguran terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 grafiknya fluktuatif dan realisasi ditahun 2021 (Februari) turun sebesar 0,30% dibanding realisasi tahun 2019 (Agustus) (grafik 3.176).



c. hasil analisis efektivitas

Efektivitas tingkat pengangguran terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 khususnya tahun 2021 (Februari) terjadi, terlihat bahwa turunnya indikator ini berada tepat/identik dengan turunnya garis linear provinsi dengan



persamaan y=-0,1495x+5,7964 (grafik 3.177).

d. hasil analisis relevansi



Relevansi tingkat pengangguran terbuka (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 (Agustus) - 2021 (Februari) khususnya realisasi tahun 2021 terjadi, karena provinsi turun sebesar 0,48% dibanding tahun 2019 dan berada dibawah turunnya garis linear provinsi tahun 2020, begitu juga nasional realisasi pada tahun 2020 naik sebesar 1,84% dibanding tahun 2019 dan berada jauh diatas naiknya garis linear nasional pada tahun 2020 (grafik 3.178).

Dengan turunnya indikator tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan sebesar 0,30% Utara tahun 2021 (Februari) dibanding tahun 2020 (Agustus) ternyata tingkat pengangguran terbuka nasional tahun 2021 (Februari) juga turun sebesar 0,81%. Ini menunjukan ada relevansinya. Dan juga terlihat masing-masing turunnya baik provinsi maupun nasional berada dibawah garis liniernya masing-masing pada tahun 2020.

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

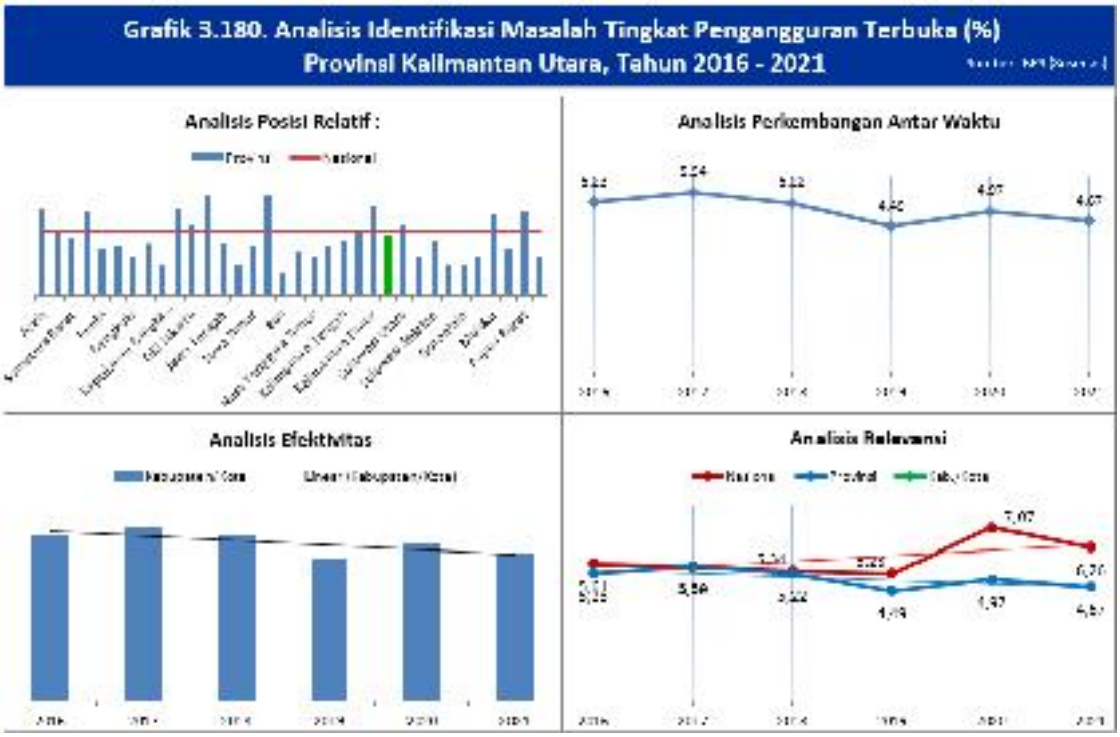


Grafik 3.179 relevansi antara tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap persentase penduduk miskin (%) sama-sama naik dibanding tahun 2019. Ini mengindikasikan bahwa dengan naiknya tingkat pengangguran terbuka biasanya diikuti oleh naiknya persentase penduduk miskin. Untuk itu, di tahun 2021 (Februari) tingkat pengangguran terbuka turun dan

diharapkan persentase penduduk miskin 2021 (Maret) juga turun, yang sampai saat ini datanya belum dirilis oleh BPS.

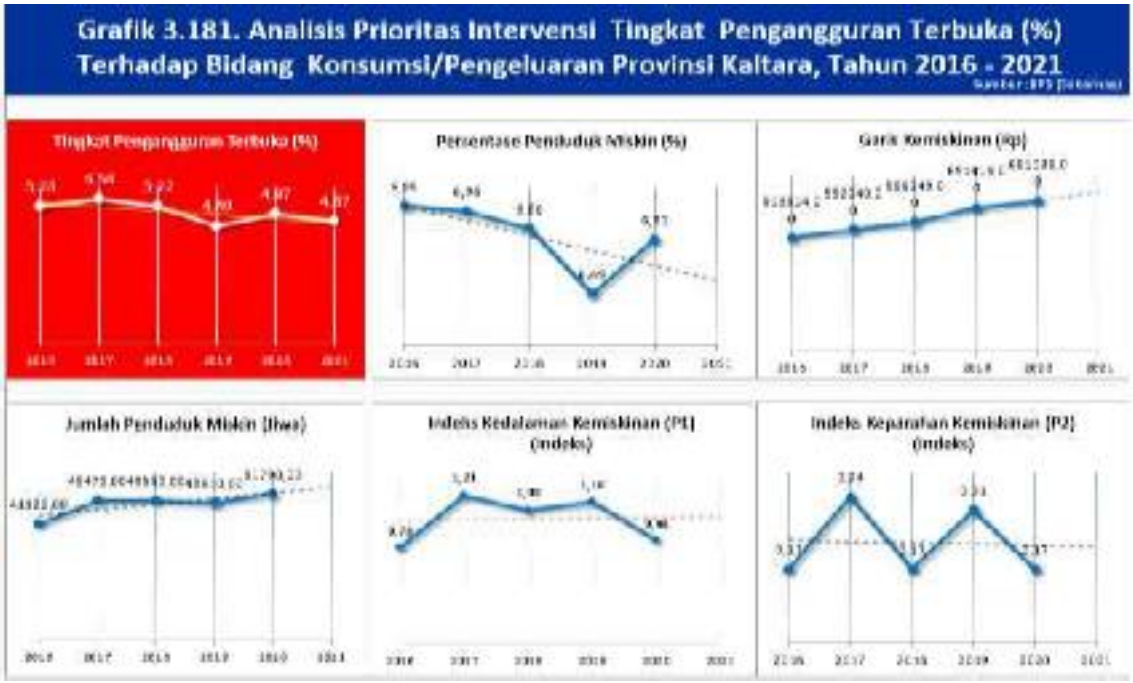
e. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.180 menunjukkan bahwa realisasi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 (Agustus) berada di bawah nasional sebagaimana disajikan pada analisis posisi relatif yang berarti baik/tidak masalah, juga terlihat pada tahun 2021 (Februari) yang turun sebesar 0,30% dibanding tahun 2019 sebagaimana disajikan pada hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi. Dengan kata lain, indikator ini tidak ada masalah dikaitkan dengan 4 (empat) hasil analisis tersebut.



f. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.181 menjelaskan hasil analisis prioritas tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 (Agustus) dihubungkan terhadap bidang konsumsi/pengeluaran terlihat bahwa dengan naiknya TPT juga diiikuti naiknya persentase penduduk miskin (%), garis kemiskinan (Rp), dan jumlah penduduk miskin (jiwa) pada tahun 2020 (September). Ketiga indikator ini perlu diintervensi di tahun 2021 agar penanggulangan kemiskinan dapat tertangani dengan baik.



g. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadan IPA

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (%) dan persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.182).



Tabel 3.22 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat pengangguran terbuka (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (%) dan persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.183).



Tabel 3.23 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat pengangguran terbuka (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (%) dan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.184).



Tabel 3.24 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat pengangguran terbuka (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Malinau

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (%) dan indeks kedalaman kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.185).



Tabel 3.25 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat pengangguran terbuka (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat pengangguran terbuka (%) dan indeks keparahan kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.186).



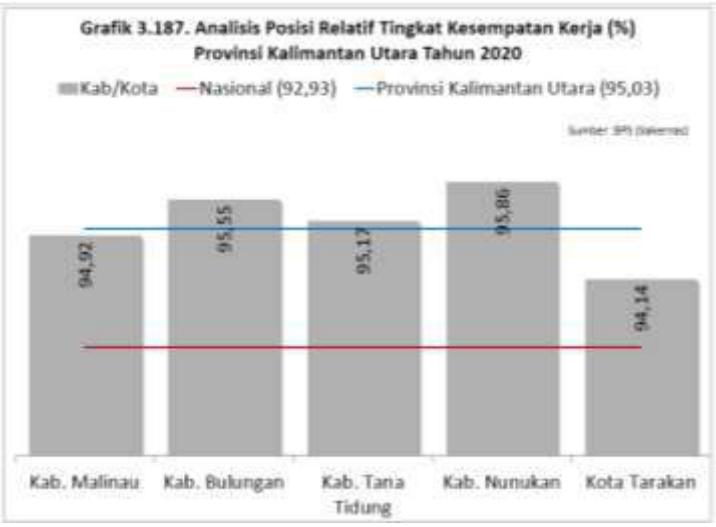
Tabel 3.26 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat pengangguran terbuka (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Malinau
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

3.1.2.5. Hasil analisis indikator tingkat kesempatan kerja (%)

a. hasil analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif tingkat kesempatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 lebih besar dibanding nasional yaitu 95,03% banding 92,93% berarti baik. Begitu juga capaian di Kabupaten Nunukan sebesar 95,86%, Kabupaten Bulungan sebesar 95,55%, dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 95,17% lebih tinggi dibanding provinsi berarti baik, sedangkan di Kabupaten Malinau sebesar 94,92%, dan di Kota Tarakan sebesar 94,14% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.187).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis antar waktu tingkat kesempatan kerja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya fluktuatif, tetapi untuk realisasi tahun 2020 trennya memburuk karena turun sebesar -0,57% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 95,03% (grafik 3.188).

c. hasil analisis efektivitas



Hasil analisis efektivitas tingkat kesempatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya untuk realisasi tahun 2020 tidak terjadi, karena turun sebesar -0,57% dibanding tahun 2019 dan turunnya berada dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y=-0,1664x+94,429 (grafik 3.189).

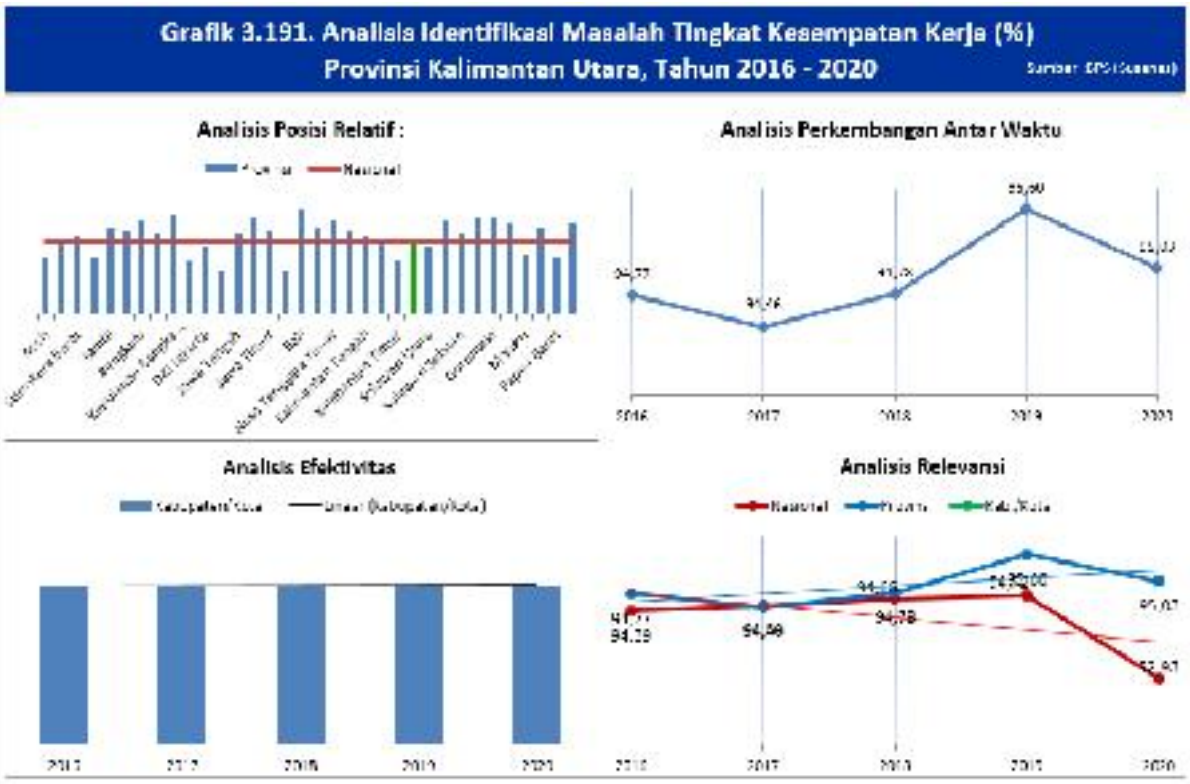
d. hasil analisis relevansi



Hasil analisis relevansi tingkat kesempatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terhadap nasional terjadi, karena masing-masing turun, dan untuk provinsi turun sebesar -0,57% yang berada dibawah naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional turun sebesar -1,79% yang berada dibawah naiknya garis linier nasional dibanding tahun 2019 (grafik 3.190).

e. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.191 menunjukkan bahwa tingkat kesempatan kerja Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 turun sebesar -0,57% dibanding tahun 2019 teridentifikasi masalahnya sebagaimana hasil pada analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas dan analisis relevansi, karena ketiga analisis ini berada dibawah naiknya garis linier provinsi tahun 2020. Oleh sebab itu, pada tahun 2021 hasil analisis ini dijadikan acuan untuk dapat diperbaiki.



f. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat kesempatan kerja (%) dan persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.192).



Tabel 3.27 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat kesempatan kerja (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat kesempatan kerja (%) dan garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.193).



Tabel 3.28 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat kesempatan kerja (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Bulungan, Kabpaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat kesempatan kerja (%) dan jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.194).



Tabel 3.29 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat kesempatan kerja (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat kesempatan kerja (%) dan indeks kedalaman kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.195).



Tabel 3.30 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat kesempatan kerja (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah menunjukkan hubungan antara tingkat kesempatan kerja (%) dan indeks keparahan kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung (grafik 3.196).



Tabel 3.31 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat kesempatan kerja (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

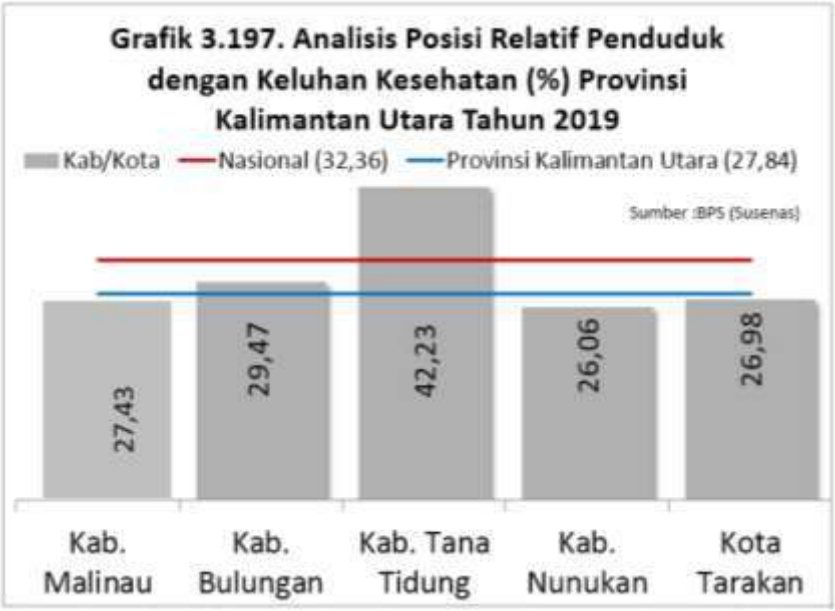
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

3.1.3. Indikator Bidang Kesehatan

1. hasil analisis indikator penduduk dengan keluhan kesehatan (%)

Hasil analisis posisi relatif penduduk dengan keluhan kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 27.84% berada dibawah nasional 32,36 berarti baik. Kabupaten Nunukan 26,06%, Kabupaten Malinau 27,43%, dan Kota Tarakan 26.98% berada dibawah provinsi berarti baik, sedangkan di Kabupaten Tana Tidung 42,23% dan Kabupaten Bulungan 29,47% berada diatas provinsi berarti buruk (grafik 3.197).



Hasil analisis antar waktu penduduk dengan keluhan kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 grafiknya fluktuatif tetapi dilihat realisasi tahun 2019 trennya membaik karena turun sebesar 3,25% dibanding tahun 2018 sehingga menjadi 27,84% (grafik 3.198).



Hasil analisis efektivitas penduduk dengan keluhan kesehatan (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 terjadi khususnya realisasi tahun 2019 karena turun sebesar 3,25%

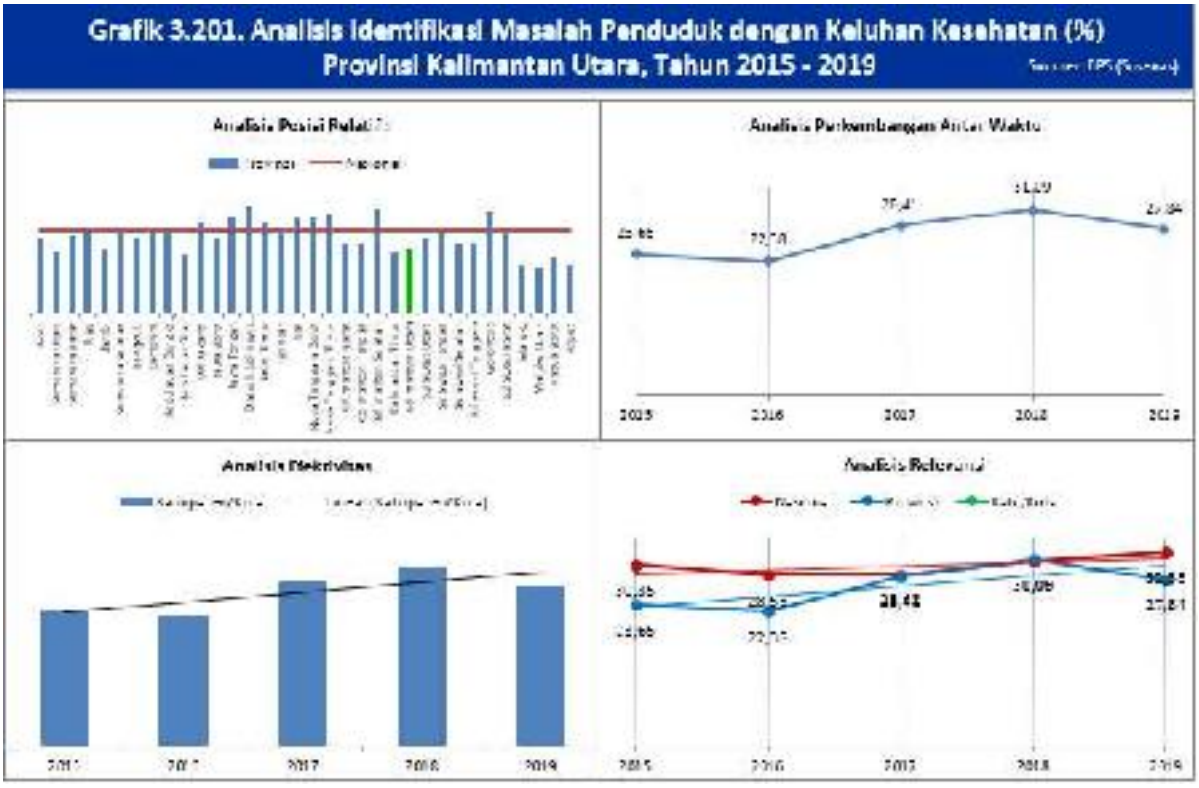


dibanding tahun 2018 dan turunnya berada jauh dibawah naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y=-1,7087x+21,549 (grafik 3.199).

Hasil analisis relevansi tingkat kesempatan kerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 tidak terjadi, karena provinsi turun sebesar 3,25% dibanding tahun 2018 dan turunnya berada dibawah naiknya garis linear provinsi, sedangkan nasional naik sebesar 1,40% dibanding tahun 2018 dan berada diatas naiknya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.200).



Grafik 3.201 menunjukkan bahwa pada analisis relevansi saja yang bermasalah karena tahun 2019 provinsi turun dan nasional naik terkait identifikasi masalah penduduk dengan keluhan kesehatan, sedangkan hasil analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu dan analisis efektifitas tidak bermasalah.



Grafik 3.202 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan keluhan kesehatan terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kabupaten Malinau.



Tabel 3.32 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan keluhan kesehatan (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.203 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan keluhan kesehatan terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas dua yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga di Kabupaten Kabupaten Malinau.



Tabel 3.33 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan keluhan kesehatan (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.204 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan keluhan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kabupaten Kabupaten Malinau.



Tabel 3.34 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan keluhan kesehatan (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.205 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan keluhan kesehatan terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kabupaten Kabupaten Malinau.



Tabel 3.35 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan keluhan kesehatan (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.206 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan keluhan kesehatan terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kabupaten Kabupaten Malinau.



Tabel 3.36 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan keluhan kesehatan (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

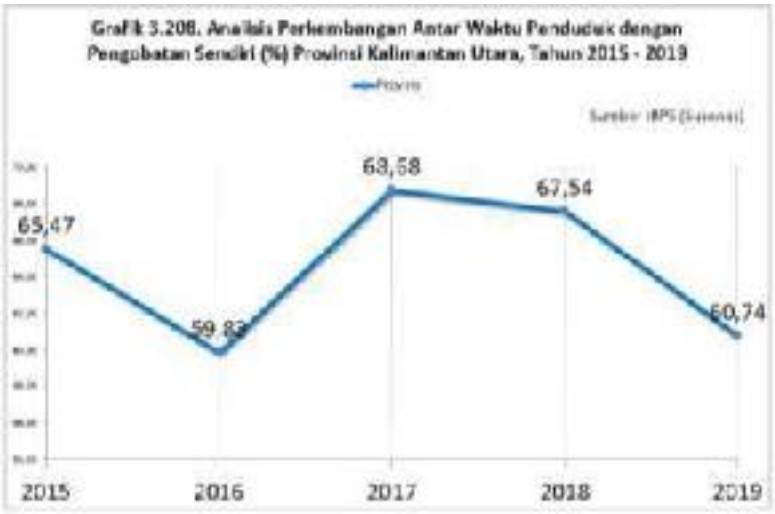
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

2. Hasil analisis indikator penduduk dengan pengobatan sendiri (%)

Hasil analisis posisi relatif penduduk dengan pengobatan sendiri Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 60,74% berada diatas nasional 62,74% berarti baik. Kabupaten Tana Tidung 36,77%, Kabupaten Malinau 45,46% berada dibawah provinsi berarti baik, sedangkan di Kabupaten Nunukan 68,80%, Kota Tarakan 64,82$ dan Kabupaten Bulungan 60,76% berada diatas provinsi berarti buruk (grafik 3.207).





Hasil analisis antar waktu penduduk dengan pengobatan sendiri Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 grafiknya fluktuatif tetapi dilihat realisasi tahun 2019 trennya membaik karena turun sebesar 6,80% dibanding tahun 2018 sehingga menjadi 60,74% (grafik 3.208).

Hasil analisis efektivitas penduduk dengan pengobatan sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 terjadi, karena turun sebesar 6,80% dibanding tahun 2018 dan turunnya berada jauh

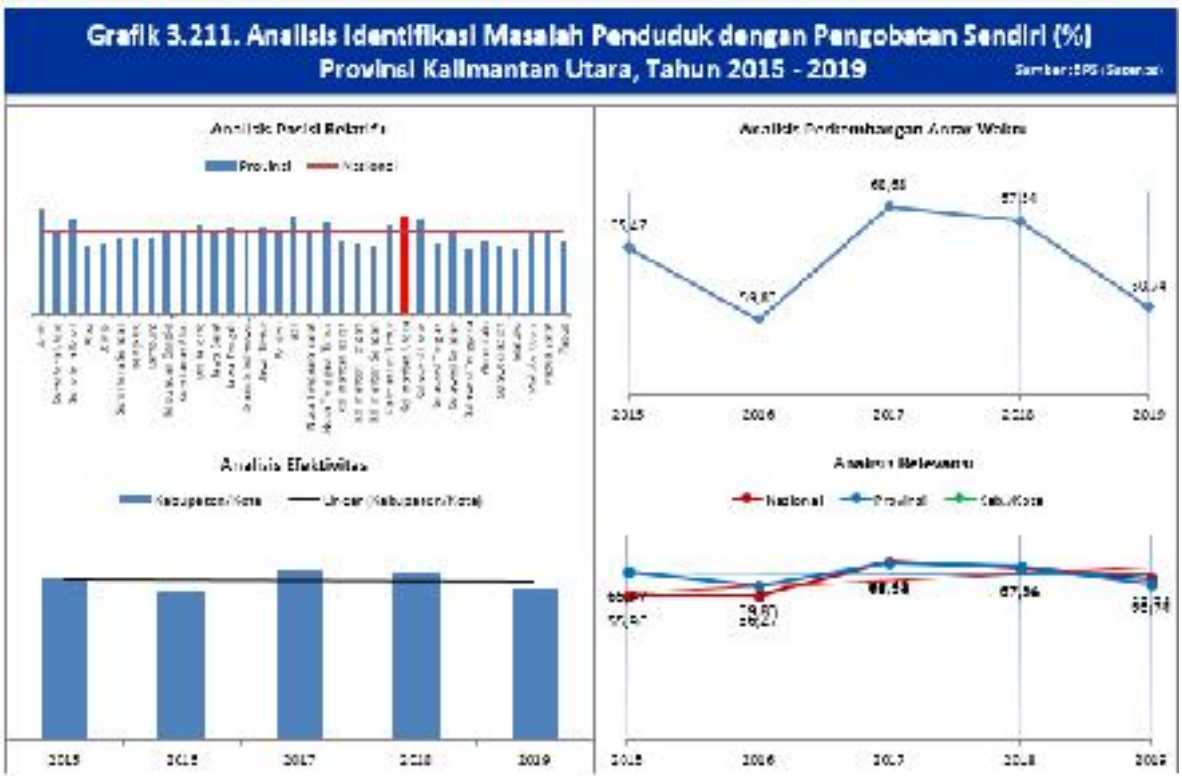


dibawah turunnya garis linear provinsi dengan persamaan y=-0,1761x+64,983 (grafik 3.209).



Hasil analisis relevansi penduduk dengan pengobatan sendiri (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 terjadi, karena provinsi turun sebesar 6,80% dibanding tahun 2018 dan turunnya berada dibawah turunnya garis linear provinsi, begitu juga nasional turun sebesar 4,30% dibanding tahun 2018 dan berada dibawah turunnya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.210).

Grafik 3.211 menunjukkan bahwa identifikasi masalah penduduk dengan pengobatan sendiri Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 tidak ada karena hasil analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi menunjukkan perbaikan.



Grafik 3.212 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan pengobatan sendiri terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau.



Tabel 3.37 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan pengobatan sendiri (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.213 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan pengobatan sendiri terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di

Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas tiga di Kabupaten Malinau, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.38 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan pengobatan sendiri (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau,
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.214 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan pengobatan sendiri terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

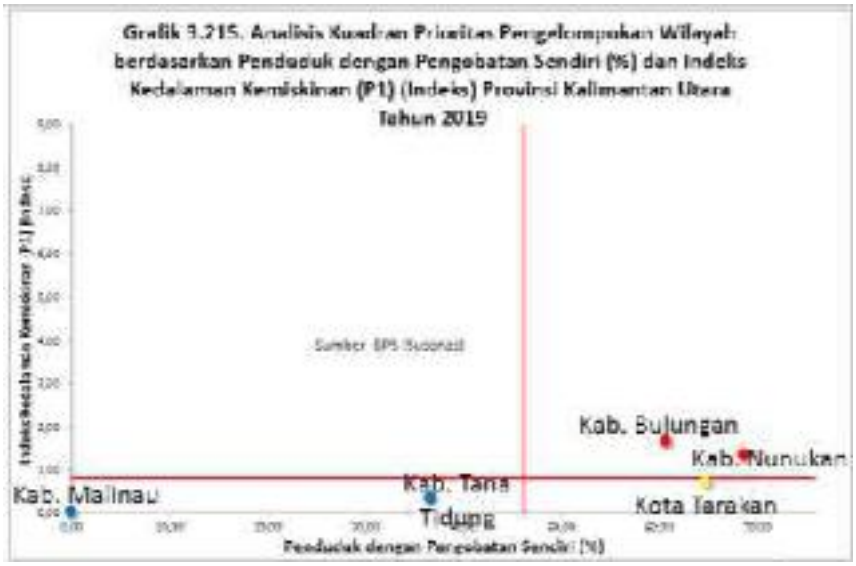


Tabel 3.39 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan pengobatan sendiri (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.215 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan pengobatan sendiri terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kota Tarakan, prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

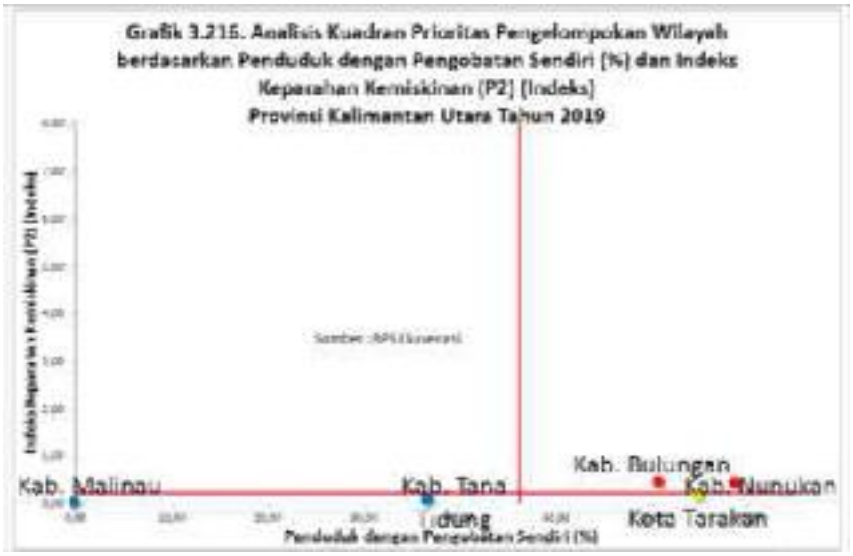


Tabel 3.40 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan pengobatan sendiri (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.216 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara penduduk dengan pengobatan sendiri terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kota Tarakan, prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.41 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara penduduk dengan pengobatan sendiri (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

3. Hasil analisis indikator kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%)



Hasil analisis posisi relatif kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 97,48% berada diatas nasional 94,72% berarti baik. Kota Tarakan sebesar 99,13% berada diatas provinsi berarti baik. Kabupaten Nunukan 97,13%, Kabupaten Bulungan 96,96%, Kabupaten Malinau 95,51% dan Kabupaten Tana Tidung 93,98% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.217).



Hasil analisis antar waktu kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 grafiknya fluktuatif tetapi dilihat realisasi tahun 2019 trennya membaik karena naik sebesar 1,50% dibanding tahun 2018 sehingga menjadi 97,48% (grafik 3.218).

Hasil analisis efektivitas kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 terjadi, karena naik sebesar 1,50% dibanding tahun 2018 dan naiknya berada tepat naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y = 0,8224x + 92,621 (grafik 3.219).

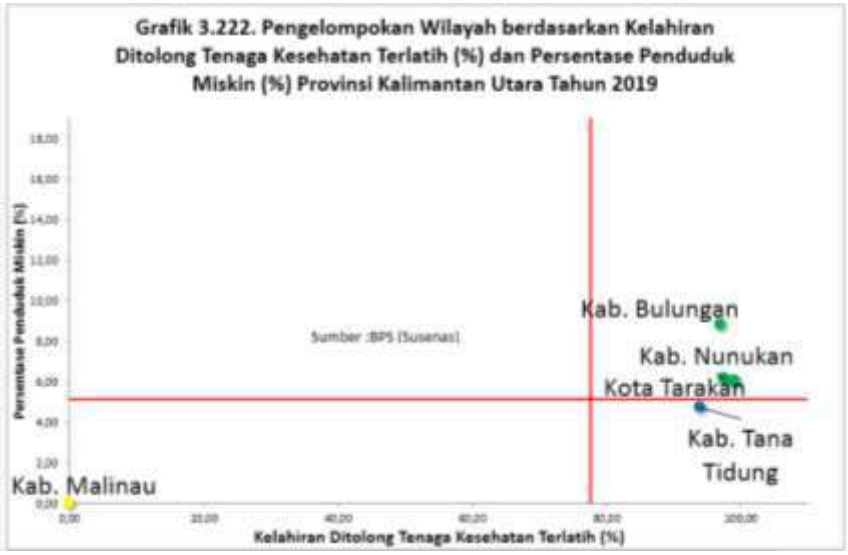




Hasil analisis relevansi kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 terjadi, karena provinsi naik sebesar 1,50% dibanding tahun 2018 dan naiknya tepat berada naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional naik sebesar 1,10% dibanding tahun 2018 dan berada diatas naiknya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.220).

Grafik 3.221 menunjukkan bahwa identifikasi masalah kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 tidak ada karena hasil analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi menunjukkan perbaikan.





Grafik 3.222 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang dintervensi terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.42 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.223 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas keempat terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.43 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.224 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.44 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.225 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

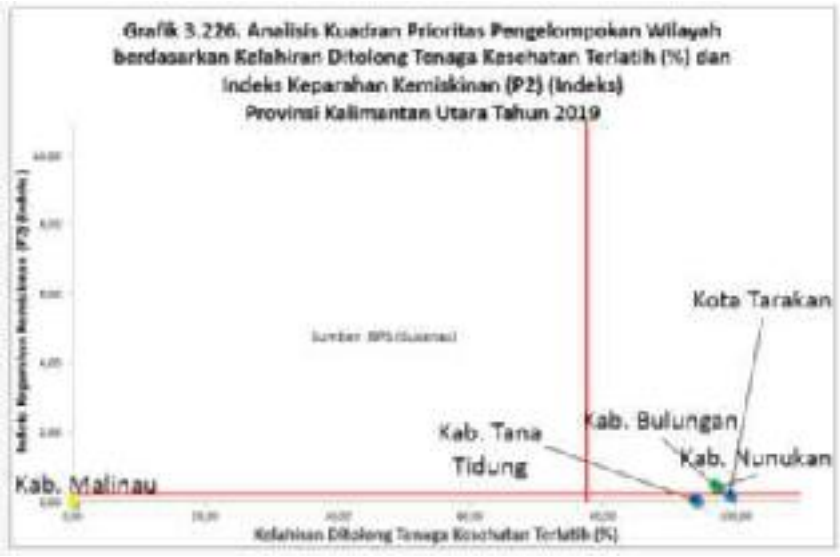


Tabel 3.45 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

Grafik 3.225 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang dintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.46 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara kelahiran ditolong tenaga kesehatan terlatih (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021.

4. Hasil analisis indikator angka morbilitas (%)

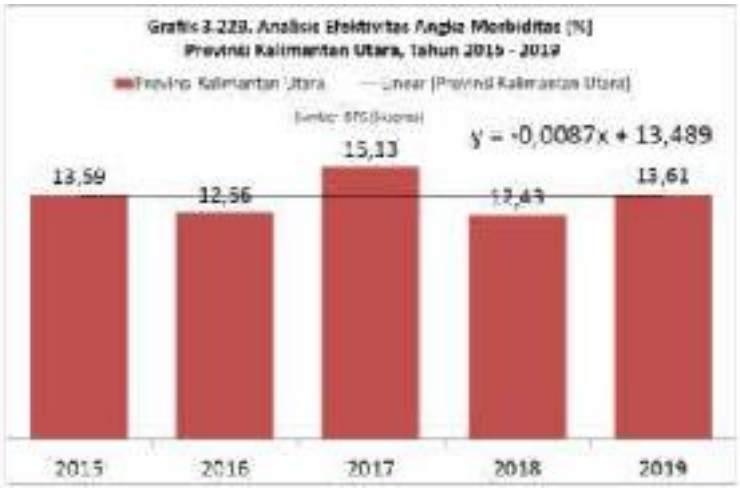


Hasil analisis posisi relatif angka morbiditas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 13,61% berada dibawah nasional 15,38% berarti baik. Kota Tarakan sebesar 12,03%, Kabupaten Malinau 12,11% dan Kabupaten Nunukan 12,83% berada dibawah provinsi berarti baik. Kabupaten Bulungan 17,92%, Kabupaten Tana Tidung 17,58% berada diatas provinsi berarti buruk (grafik 3.227).



Hasil analisis antar waktu angka morbiditas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 grafiknya fluktuatif tetapi dilihat realisasi tahun 2019 trennya memburuk karena naik sebesar 1,18% dibanding tahun 2018 sehingga menjadi 13,61% (grafik 3.228).

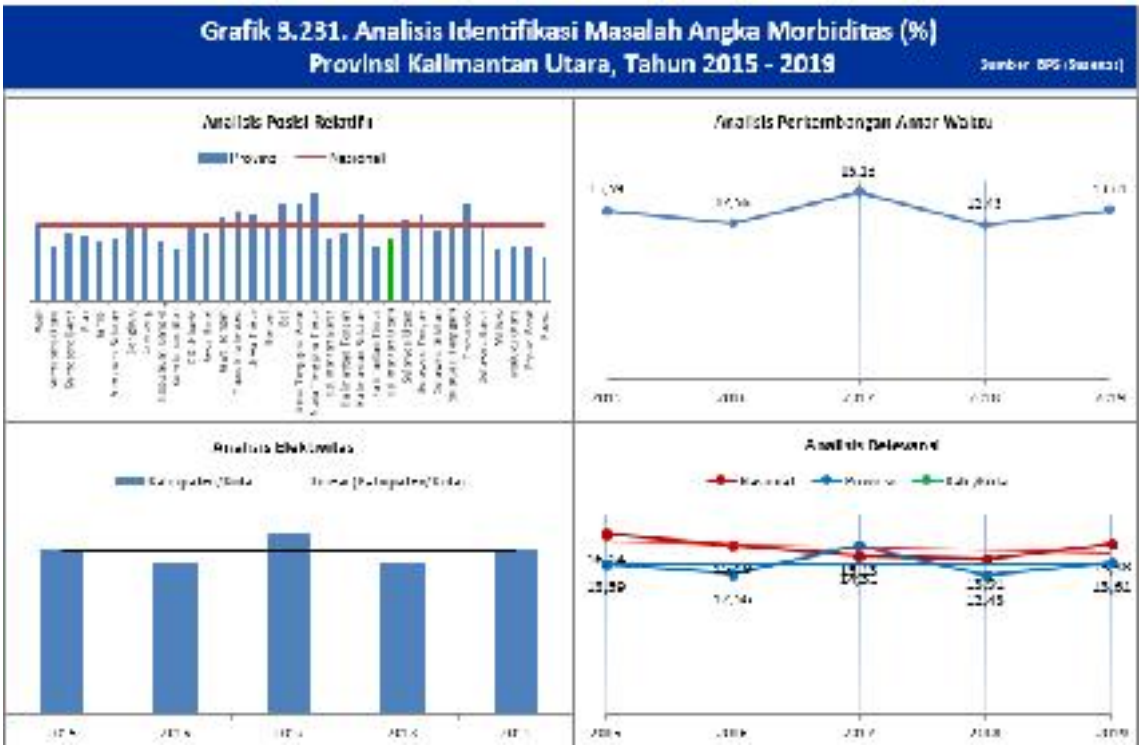
Hasil analisis efektivitas angka morbiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 terjadi, walaupun naik sebesar 1,18% dibanding tahun 2018 dan naiknya berada tepat turunnya garis linear provinsi dengan persamaan y = -0,0087x + 13,489 (grafik 3.229).





Hasil analisis relevansi angka mobiditas (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015-2019 khususnya realisasi tahun 2019 terjadi, karena provinsi naik sebesar 1,18% dibanding tahun 2018 dan naiknya tepat berada naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional naik sebesar 1,47% dibanding tahun 2018 dan berada diatas turunnya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.230).

Grafik 3.231 menunjukkan bahwa identifikasi masalah angka morbiditas Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 terjadi sebagaimana disajikan pada hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi, tetapi analisis posisi relatif tidak menjadi masalah.





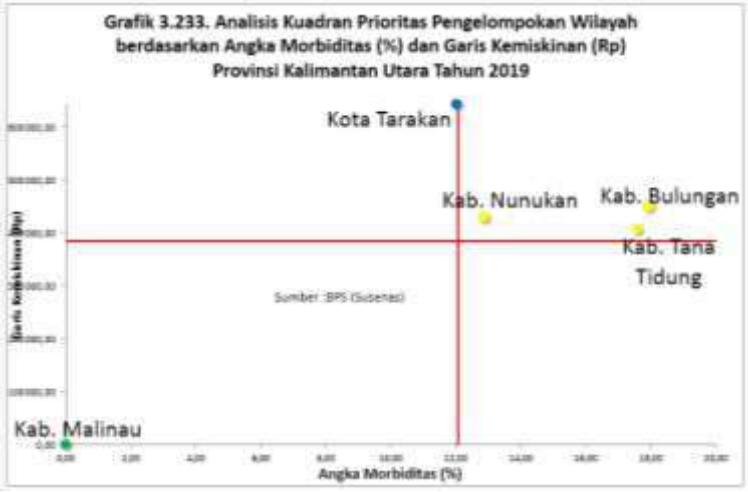
Grafik 3.232 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka morbiditas terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga di Kota Tarakan, prioritas empat di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.47 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka morbilitas (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.233 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka morbiditas terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang dintervensi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten di Kabupaten Malinau, prioritas empat di Kota Tarakan.



Tabel 3.48 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka morbilitas (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.234 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka morbiditas terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi terdapat di Kabupaten Bulungan,

Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kota Tarakan dan prioritas empat di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.49 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka morbilitas (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kota Tarakan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.235 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka morbiditas terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan.

Tabel 3.50 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka morbilitas (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh	Tidak ada

	pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau,Kota Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.236 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka morbiditas terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang dintervensi terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan.

Tabel 3.51 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka morbilitas (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan,
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau,Kota

		Tarakan
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

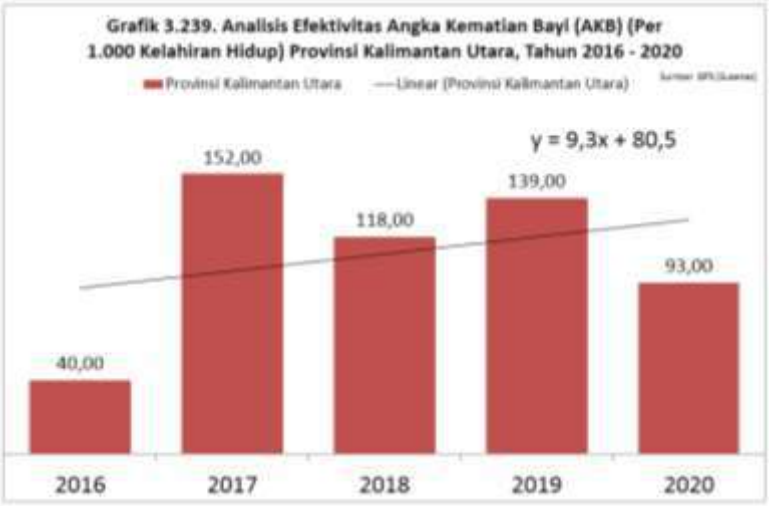
5. Hasil analisis indikator angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)



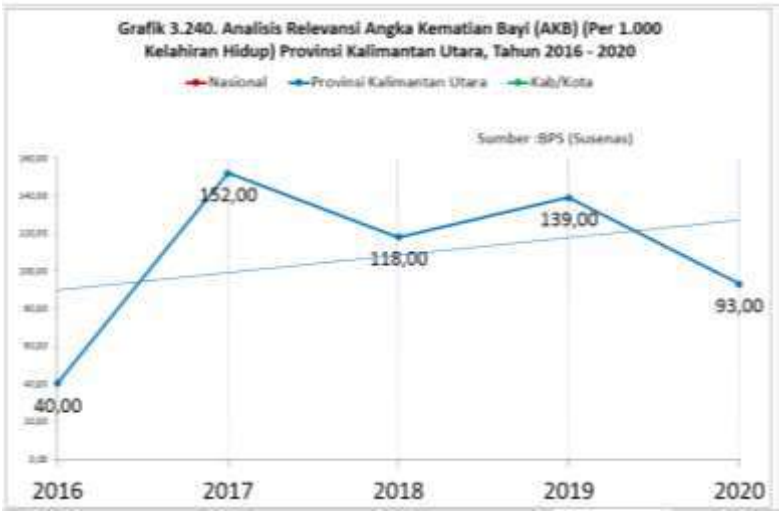
Hasil analisis posisi relatif angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) tahun 2020 tercatat bahwa di Kabupaten Nunukan sebanyak 36 kasus, di Kabupaten Bulungan 22 kasus, di Kota Tarakan 19 kasus, di Kabupaten Tana Tidung 3 kasus sedangkan di Kabupaten Malinau nol kasus (grafik 3.237).

Hasil analisis antar waktu angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya fluktuatif, dilihat realisasi tahun 2020 trennya terus membaik/turun sebesar 46 kasus AKB dibandingtahun 2019 sehingga menjadi 93 kasus (grafik 3.238).





Hasil analisis efektivitas angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi dan tercatat hanya 93 kasus AKB, serta turunnya jauh dibawah naiknya garis liniernya dengan persamaan y = 9,3x + 80,5 (grafik 3.239).

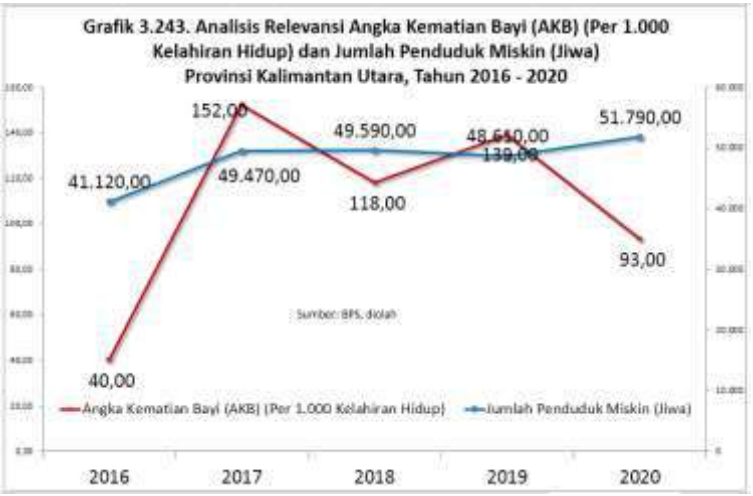


Hasil analisis relevansi angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, karena turun dibanding tahun 2019 dan berada jauh dibawah garis linier provinsi tahun 2020 (grafik 3.240).

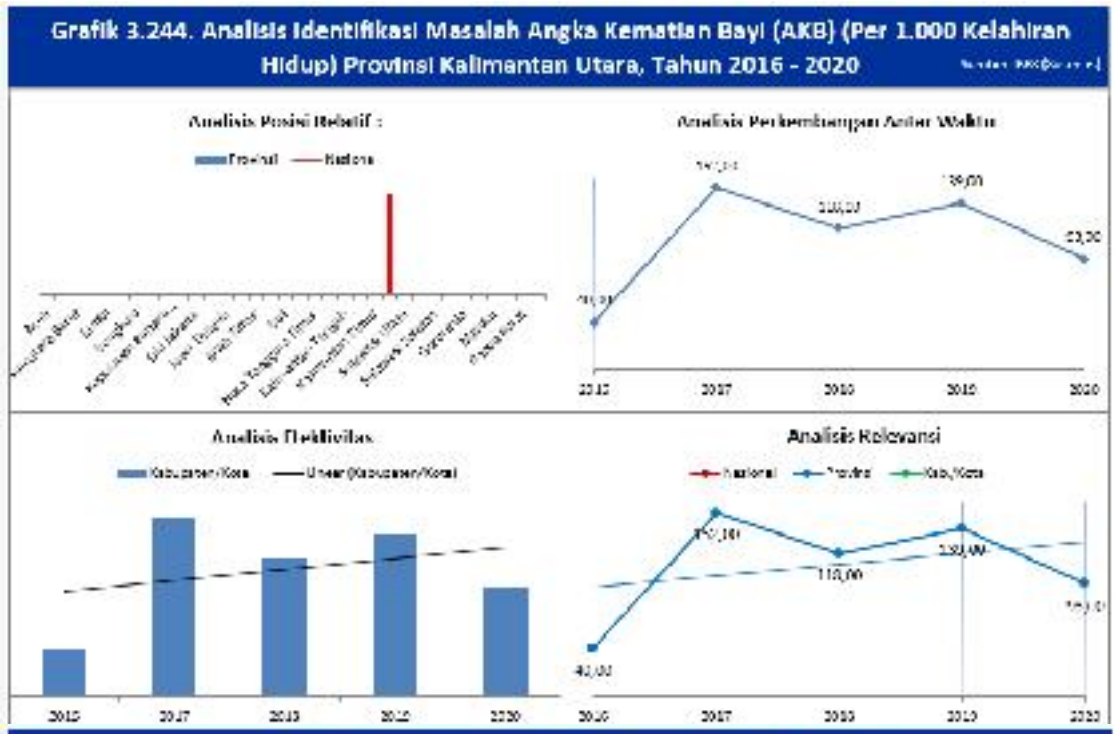


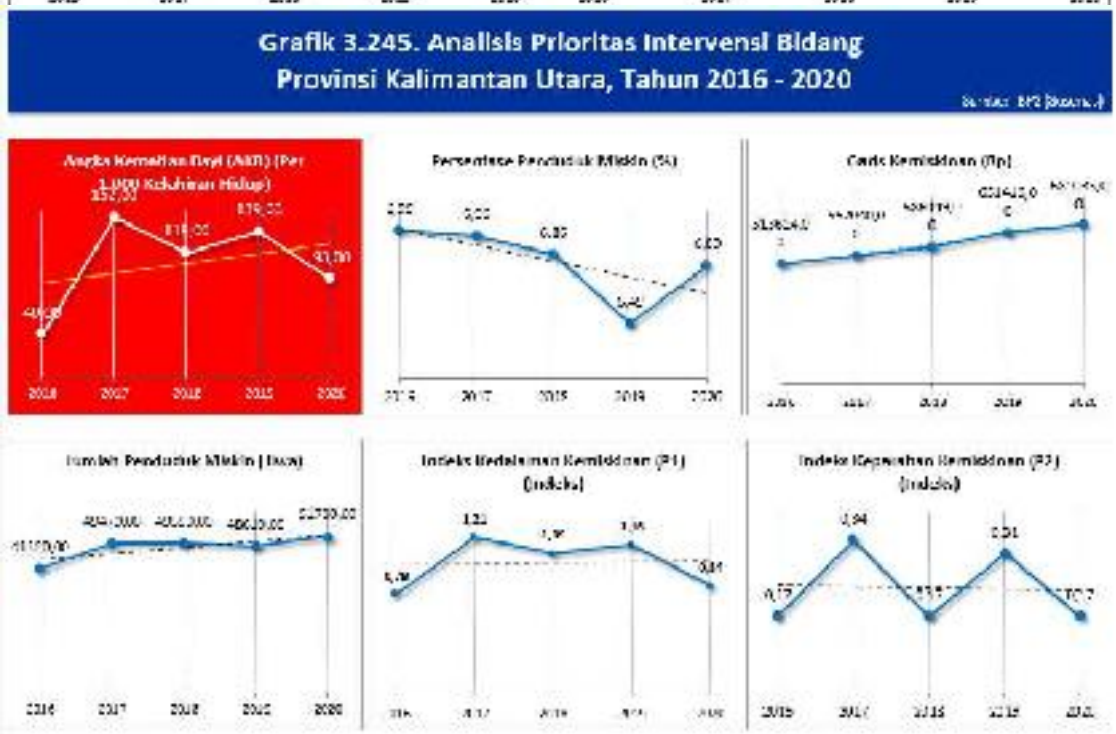
Hasil analisis relevansi angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terhadap persentase penduduk miskin (%) (grafik 3.241), garis kemiskinan (Rp) (grafik 3.242), dan jumlah penduduk miskin (jumlah) (grafik 3.243) tidak terjadi, karena angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) turun sedangkan persentase penduduk miskin (%), garis kemiskinan (Rp) dan jumlah penduduk miskin (jiwa) naik.





Grafik 3.244 menunjukkan bahwa identifikasi masalah angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya pada tahun 2020 tidak terjadi masalah, sebagaimana disajikan pada hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas, analisis relevansi, dan analisis posisi relatif grafiknya membaik. Dari grafik 3.245 menunjukkan analisis prioritas bidang angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya pada tahun 2020 yang perlu diintervensi adalah terhadap persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin karena ketiga indikator ini naik, sedangkan terhadap indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan justru turun/membaik seiring dengan membaiknya AKB di tahun 2020.





Grafik 3.246 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) terhadap persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Malinau, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.52 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian bayi (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.247 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) terhadap garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua di Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Tana Tidung, dan prioritas empat di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.53 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian bayi (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.248 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) terhadap jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.54 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian bayi (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan , Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.249 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) terhadap indeks kedalaman kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Kabupaten Bulungan, prioritas dua di

Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Tana Tidung, dan prioritas empat di Kabupaten Malinau.

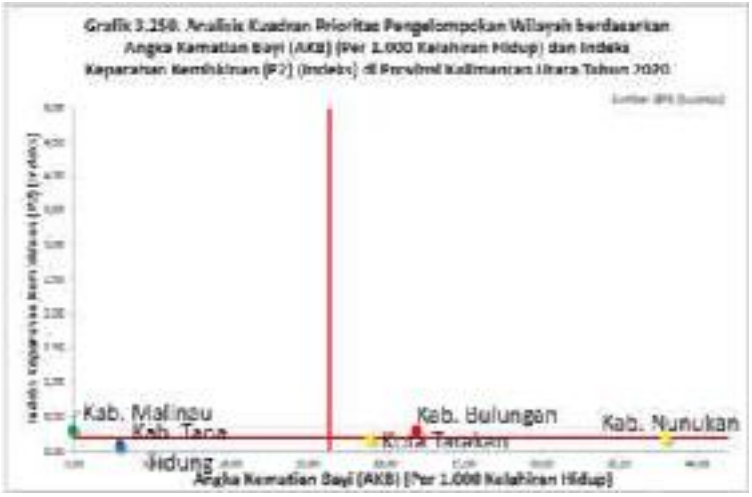


Tabel 3.55 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian bayi (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.250 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) terhadap indeks keparahan kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Kabupaten Bulungan, prioritas dua di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Malinau, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.56 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian bayi (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

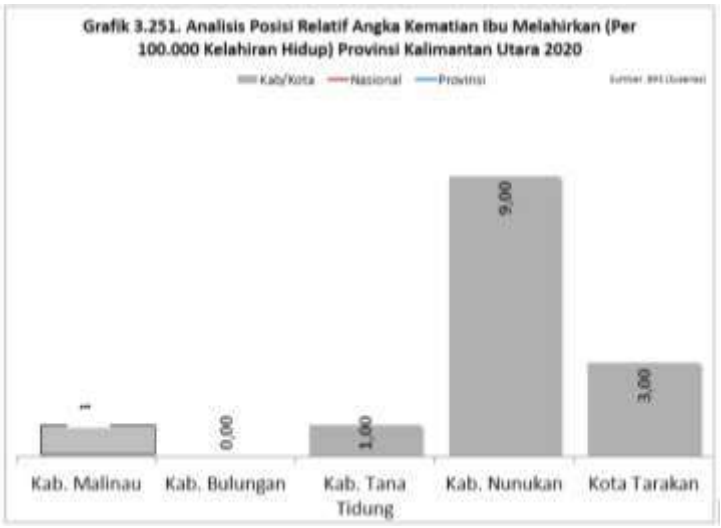
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

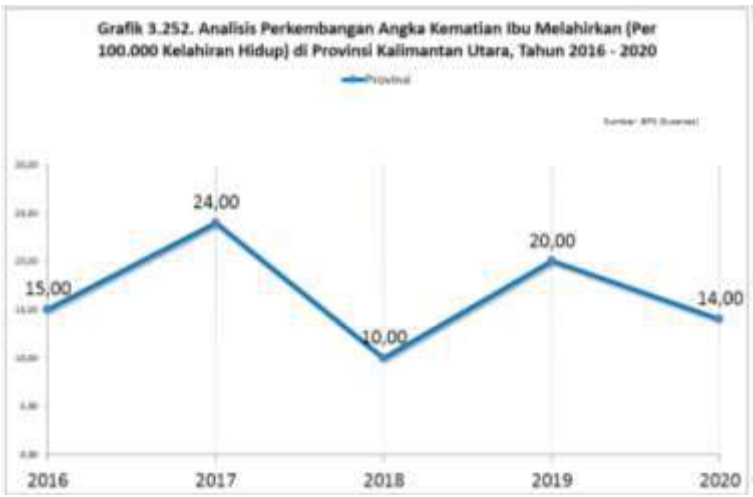
3.1.3.6. Hasil analisis indikator angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

a. hasil analisis posisi relatif

Dari grafik 3.251 menunjukkan bahwa hasil analisis posisi relatif angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tercatat sebanyak 14 kasus AKI, mencakup di Kabupaten Nunukan sebanyak 9 kasusm di Kota Tarakan 3 kasus, di Kabupaten Tana Tidung dan di Kabupaten Malinau masing-masing 1 kasus, sedangkan di Kabupaten Bulungan tidak ada kasus.



b. hasil analisis perkembangan antar waktu



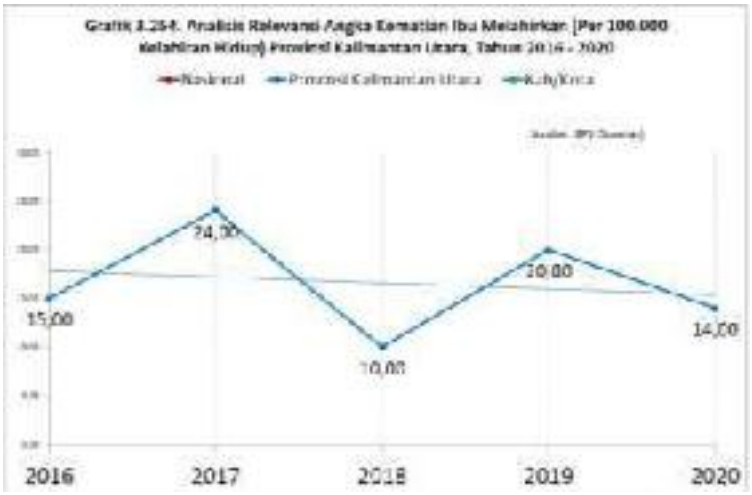
Dari grafik 3.252 hasil analisis perkembangan antar waktu angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 fluktuatif, tetapi untuk tahun 2020 turun/membaik sebanyak 6 kasus AKI dibanding tahun 2019.

c. hasil analisis efektivitas



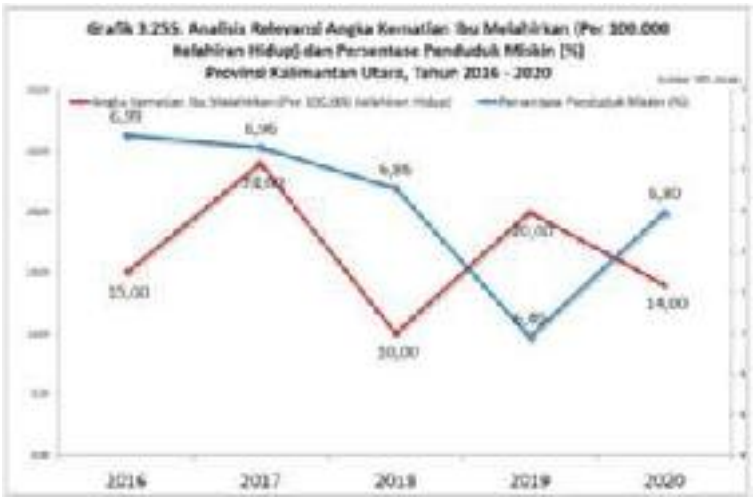
Grafik 3.253 hasil analisis efektivitas angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 terjadi, karena turunnya jauh dibawah tren turunnya garis linier provinsi, dengan persamaan y = -0,6x + 18,4.

d. hasil analisis relevansi



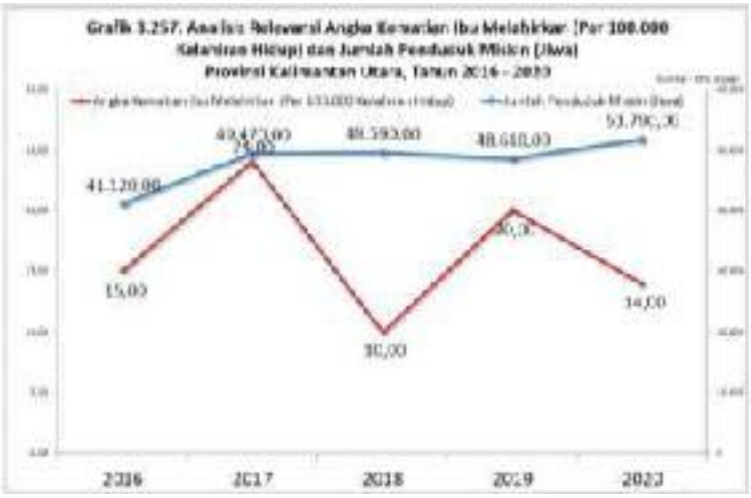
Grafik 3. 254 untuk hasil analisis relevansi angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 tidak dapat diinterprestasikan karena data AKI nasional sebagai data pembandingnya belum tersedia (masih proses pengumpulan data).

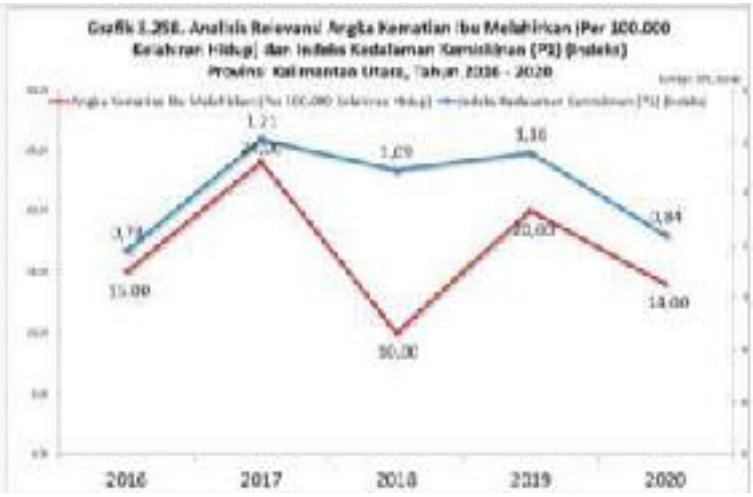
e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

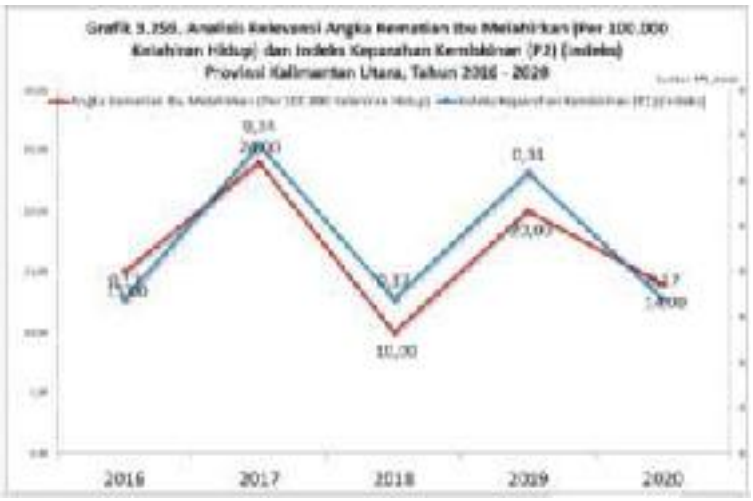


Hasil analisis relevansi antar indikator angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup) tahun 2016-2020 khususnya tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara trennya turun/membaik, sedangkan persentase penduduk miskin (%) (grafik 3.255), garis kemiskinan (Rp) (grafik 3.256), dan jumlah penduduk miskin (jiwa) (grafik 3.257) trennya naik/memburuk. Sementara jika dikaitkan dengan indikator indeks kedalaman kemiskinan (%) (grafik 3.258) dan indeks keparahan kemiskinan (%) (grafik 2.259) trennya turun/membaik.


513.614,00
560.048,00
652.416,00
681.035,00
15,00
24,00
10,00
20,00
14,00
2016
2017
2018
2019
2020

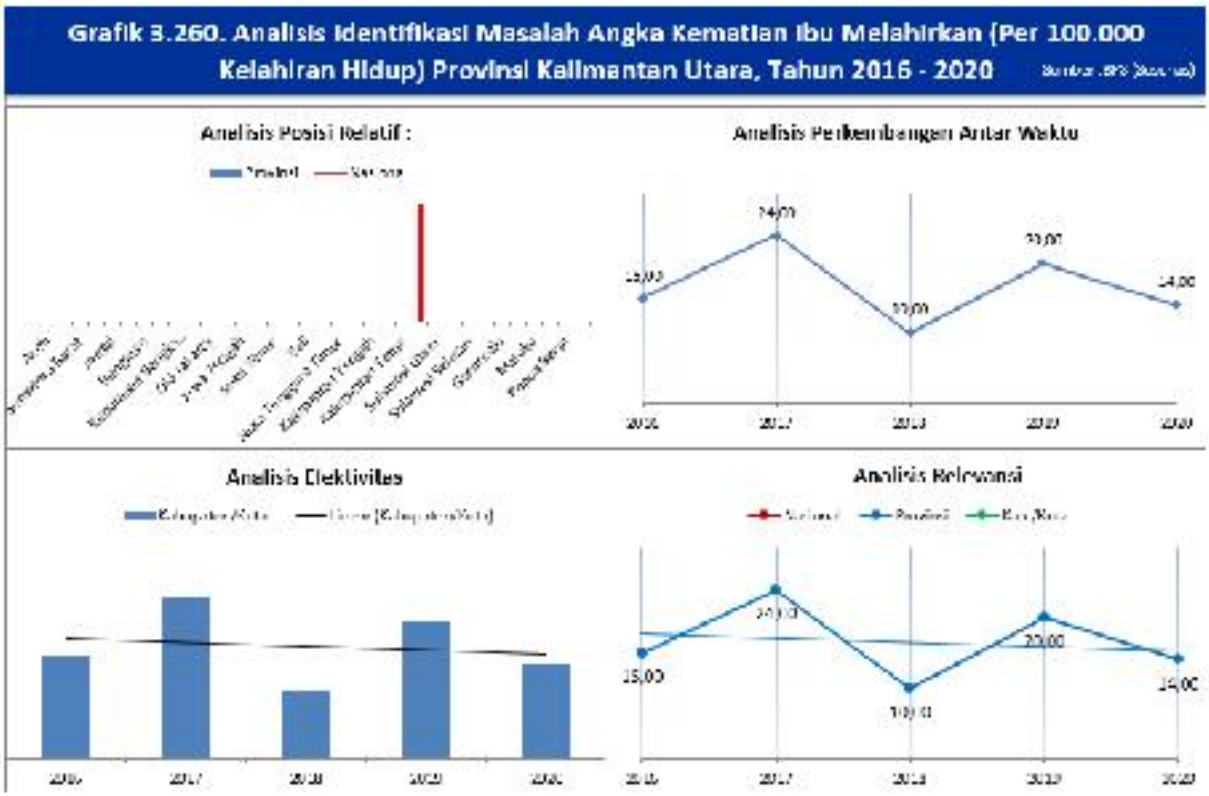

41.120,00
48.477,00
48.593,00
48.610,03
15,00
24,00
30,00
20,0
14,00
2016
2017
2018
2019
2020


3,74
4,21
4,09
4,16
3,84
15,00
24,00
30,00
20,03
14,00
2016
2017
2018
2019
2020



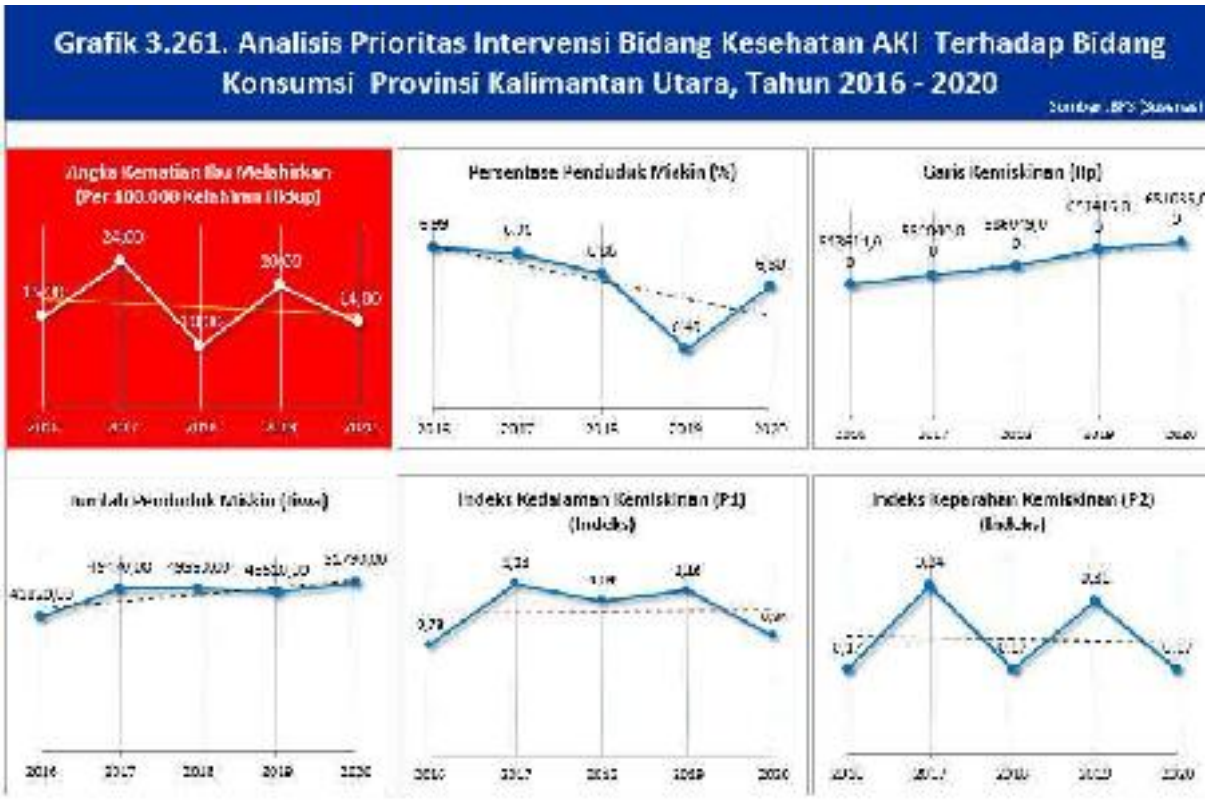
f. hasil analisis identifikasi masalah

Dari grafik 3.260 menunjukkan analisis identifikasi masalah angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa hasil analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas, tidak bermasalah karena trennya membaik/turun kecuali hasil analisis relevansi karena data nasional masih dalam proses (belum diinput/tersedia).



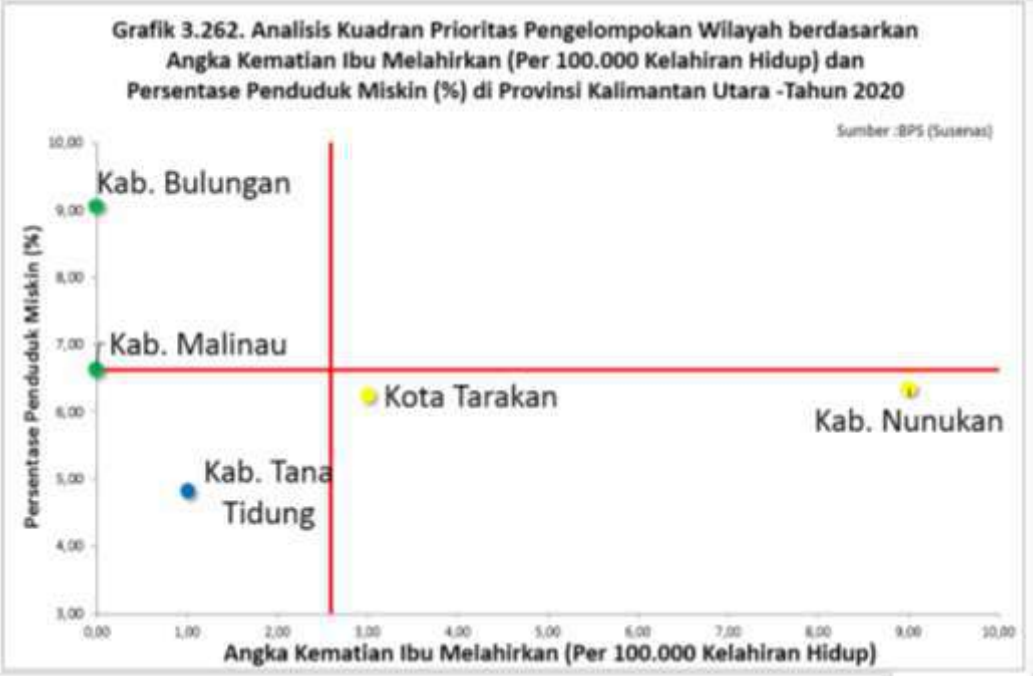
g. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.261 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya pada tahun 2020 terhadap bidang konsumsi yaitu persentase penduduk miskin (%), garis kemiskinan (Rp), jumlah penduduk miskin (jiwa) tidak berpengaruh karena AKI turun sementara tiga indikator bidang konsumsi naik, dan sebaliknya terhadap indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan berpengaruh karena terlihat menunjukkan perbaikan/sama-sama turun.



g. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Grafik 3.262 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) terhadap persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 tidak ada, prioritas dua terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.57 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian ibu melahirkan (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.263 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) terhadap garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Nunukan, prioritas dua di Kota Tarakan,

prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, dan prioritas empat di Kabupaten Malinau.



Tabel 3.58 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian ibu melahirkan (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.264 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) terhadap jumlah penduduk

miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas dua tidak ada, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

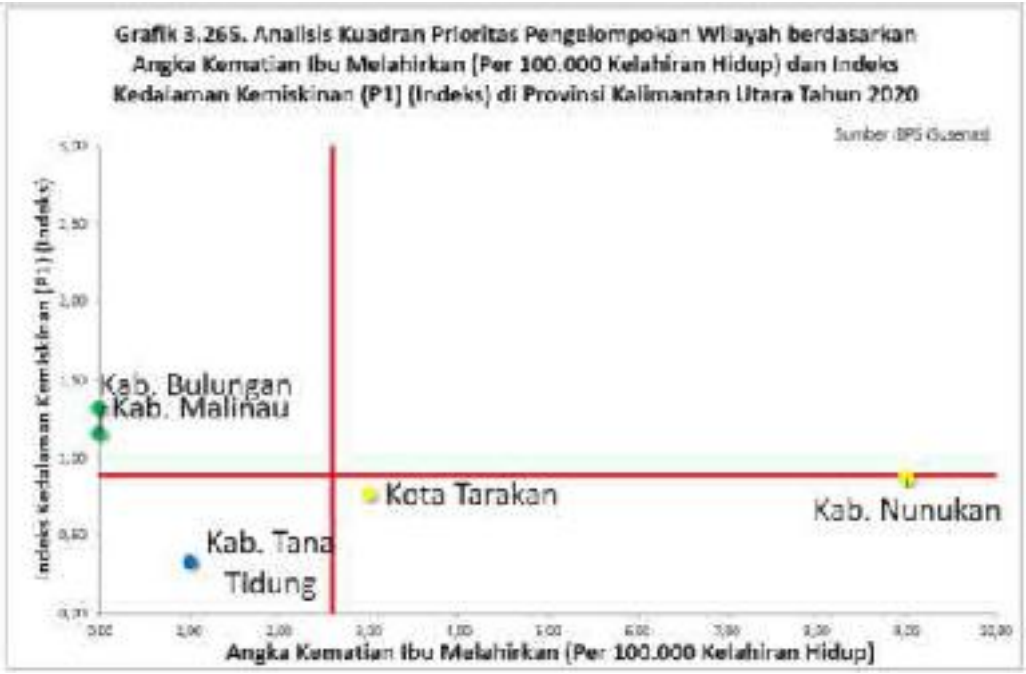


Tabel 3.59 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian ibu melahirkan (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.265 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) terhadap indeks kedalaman kemiskinan (indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 tidak ada, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.

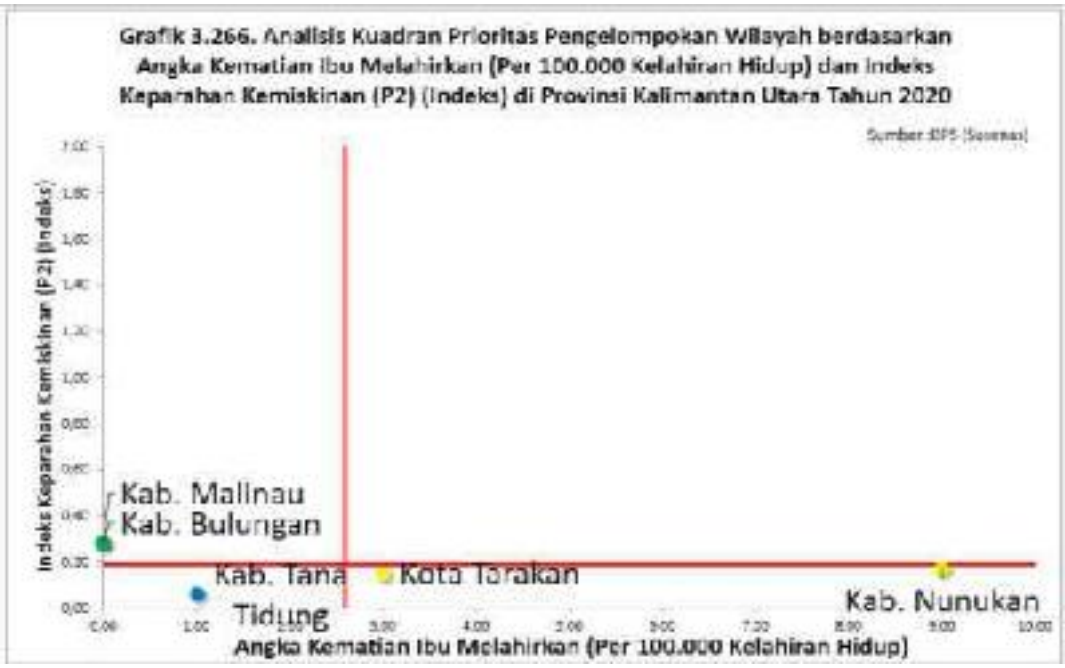


Tabel 3.60 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian ibu melahirkan (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.266 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas antara angka kematian ibu melahirkan (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup) terhadap indeks keparahan kemiskinan (indeks) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, maka prioritas pertama yang dintervensi pada tahun 2021 tidak ada, prioritas dua terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas tiga di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.61 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka kematian ibu melahirkan (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

3.1.4. Indikator Bidang Pendidikan

3.1.4.1. Hasil analisis indikator angka partispasi murni/APM SD/MI (%)

a. hasil analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SD/MI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 93,15% berada dibawah nasional 97,64% berarti buruk. Kota Tarakan sebesar 97,26% berada diatas provinsi berarti baik. Kabupaten Malinau 93,33%, Kabupaten Bulungan 90.81%, Kabupaten Nunukan 90,90%, Kabupaten Tana Tidung 86,32% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.267).

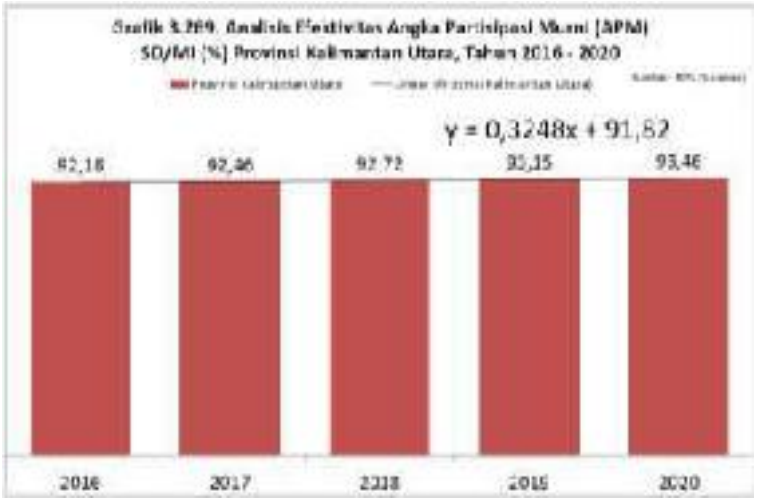
b. hasil analisis perkembangan antar waktu



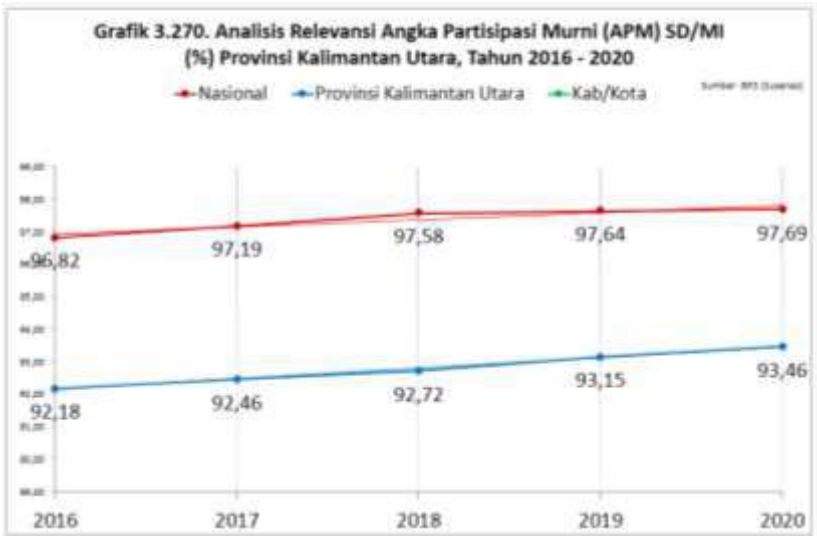
Hasil analisis antar waktu angka partisipasi murni (APM) SD/MI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya terus naik, khusus tahun 2020 naik sebesar 0,31% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 93,46% (grafik 3.268).

c. hasil analisis efektivitas

Hasil analisis efektivitas angka partisipasi murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafinya terus naik, khususnya realisasi tahun 2020 terjadi dan tetap berada digaris linier provinsi tahun 2020, dengan persamaan y = 0,3248x + 91,82 (grafik 3.269).



d. hasil analisis relevansi



Hasil analisis relevansi angka partisipasi murni (APM) SD/MI (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, karena provinsi naik sebesar 0,31% dibanding tahun 2019 dan naiknya tepat berada naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional tahun 2020 naik sebesar 0,05% dibanding tahun 2019 dan berada dibawah naiknya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.270).

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Hasil analisis relevansi antar realisasi indikator APM SD/MI di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 naik sebesar 0,31% dibanding tahun 2019, sedangkan realisasi persentase penduduk

miskin (grafik 3.271), garis kemiskinan (grafik 3.272) dan jumlah penduduk miskin (grafik 3.273) tahun 2020 naik dibanding tahun 2019.





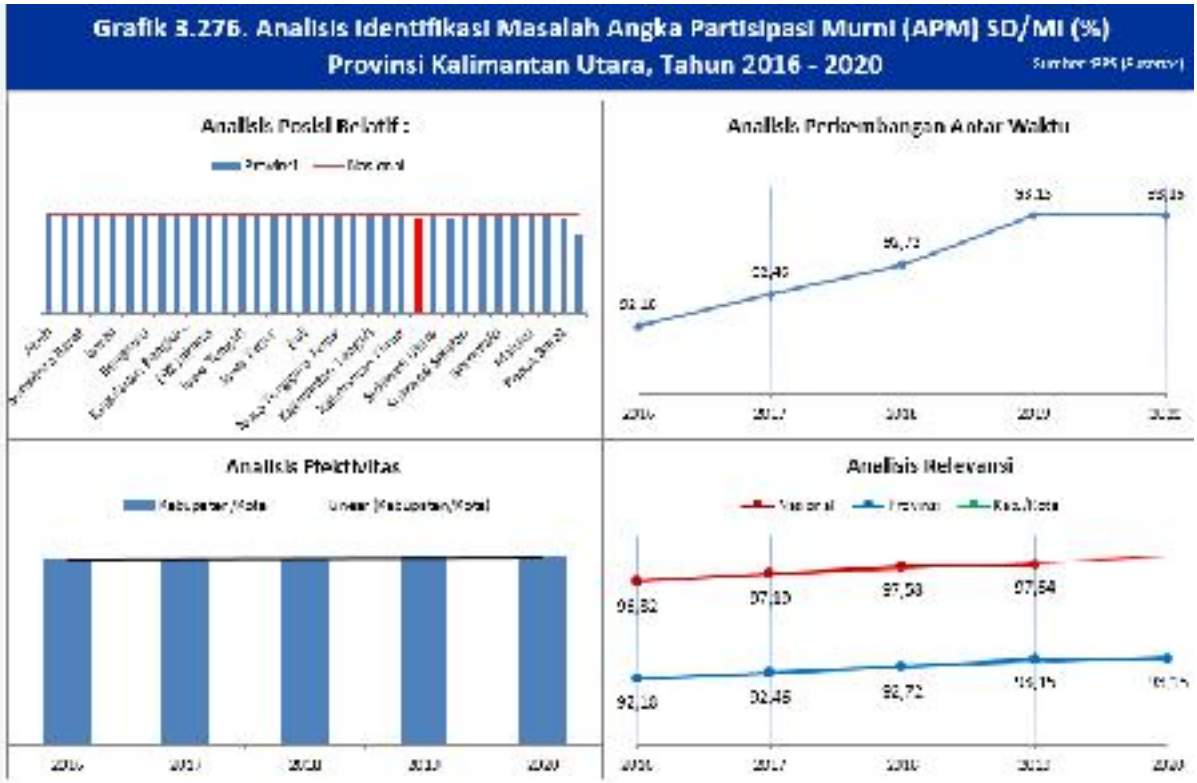
Selanjutnya, hasil analisis relevansi antar realisasi indikator APM SD/MI di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 naik sebesar 0,31% dibanding tahun 2019, sedangkan realisasi indeks kedalaman kemiskinan tahun 2020 turun sebesar 0,76% dibanding tahun 2019 (grafik 3.274), indeks keparahan kemiskinan tahun 2020 turun sebesar 0,14% dibanding tahun 2019 (grafik 3.275).





f. hasil analisis identifikasi masalah

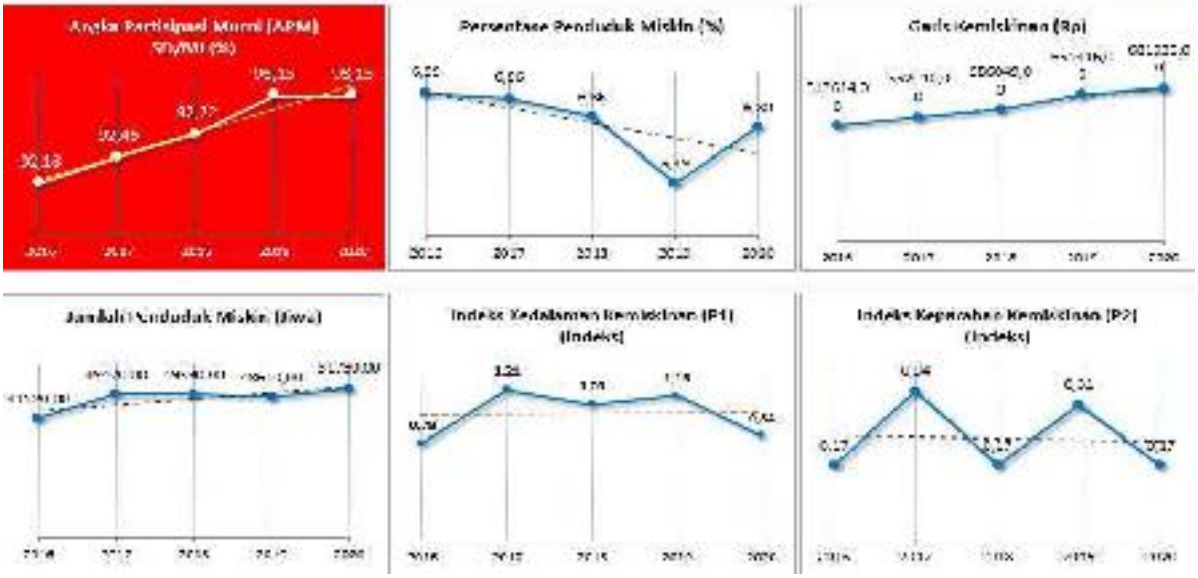
Grafik 3.276 menjelaskan bahwa tidak ada masalah angka partisipasi murni (APM) SD/MI di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 dari hasil analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas, dan analisis relevansi, walaupun kenaikanny tidak terjadi (stagnan) dibanding tahun 2019. Angka ini identik/hampir sama dengan naiknya garis linier provnsi tahun 2020.



g. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.277 menjelaskan bahwa analisis prioritas intervensi (keterkaitan) angka partisipasi murni (APM) SD/MI pada tahun 2021 terhadap bidang konsumsi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya tahun 2020 yaitu pada indikator persentase penduduk miskin (%), garis kemiskinan (Rp), dan jumlah penduduk miskin (jiwa), sedangkan indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak perlu diintervensi karena trennya turun/membaik.

Grafik 3.277. Analisis Prioritas Intervensi APM SD/MI terhadap Bidang Konsumsi di Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Grafik 3.242 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi adalah di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.

Grafik 3.278. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019



Tabel 3.62 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SD/MI (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.243 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang diintervensi adalah di Kabupaten Malinau, prioritas empat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

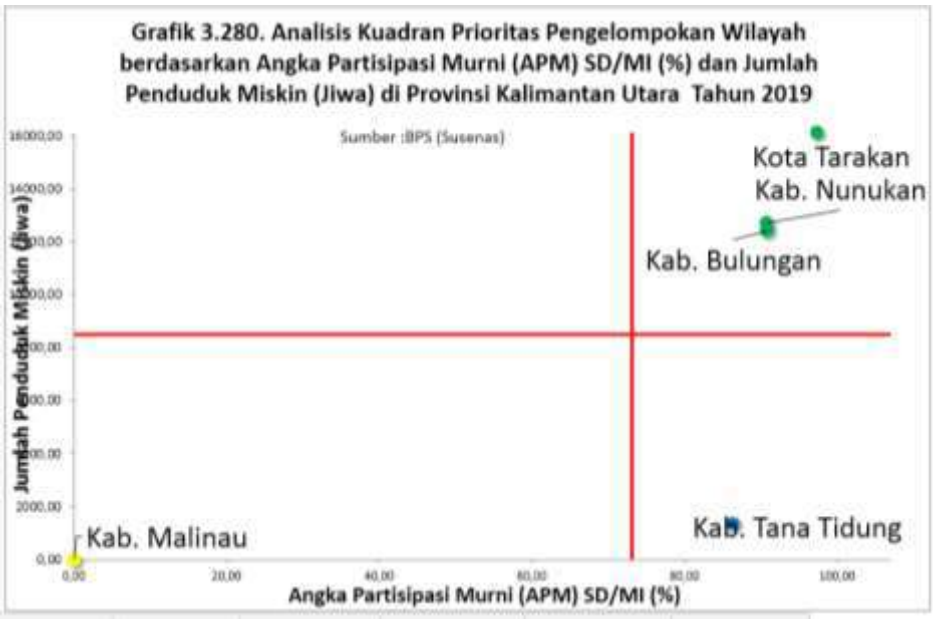


Tabel 3.63 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SD/MI (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.244 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi adalah di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.64 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SD/MI (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.245 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi adalah di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan prioritas empat di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.65 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SD/MI (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.246 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SD/MI terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi adalah di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.66 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SD/MI (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

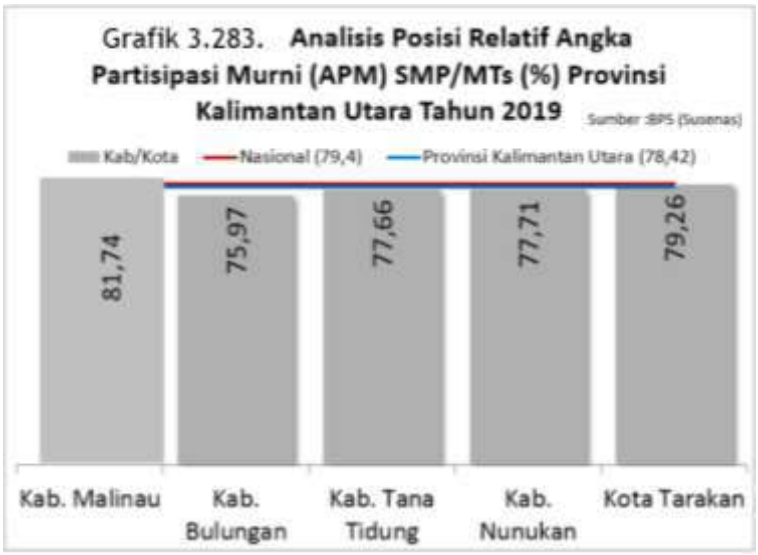
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

4.1.4.2. Hasil analisis indikator angka partispasi murni/APM SMP/MTs (%)

a. hasil analisis posisi relatif

Hasil analisis posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 78,42% berada dibawah nasional 79,40% berarti buruk. Kabupaten Malinau 81,74% dan Kota Tarakan 79,26% berada diatas provinsi berarti baik. Kabupaten Nunukan 77,71%, Kabupaten Tana Tidung 77,66% dan Kabupaten Bulungan 75,97% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.283).



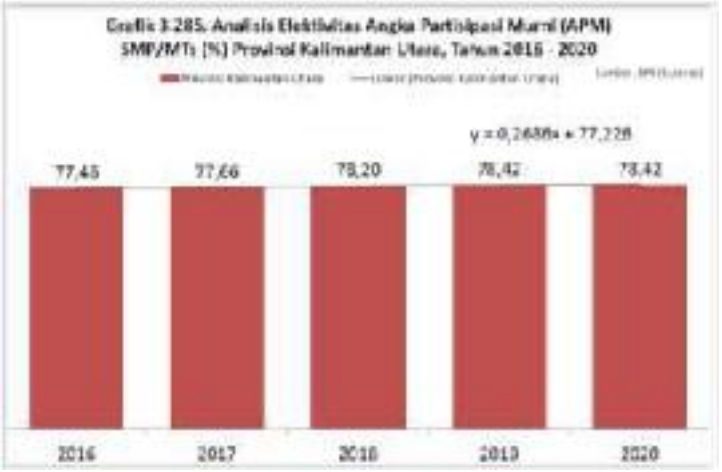
b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis antar waktu angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya terus tetapi pada tahun 2020 stagnan (tetap) dibanding tahun 2019, yaitu 78,42% (grafik 3.284).

c. hasil analisis efektivitas

Hasil analisis efektivitas angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, walaupun stagnan (tetap) dibanding tahun 2019 dan berada tepat naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y = 0,2686x + 76,226 (grafik 3.285).



d. hasil analisis relevansi

Hasil analisis relevansi angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, karena provinsi naik sebesar 0,67% dibanding tahun 2020 dan naiknya berada diatas naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional naik tahun 2020 sebesar 0,72%



dibanding tahun 2019 dan berada dibawah naiknya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.286) .

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Hasil analisis relevansi antar indikator angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs dan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 sama-sama naik (grafik 3.287), begitu juga terhadap garis kemiskinan (grafik 3.288), dan jumlah penduduk miskin (grafik 3.289) juga sama-sama naik. Sementara hasil analisis relevansi antar indikator angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs pada tahun 2020 naik sedangkan indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.290) dan indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.291) pada tahun 2020 justru turun.

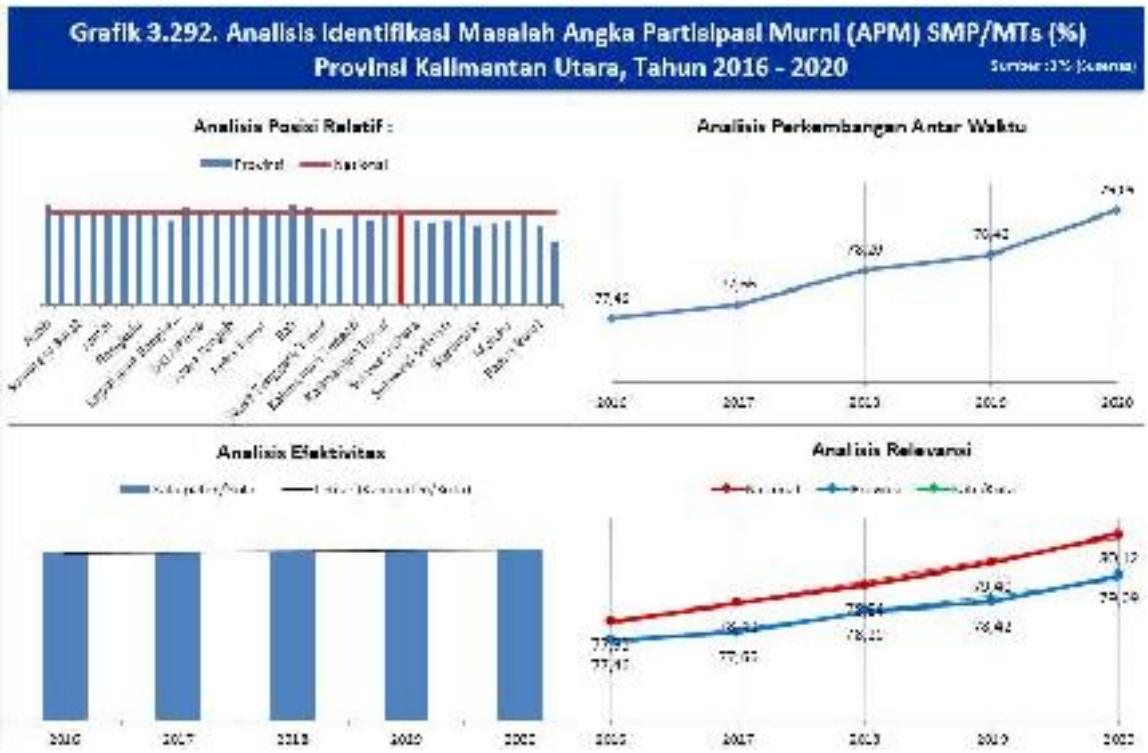






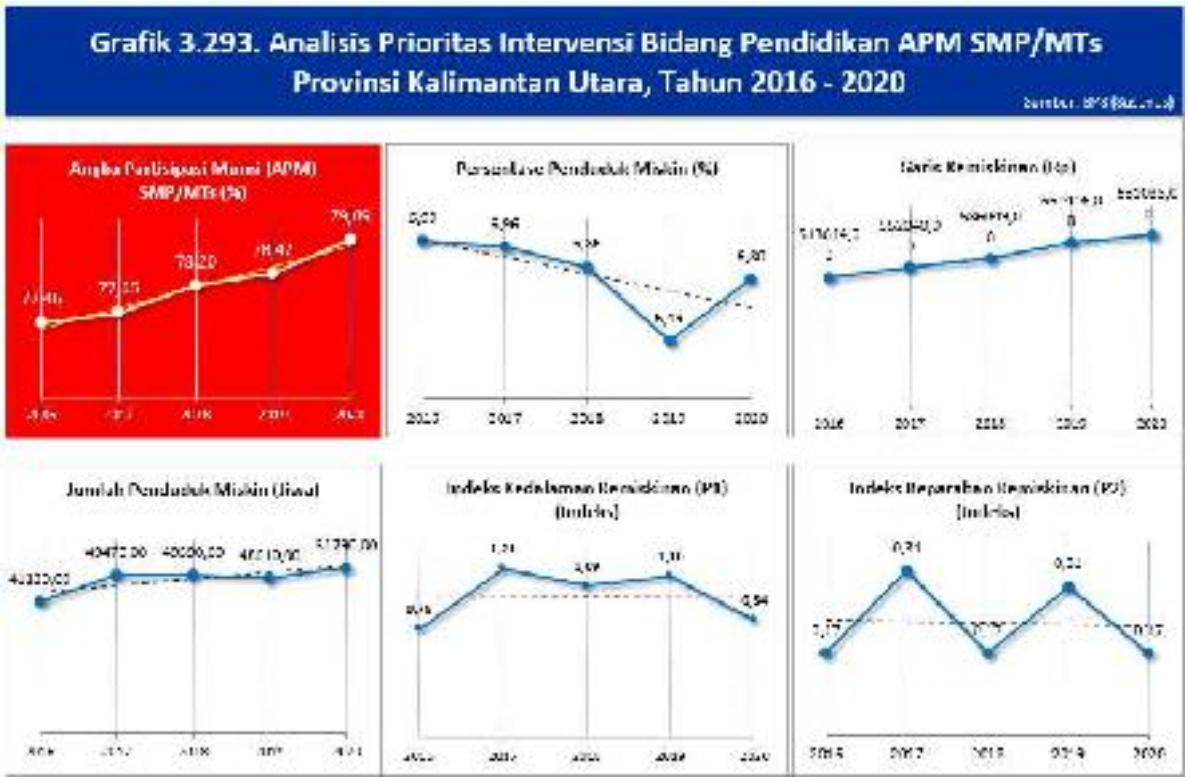
f. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.292 menunjukkan bahwa identifikasi masalah angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 hasil dari analisis posisi relatif berada dibawah nasional saja yang jadi masalah dan perlu diintervensi pada tahun 2021 agar naik dan melebihi nasional, sedangkan dari hasil analisis perkembangan antar waktu naik, analisis efektifitas terjadi dan analisis relevansi tidak menjadi masalah.



g. hasil analisis prioritas intervensi

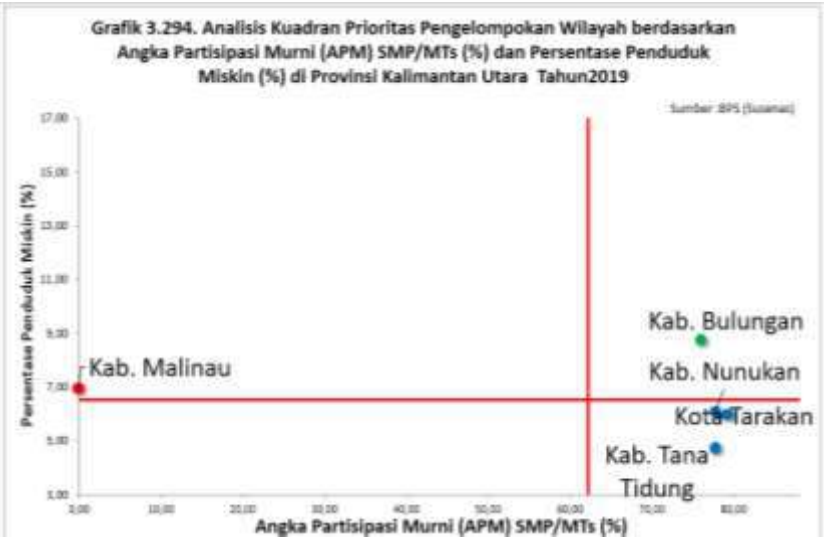
Grafik 3.293 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi angka partisipasi murni



(APM) SMP/MTs Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 naik, yaitu terhadap persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin karena naik, seharusnya ketiga indikator ini miniman tetap dengan capaian pada tahun

2019. Sedangkan untuk indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan minimal perlu dipertahankan pada pelaksanaan intervensi pada tahun 2021.

h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

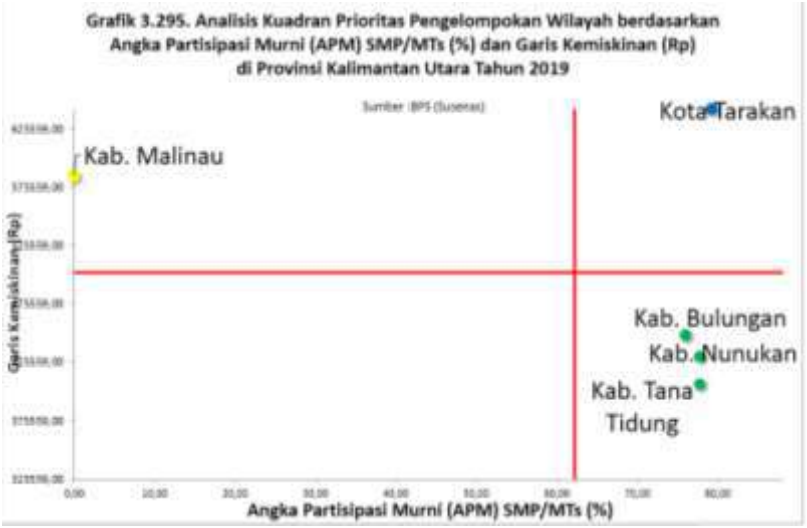


Grafik 3.252 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.67 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMP/MTs (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.295 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat di Kota Tarakan.

Tabel 3.68 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMP/MTs (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

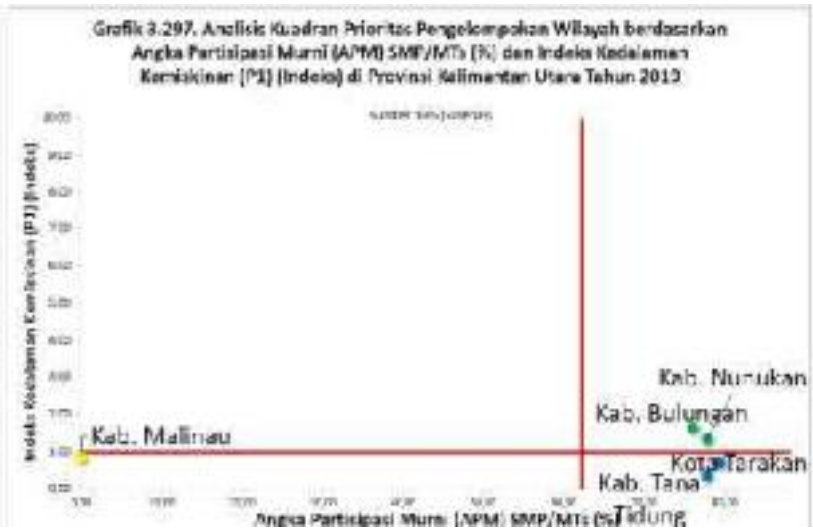
Grafik 3.296 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat di Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.69 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMP/MTs (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

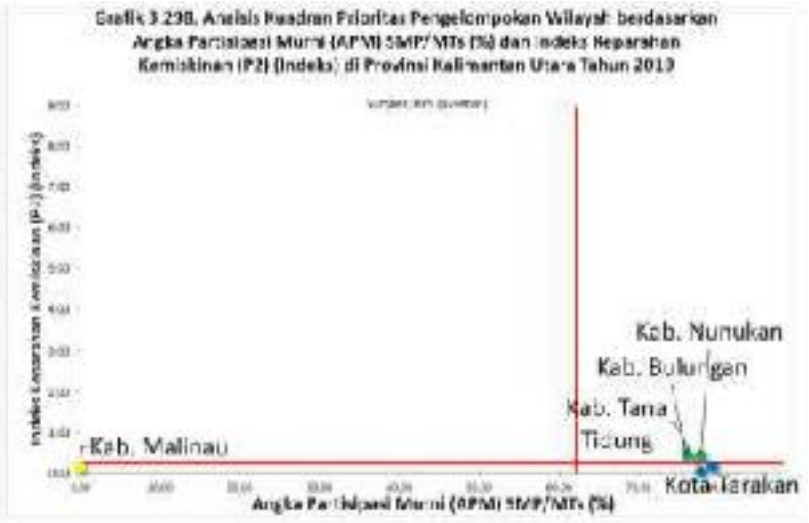


Grafik 3.297 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.70 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMP/MTs (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021



Grafik 3.298 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas kedua yang diintervensi pada tahun 2020 adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

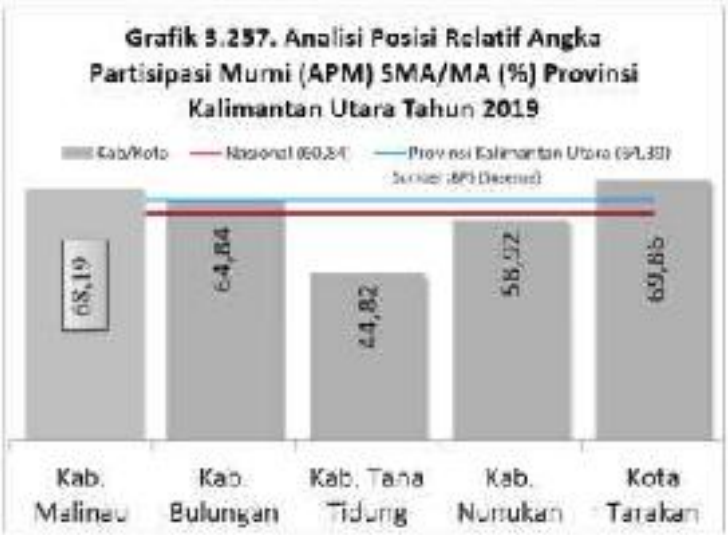
Tabel 3.71 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMP/MTs (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung

Sumber: hasil analisis, 2021

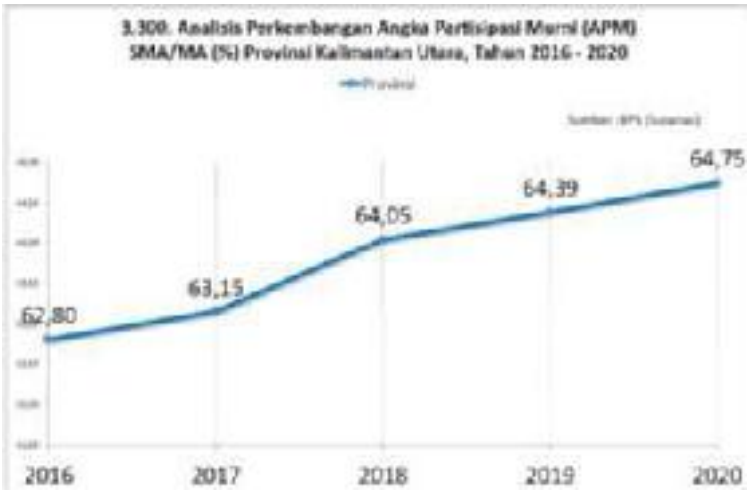
4.1.4.3. Hasil analisis indikator angka partispasi murni/APM SMA/MA (%)

a. hasil analisis posisi relatif



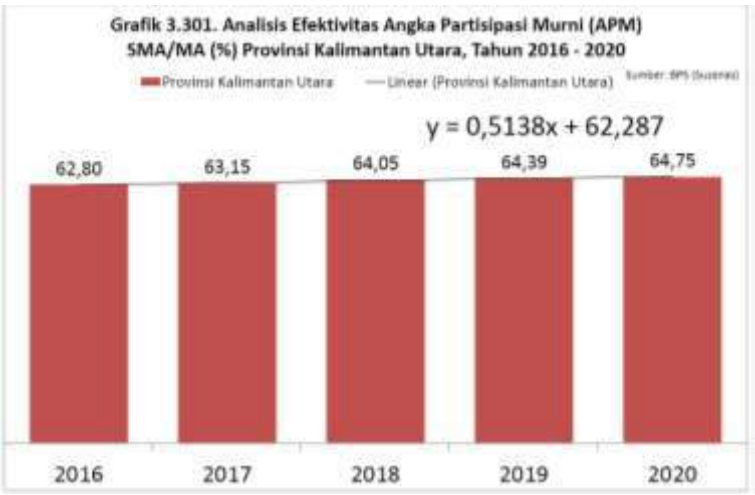
Hasil analisis posisi relatif angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 64,39% berada diatas nasional 60,84% berarti baik. Kota Tarakan 69,86%, Kabupaten Malinau 68,19% dan Kabupaten Bulungan 64,84% berada diatas provinsi berarti baik. Kabupaten Nunukan 58,92% dan Kabupaten Tana Tidung 44,82% berada dibawah provinsi berarti buruk. Dibanding target APM SMA/MA tahun 2019 sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 adalah sebesar 79,68%, maka tidak tercapai karena realisasi APM SMA/MA provinsi pada tahun 2019 hanya sebesar 64,39% (grafik 3.257).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu



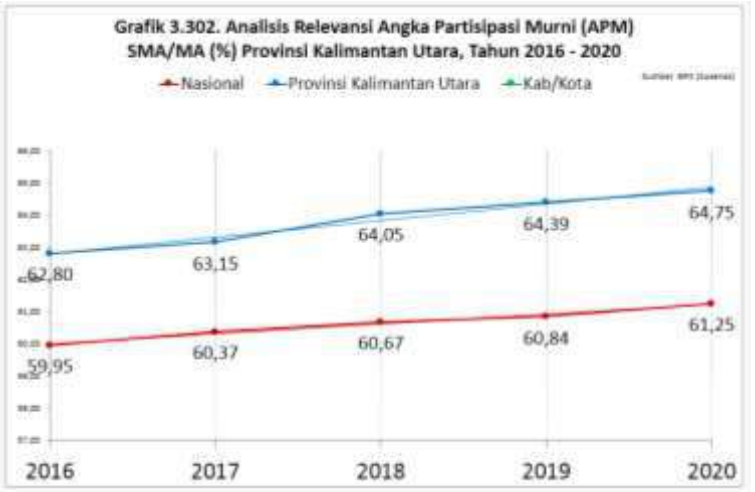
Hasil analisis antar waktu angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2030 grafiknya terus naik, dilihat realisasi tahun 2020 trennya terus naik sebesar 0,36% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 64,75% (grafik 3.300).

c. hasil analisis efektivitas



Hasil analisis efektivitas angka partisipasi murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, walaupun naiknya hanya sebesar 0,36% dibanding tahun 2019 dan naiknya berada tepat naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y = 0,5138x + 62,287(grafik 3.301).

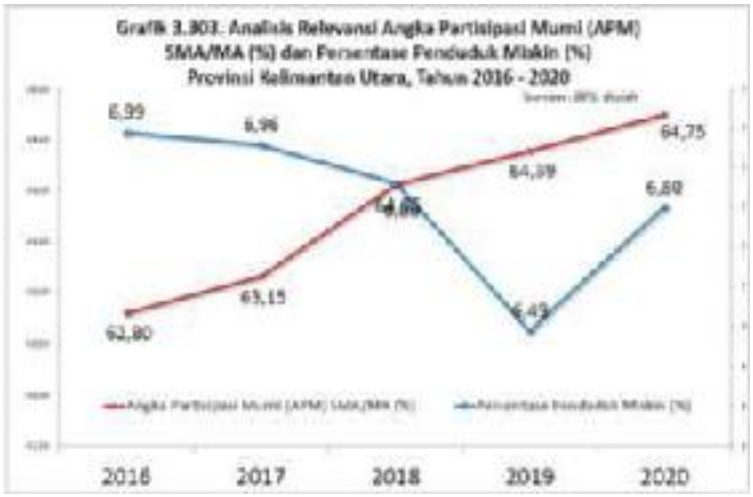
d. hasil analisis relevansi



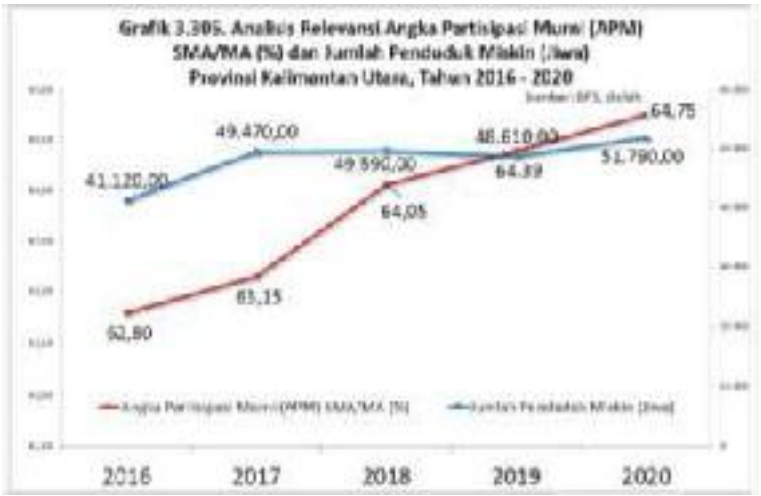
Hasil analisis relevansi angka partisipasi murni (APM) SMA/MA (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, karena provinsi naik sebesar 0,36% dibanding tahun 2019 dan naiknya berada diatas naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional naik sebesar 0,41% dibanding tahun 2019 dan berada ditepat naiknya garis linear nasional pada tahun 2020 (grafik 3.302).

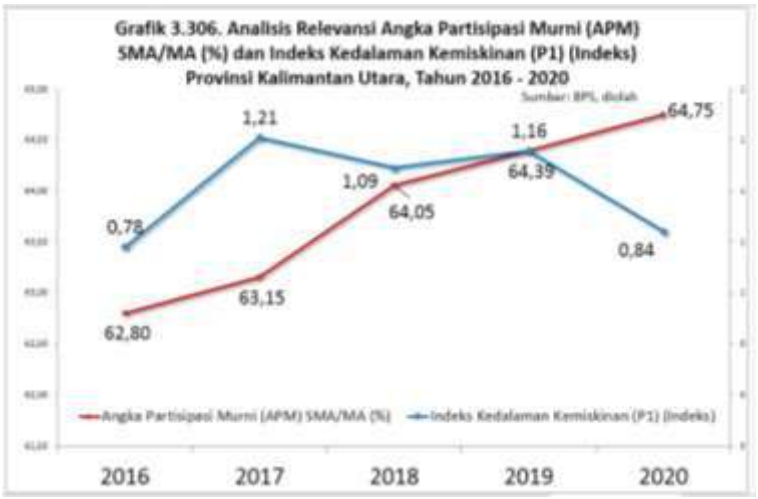
e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

Selanjutnya, grafik 3.303 s/d grafik 3.307, menjelaskan relevansi antara naiknya APM SMA/MA tahun 2020 juga diikuti naiknya indikator persentase penduduk miskin (grafik 3.303), naiknya garis kemiskinan (grafik 3.304), dan naiknya jumlah penduduk miskin (grafik 3.305) yang menunjukkan bahwa dengan naiknya APM SMA/MA, tiga indikator lainnya memburuk atau dengan kata lain tidak relevan. Sedangkan dengan naiknya indikator APM SMA/MA tahun 2020 relevan dengan turunnya indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.306) dan turunnya indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.307).


6,99
6,96
64,75
64,39
6,60
63,15
62,80
6,43
2016
2017
2018
2019
2020


64,75
651.416,00
552.040,00
64,39
681.035,00
513.614,00
586.049,00
63,15
62,80
2016
2017
2018
2019
2020

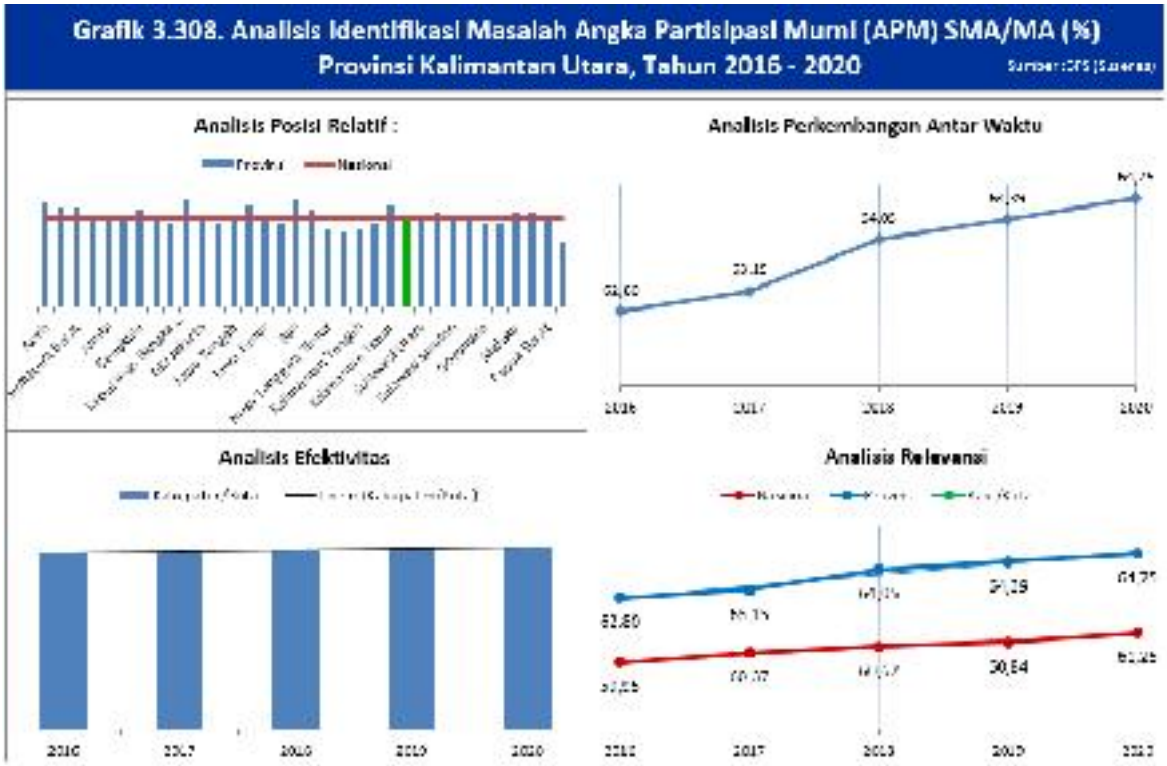

64,75
49.470,00
48.610,00
49.590,00
64,39
51.790,00
41.120,00
64,05
63,15
62,80
2016
2017
2018
2019
2020





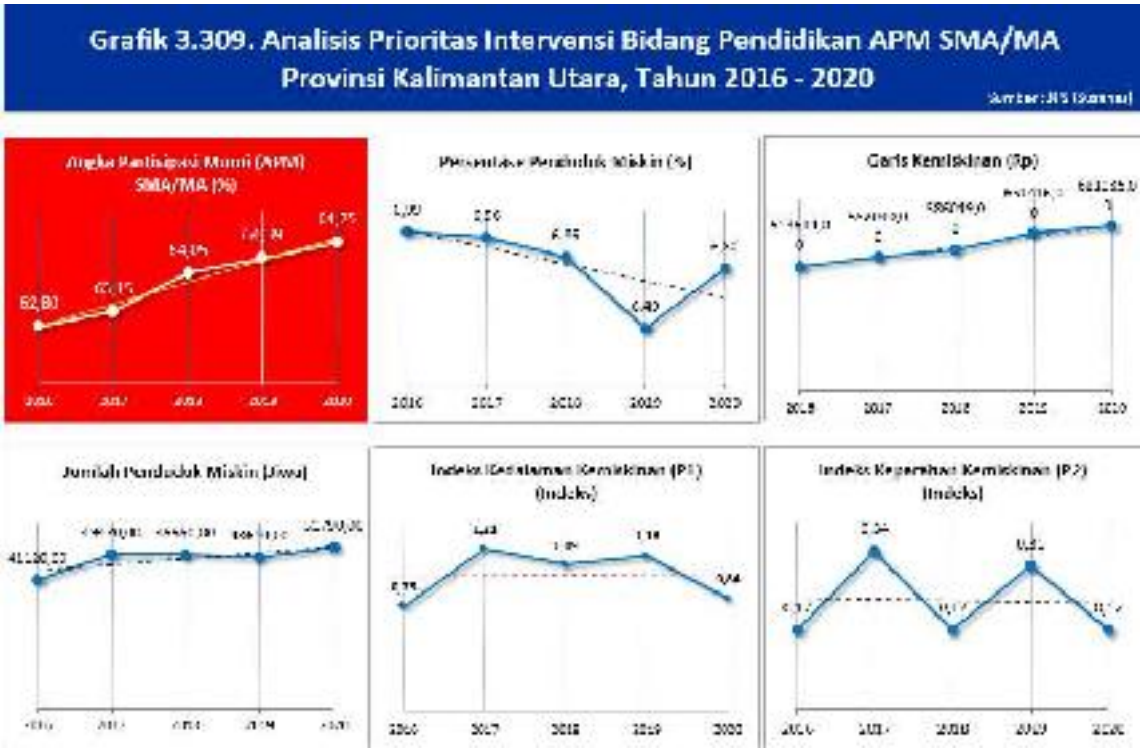
f. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.308 menunjukkan bahwa identifikasi masalah angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 tidak terjadi, karena semua hasil analisis indikator menunjukkan perbaikan yaitu hasil analisis posisi relatif, analisis perkembangan antar waktu, analisis efektifitas dan analisis relevansi.



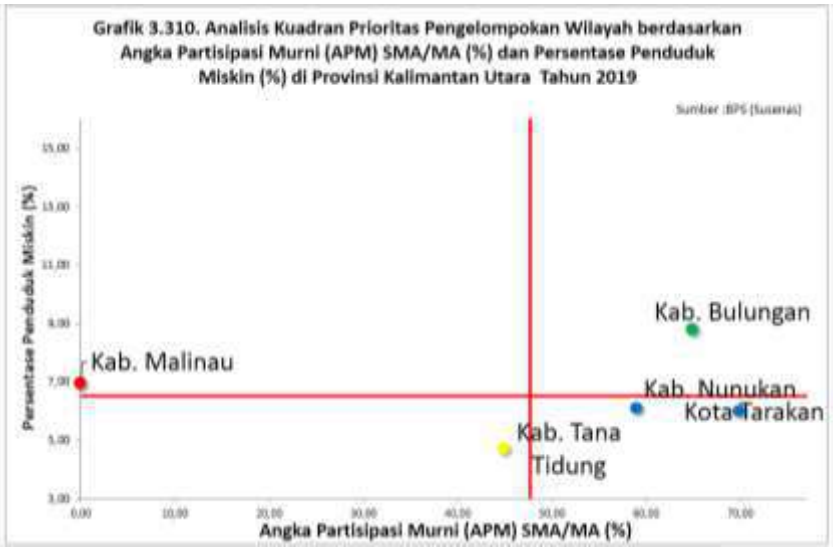
g. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.309 menunjukkan hasil analisis prioritas intervensi angka partisipasi murni (APM) SMA/MA Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran terjadi, yaitu pada hasil analisis indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan, dan ada juga yang tidak terjadi karena naik/memburuk yaitu hasil analisis persenntase penduduk miskin, garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin.



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Grafik 3.310 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMA/MA terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, dan prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.



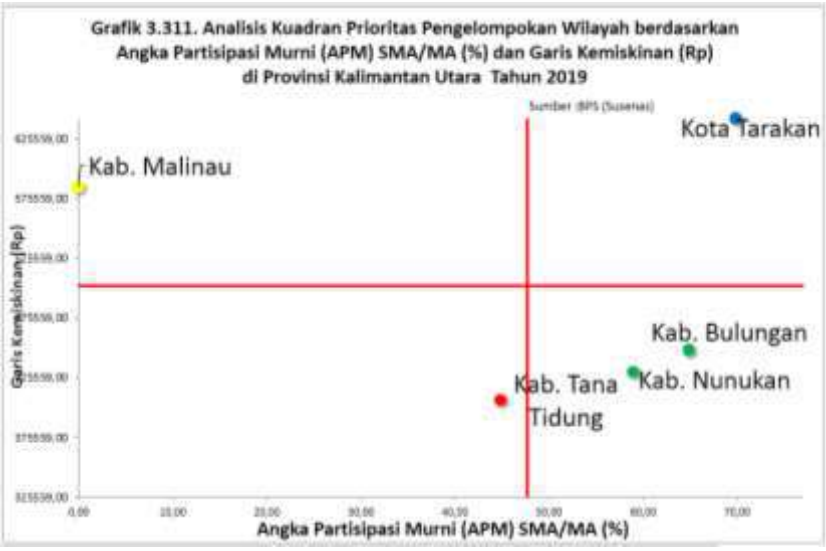
Tabel 3.72 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMA/MA (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang	Kabupaten

	menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.311 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMA/MA terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, prioritas dua terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Malinau, dan prioritas empat terdapat di Kota Tarakan.



Tabel 3.73 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMA/MA (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas,	Kabupaten Tana

	dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.312 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMA/MA terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas dua yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan.

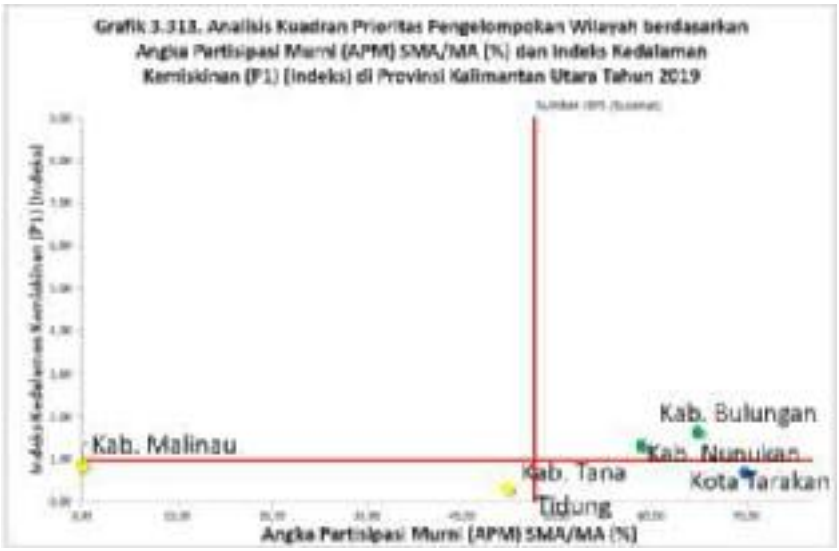


Tabel 3.74 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMA/MA (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.313 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMA/MA terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas dua yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat terdapat di Kota Tarakan.

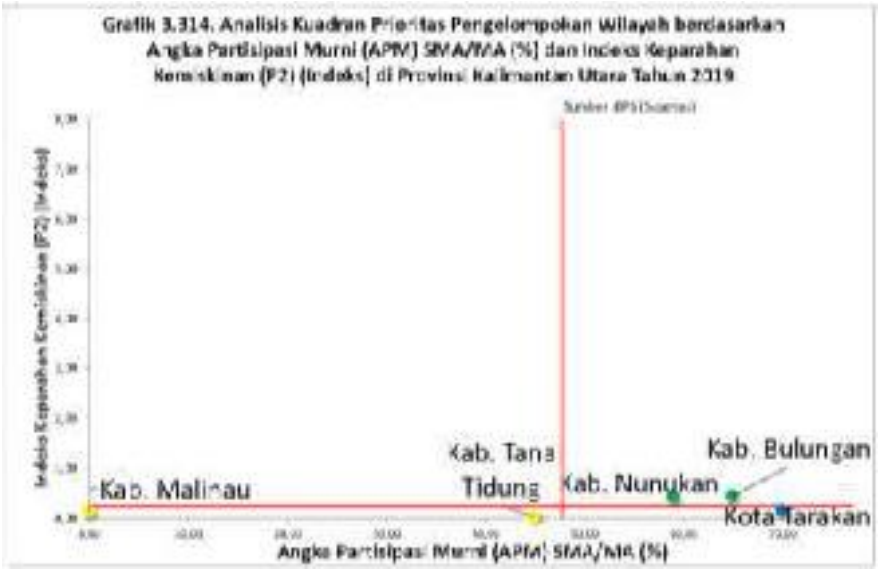


Tabel 3.75 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMA/MA (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021

Grafik 3.314 menjelaskan hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan angka partisipasi murni (APM) SMA/MA terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019, maka prioritas dua yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat terdapat di Kota Tarakan.



Grafik 3.314. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Tabel 3.76 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara angka partisipasi murni SMA/MA (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021

3.1.5. Bidang Infrastruktur Dasar

3.1.5.1. Hasil analisis indikator proforsi rumah tangga dengan air minum layak (%)

a. hasil analisis posisi relatif

Hasil analisis posisi relatif proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 87,90% berada dibawah nasional 89,27% berarti buruk. Kota Tarakan 98,13%, Kabupaten Nunukan 91,63% berada diatas provinsi berarti baik. Kabupaten Tana Tidung 78,68%, Kabupaten Bulungan 78,22% dan Kabupaten Malinau 68,04% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.315).



b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis antar waktu proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya fluktuatif, dilihat realisasi tahun 2020 trennya terus membaik dan naik sebesar 1,60% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 89,50%. Dibanding target tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dengan bunyi indikator rumah tangga pengguna air bersih yaitu sebesar ...., maka tercapai karena berada diatas target pencapaian (grafik 3.316).

c. hasil analisis efektivtas



Hasil analisis efektivitas proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, dan naiknya sebesar 1,60% dibanding tahun 2019, kemudian naiknya juga berada diatas naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y = 1,394x + 82,632 (grafik 3.317).

d. hasil analisis relevansi



Hasil analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, karena provinsi naik sebesar 1,60% dibanding tahun 2019 dan naiknya berada diatas naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional naik sebesar 0,94% dibanding tahun 2019 dan naiknya berada tepat naiknya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.318).

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Naiknya proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) dan persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan, (grafik 3.319), begitu juga terhadap garis kemiskinan naik (grafik 3.320), dan

terhadap jumlah penduduk miskin naik (grafik 3.321), tetapi sebaliknya terhadap indeks kedalaman kemiskinan turun (grafik 3.322), dan indeks keparahan kemiskinan turun (grafik 3.323) sehingga dapat dikatakan relevan.



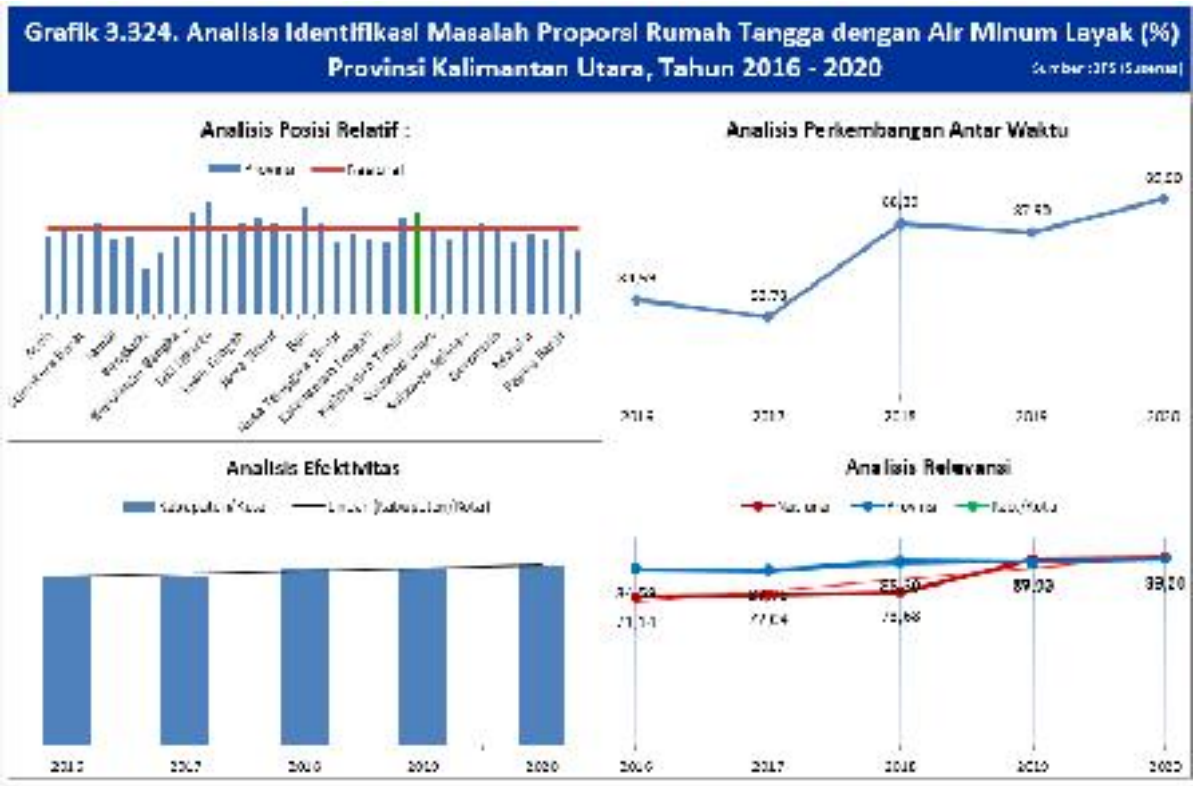






f. hasil analisis identifikasi masalah

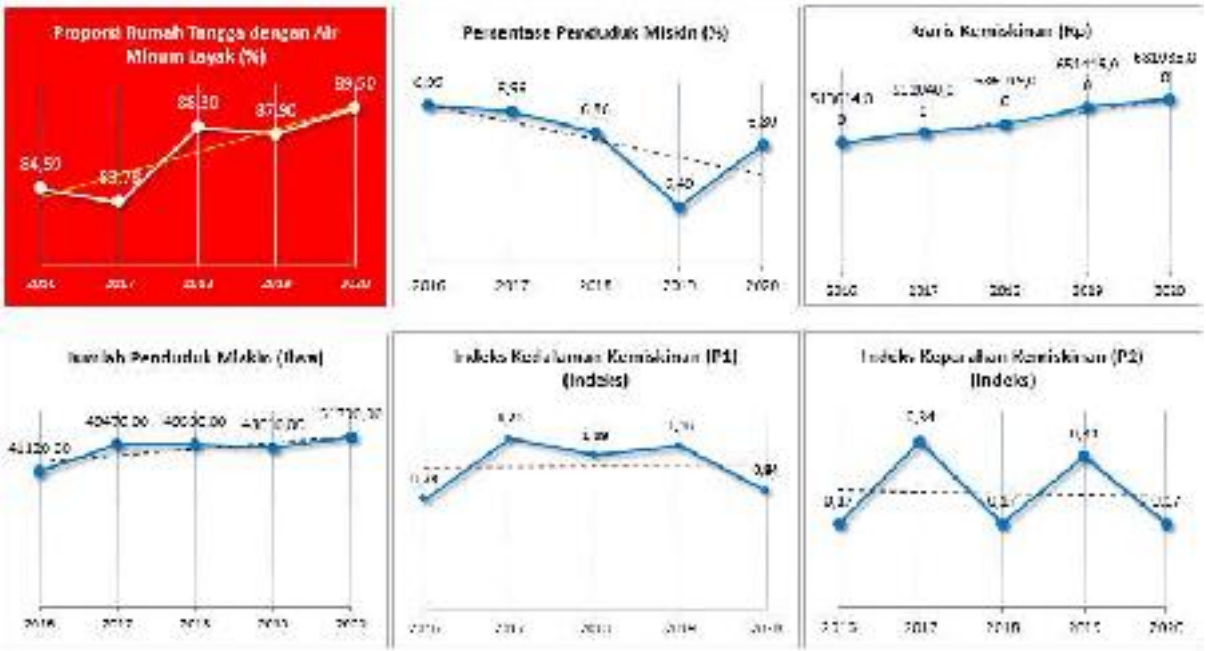
Grafik 3.324 menginformasikan bahwa tidak ada masalah proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, karena semua hasil analisis trennya membaik.



g. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.325 menginformasikan bahwa prioritas intervensi proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran yaitu persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin karena hasil analisisnya naik/memburuk.

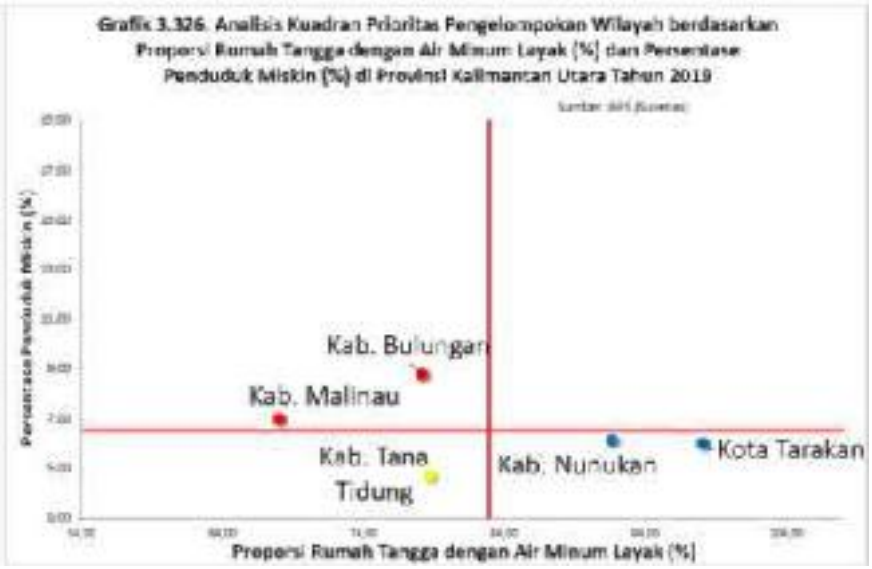
Grafik 3.325. Analisis Prioritas Intervensi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak terhadap Bidang Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



g. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dikaitkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.326 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat Kabupaten Bulugan dan Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.

Grafik 3.326. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Persentase Penduduk Miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

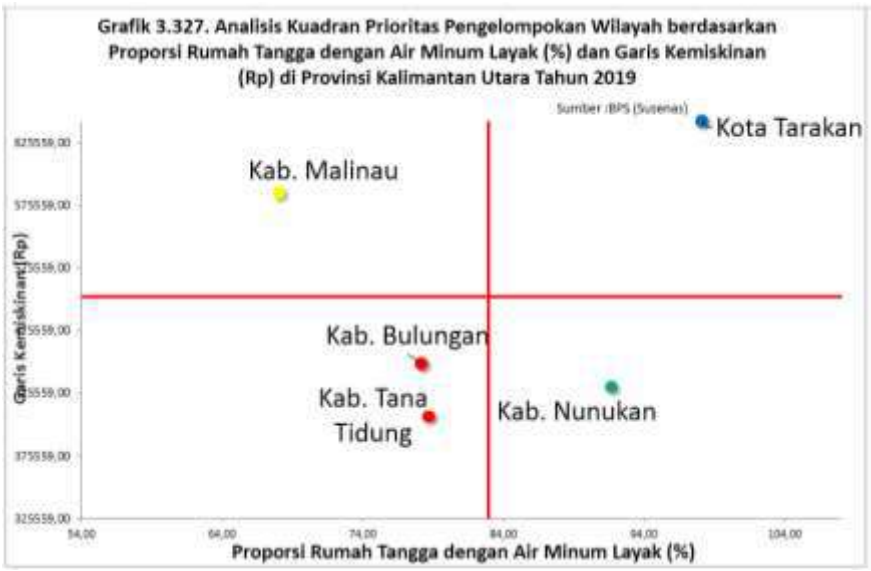


Tabel 3.76 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan air minum layak (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dikaitkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.327 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan, dan prioritas empat di Kota Tarakan.

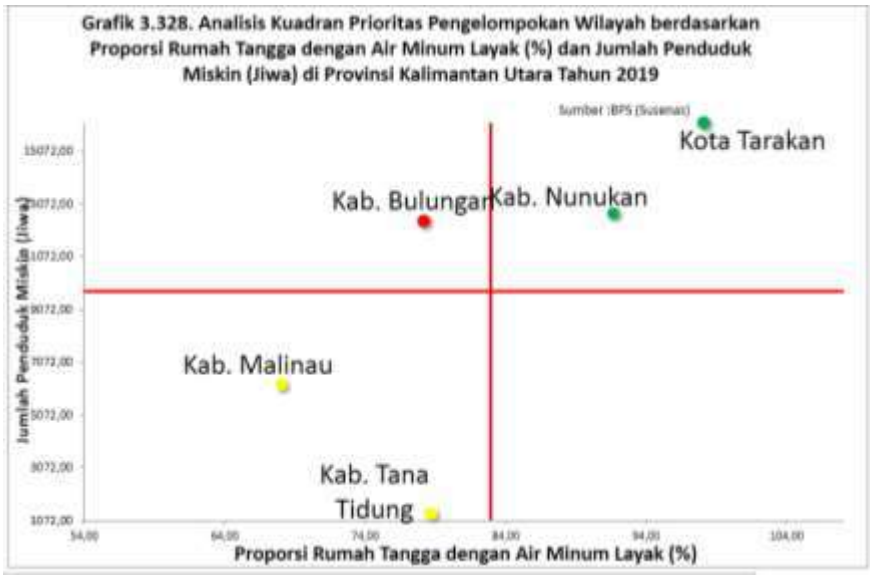


Tabel 3.77 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan air minum layak (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dikaitkan dengan jumlah penduduk miskn di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.328 menunjukkan bahwa



prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.

Tabel 3.78 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan air minum layak (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dikaitkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.329



GraFik 3.329. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan, dan prioritas empat terdapat di Kota Tarakan.

Tabel 3.79 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan air minum layak (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak dikaitkan dengan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.330 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan.



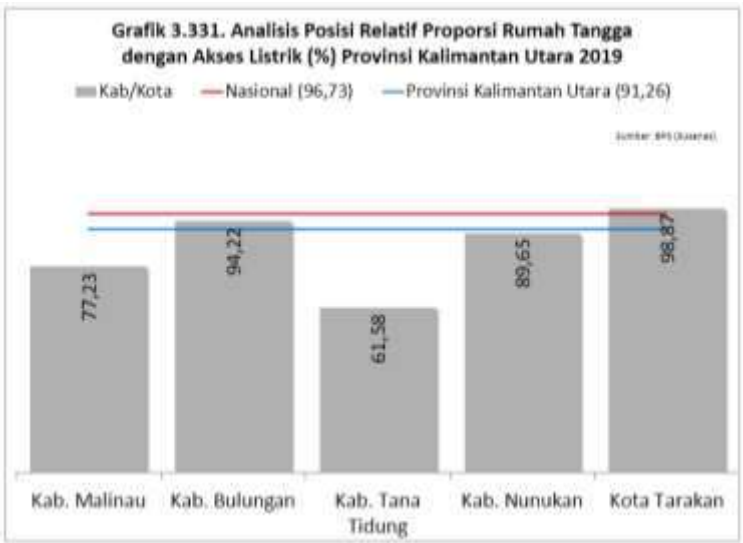
Tabel 3.80 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan air minum layak (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021

3.1.5.2. Hasil analisis indikator proforsi rumah tangga dengan akses listrik (%)

a. hasil analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 91,26% berada dibawah nasional 96,73% berarti buruk. Kota Tarakan 98,87%, Kabupaten Bulungan 94,22% berada diatas provinsi berarti baik. Kabupaten Tana Tidung 61,58%, Kabupaten Malinau 77,23% dan Kabupaten Tana Tidung 61,58% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.331).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis antar waktu proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya fluktuatif, dilihat realisasi tahun 2020 trennya membaik dan naiknya sebesar 8,34% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 99,60%. Dibanding target tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 dengan bunyi indikator rumah tangga pengguna listrik sebesar .....%, maka tercapai karena berada diatas target pencapaian tahun 2019 (grafik 3.332).

c. hasil analisis efektivitas



Hasil analisis efektivitas proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, dan naiknya sebesar 8,34% dibanding tahun 2019, dan naiknya berada diatas naiknya garis linear provinsi dengan persamaan y = 0,292x + 93,422 (grafik 3.333).

d. hasil analisis relevansi

Hasil analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya realisasi tahun 2020 terjadi, karena provinsi naik sebesar 8,34% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 98,98%, dan naiknya berada diatas naiknya garis linear provinsi, begitu juga nasional tahun 2020 naik sebesar 7,72% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 99,60% dan naiknya berada dibawah naiknya garis linear nasional pada tahun 2019 (grafik 3.334).



e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

Naiknya proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) dan persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 tidak relevan, (grafik 3.335), begitu juga terhadap garis kemiskinan naik (grafik 3.336), dan terhadap jumlah penduduk miskin naik (grafik 3.337), tetapi sebaliknya terhadap indeks kedalaman kemiskinan turun (grafik 3.338), dan indeks keparahan kemiskinan turun (grafik 3.339) sehingga dapat dikatakan relevan.



Grafik 3.336. Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Garis Kemiskinan (Rp)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



Grafik 3.337. Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



Grafik 3.338. Analisis Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020





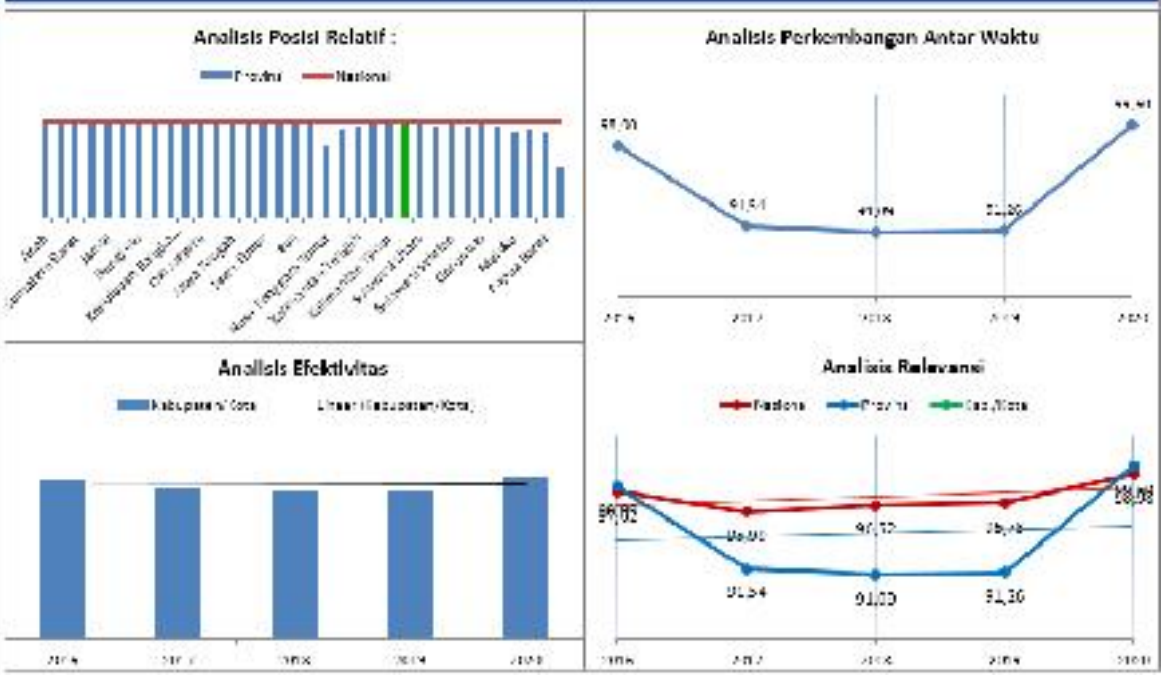
f. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.340 menginformasikan bahwa tidak ada masalah proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, karena semua hasil analisis trennya membaik.

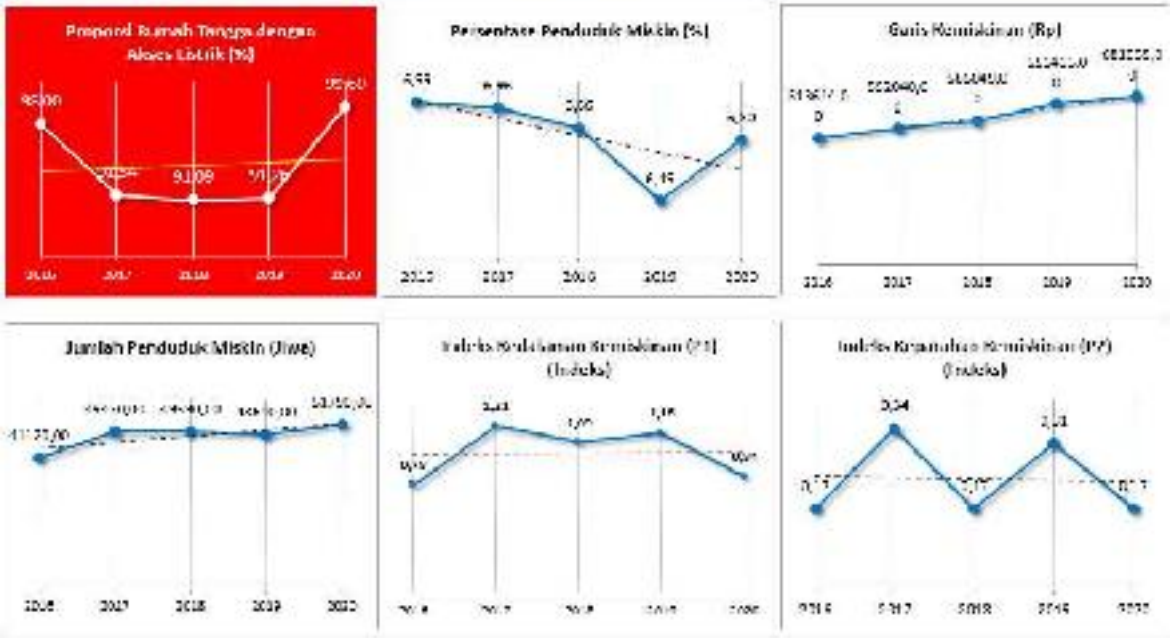
g. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.341 menginformasikan bahwa prioritas intervensi proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran yaitu pada indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin karena hasil analisisnya naik/memburuk. Sedangkan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak bermasalah karena turun/membaik selaras dengan membaiknya indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak pada tahun 2020.

Grafik 3.340. Analisis Identifikasi Masalah Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020

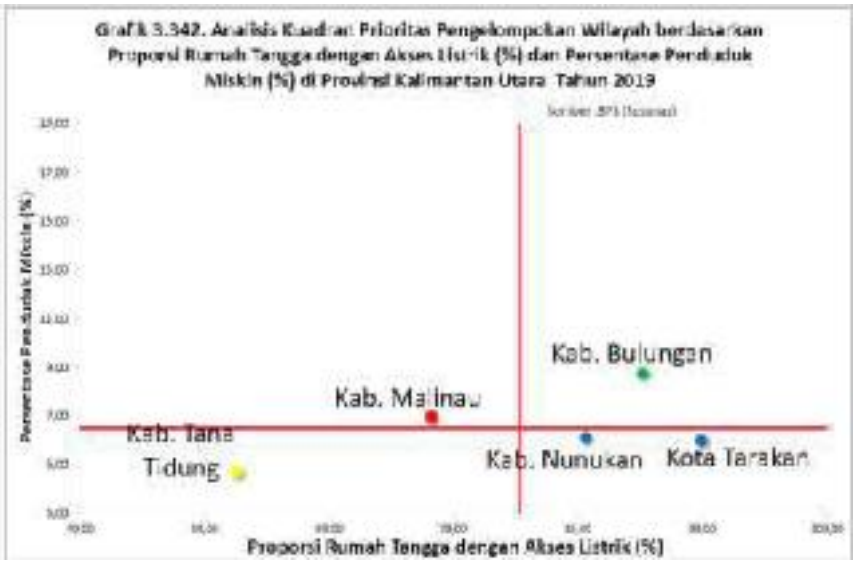


Grafik 3.341. Analisis Prioritas Intervensi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik Layak terhadap Bidang Konsumsi Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.342 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas dua di Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan prioritas empat di Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.



Tabel 3.81 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan akses listrik (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.343 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Tana Tidung, prioritas dua terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Malinau dan prioritas empat terdapat di Kota Tarakan.



Tabel 3.82 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan akses listrik (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.344 menunjukkan bahwa prioritas kedua yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan.



Grafik 3.344. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019

Tabel 3.83 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan akses listrik (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik dikaitkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.345 menunjukkan bahwa



prioritas kedua yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan.

Tabel 3.84 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan akses listrik (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

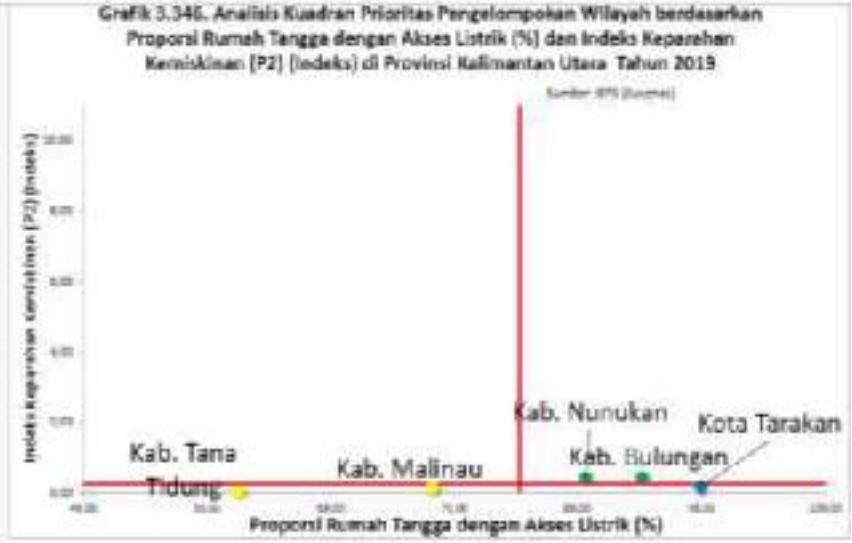
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik dikaitkan dengan indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.286

menunjukkan bahwa prioritas kedua yang diintervensi adalah di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat di Kota Tarakan.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik dikaitkan dengan indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebagaimana disajikan grafik 3.346 menunjukkan bahwa prioritas kedua yang diintervensi adalah terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Nunukan, prioritas empat terdapat di Kota Tarakan.



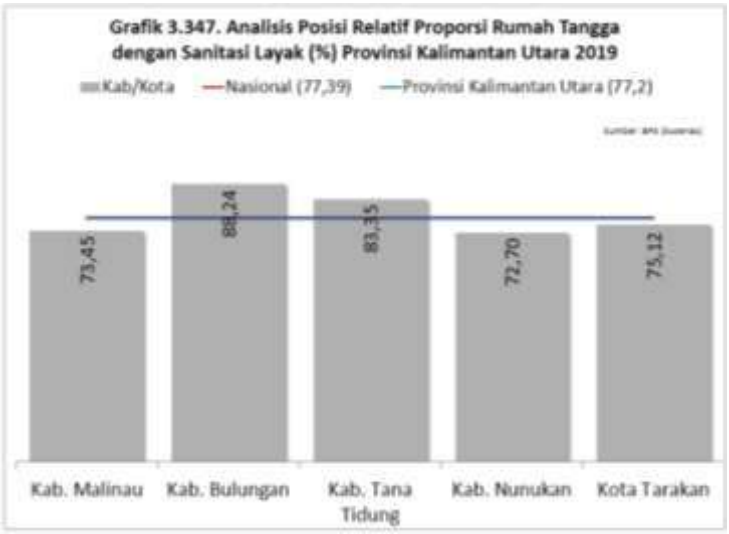
Tabel 3.85 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan akses listrik (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Tidak ada
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021

3.1.5.3. Hasil analisis indikator proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%)

a. hasil analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebesar 77,20% berada dibawah nasional 77,39% berarti buruk. Kota Tarakan sebesar 88,24%, Kabupaten Tana Tidung sebesar 83,35% berada diatas provinsi berarti baik. Sedangkan di Kota Tarakan sebesar 75,12%, Kabupaten Malinau sebesar 73,45%, dan Kabupaten Nunukan sebesar 72,70% berada dibawah provinsi berarti buruk (grafik 3.347).

b. hasil analisis perkembangan antar waktu



hasil analisis perkembangan antar waktu proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 trennya naik/membaik, untuk tahun 2020 naik sebesar 4,89% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 82,09% (grafik 3.348).

c. hasil analisis efektivitas



Kenaikan ini juga dipertegas pada hasil analisis efektivitasnya, yaitu terlihat bahwa kenaikan/membaiknya proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak tahun 2020 tersebut berada

diatas/indentik dengan naiknya garis linier provinsi, dengan persamaan y = 4,5423x + 58,836 (grafik 3.349).

d. hasil analisis relevansi

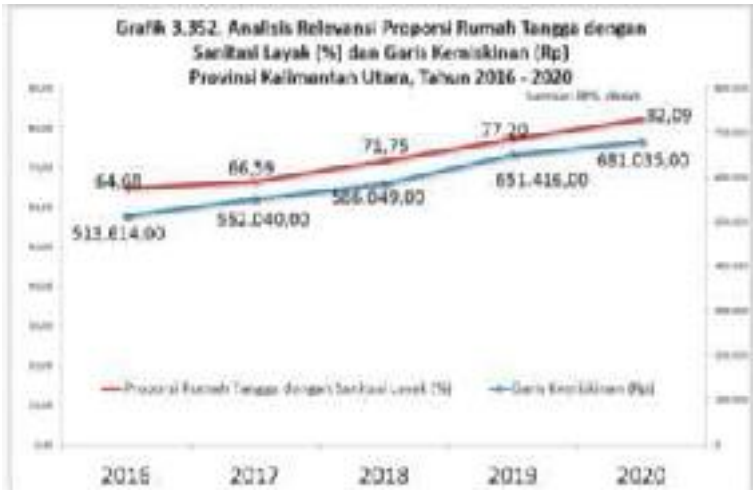


Selanjutnya, grafik 3.350 menjelaskan bahwa terjadi relevansi kenaikan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak antara Provinsi Kalimantan Utara dengan nasional pada tahun 2020. Untuk provinsi naik sebesar 4,89% dan naiknya berada diatas atau identik dengan naiknya garis linier provinsi, begitu juga nasional naik sebesar 2,14% dan naiknya identik dengan naiknya garis linier nasional pada tahun 2020.

e. hasil analisi keterkaitan/relevansi antar indikator

Kemudian, grafik 3.351 s/d grafik 3.355 menjelaskan relevansi antara naiknya proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap indikator bidang konsumsi/pengeluaran. Naiknya proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak tahun 2020 juga ikuti naiknya persentase penduduk miskin (grafik 3.351), naiknya garis kemiskinan (grafik 3.352) dan naiknya jumlah penduduk miskin (grafik 3.353), yang mengindikasikan tidak relevan





karena ke tiga indikatornya memburuk sedangkan indikator proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak naik. Relevansi naiknya proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak tahun 2020 juga diikuti perbaikan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.354) dan indikator indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.356), karena dua indikator ini turun/membaik.

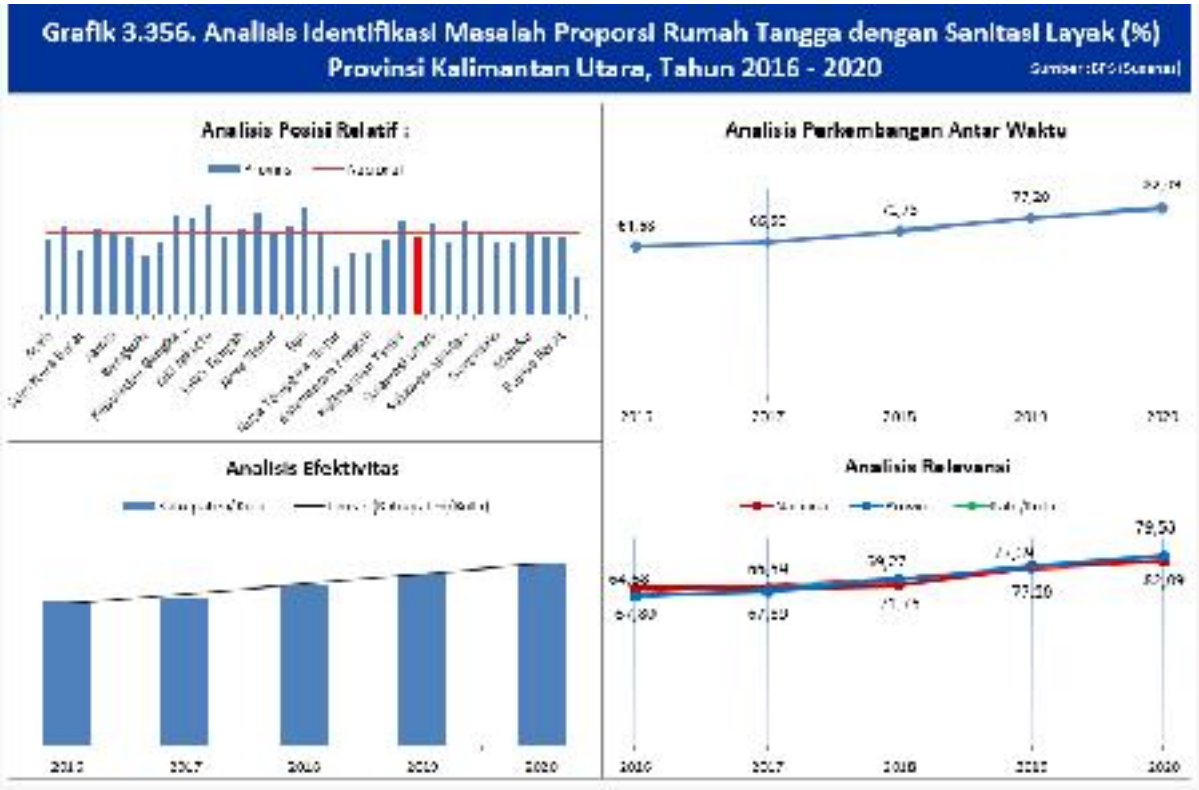






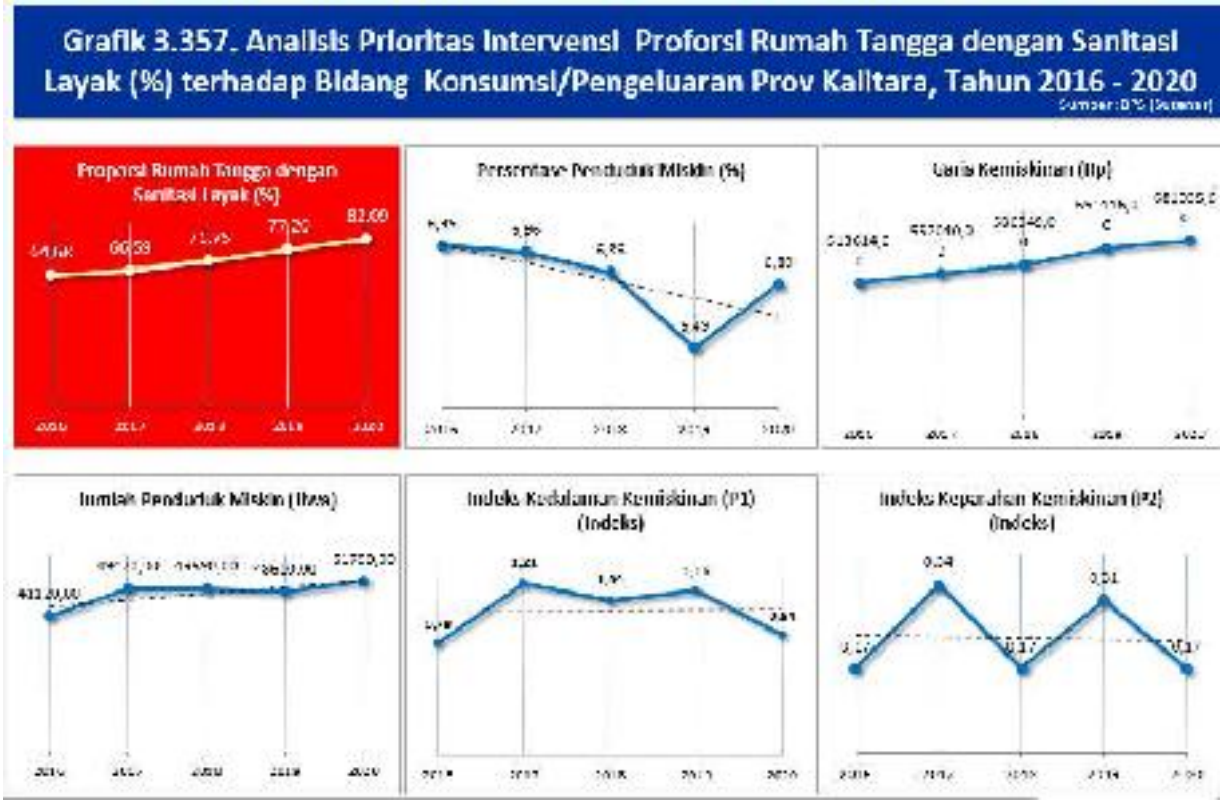
f. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.356 menginformasikan bahwa tidak ada masalah proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, karena semua hasil analisis trennya membaik.



g. hasil analisis prioritas intervensi

Sedangkan grafik 3.357 menginformasikan bahwa prioritas intervensi proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran yaitu pada indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin karena hasil analisisnya naik/memburuk, sedangkan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak bermasalah karena turun/membaik selaras dengan membaiknya indikator proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak pada tahun 2020.



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA



Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) terhadap persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.358 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.86 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Terdapat di lima kabupaten/kota
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Terdapat di lima kabupaten/kota
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021, keterangan diantara kuadran I dan II

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) terhadap garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.359 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau.



Tabel 3.87 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Terdapat di lima kabupaten/kota
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Terdapat di lima kabupaten/kota
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021, keterangan diantara kuadran I dan II

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) terhadap jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.360 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.88 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh	Terdapat di lima

	pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	kabupaten/kota
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Terdapat di lima kabupaten/kota
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021, keterangan diantara kuadran I dan II



Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) terhadap indeks kedalaman kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.361 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.89 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Terdapat di lima kabupaten/kota
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Terdapat di lima kabupaten/kota

III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021, keterangan diantara kuadran I dan II

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) terhadap indeks keparahan kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.362 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas dua terdapat di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.90 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

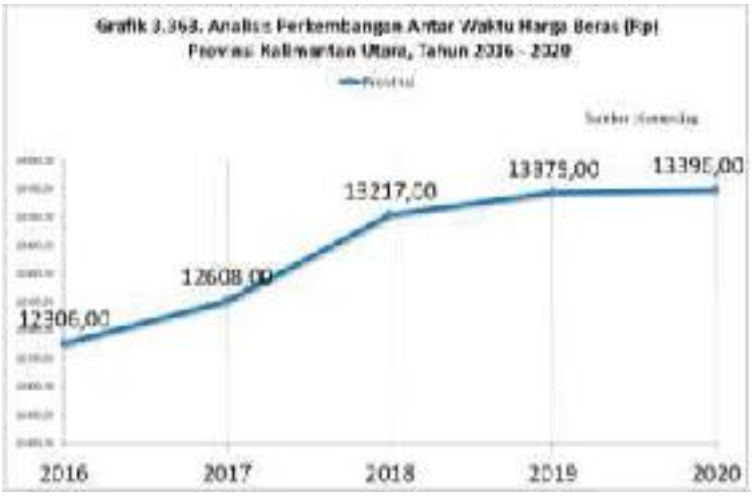
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Terdapat di lima kabupaten/kota
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Terdapat di lima kabupaten/kota
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Tidak ada
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021, keterangan diantara kuadran I dan II

3.1.6. Bidang Ketahanan Pangan

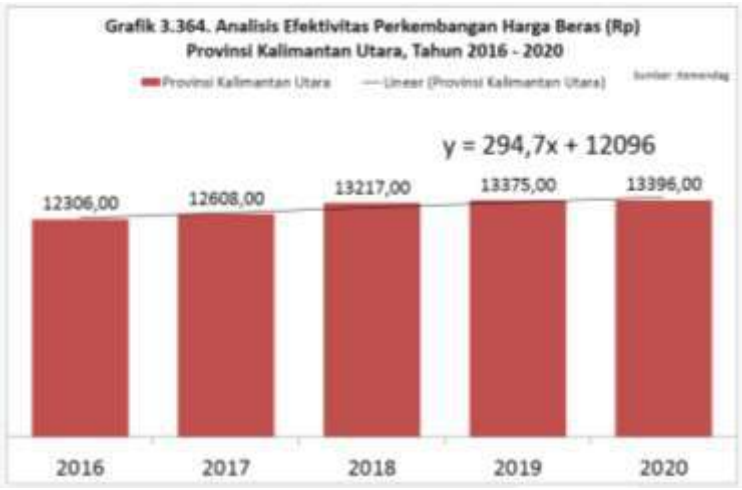
3.1.6.1. Hasil analisis indikator harga beras (Rp)

a. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu harga beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 tren grafiknya terus naik, untuk tahun 2020 naik sebesar Rp.21/kg,- dibanding tahun 2019 sehingga menjadi Rp.13.396,00 (grafik 3.363).

b. hasil analisis efektivitas



Hasil analisis efektivitas perkembangan harga beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 terjadi, karena tahun 2020 hanya naik sebesar Rp.21/kg,- dibanding tahun 2019, dan turunnya berada dibawah naiknya garis linear provinsi pada tahun 2020 dengan persamaan y = 294,7x + 12096 (grafik 3.364).

c. hasil analisis relevansi



Selanjutnya, grafik 3.365 menjelaskan bahwa terjadi relevansi perkembangan harga beras (Rp) antara provinsi terhadap nasional pada tahun 2020. Karena provinsi turun sebesar Rp.21/kg, dan nasional turun sebesar Rp.383/kg. Selain

itu, capaian provinsi berada dibawah nasional berarti baik, serta turunnya berada tepat diatas naiknya garis linier provinsi tahun 2020, termasuk turunnya capaian nasional juga berada diatas turunnya garis linier nasional pada tahun 2020.

d. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator



Kemudian, grafik 3.366 s/d grafik 3.370 menjelaskan relevansi antara turunnya perkembangan harga beras (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap indikator bidang konsumsi/pengeluaran. Turunnya perkembangan harga beras (Rp) provinsi tahun 2020 juga ikuti naiknya persentase penduduk miskin (grafik 3.359), naiknya garis kemiskinan (grafik 3.360) dan naiknya jumlah penduduk miskin (grafik 3.361), yang mengindikasikan tidak relevan karena ke tiga indikatornya memburuk, sementara indikator proforsi rumah tangga dengan sanitasi layak naik/membaik. Relevansi turunnya perkembangan harga beras (Rp) provinsi tahun 2020 juga diikuti perbaikan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.362) dan indikator





indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.363), karena dua indikator ini turun/membaik.





e. hasil analisis identifikasi masalah

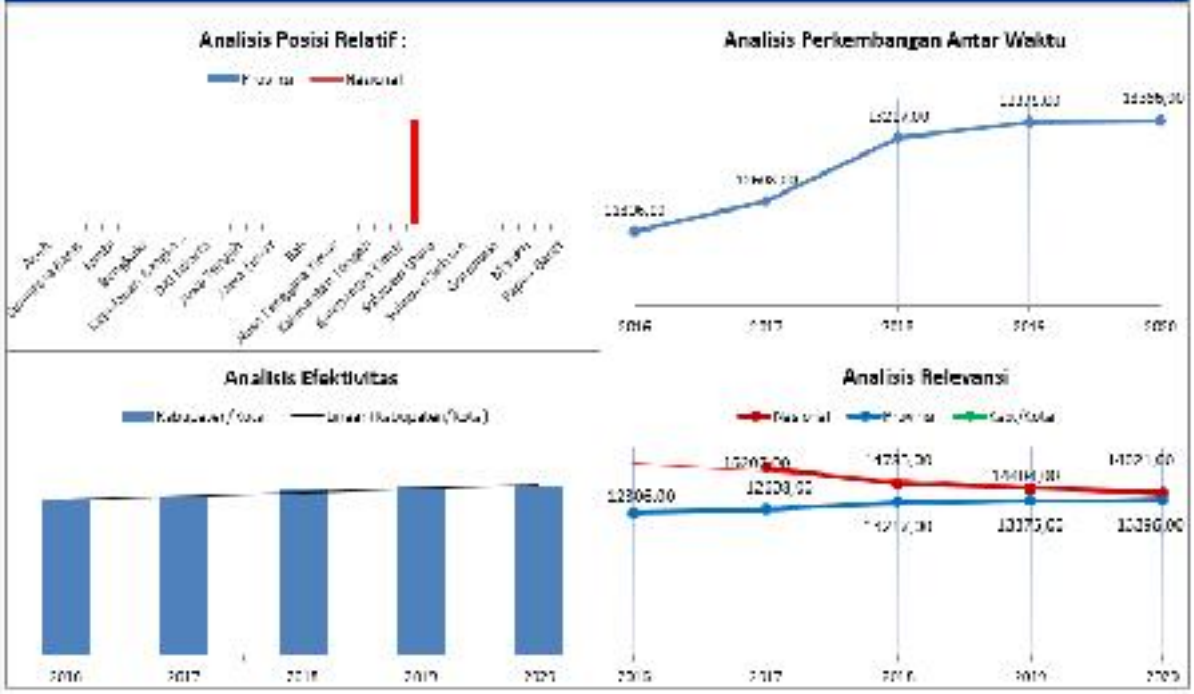
Grafik 3.371 menginformasikan bahwa tidak ada masalah perkembangan harga beras (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, karena semua hasil analisis trennya naik tetapi masih dibawah naiknya garis linier provinsi pada tahun 2020.

f. hasil analisis prioritas intervensi

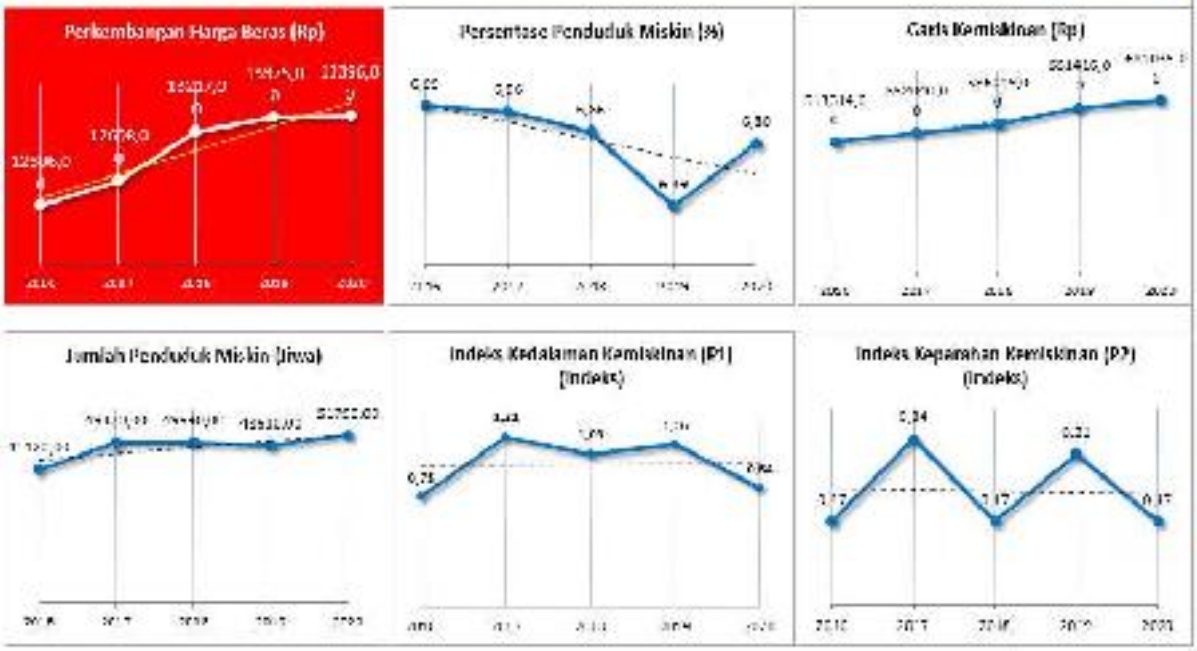
Sedangkan grafik 3.372 menginformasikan bahwa prioritas intervensi dengan naiknya harga beras (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran yaitu pada indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin, ketiga indikator ini juga turut naik/memburuk, sedangkan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak bermasalah karena turun/membaik walaupun

ada kenaikan indikator harga beras (Rp) pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara.

Grafik 3.371. Analisis Identifikasi Masalah Perkembangan Harga Beras (Rp) Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



Grafik 3.372. Analisis Prioritas Intervensi Perkembangan Harga Beras (Rp) terhadap Bidang Konsumsi/Pengeluaran Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2020



g. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan perkembangan harga beras (%) terhadap persentase penduduk miskin (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.373 menunjukkan bahwa prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.91 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara perkembangan harga beras (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan

Sumber: hasil analisis, 2021,
keterangan diantara kuadran I dan III, diantara kuadran II dan IV.

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan perkembangan harga beras (%) terhadap garis kemiskinan (Rp) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.374 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau.



Tabel 3.92 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara perkembangan harga beras (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kabupaten Bulungan

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan perkembangan harga beras (%) terhadap jumlah penduduk miskin (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.375



Grafik 3.375. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Perkembangan Harga Beras (Rp) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, prioritas dua terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.93 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara perkembangan harga beras (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan perkembangan harga beras (%) terhadap indeks kedalaman kemiskinan (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.376 menunjukkan bahwa prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.93 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara perkembangan harga beras (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan

Sumber: hasil analisis, 2021
Keterangan terdapat diantara kuadran I dan III, diantara kuadran II dan IV

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan perkembangan harga beras (%) terhadap indeks keparahan kemiskinan (jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.377 menunjukkan bahwa prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.



Tabel 3.94 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara perkembangan harga beras (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

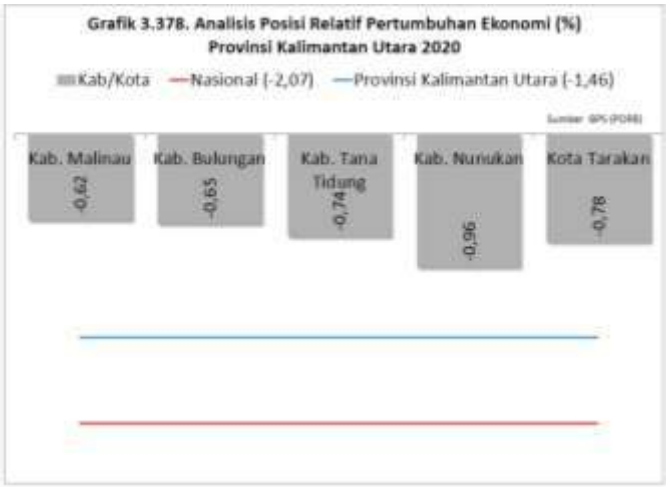
Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan

Sumber: hasil analisis, 2021
Keterangan terdapat diantara kuadran I dan III, diantara kuadran II dan IV

3.1.7. Bidang Ekonomi

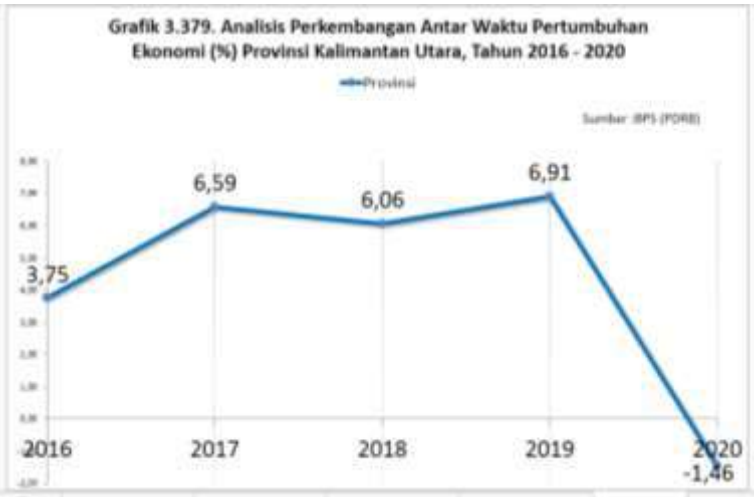
3.1.7.1. Hasil analisis pertumbuhan ekonomi (%)

a. hasil analisis posisi relatif



Hasil analisis posisi relatif pertumbuhan ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terkontraksi sebesar -1,46% berada diatas nasional -2,07% berarti baik. Lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara berada diatas provinsi berarti baik, dari kontraksi tertinggi ke terendah sebagai berikut di Kabupaten Nunukan -0,96%, di Kota Tarakan sebesar -0,78%, di Kabupaten Tana Tidung sebesar -0,74%, di Kabupaten Bulungan sebesar -0,65, dan di Kabupaten Malinau sebesar -0,62% (grafik 3.378).

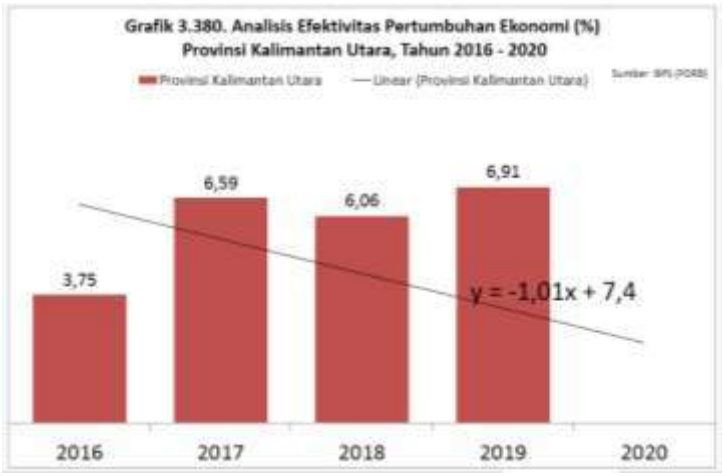
b. hasil analisis perkembangan antar waktu



Hasil analisis perkembangan antar waktu pertumbuhan ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya fluktuatif, untuk tahun 2020 terkontraksi/turun/memburuk sebesar 8,37% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi -1,46%. Dibanding target pencapaian tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 adalah sebesar .....%, maka tidak tercapai karena berada dibawah target pencapaian tahun 2020 (grafik 3.379).

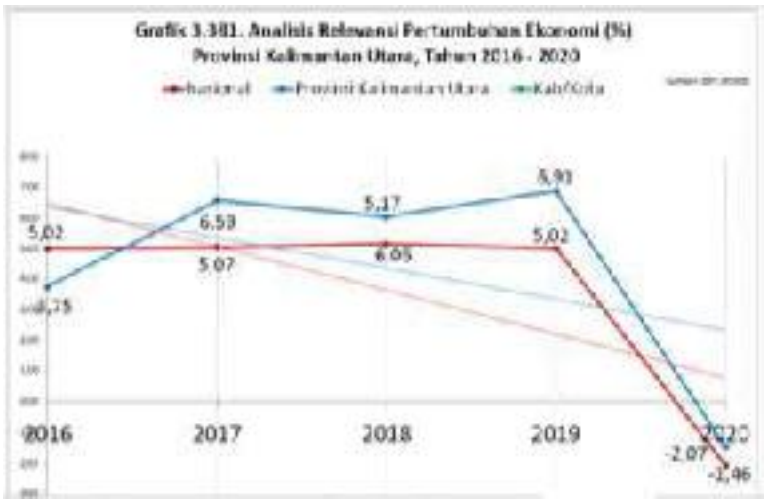
c. hasil analisis efektivitas

Hasil analisis efektivitas pertumbuhan ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 tidak terjadi, karena tahun 2020 terkontraksi sebesar 8,37%



dibanding tahun 2019 sehingga tahun 2020 bernilai -1,46%, dan turunnya jauh dari turunnya garis linear provinsi dengan persamaan y = 1,01x+7,4 (grafik 3.380).

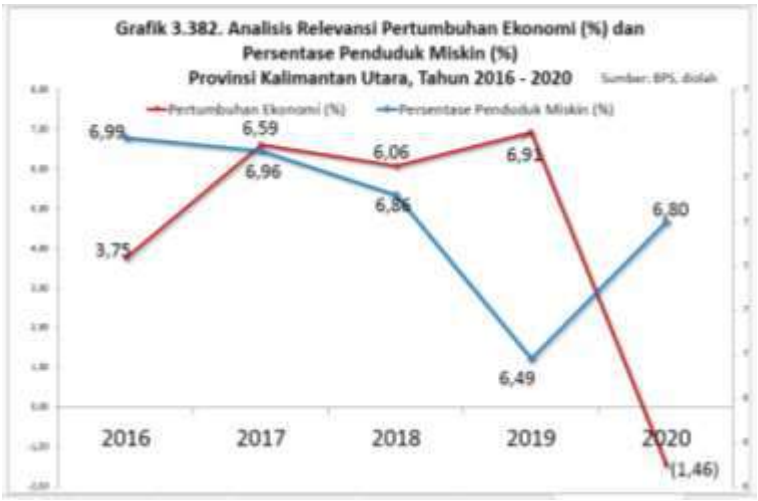
d. hasil analisis relevansi

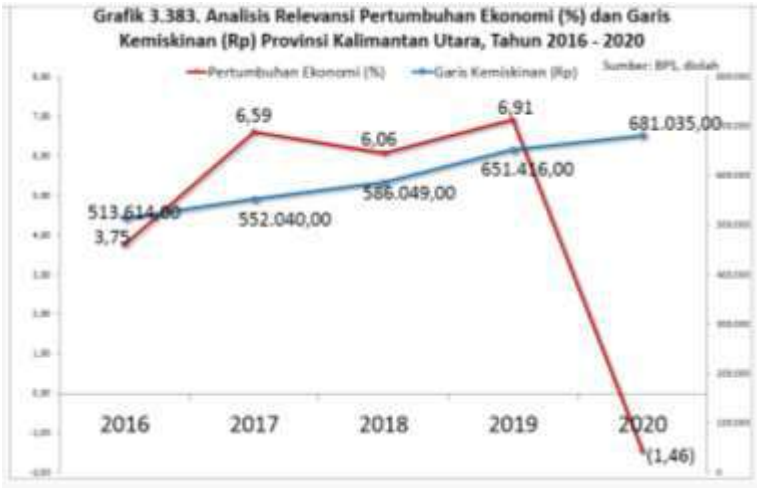


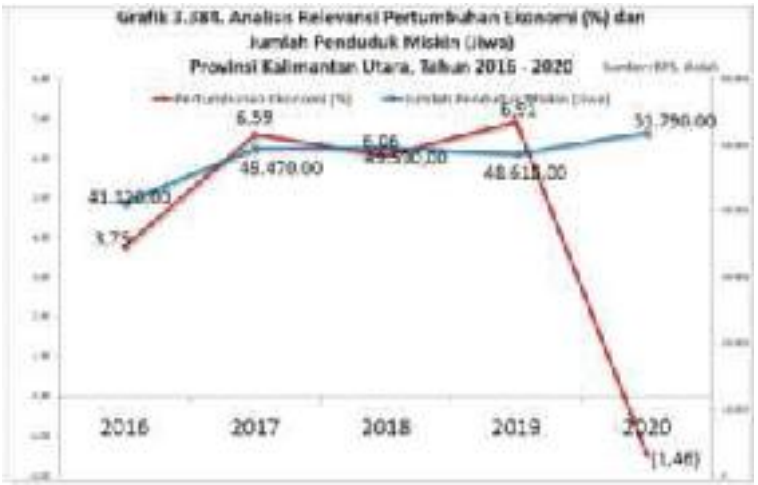
Grafik 3.381 menjelaskan relevansi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020, khususnya pada tahun 2020 terhadap nasional terjadi, karena masing-masing terlihat terkontraksi/turun/memburuk sebesar 8,37% untuk provinsi sehingga menjadi -1,46%, dan turunnya jauh dibawah turunnya garis linear provinsi tahun 2020, dibanding capaian provinsi tahun 2019, begitu juga nasional terkontraksi/turun/memburuk sebesar 7,09% sehingga menjadi -2,07%, dan naiknya berada jauh dibawah turunnya garis linear nasional pada tahun 2020, dibanding capaian nasional tahun 2020.

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

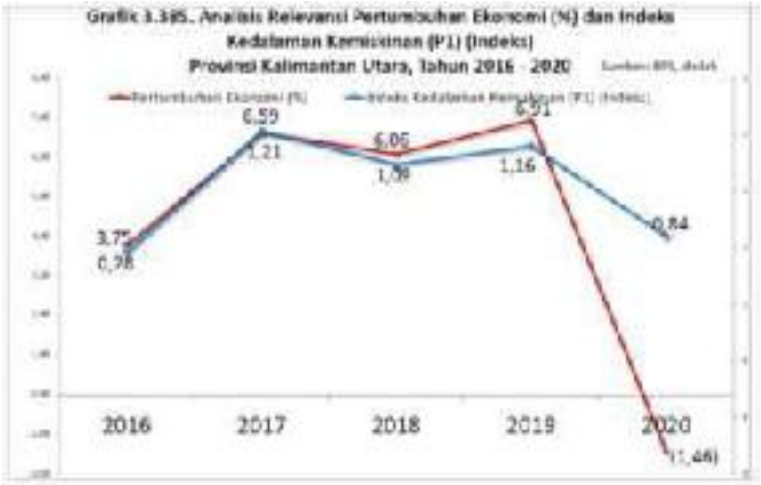
Kemudian, grafik 3.382 s/d grafik 3.386 menjelaskan relevansi antara turunnya pertumbuhan ekonomi (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap indikator bidang konsumsi/pengeluaran. Turunnya pertumbuhan ekonomi (%) provinsi tahun 2020 juga ikuti naiknya persentase penduduk miskin (grafik 3.383), naiknya garis kemiskinan (grafik 3.384) dan naiknya jumlah penduduk miskin (grafik 3.384), yang mengindikasikan relevan karena ke tiga indikatornya memburuk, akibat memburuknya pertumbuhan ekonom1 pada tahun 2020.







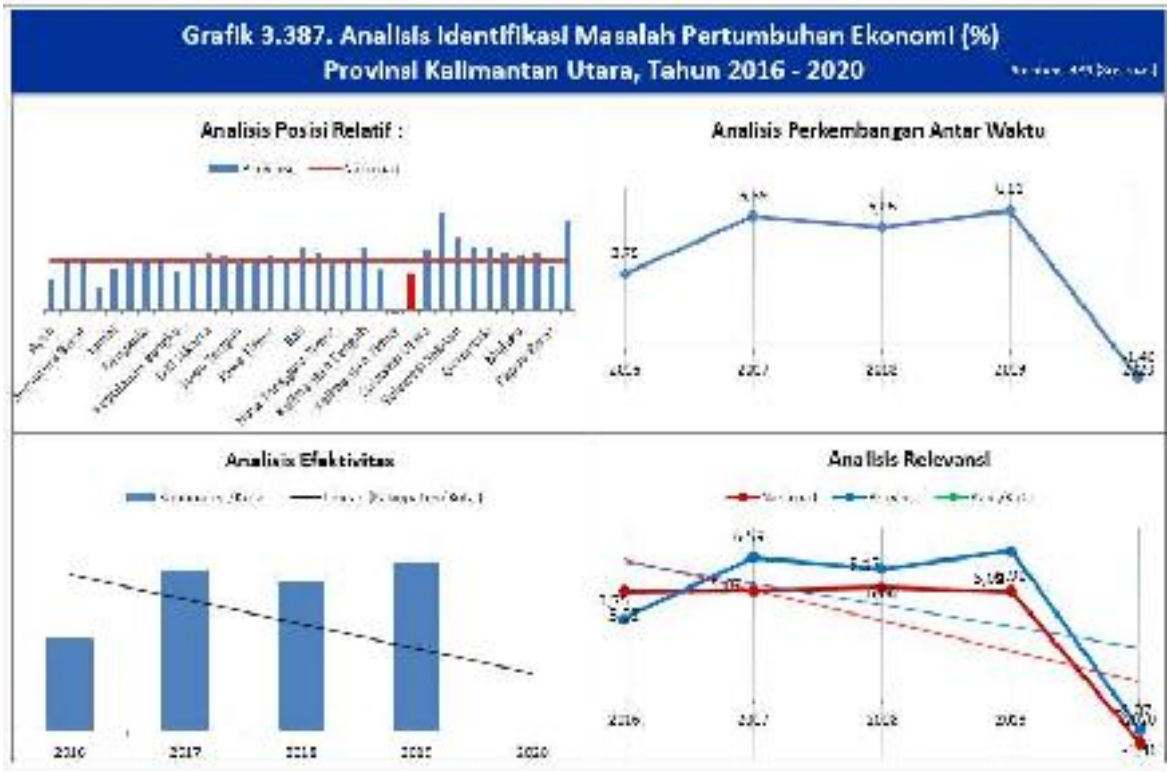
Relevansi tidak terjadi antara memburuknya pertumbuhan ekonomi (%) provinsi tahun 2020 terhadap indikator indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.385) dan indikator indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.386) karena kedua indikator ini membaik/turun.





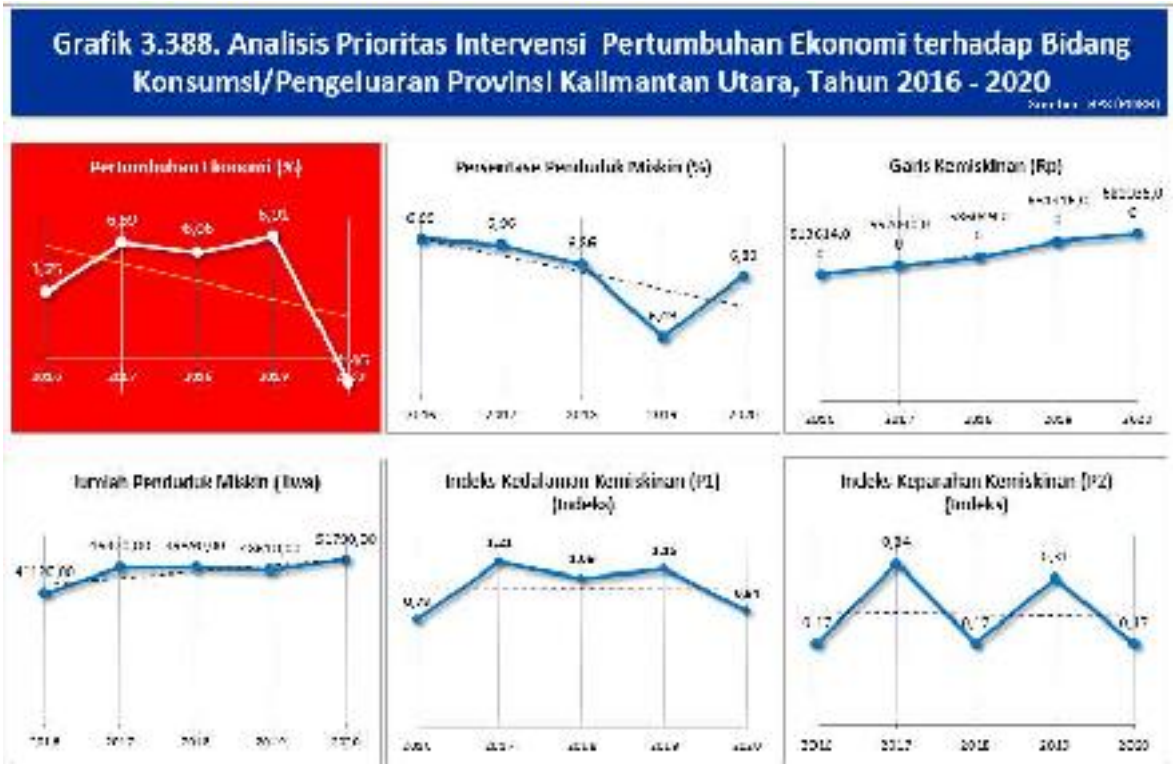
f. hasil analisis identifikasi masalah

Grafik 3.387 menginformasikan bahwa ada masalah pertumbuhan ekonomi (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020, karena hasil analisis trennya turun/memburuk yaitu pada hasil analisis perkembangan antar waktu, analisis efektivitas, dan analisis relevansi, sedangkan pada hasil analisis posisi relatif pada tahun 2020 tidak masalah karena masih dibawah nasional yang artinya baik.



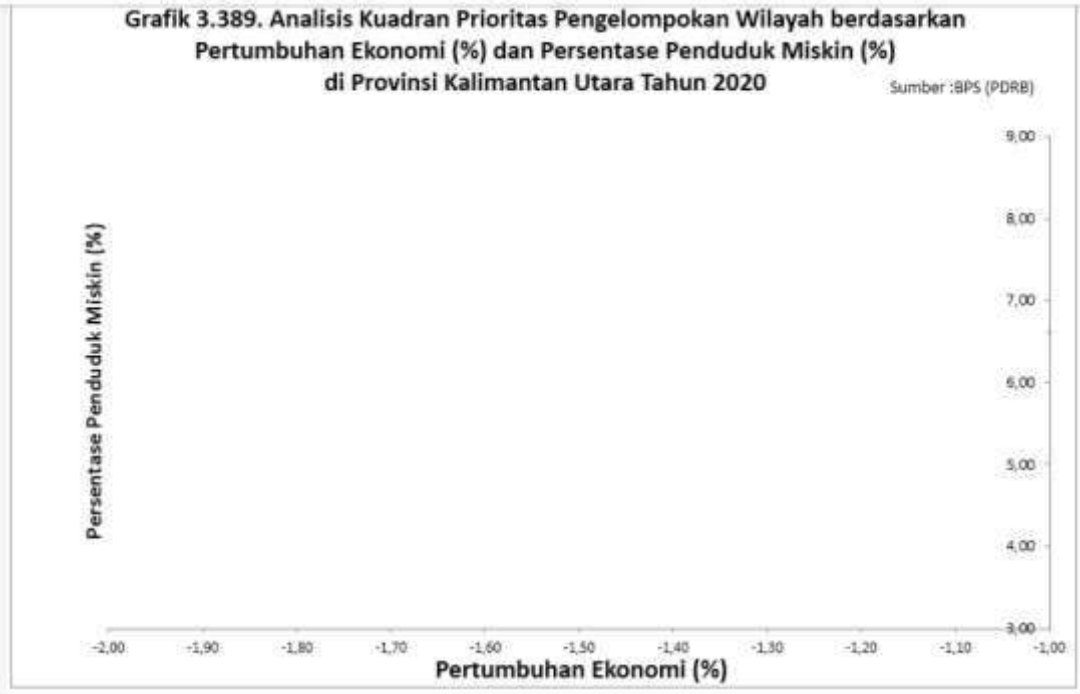
g. hasil analisis prioritas intervensi

Selanjutnya, grafik 3.388 menginformasikan bahwa prioritas intervensi dengan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran yaitu pada indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin, ketiga indikator ini juga turut naik/memburuk, sedangkan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak bermasalah karena turun/membaik, walaupun pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -1,46% pada tahun 2020.



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA

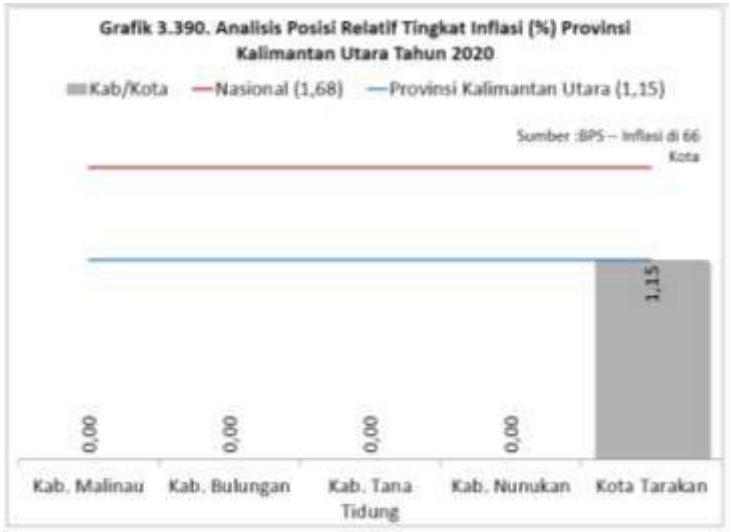
Berhubung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 terkontraksi -1,46% dikaitkan dengan indikator bidang konsumsi/pengeluaran pada tahun 2020, maka *tool* aplikasi analisis situasi kemiskinan tidak dapat menampilkan hasil analisisnya sebagaimana contoh pada grafik 3.389. Sehingga, hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA tahun 2020 tidak dapat disajikan/ditampilkan.



3.1.7.2. Hasil analisis tingkat inflasi (%)

a. hasil analisis posisi relatif

Grafik 3.390 menginformasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Utara sebagai lokus inflasi adalah di Kota Tarakan yang merupakan salah satu dari 66 kota di Indonesia untuk dinilai inflasinya oleh BPS. Berdasarkan data pada tahun 2020 tercatat inflasi di provinsi sebesar 1,15% lebih rendah dibanding nasional sebesar 1,68%, berarti baik.



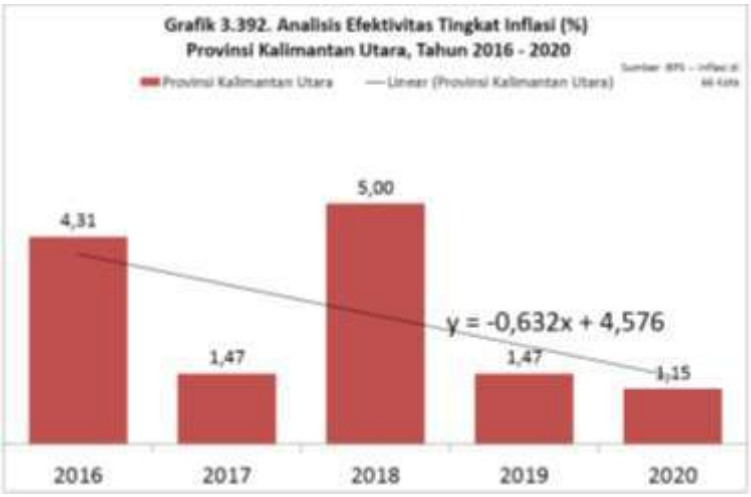
b. hasil analisis perkembangan antar waktu

Hasil analisis perkembangan antar waktu tingkat inflasi (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 grafiknya fluktuatif, untuk tahun 2020 turun sebesar -0,32% dibanding tahun 2019 sehingga menjadi 1,15%. Dibanding target inflasi tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 sebesar .....%, tercapai karena realisasinya berada dibawah target pencapaian (grafik 3.391).

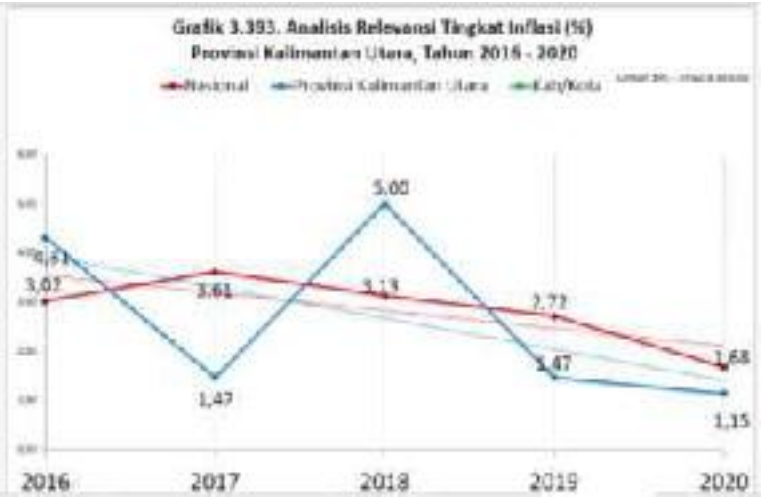


c. hasil analisis efektivitas

Hasil analisis efektivitas tingkat inflasi (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khsusunya tahun 2020 terjadi, karena pada tahun 2020 turun sebesar -0,32% dibanding tahun 2019, dan turunnya jauh dibawah turunnya garis linear provinsi pada tahun 2020, dengan persamaan y = 0,632x + 4,576 (grafik 3.392).



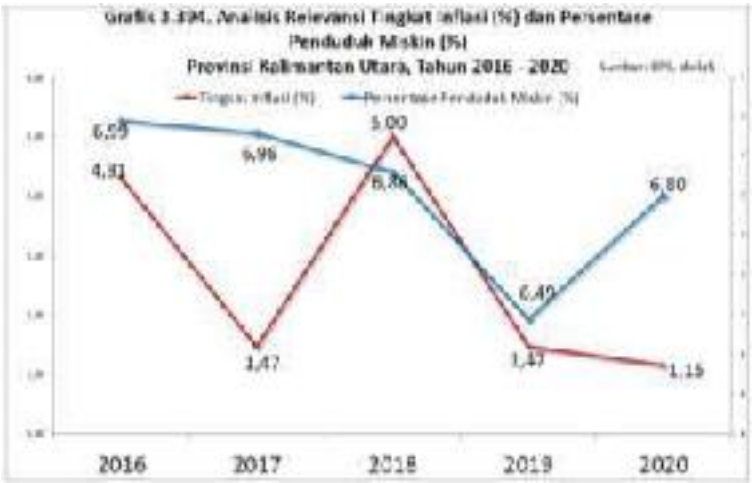
d. hasil analisis relevansi



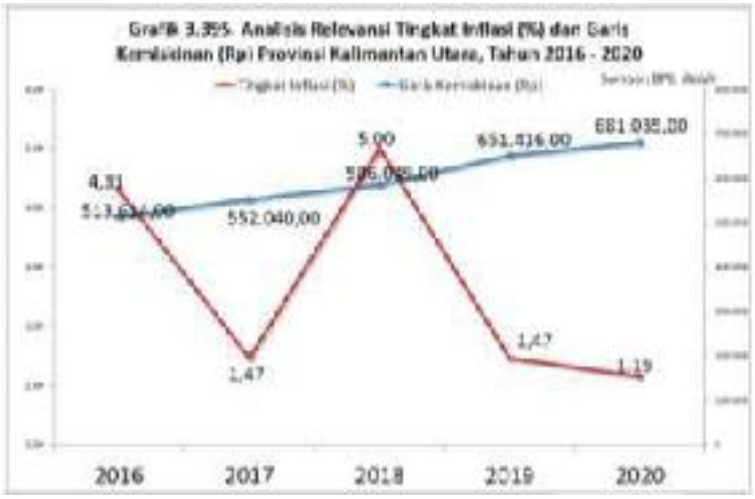
Grafik 3.393 menjelaskan hasil analisis relevansi tingkat inflasi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 khususnya pada tahun 2020 terhadap nasional terjadi, karena sama-sama turun, untuk provinsi turun sebesar -0,32% dan turunnya dibawah turunnya garis linear provinsi begitu juga nasional turun sebesar -1,04% dan turunnya berada dibawah turunnya garis linear nasional pada tahun 2020.

e. hasil analisis keterkaitan/relevansi antar indikator

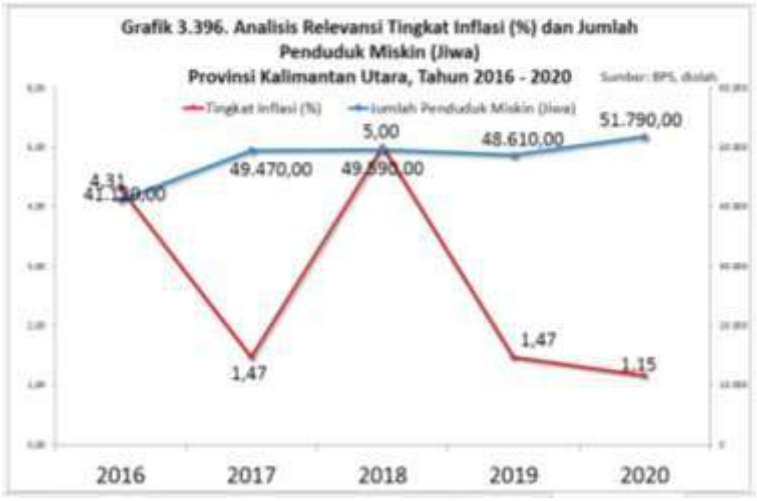
Kemudian, grafik 3.394 s/d grafik 3.398 menjelaskan relevansi antara turunnya tingkat inflasi (%) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap indikator bidang konsumsi/pengeluaran.

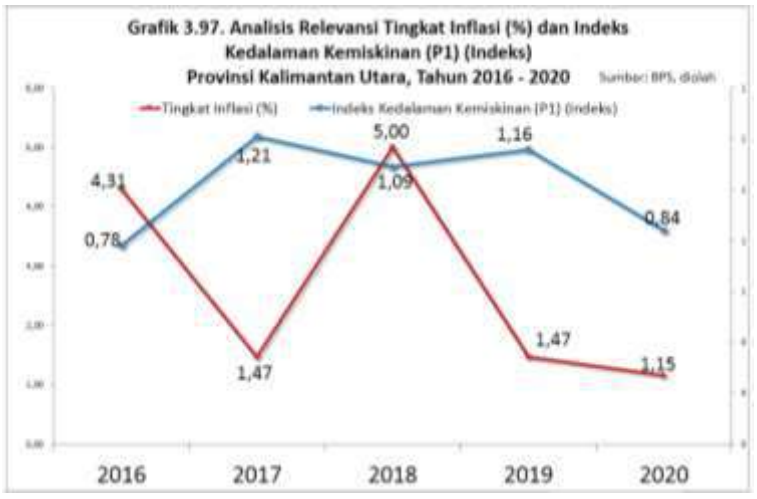


Turunnya tingkat inflasi (%) provinsi tahun 2020, sementara indikator persentase penduduk miskin (grafik 3.394), garis kemiskinan (grafik



3.395) dan jumlah penduduk miskin (grafik 3.396) justru masing-masing indikator naik, yang mengindikasikan tidak terjadi relevan karena ke tiga indikatornya memburuk. Tepai sebaliknya, relevansi terjadi antara turunnya tingkat inflasi (%) provinsi tahun 2020 terhadap indikator indeks kedalaman kemiskinan (grafik 3.397) dan indikator indeks keparahan kemiskinan (grafik 3.398) karena kedua indikator ini membaik/turun.

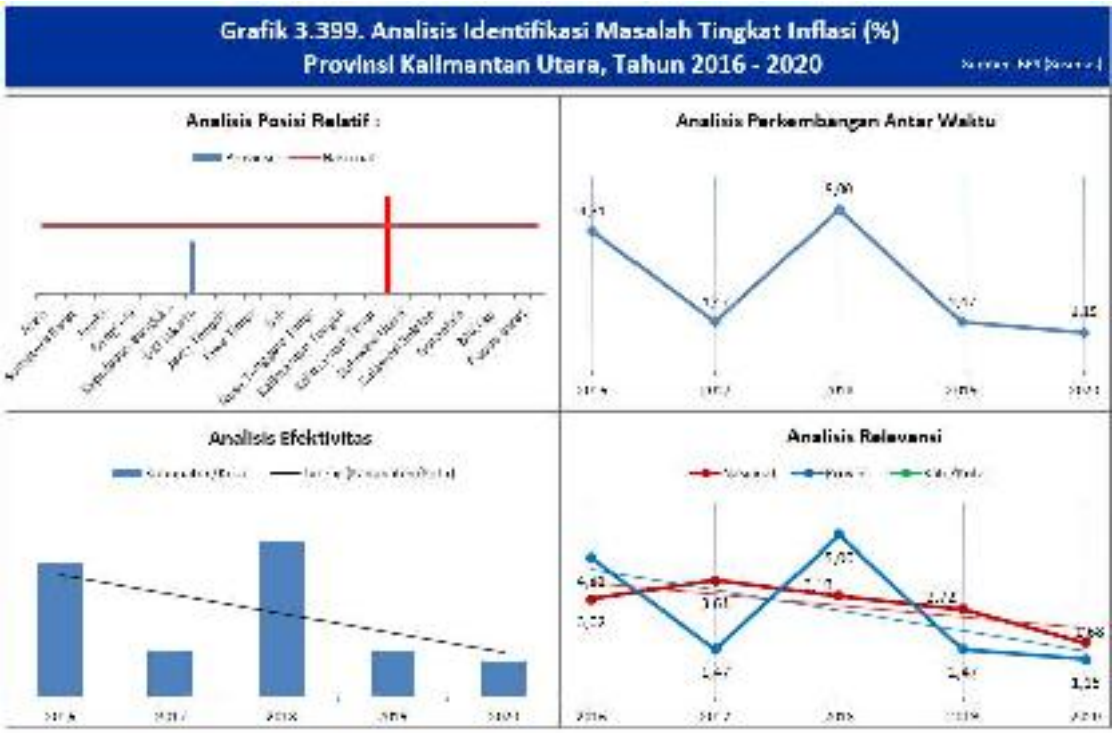






f. hasil analisis identifikasi masalah

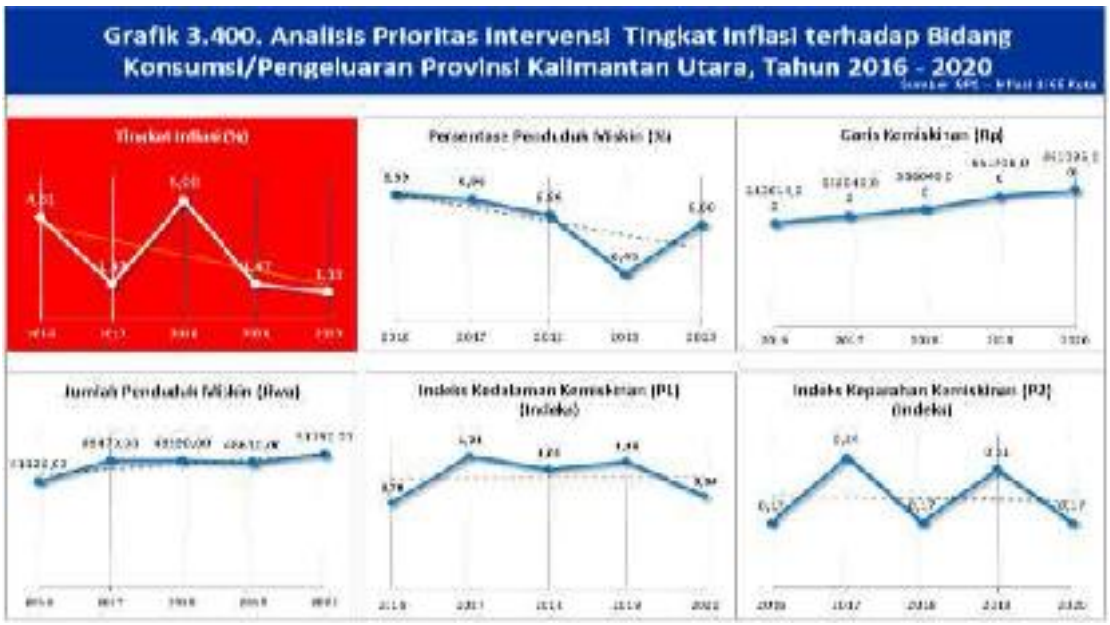
Selanjutnya, grafik 3.399 menginformasikan hasil analisis identifikasi masalah, yaitu dengan terkontraksinya tingkat inflasi sebesar -0,32% di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran tidak ada masalah karena semua hasil analisisnya membaik/turun.



g. hasil analisis prioritas intervensi

Grafik 3.400 menginformasikan bahwa prioritas intervensi dengan terkontraksinya tingkat inflasi sebesar -0,32% di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 terhadap bidang konsumsi/pengeluaran yaitu pada indikator persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin, ketiga indikator ini juga turut

naik/memburuk, sedangkan pada indikator indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tidak bermasalah karena turun/membaik.



h. hasil analisis kuadran prioritas dan kuadran IPA



Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat inflasi terhadap persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.401 menunjukkan bahwa prioritas kedua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung .

Tabel 3.95 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat inflasi (X) dan persentase penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi,	Kabupaten Bulungan, Kabupaten

	tetapi kualitas rendah	Malinau,
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021



Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat inflasi terhadap garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.402 menunjukkan bahwa prioritas kedua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau.

Tabel 3.96 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat inflasi (X) dan garis kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Malinau,
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Bulungan,

		Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Tidak ada

Sumber: hasil analisis, 2021

Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat inflasi terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.403 menunjukkan bahwa prioritas pertama yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan, prioritas empat terdapat di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung.

Grafik 3.403. Analisis Kuadran Prioritas Pengelompokan Wilayah berdasarkan Tingkat Inflasi (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



Tabel 3.97 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat inflasi (X) dan jumlah penduduk miskin (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Kota Tarakan
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan	Tidak ada

	atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	

Sumber: hasil analisis, 2021



Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat inflasi terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.404 menunjukkan bahwa prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.98 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat inflasi (X) dan indeks kedalaman kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021



Hasil analisis kuadran prioritas pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat inflasi terhadap indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagaimana disajikan grafik 3.405 menunjukkan bahwa prioritas dua yang diintervensi pada tahun 2021 adalah terdapat di Kota Tarakan, prioritas tiga terdapat di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, dan prioritas empat terdapat di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 3.99 Hasil analisis kuadran *Importance Performance Analysis* (IPA) antara tingkat inflasi (X) dan indeks keparahan kemiskinan (Y) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.

Kuadran IPA	Penjelasan	Kabupaten/Kota
I	*high leverage, attribute to improve*/variabel yang menjadi prioritas perbaikan, sangat diharapkan oleh pengguna, dan tingkat kepentingan/kepuasan tinggi, tetapi kualitas rendah	Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau
II	*attribute to maintain*/variabel yang sebaiknya dipertahankan, karena dari segi kualitas tinggi, dan tingkat kepentingan/kepuasan oleh pengguna dinilai tinggi. Keunggulan produk/jasa ditentukan oleh variabel di kuadran II	Tidak ada
III	*attribute to maintain*/variabel yang kurang prioritas, dari segi kualitas rendah, sehingga bisa diabaikan	Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung
IV	*attribute low leverage, attribute to de-emphasize*/variabel yang bisa dikatakan berlebihan, karena kualitas dinilai tinggi, tetapi kurang diharapkan atau tingkat kepentingan/kepuasan rendah. Bisa dikurangi untuk efisiensi	Kota Tarakan

Sumber: hasil analisis, 2021

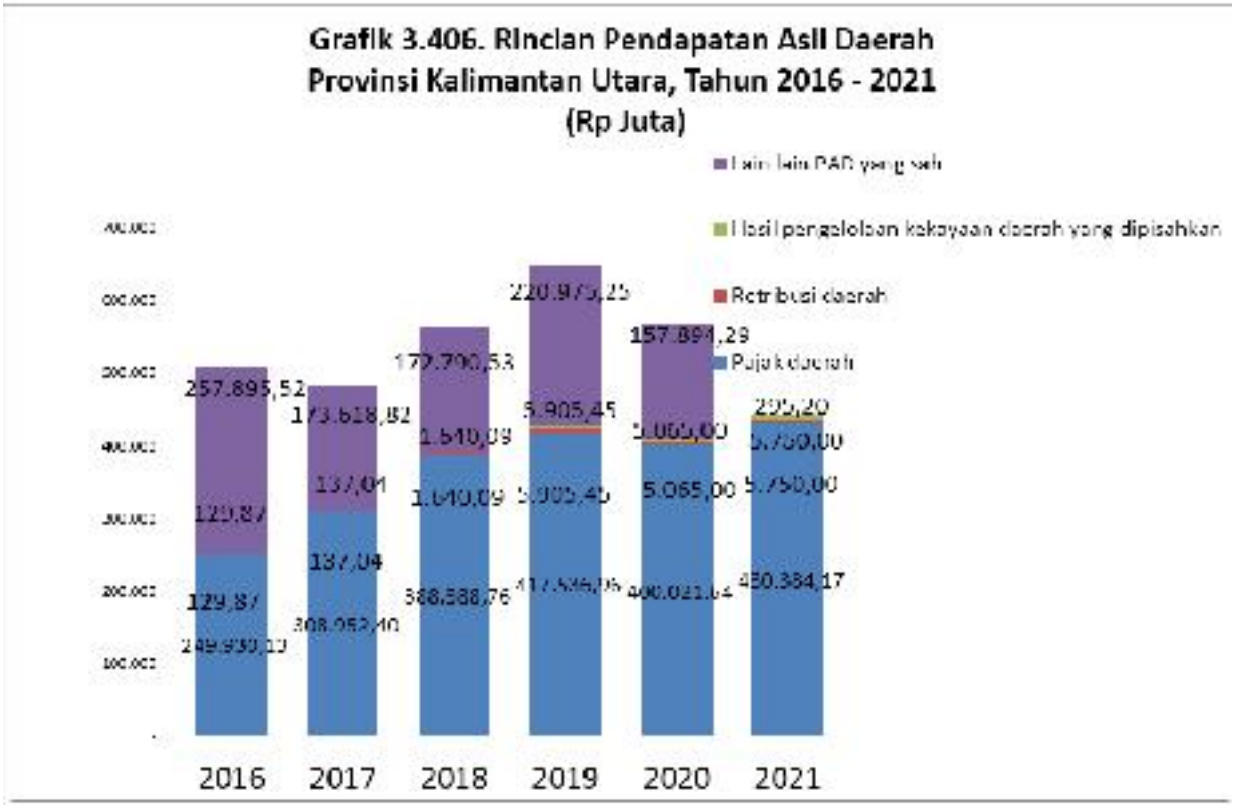
3.2. Analisis Profil APBD Provinsi

Menu Profil Umum APBD dalam aplikasi ini menjelaskan 2 komponen utama APBD, yaitu Profil Pendapatan (PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah) dan Belanja Daerah (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung).

3.2.1. Analisis Pendapatan

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik 3.406 menyajikan rincian pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021, dimana tahun 2016-2019 merupakan realisasi sedangkan tahun 2020-2021 adalah target pencapaian (Rp juta) (sumber: data diolah, BPKD Provinsi Kaltara, 2021.



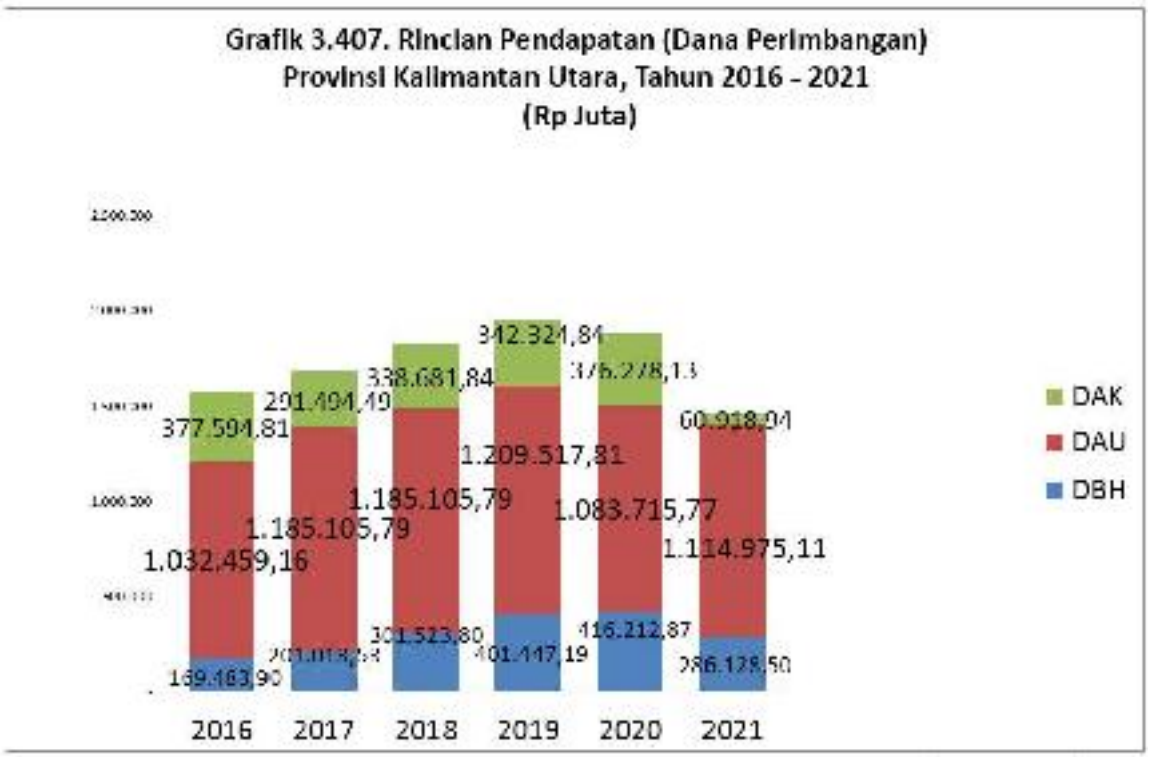
Tahun	2016 REALISASI	2017 REALISASI	2018 REALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH	507.955.516.972,13	482.740.846.005,72	574.088.357.593,08
Pendapatan Pajak Daerah	249.930.125.019,00	308.952.404.415,00	388.388.763.489,00
Hasil Retribusi Daerah	129.871.200,00	137.040.500,00	1.640.091.145,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	32.576.306,64	11.268.969.572,27
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	257.895.520.753,13	173.618.824.784,08	172.790.533.386,81

Tahun	2019 REALISASI	2020 ANGGARAN (MURNI)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	655.846.206.222,83	690.260.962.728,00
Pendapatan Pajak Daerah	417.536.961.744,00	480.025.962.728,00
Hasil Retribusi Daerah	5.905.454.587,00	22.000.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.428.544.713,99	13.200.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.975.245.177,84	175.035.000.000,00

Sumber: BPKD Prov. Kaltara, 2021

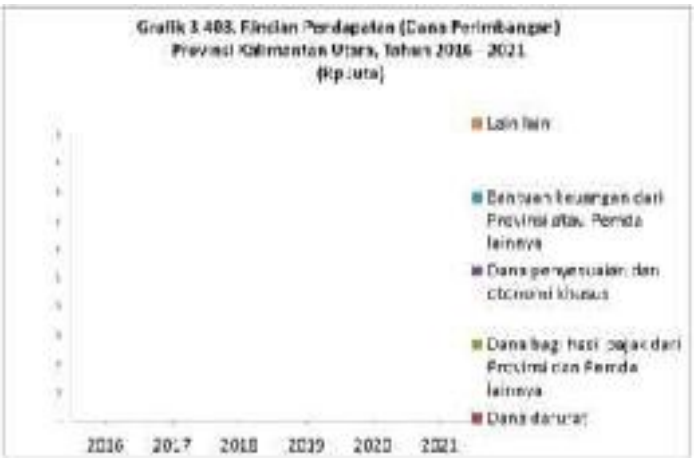
3.2.1.2. Dana Perimbangan

Grafik 3.407 menyajikan rincian pendapatan dana perimbangan terdiri atas dana alokasi khusus (DAK), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021, dimana tahun 2016-2020 merupakan realisasi sedangkan tahun 2021 adalah target pencapaian (Rp juta) (sumber: data diolah, BPKD Provinsi Kaltara, 2021.



3.2.1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

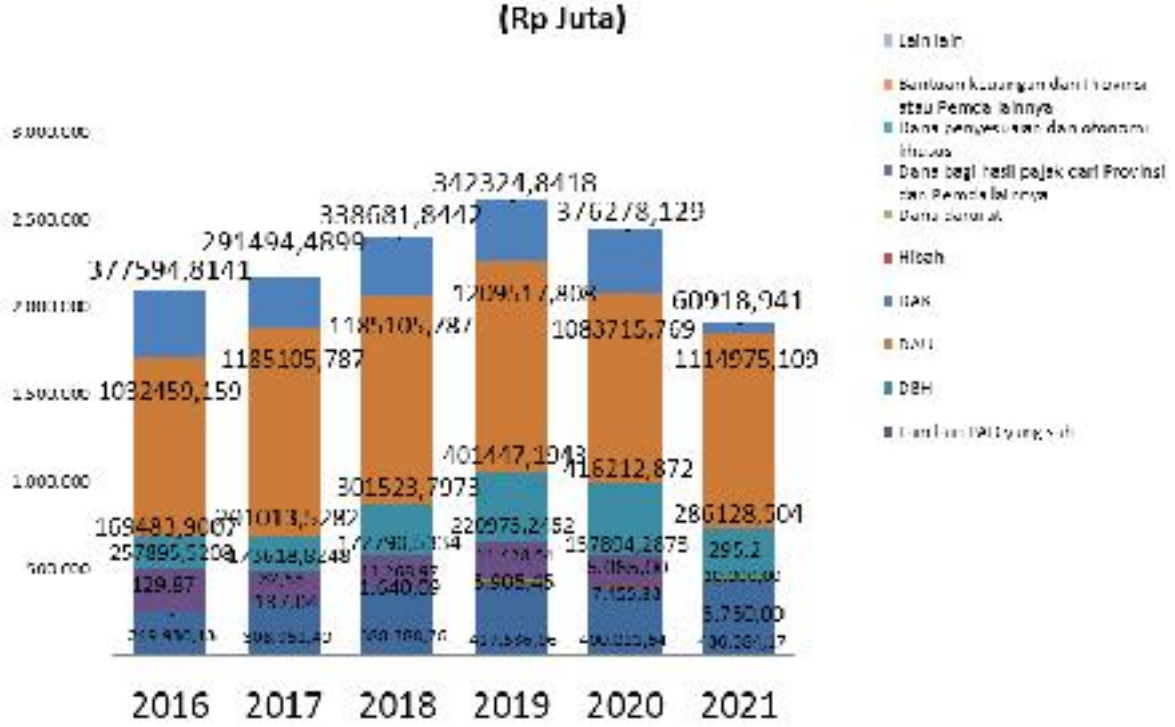
Untuk rincian pendapatan (dana perimbangan) yang berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 tidak ada sebagaimana disajikan pada grafik 3.408 (sumber: data diolah, BPKD Provinsi Kaltara, 2021.



3.2.1.4. Rincian keseluruhan pendapatan daerah

Adapun rincian keseluruhan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan pada grafik 3.409 dalam Rp juta. Untuk tahun 2016-2020 adalah realisasi, sedangkan tahun 2021 adalah target pencapaian rincian pendapatan (sumber: data diolah, BPKD Provinsi Kaltara, 2021).

Grafik 3.409. Rincian Pendapatan (Semua Pendapatan)
Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2016 - 2021
(Rp Juta)



Tabel 3.100 Rincian pendapatan murni dan perubahan (Rp)

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021

NO	URAIAN	2016		2017		TAHUN ANGGARAN 2018	
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN
I	PENDAPATAN						
	I.A. PENDAPATAN ASLI DAERAH						
	I.A.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH						
	I.A.2 HASIL RETRIBUSI DAERAH						
	I.A.3 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN						
	I.A.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH						
	I.B. DANA PERIMBANGAN						
	I.B.1 BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK						
	I.B.2 DANA ALOKASI UMUM						
	I.B.3 DANA ALOKASI KHUSUS						
	I.C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
	I.C.1. PENDAPATAN HIBAH						
	I.C.2. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAINNYA						
	I.C.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS						
	I.C.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA						
	I.C.6. PENDAPATAN LAINNYA						

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
		2019		2020	
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN
1	PENDAPATAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.1.4	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2.	DANA PERIMBANGAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3.	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3.1	PENDAPATAN HIBAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.3.2	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI & PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	-	-	-
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	-	-	-	[illegible]
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	-	-	-	-
1.3.6	PENDAPATAN LAINNYA	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]

KODE	URAIAN	TAHUN ANGGARAN			
		2021		2022	
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	675.462.500.000	-	-	
4.1.01	PAJAK DAERAH	430.384.170.522	-	-	
4.1.02	RETRIBUSI DAERAH	3.750.000.000	-	-	
4.1.03	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN	10.000.000.000	-	-	
4.1.04	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	229.308.329.478	-	-	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.534.318.927.000,00	-	-	
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.534.318.927.000	-	-	
4.2.01.01	DANA PERIMBANGAN	1.462.022.554.000	-	-	
4.2.01.01.01	DANA TRANSFER UMUM - DANA BAGI HASIL (DBH)	286.128.504.000	-	-	
4.2.01.01.02	DANA TRANSFER UMUM - DANA ALOKASI UMUM (DAU)	1.114.975.109.000	-	-	
4.2.01.01.03	DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK	53.274.586.000	-	-	
4.2.01.01.04	DANA TRANSFER KHUSUS - DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK	7.644.355.000	-	-	
4.2.01.02	DANA INSENTIF DAERAH (DID)	72.296.373.000	-	-	
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	295.200.000	-	-	
4.3.01	PENDAPATAN HIBAH	295.200.000	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.250.056.627.000	-	-	

Tabel 3.101 Rincian pendapatan perubahan (Rp), realisasi (Rp) dan Kinerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020

KODE URAIAN	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018			TAHUN ANGGARAN 2017		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	
4.2	DANA PERIMBANGAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2.2	Dana Alokasi Umum	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3.1	Hendapatan Hibah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.3.0	Pendapatan Lainnya	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	



NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018			TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.1							
4.1.2							
4.1.3							
4.1.4							
4.2	DANA PERIMBANGAN						
4.2.1							
4.2.2							
4.2.3							
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
4.3.1							
4.3.4							
4.3.6							

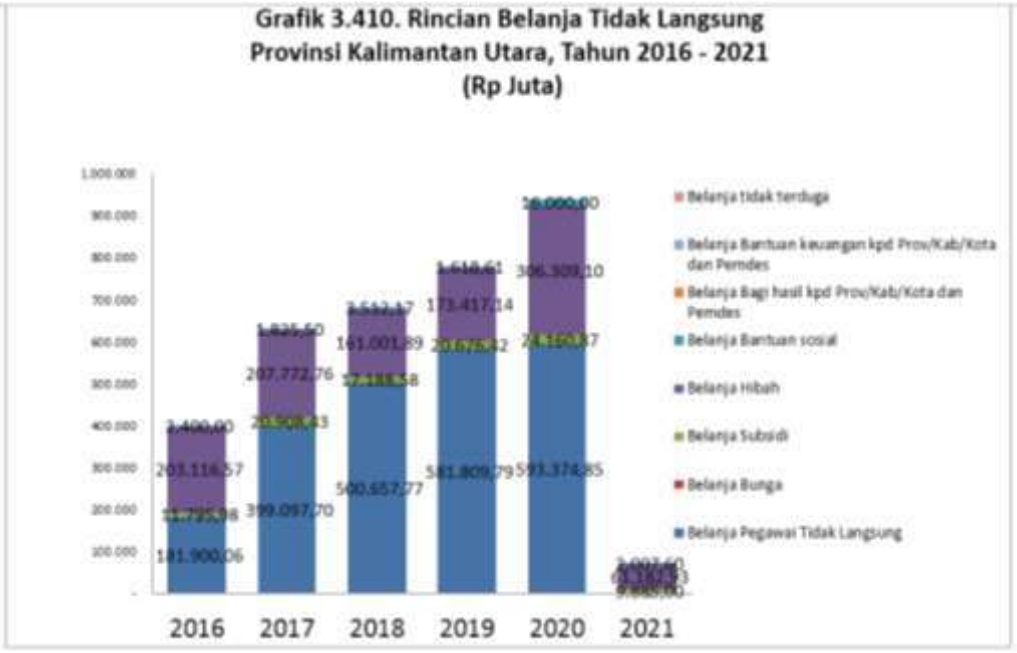


NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN (RUPIAH)	REALISASI	(%)
4	PENDAPATAN		0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00	0,00
4.1.1			0,00	0,00
4.1.2			0,00	0,00
4.1.3			0,00	0,00
4.1.4			0,00	0,00
4.2	DANA PERIMBANGAN		0,00	0,00
4.2.1			0,00	0,00
4.2.2			0,00	0,00
4.2.3			0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		0,00	0,00
4.3.1			0,00	0,00
4.3.4			0,00	#DIV/0!
4.3.6			0,00	0,00

3.2.2. Analisis Belanja

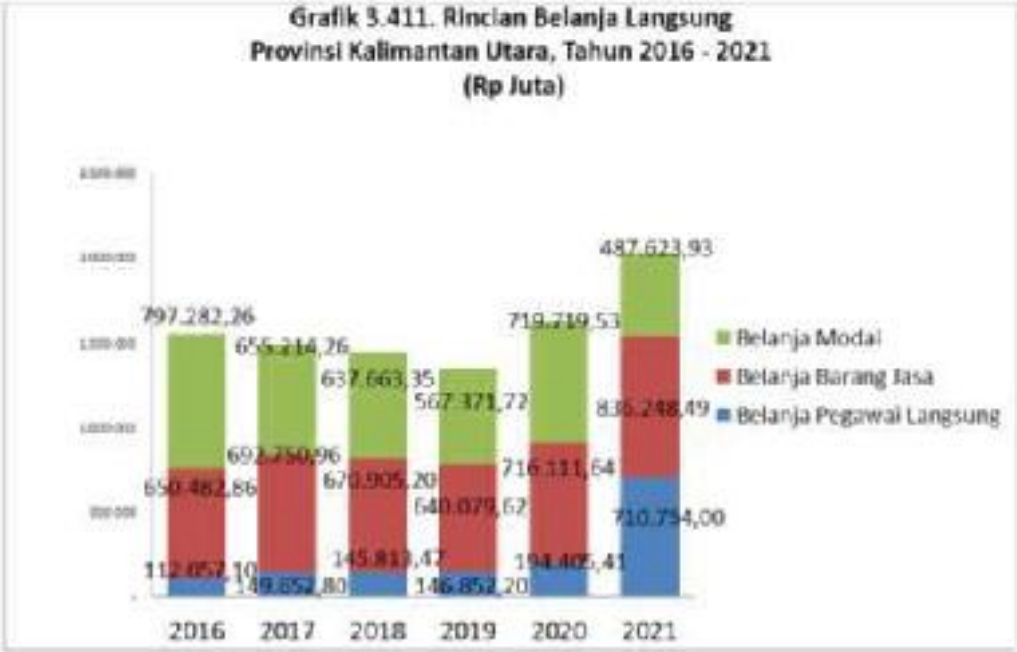
3.2.2.1. Belanja tidak langsung

Grafik 4.410 menyajikan rincian belanja tidak langsung Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 (Rp juta), untuk tahun 2016-2021 adalah realisasi, sedangkan tahun 2021 adalah target pencapaian (sumber : data diolah, BPKD Prov.Kaltara, 2021).



3.2.2.2. Belanja langsung

Grafik 4.411 menyajikan rincian belanja langsung Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 (Rp juta), untuk tahun 2016-2021 adalah realisasi, sedangkan tahun 2021 adalah target pencapaian (sumber : data diolah, BPKD Prov.Kaltara, 2021).



3.2.2.3. Total Belanja

Grafik 4.412 menyajikan rincian pendapatan (semua belanja) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 (Rp juta), untuk tahun 2016-2021 adalah realisasi,

sedangkan tahun 2021 adalah target pencapaian (sumber : data diolah, BPKD Prov.Kaltara, 2021).



Tabel 3.102 Rincian belanja murni dan perubahan (Rp)

Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN					
		2016		2017		2018	
		MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN	MURNI	PERUBAHAN
2	BELANJA	2.128.219.904.001,83	2.031.308.969.202,32	1.812.712.089.203,00	1.691.252.298.706,17	1.331.202.895.681,19	2.095.179.000.911,19
	2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.141.300.054.597,80	1.004.111.075.901,81	1.027.009.806.296,80	1.032.780.403.267,30	1.017.902.250.000,00	989.429.833.026,13
	2.1.1. BELANJA PEGAWAI	313.964.197.401,83	297.976.276.691,00	347.576.276.691,00	473.718.074.230,00	506.252.250.296,19	542.917.532.181,13
	2.1.2. BELANJA BUNGA			7.162.681.297,00	7.162.681.297,00	9.618.892,97,00	2.000.000.000,00
	2.1.3. BELANJA SUBSIDI	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	14.000.000.000,00	13.758.000.000,00	21.759.331.000,00	21.759.000.000,00
	2.1.4. BELANJA HIBAH	226.905.200.000,00	210.204.200.000,00	220.189.009.209,00	318.199.980.000,00	344.819.870.121,57	309.209.870.121,57
	2.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.802.000.000,00	7.300.300.000,00	6.815.300.000,00
	2.1.6. BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA	157.377.857.843,83	155.833.984.189,81	334.583.140.216,80	334.583.140.216,80	344.819.190.180,00	347.575.00...7.121,57
	2.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	408.033.200.000,00	408.338.300.000,00	185.271.006.206,00	170.827.230.080,00	234.896.160.486,24	76.916.160.486,24
	2.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	13.007.009.204,00	3.000.000.204,00	5.300.300.000,00	5.000.000.000,00
	2.2. BELANJA LANGSUNG	1.100.573.253.300,00	1.137.052.895.041,51	1.801.202.002.906,00	2.011.012.279.811,17	1.863.952.000.000,00	3.139.000.235.811,00
	2.2.1. BELANJA PEGAWAI	141.202.671.403,00	148.338.713.206,00	181.071.803.208,00	133.138.958.208,13	194.215.217.716,85	174.317.381.418,85
	2.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA	308.779.481.120,00	364.945.913.908,51	322.831.694.815,00	913.678.138.457,42	914.334.387.390,47	774.304.280.781,57
	2.2.3. BELANJA MODAL	535.505.103.031,00	627.572.660.700,00	954.351.604.915,24	1.611.704.183.046,52	1.133.318.347.340,68	1.064.361.307.385,80
		750.000.000.000,00	585.239.471.047,29	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	PEMBIAYAAN DAERAH	750.000.000.000,00	585.239.471.047,29	613.739.806.210,00	701.914.731.386,73	795.851.316.386,19	485.585.885.386,58
	3.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	900.000.000.000,00	735.239.471.047,29	847.571.806.210,00	202.857.481.276,21	853.851.316.386,19	485.585.885.307
	3.1.1. SILPA TAHUN LALU/SISA LEBIH	900.000.000.000,00	150.239.471.047,29	309.300.000.208,00	161.857.503.140,73	853.851.317.796,81	348.367.937.062,90
	3.1.4. PENERIMAAN PEMBIAYAAN LAINNYA	-	-	847.571.806.210,00	847.571.806.210,00	348.599.366.377,81	348.599.366.377,81
	3.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	-	-	57.999.999.999,00	99.999.999.999,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-	-





Tabel 3.101 Rincian belanja perubahan (Rp), realisasi (Rp) dan kinerja (%) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020





NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018			TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	999.626.913.026,14	999.802.136.886,71	92,65	1.100.080.688.673,00	1.062.974.813.319,58	96,66
5.1.1	Belanja Pegawai	583.517.624.301,11	580.657.170.389,40	99,51	699.872.734.726,00	561.888.785.389,15	80,31
5.1.2	Belanja Bunga	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.3	Belanja Subsidi	31.275.555.000,00	17.981.564.315,00	57,49	35.960.874.625,00	29.670.414.937,68	82,50
5.1.4	Belanja Hibah	199.200.179.523,24	161.031.996.178,24	80,85	189.799.788.500,00	173.403.135.500,00	91,37
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.487.000.000,00	5.092.171.490,00	78,51	3.000.000.000,00	1.010.911.794,00	33,70
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	187.626.287.713,61	140.520.883.026,39	74,91	213.467.424.000,00	213.100.917.381,28	99,83
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan	70.356.166.460,24	70.021.499.792,00	99,52	139.280.916.460,00	71.010.943.745,53	50,98
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	88.338.353,00	2,94	3.000.000.000,00	0,00	0,00
			1.464.382.819.573,71			1.364.303.536.343,44	
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.314.648.230.611,00	1.464.382.819.573,71	75,66	1.377.918.481.086,75	1.364.303.536.343,44	83,19
5.2.1	Belanja Pegawai	174.017.663.405,00	149.813.473.000,00	85,34	183.677.358.894,00	146.852.187.914,00	88,55
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	724.606.294.793,14	670.900.186.539,65	92,59	812.309.724.500,00	640.079.917.313,31	78,81
5.2.3	Belanja Modal	1.314.682.537.200,00	637.682.349.340,68	48,51	550.000.398.758,54	567.371.723.712,13	87,25
	SURPLUS / (DEFISIT)	(583.746.844.308,63)	97.779.773.830,26	(16,71)	(100.398.713.313,26)	103.699.968.355,26	(126,79)



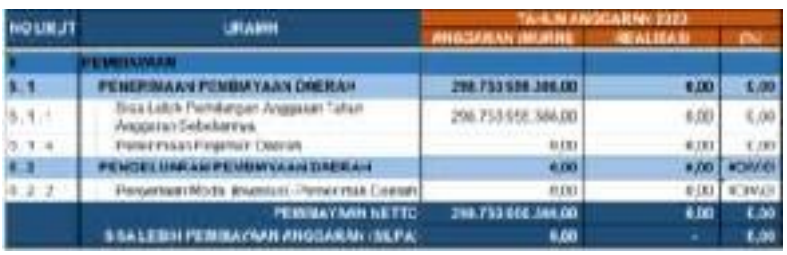
NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN MURNI	REALISASI	(%)
		1.352.234.669.681,00		
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.352.234.669.681,00	0,00	0,00
5.1.1	Belanja Pegawai	703.652.351.302,00	0,00	0,00
5.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	#DIV/0!
5.1.3	Belanja Subsidi	33.160.874.625,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	307.022.943.000,00	0,00	0,00
5.1.5	belanja bantuan sosial	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	230.007.798.815,00	0,00	0,00
5.1.7	belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan	73.342.748.000,00	0,00	0,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	17.142.501.000,00	0,00	0,00
		1.471.232.463.073,00		
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.471.232.463.073,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Pegawai	171.600.149.000,00	0,00	0,00
5.2.2	belanja barang dan jasa	773.282.435.585,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal	526.349.878.488,00	0,00	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(238.752.998.380,00)	0,00	0,00



NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2018			TAHUN ANGGARAN 2021		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	736.234.472.847,29	736.234.472.847,29	100,00	702.363.411.788,23	361.674.577.270,52	51,49
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	736.234.472.847,29	736.234.472.847,29	100,00	361.674.577.270,52	361.674.577.270,52	100,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	340.678.834.517,71	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	PEMBIAYAAN NETTO	586.234.472.847,29	586.234.472.847,29	100,00	702.363.411.788,23	361.674.577.270,52	51,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	361.687.466.162,00	0,00	0,00	140.688.939.682,00	0,00



NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2019			TAHUN ANGGARAN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	(%)	ANGGARAN	REALISASI	(%)
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	489.746.846.306,68	140.865.939.682,90	28,76	187.845.712.313,20	187.845.712.313,20	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya	140.865.939.682,90	140.865.939.682,90	100,00	187.845.712.313,20	187.845.712.313,20	100,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	348.880.906.623,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	29.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	29.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	27.500.000.000,00	27.500.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	460.746.846.306,68	120.865.939.682,90	26,00	160.345.712.313,20	160.345.712.313,20	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	987.846.718.313,25	0,00	0,00	140.688.939.682,00	0,00

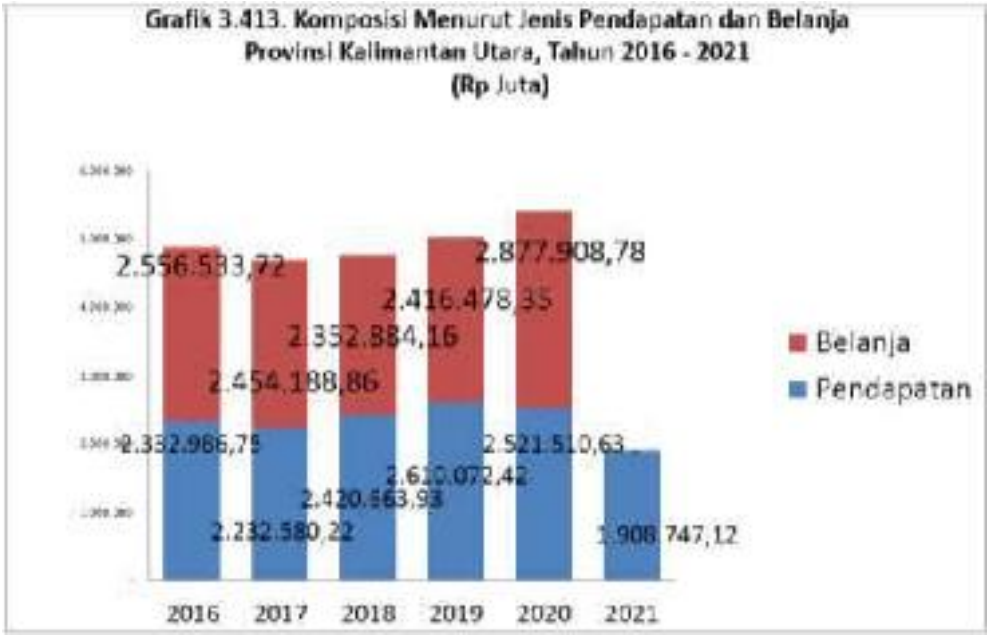


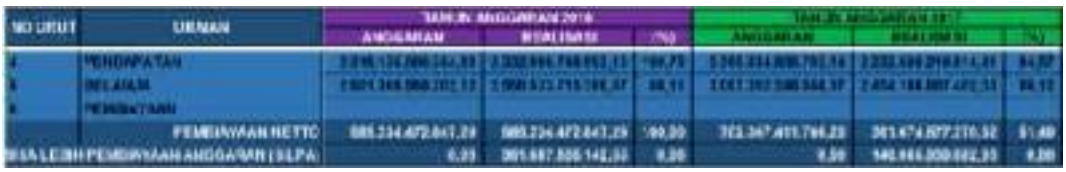
NO URUT	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2020		
		ANGGARAN MURNI	REALISASI	(%)
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	298.753.938.386,00	0,00	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	298.753.938.386,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	#DIV/0!
	PEMBIAYAAN NETTO	298.753.938.386,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	-	0,00

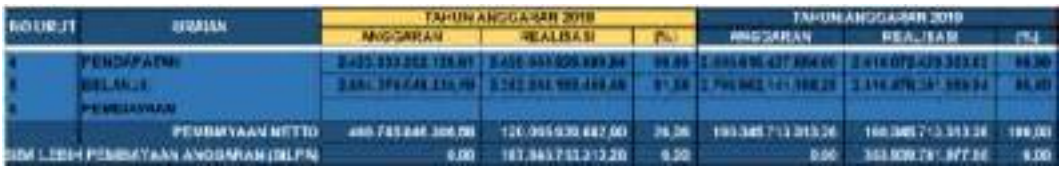
3.2.3. Total Pendapatan dan Belanja

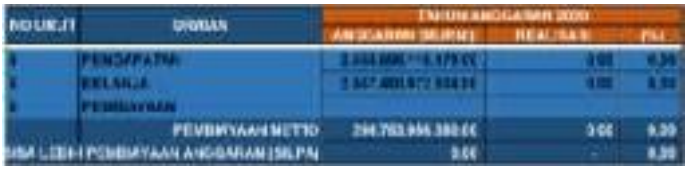
Grafik 4.413 menyajikan komposisi menurut jenis pendapatan dan belanja di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021 (Rp juta), untuk tahun 2016-2021

adalah realisasi, sedangkan tahun 2021 adalah target pencapaian (sumber : data diolah, BPKD Prov.Kaltara, 2021).









BAB IV
PRIORITAS PROGRAM

4.1. Pengertian Prioritas Program

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kata prioritas adalah sesuatu yang harus didahulukan dan diutamakan daripada hal yang lain. Adapun pengertian kata program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan (https://kbbi.web.id). Prioritas dapat didefinsikan sebagai sebuah kondisi dimana anda harus mengerjakan sebuah pekerjaan yang sangat penting dan dijadikan sebagai hal yang utama agar diselesaikan terlebih dahulu (kamus *Oxford*). Waluyo menyatakan, prioritas adalah sebuah daftar yang berisi mengenai kebutuhan yang begitu banyak dan harus dikerjakan menurut tingkat keutamaanya terlebih dahulu. Sedangkan tingkat dari keutamaan yakni, darurat, penting, prioritas tinggi, prioritas menengah, prioritas rendah, dan tidak ada prioritas (sepositif.com).

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama.Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Program sering dikaitkan dengan perencanaan, persiapan, dan desain atau rancanagan. Harjanto mengemukakan bahwa desain ialah berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilakukan.(http://repository.uin-suska.ac.id).

Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal.

4.2. Prioritas program dan sasaran penerima program

Prioritas program dan sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berpedaman pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020. Pasal 1 berbunyi: "Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat".

Pasal 2 berbunyi: "Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi".

Pasal 15 berbunyi: "Pelaksanaan tugas TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan.

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi ini diantaranya adalah dengan cara melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Programnya yaitu:

a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan.

Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial masih banyak terkendala dengan keserasian pendataan penduduk. Data penentuan target baik pelayanan dasar maupun perlindungan sosial telah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Namun demikian, masih banyak penduduk yang belum melaporkan, menyelaraskan, maupun mencatatkan NIK tersebut, atau bahkan belum memiliki NIK. Sebagai konsekuensi, statistik hayati yang lengkap dan valid sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan belum tersedia.

Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil masih menghadapi tantangan dalam menjangkau wilayah sulit maupun penduduk kelompok khusus. Pelayanan administrasi kependudukan belum sepenuhnya menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Selain itu, administrasi kependudukan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor. Di samping untuk memperluas cakupan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, cakupan administrasi kependudukan yang komprehensif akan menghasilkan statistik hayati yang mumpuni.

4.3. Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Di era digitalisasi dan internet saat ini dimanfaat maksimal oleh pemerintah dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, walaupun ada sebagian kecil masih ada daerah yang belum terfasilitasi atas hal ini. Untuk itu, maka kemudahan tersebut, mengakibatkan terjadinya efisiensi dan efektifnya pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan aplikasi *Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NK)* yang dikelolah oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI sebagaimana disajikan pada gambar 4.1.

Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan (https://kominfo.go.id).



Gambar 4.1 SIKS_NG dan DTKS

4.3.1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu masyarakat Indonesia, khususnya untuk ibu hamil dan balita, serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 serta menggerakkan ekonomi nasional, sebagaimana disajikan pada gambar 4.2.



Gambar 4.2. PKH



Ada dua syarat penerima bansos PKH. Yaitu penerima terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan memenuhi komponen persyaratan sebagai peserta PKH. Adapun rincian BLT PKH berdasarkan dua komponen tersebut:

Komponen kesehatan:

- Ibu hamil/nifas, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun;

Anak usia dini, berhak mendapatkan bantuan Rp3 juta per tahun.

Komponen pendidikan:

Anak umur 6--21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar;

Anak SD/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp900.000 per tahun;

Anak SMP/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp1,5 juta per tahun;

Anak SMA/sederajat, berhak mendapatkan bantuan Rp2 juta per tahun.

untuk kategori disabilitas berat dan lansia juga berhak mendapatkan bantuan masing-masing Rp2,4 juta per tahun.

Kemensos membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Berikut rincian besaran bantuannya:

Ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH;

Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak di dalam keluarga PKH;

Anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak dalam keluarga PKH;

Anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;

Anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH;

Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH;

Penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.

Apabila dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, yang didahulukan adalah anak usia dini.

Jika memenuhi syarat dan kriteria penerima BLT PKH, masyarakat silakan mendaftar dengan mengikuti tahapan pendaftaran seperti berikut:

Warga (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.

Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah di tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (*pre-list*) maupun usulan baru.

Musyawarah desa/musyarwah kelurahan (musdes/muskel) akan menghasilkan berita acara yang ditandangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya, untuk kemudian menjadi *pre-list* akhir.

Pre-List akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga.

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi SIKS *offline* oleh operator desa/kecamatan, untuk kemudian diekspor berupa *file extention* SIKS.

File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS *online*.

Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/wali kota.

Bupati/wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.

Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan bupati/wali kota serta berita acara musdes/muskel.

Data penerima PKH dapat dilihat di laman *https://dtks.kemensos.go.id/* dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

Adapun realisasi dari pelaksanaan PKH di Kalimantan Utara yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kaltara disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Realisasi pencairan dana PKH di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 menurut Kabupaten/Kota dan rata-ratanya.

Daerah	2016	2017	2018
Bulungan	Rp 2.015.700.000	Rp 3.829.180.000	Rp 5.601.358.000
Tarakan	Rp 3.113.865.000	Rp 4.190.480.000	Rp 5.836.358.000
Malinau	Rp 1.516.850.000	Rp 1.687.220.000	Rp 2.842.358.000
Nunukan	Rp 4.707.500.000	Rp 5.482.700.000	Rp 10.513.441.800
Tana Tidung	Rp 551.700.000	Rp 784.560.000	Rp 1.180.263.050
Kalimantan Utara	Rp11.905.615.000	Rp15.974.140.000	Rp25.973.778.850

2019	2020	Total	Rata-rata
Rp 9.430.538.000	Rp 8.993.041.000	Rp 29.869.817.000	Rp11.544.786.800
Rp10.026.838.000	Rp12.444.453.000	Rp 35.611.994.000	Rp13.622.024.600

Rp 4.529.578.000	Rp 5.409.599.000	Rp 15.985.605.000	Rp 6.090.872.000
Rp15.996.141.800	Rp19.996.195.000	Rp 56.695.978.600	Rp21.736.891.440
Rp 1.964.823.050	Rp 1.822.610.000	Rp 6.303.956.100	Rp 2.411.242.440
Rp41.947.918.850	Rp48.665.898.000	Rp 144.467.350.700	Rp55.405.817.280

Sumber : data diolah, Dinas Sosial Prov. Kaltara, 2021

Sedangkan jumlah penerima manfaat dari pelaksanaan PKH di Kalimantan Utara yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kaltara disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Jumlah kelompok penerima manfaat (KPM) PKH di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2020 menurut Kabupaten/Kota dan rata-ratanya.

Daerah	2016	2017	2018	2019	2020	Total	Rata-rata
Bulungan	849	2.015	3.080	3.062	22.657	31.663	12.495
Tarakan	1.265	2.172	3.073	3.147	28.572	38.229	15.039
Malinau	643	881	1.252	1.207	12.122	16.105	6.313
Nunukan	1.929	2.865	5.868	5.808	47.237	63.707	25.097
Tana Tidung	246	417	643	606	4349	6.261	2.455
Kalimantan Utara	4.932	8.350	13.916	13.830	22.657	63.685	24.488

Sumber : data diolah, Dinas Sosial Provinsi Kaltara, 2021

4.3.2. Program Indonesia Sehat

Implementasi dari pelaksanaan Program Indonesia Sehat adalah melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan (gambar 4.2). Peserta meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi yang lahir dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang selama ini tidak dijamin.

KIS memberikan tambahan manfaat, layanan preventif, promotif dan deteksi dini yang akan dilaksanakan secara lebih intensif dan terintegrasi. KIS memberikan jaminan bahwa pelayanan oleh fasilitas kesehatan tidak membedakan peserta berdasarkan status sosial.Penyelenggara Program adalah BPJS Kesehatan.Perlu ditekankan bahwa layanan kesehatan bagi pasien pemegang kartu lain yang dikeluarkan BPJS berlangsung seperti biasa dengan manfaat yang sama dengan pemegang Kartu Indonesia Sehat.

Dalam layanan online INTEL RESOS, yang bisa mendaftar melalui KIS Online hanyalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, diantaranya : Anak terlantar, Anak Jalanan, Anak Korban Kekerasan yang tinggal di dalam Panti Asuhan dan Rumah Singgah , Lanjut Usia yang berada di Panti Asuhan, Lanjut usia yang terlantar dan tidak diurus keluarga kandung atau keluarga asuh , Gelandangan, pengemis dan pemulung yang tidak memiliki hunian tetap / tinggal di kolong jembatan, dan tempat-tempat yang tidak layak.



Gambar 4.3.



Adapun kriteria yang mendapatkan KIS adalah sebagai berikut:

Seluruh kelompok Usia

Anak yang tinggal menetap di Panti Asuhan.

Anak yang tinggal menetap di Pondok Pesantren

Anak yang tidak memiliki Orangtua dan keluarga Asuh.

Anak Yang tinggal menetap di Rumah Singgah.

Anak Korban Tindak kekerasan.

Anak dan perempuan Korban Perdagangan Manusia.

Pekerja Anak.

Gelandangan, pengemis, pemulung yang tinggal di bawah kolong jembatan dan hunian tidak layak.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

Lanjut Usia yang berada di panti Asuhan, Rumah Singgah, dan Rumah Perlindungan Lansia

Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh KIS adalah sebagai berikut:

Surat Keterangan dari RT / RW setempat yang menyatakan bahwa PMKS benar Penghuni Panti Asuhan/Ponpes/Rumah Singgah/Tidak memiliki Orangtua atau keluarga Asuh (Bisa dibuat secara kolektif)

Surat keterangan dari kantor Desa / Lurah yang menyatakan bahwa Anak benar Penghuni Panti Asuhan/Ponpes/Rumah Singgah/Tidak memiliki Orangtua atau keluarga Asuh (Bisa dibuat secara kolektif)

Kartu Keluarga

KTP

Pas Foto

Foto Tubuh

Tahapan layanan untuk mendapatkan KIS sebagai berikut:

Sponsor (LKS / Yayasan / Panti Asuhan / Ponpes / perorangan) mendaftarkan diri melalui portal intelresos.kemsos.go.id sampai mendapat verifikasi email dari intelresos. Yang menandakan bahwa akun Sponsor telah aktif.

Setelah akun sponsor telah aktif, maka Sponsor wajib menginput data PMKS yang sesuai kriteria pada portal rehsos.kemsos.go.id sesuai dengan format yang diberikan secara lengkap untuk diajukan menjadi penerima Kartu Indonesia Sehat.

Dinas Sosial Provinsi dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Kota melakukan verifikasi terhadap LKS yang mendaftar berdasarkan Kelengkapan berkas LKS yang diupload seperti Scan Foto Lembaga, Scan Surat Rekomendasi, dan berkas lainya melalui intelresos.kemsos.go.id.

Dinas Sosial dan Provinsi melakukan verifikasi terhadap PMKS yang didaftarkan secara online oleh sponsor (LKS / Yayasan / Panti Asuhan / Ponpes) berdasarkan dokumen yang diupload oleh sponsor seperti Surat keterangan RT / RW/Lurah, Akta Lahir, Kartu Siswa, dan sebagainya melalui intelresos.kemsos.go.id.

Hasil verifikasi online yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Kota melalui intelresos.kemsos.go.id kemudian di verifikasi dan matching data dengan (a) hasil pendataan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan (b) hasil verifikasi validasi pemerintah daerah secara manual (offline).

Hasil verifikasi dan matching data tersebut kemudian ditetapkan sebagai daftar penerima Kartu Indonesia Sehat melalui Surat Keputusan Menteri Sosial.

Pusdatin Kemensos mengirimkan Surat Keputusan Menteri Sosial yang dilampirkan Data By Name By Address Hasil Pendaftaran Online melalui intelresos.kemsos.go.id, Verifikasi dan Validasi Pusdatin, dan Verifikasi dan validasi Pemerintah Daerah kepada Kementerian Kesehatan cc Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

BPJS Kesehatan melakukan verifikasi dan matching data yang dikirimkan Pusdatin Kemensos dengan Master File Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan untuk menghindari data ganda.

Hasil Matching data adalah data baru PMKS yang belum terdaftar sebagai penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Hasil Matching Data yang dilakukan BPJS Kesehatan kemudian diserahkan kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial untuk dibuatkan Surat Keputusan Menteri Sosial Perubahan atas Surat Keputusan Menteri Sebelumnya.

Pusdatin Kemensos menyerahkan Surat Keputusan Menteri Sosial perubahan atas Data PMKS sebelunya disertai Data PMKS baru calon Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan kepada Kementerian Kesehatan cc. BPJS Kesehatan.

Kementerian Kesehatan membayarkan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan PMKS kepada BPJS Kesehatan sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial.

BPJS Kesehatan mencetak KIS untuk PMKS sesuai jumlah yang tertera di Surat keputusan Menteri Sosial.

Kartu Indonesia yang telah dicetak oleh BPJS Kesehatan diserahkan kepada Pusdatin Kemensos disertai dengan Berita Acara Serah terima KIS bagi PMKS.

Pusdatin Kemensos menyerahkan KIS yang didaftarkan melalui pendaftaran online kepada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.

Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, mengirimkan KIS kepada Dinas Sosial Provinsi untuk didistribusikan kepada Sponsor PMKS.

4.3.3. Program Bantuan Sosial Pangan

Program bantuan sosial (Bansos) pangan mencakup; pertama bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) yang merupakan bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dalam bentuk beras kualitas medium sebanyak 10 kg/KPM setiap bulannya, kedua bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan bantuan dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang diberikan setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanya untuk dibelanjakan beras dan/atau telur di warung elektronik gotong-royong (e-warong), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (gambar 4.3).



Gambar 4.4

Kartu Sembako	Sasaran KPM	Kriteria Pangan	Jenis Sembako
• Pengembangan program BPNT • Selain beras dan telur, KPM dapat memperoleh sembako (pangan bernutrisi)	• Penerima Kartu Sembako sama dengan penerima BPNT sebanyak 15,6 juta KPM	• Pangan bernutrisi • Bahan makanan yang sensitif dengan daya beli masyarakat	1. **Jenis bahan pangan :** • Sumber karbohidrat, seperti beras (dapat diganti jagung/sagu/ubi). • Sumber protein, seperti telur, daging/ayam/ikan, kacang-kacangan. • MP-ASI 2. Komoditas sembako sesuai ketersediaan pangan lokal. 3. **KPM diberikan kebebasan** untuk memilih bahan pangan. 4. E-warong **tidak diharuskan** menyediakan seluruh bahan pangan yang ada di poin 1.

Mekanisme Penyaluran

- Dilaksanakan mulai **Januari 2020,** diberikan kepada 15,6 juta KPM dan disalurkan melalui KKS eksisiting.
- Kartu Sembako dicetak sebagai kartu penanda

Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi.

Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Dari situ, calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan.

Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat untuk melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS. E-warong adalah agen bank, pedagang atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pencairan/penukaran/pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), agen bank yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya. KPM dapat

membeli bahan pangan sesuai kebutuhan pada e-warong yang memiliki tanda lokasi penyaluran bantuan sosial non tunai.

Transaksi dilakukan secara non tunai mengacu pada jumlah saldo yang tersimpan pada chip KKS. Lewat sistem yang terhubung dengan perbankan ini, penyalur bantuan akan mendapatkan laporan rinci seputar jumlah dana yang telah disalurkan, jumlah dana yang ditarik oleh penerima, jumlah dana yang tersisa dan berapa orang penerima yang belum menarik bantuan pangannya.

Penyaluran bantuan pangan secara non tunai lewat BPNT mengacu pada 4 (empat) prinsip umum, yaitu:

Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM.

Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memanfaatkan bantuan, kapan dan berapa banyak bahan pangan yang dibutuhkan. Juga termasuk kebebasan memilih jenis dan kualitas bahan pangan berdasarkan preferensi yang telah ditetapkan dalam program ini.

Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM.

Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan KPM.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari BPNT, yaitu:

Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Adapun realisasi dari pelaksanaan bantuan sosial pangan (BPNT) di Kalimantan Utara yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kaltara sebagaimana disajikan pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Data realisasi bantuan sosial pangan (BPNT) di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020

Kab/kota/prov	Rencana Jumlah KPM	Realisasi Jumlah KPM	Rencana anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)
Malinau	3.384	4.707	676.800.000	941.400.000
Bulungan	4.199	4.084	839.800.000	816.800.000
Tana Tidung	964	788	192.800.000	157.600.000
Nunukan	9.275	10.335	1.855.000.000	2.067.000.000
Kota Tarakan	8.284	8.727	1.656.800.000	1.745.400.000
Kalimantan Utara	26.106	28.641	5.221.200.000	5.728.200.000

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kaltara, 2021
KPM (kelompok penerima mafaat).

Total realisasi anggaran BPNT di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2020 sebesar Rp.5.728.200.000, yang tertinggi terdapat di Kabupaten Nunukan sebesar Rp.2.067.000.000 dengan 10.335 KPM dan terendah terdapat di Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp.157.600.000 dengan 788 KPM.

Sedangkan pada tahun 2021 yang tercatat hanya pada bulan Januari dan Februari 2021 saja, sebagaimana disajikan pada tabel 4.4 dan tabel 4.5.

Tabel 4.4. Data realisasi bantuan sosial pangan (BPNT) di Provinsi Kalimantan Utara, bulan Januari 2021

No	Daerah	BANK PENYALUR	Kuota	Terbayar		Belum Terbayar	
				Realisasi (KPM)	%	Realisasi	%
1	Kota Tarakan	BNI	7.848	6.948	88,53	862	10,98
2	Kab. Bulungan	BRI	3.498	2.275	65,04	377	10,78
3	Kab. Malinau	BRI	3.318	2.740	82,58	548	16,52
4	Kab. Tana Tidung	BRI	686	262	38,19	35	5,10
5	Kab. Nunukan	MANDIRI	8.252	7.199	87,24	625	7,57
Prov. Kaltara			23.602	19.424	82,30	2.447	10,37

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kaltara, 2021

Tabel 4.5. Data realisasi bantuan sosial pangan (BPNT) di Provinsi Kalimantan Utara, bulan Februari 2021

No	Daerah	BANK PENYALUR	Kuota KPM	Realisasi	Persentase (%)
1	Kota Tarakan	BNI	9043	7848	86,79
2	Kab. Bulungan	BRI	5126	3498	68,24
3	Kab. Malinau	BRI	5965	3318	55,62
4	Kab. Tana Tidung	BRI	2794	686	24,55
5	Kab. Nunukan	MANDIRI	10428	8252	79,13
	Prov. Kaltara		33356	23602	70,76

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kaltara, 2021

4.3.4. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah (gambar 4.5). PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP).

PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama (https://indonesiapintar.kemdikbud.go.id).





Gambar 4.5







Prioritas sasaran penerima PIP yaitu :

Peserta Didik pemegang KIP

Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

- Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan
- Peserta Didik dari keluarga pemegang KartuKeluarga Sejahtera
- Peserta Didik yang berstatus yatimpiatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan
- Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam
- Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah
- Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah

- Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

Cara menggunakan KIP yaitu Penerima KIP harus terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) ataupun non formal (PKBM/SKB/LKP); KIP harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan.

Besaran dana manfaat PIP :

Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp.450.000/tahun;

Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp/750.000/tahun;

Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp.1.000.000/tahun.

Kewajiban peserta didik penerima dana PIP:

Menyimpan dan menjaga KIP dengan baik;

PIP merupakan bantuan pendidikan. Dana manfaatnya harus digunakan untuk keperluan yang relevan;

Terus belajar dan bersekolah (tidak putus sekolah) dengan rajin, disiplin dan tekun.

Dana PIP dapat digunakan untuk membantu biaya pribadi peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi.

KIP mejadi tanggung jawab pemiilik, Jika KIP hilang/rusak, pemilik KIP dapat segera menghubungu kontak pengaduan PIP. Untuk penggantian kartu baru, pemilik wajib memberitahukan nomor KIP dan menyertakan identitas diri.

Adapun pelaksanaan dari program KIP di Kalimantan Utara yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi bersama Kabupaten/Kota se-Kaltara sebagaimana disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Data realisasi program kartu Indonesia pintar (KIP) bagi siswa SD s/d SLTA di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 s/d Maret 2021.

Tahun	Kab/kota	Satuan	Disalurkan	Dicairkan	%
2018	Bulungan	Siswa	7.557	6.371	84,31%
		Rupiah	3.862.325.000	3.277.075.000	84,85%
	Malinau	Siswa	4.317	3.795	87,91%
		Rupiah	2.244.875.000	2.010.950.000	89,58%
	Nunukan	Siswa	17.189	15.510	90,23%

		Rupiah	8.767.775.000	8.029.975.000	91,59%
	Tana Tidung	Siswa	1.794	1.577	87,90%
		Rupiah	986.200.000	860.075.000	87,21%
	Tarakan	Siswa	12.394	12.331	99,49%
		Rupiah	6.402.775.000	6.369.750.000	99,48%
	Kaltara	Siswa	43.251	39.584	91,52%
		Rupiah	22.263.950.000	20.547.825.000	92,29%
2019	Bulungan	Siswa	6.026	5.135	85,21%
		Rupiah	3.141.575.000	2.668.550.000	84,94%
	Malinau	Siswa	5.132	4.073	79,36%
		Rupiah	2.988.725.000	2.293.825.000	76,75%
	Nunukan	Siswa	16.111	14.737	91,47%
		Rupiah	8.696.625.000	8.021.650.000	92,24%
	Tana Tidung	Siswa	1.245	1.184	95,10%
		Rupiah	652.875.000	617.325.000	94,55%
	Tarakan	Siswa	11.002	10.605	96,39%
		Rupiah	5.792.700.000	5.570.825.000	96,17%
	Kaltara	Siswa	39.516	35.734	90,43%
		Rupiah	21.272.500.000	19.172.175.000	90,13%
2020	Bulungan	Siswa	5.948	4.950	83,22%
		Rupiah	3.157.375.000	2.673.200.000	84,67%
	Malinau	Siswa	5.614	4.608	82,08%
		Rupiah	3.021.200.000	2.536.375.000	83,95%
	Nunukan	Siswa	16.231	14.533	89,54%
		Rupiah	8.673.575.000	7.794.700.000	89,87%
	Tana Tidung	Siswa	1.426	1.310	91,87%
		Rupiah	801.100.000	744.100.000	92,88%
	Tarakan	Siswa	12.731	12.248	96,21%
		Rupiah	6.798.025.000	6.550.050.000	96,35%
	Kaltara	Siswa	41.950	37.649	89,75%
		Rupiah	22.451.275.000	20.298.425.000	90,41%
Maret 2021	Bulungan	Siswa	2.821	2.371	84,05%
		Rupiah	1.497.325.000	1.155.375.000	77,16%
	Malinau	Siswa	2.589	2.073	80,07%
		Rupiah	1.378.675.000	989.175.000	71,75%

Nunukan	Siswa	8.617	7.439	86,33%
	Rupiah	4.367.825.000	3.521.325.000	80,62%
Tana Tidung	Siswa	594	465	78,28%
	Rupiah	329.175.000	231.675.000	70,38%
Tarakan	Siswa	7.316	6.184	84,53%
	Rupiah	3.807.450.000	2.962.950.000	77,82%
Kaltara	Siswa	21.937	18.532	84,48%
	Rupiah	11.380.450.000	8.860.500.000	77,86%

Sumber: https://pip.kemdikbud.go.id

4.3.4. Program Kelompok Usaha Bersama (Kube)

Melalui program kelompok usaha bersama (Kube), anggota kelompok yang merupakan keluarga miskin dapat berjejaring dan mengembangkan potensi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Jumlah bantuan usaha ekonomi produktif kepada setiap Kube ditentukan berdasarkan jumlah anggota Kube. Perhitungannya adalah jumlah anggota Kube dikalikan Rp 2 juta. Jika masing-masing Kube memiliki anggota sebanyak 10 orang, maka setiap Kube mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta.

Keberadaan Kube, merupakan bagian dari upaya pemberdayaan sosial untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat prasejahtera dari dampak Covid-19. diharapkan melalui Kube aktivitas ekonomi masyarakat prasejahtera dapat terus berjalan, dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka dapat ditingkatkan secara kreatif dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya (https://portalsulut.pikiran rakyat.com).

4.3.5. Program Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Komunitas adat terpencil (KAT) adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi (https://sikapdaya.kemsos.go.id).

Keberadaan KAT di Kalimantan Utara merupakan realitas yang tidak bisa diabaikan dan menjadi semangat bagi pemerintah terlebih untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kendati saat ini KAT di Kalimantan Utara sudah ada yang meningkat taraf hidupnya, tetapi di sisi lain masih ada yang

menjalani kehidupan yang cukup memprihatinkan karena mendiami tempat-tempat terpencil yang secara geografis sulit dijangkau.

Direktorat Pemberdayaan KAT, Kementerian Sosial RI mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil.

Melalui kegiatan program pemberdayaan sosial terhadap KAT diharapkan perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan kemandirian sebagai warga negara dapat diwujudkan.

4.3.6. Program Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. (https://www.jogloabang.com).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dilaksanakan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya sehingga lebih layak huni dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat jelang pelaksanaan new normal di tengah pandemi Covid-19. “Program ini merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan Kementerian PUPR untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni [RTLH] di Indonesia (https://ekonomi.bisnis.com).

Di Kalimantan Utara program ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yang pembiayaannya berasal dari APBN sejak tahun 2016 hingga 2020 sebagaimana disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Data realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016 s/d 2020 yang bersumber dari APBN.

Kab/kota	SAT	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
Tarakan	Unit	303	206	347	1.039	670	2.565
Bulungan	Unit	1.994	423	630	450	635	4.132
Tana Tidung	Unit	-	-	376	443	445	1.264
Nunukan	Unit	212	705	527	770	820	3.034
Malinau	Unit	-	240	120	437	430	1.227
TOTAL	Unit	2.509	1.574	2.000	3.139	3.000	12.222
TOTAL	(Rp. 1.000)	28.815.348	23.610.000	35.000.000	54.932.500	52.500.000	194.857.848

Sumber : DPUPRPerkim Prov.Kaltara, 2021

4.3.7. Program Subsidi Ongkos Angkut Barang dan Penumpang

Pemerintah menjamin pemberian subsidi bagi angkutan penumpang umum kelas ekonomi dan angkutan barang pada lintas dan trayek tertentu. Tujuannya demi mendukung program pemerintah khususnya pada wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Hal tersebut tertuang dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang merupakan aturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

"Subsidi dalam Peraturan Pemerintah ini tidak hanya diberikan kepada angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor untuk tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu, tetapi juga diberikan kepada angkutan barang pada lintas tertentu," (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi).

4.3.8. Program Subsidi BBM Satu Harga di Perbatasan Krayan

Program bahan bakar minyak (BBM) satu harga merupakan program pemerataan energi dan penerapan energi berkeadilan dengan harga BBM yang sama untuk produk premium dan solar bersubsidi di wilayah yang memiliki keterbatasan akses atau tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Program ini dicanangkan oleh

Pemerintah sejak tahun 2016, dan hingga tahun 2020. Pertamina sudah mengoperasikan sebanyak 243 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di Kalimantan Utara, program ini difasilitasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Krayan Kabupaten Nunukan merupakan lokus dibangunnya program ini sebagaimana disajikan pada gambar 4.5 Terbangunnya SPBU di Krayan.



4.4. Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN tahun 2020-2024

Perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan diberikan melalui bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Selain program bantuan sosial, terdapat pula program-program subsidi, seperti LPG dan listrik yang ditujukan bagi kelompok miskin dan rentan. Pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi akan terus disempurnakan melalui penyelenggaraan yang terintegrasi dan tepat sasaran, agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan.

Selain bantuan sosial, perlindungan sosial bagi penduduk diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari jaminan kesehatan dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya menjadikan kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif
masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah
kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.

Pemerintah memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial melalui kegiatan penguatan pelaksanaan jaminan sosial, penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasidan tepat sasaran, perlindungan sosial adaptif, peningkatan kesejahteraan sosial, penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu. Pemeritah juga, meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pengentasan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah melalui:

1. akselerasi penguatan ekonomi keluarga, mencakup: (a) pembinaan rencana keuangan keluarga pra dan paska pernikahan, termasuk rencana investasi keluarga; dan (b) pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi

keluarga miskin dan rentan; (c) fasilitasi pendanaan ultra mikro bagi individu atau kelompok usaha produktif dari keluarga miskin dan rentan; (d) pemberian stimulan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga; dan (e) penyelenggaraan kewirausahaan sosial,

2. keperantaraan usaha dan dampak sosial, mencakup: (a) penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta menghubungkan dengan mitra usaha strategis; (b) pengembangan skema pendanaan program ekonomi produktif yang berdampak sosial; (c) transformasi ekonomi kampung terpadu (TEKAD); (d) penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan; dan (e) penyuluhan dan/ atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan (mencakup peningkatan kapasitas penyuluh dan pembentukan kelompok tani hutan (KTH) mandiri untuk pengembangan usaha produktif;
3. reforma agraria, mencakup: (a) penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan; (b) pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi; (c) pemberian sertipikat tanah (legalisasi), termasuk untuk kawasan transmigrasi yang penempatan sebelum tahun 1998; dan (d) pemberdayaan masyarakat penerima TORA;
4. pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial, mencakup: (a) pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan kemitraan kehutanan; (b) peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat; (c) membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial; (d) pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan (e) pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

4.5. Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Renstra Kemensos RI 2020-2024

Kementerian Sosial dalam penguatan perlindungan sosial yang komprehensif dan adaptif diantaranya yaitu:

1. Pemanfaatan DTKS dalam penguatan pelaksanaan jaminan sosial melalui cakupan penerima bantuan iuran (PBI) JKN dari 40% penduduk berpendapatan terbawah berjumlah 96,8 juta penduduk pada tahun 2019 dan target tahun 2024 berjumlah 112,9 juta penduduk.
2. Pemanfaatan DTKS dalam penguatan program bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan berjumlah 10 juta KK, bantuan pangan melalui Program Sembako berjumlah 15,6 juta KK, bantuan elpiji 3 kg berjumlah 31 ,4 juta KK, bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA berjumlah 31,4 juta KK.
3. Pemberdayaan sosial ekonomi kepada KPM PKH yang dimulai dari Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), kemudian berlanjut untuk KPM PKH Graduasi diberikan pendampingan profesional/ mentoring, peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, peningkatan akses pasar serta pemberian akses pendanaan usaha yang diintegrasikan dengan program Kementerian/Lembaga lain.
4. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu melalui penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial, terutama standar kompetensi dan mekanisme insentif; perluasan sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi lembaga kesejahteraan sosial; peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; peningkatan penge- 21 tahuan, pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga; dan penguatan mekanisme pengaduan, pendataan, rujukan dan layanan terpadu.
5. Penguatan perlindungan sosial adaptif melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui kabupaten/ kota siaga bencana, pengembangan kapasitas masyarakat untuk memiliki kesiapsiagaan bencana,

serta terwujudnya adaptibilitas program perlindungan sosial yang ada untuk memitigasi dampak bencana terhadap kemiskinan dan kerentanan masyarakat.

Penjangkauan Layanan Sosial Dasar dan Pengembangan Penghidupan Secara Berkelanjutan Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan mengutamakan pendekatan penghidupan berkelanjutan untuk memastikan penduduk miskin dan rentan memperoleh akses penjangkauan pelayanan sosial dasar seperti akses terhadap administrasi kependudukan yaitu kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran, akses layanan pendidikan khususnya bagi anak usia sekolah, akses layanan kesehatan dan gizi, akses perumahan permukiman yang layak, akses terhadap bantuan usaha ekonomi dan peningkatan kemampuan keluarga, serta akses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang inklusif khususnya bagi penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

Untuk mendukung hal tersebut, beberapa program prioritas telah dilakukan oleh Kementerian Sosial yang menjangkau sampai tingkat desa/kelurahan/nama lain. Perluasan PKH yang diharapkan dapat meningkatkan akses kesehatan dan pendidikan; program bantuan pangan nontunai dengan variasi bahan pangan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi penduduk; program rehabilitasi sosial lansia, penyandang disabilitas, dan anak melalui skema terintegrasi lintas sektor/instansi untuk memastikan terselenggaranya pelayanan inklusif bagi semua penduduk melalui kelembagaan dan SDM yang ada di tingkat desa/kelurahan/nama lain sampai pada tingkat nasional. Sementara itu untuk peningkatan ekonomi dan kemampuan berusaha dilakukan melalui pendampingan dan pemberian modal usaha berkelompok.

4.6. Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD tahun 2016-2021

Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021, melalui pelaksanaan program/kegiatan di dalam APBD Provinsi, terdapat beberapa program penanggulangan kemiskinan sebagaimana disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4.8. Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021

No	Program	Tujuan	Pengampu	Jumlah KPM

1	Sipelandukilat	Melayani administrasi kependudukan warga masyarakat Kaltara yang sulit terjangkau secara gratis dengan cara mendatangi langsung ke KPM agar kebutuhan administrasi kependudukan mereka terpenuhi	Disdukcapil	19.770
2	Dokter Terbang	Melayani kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan kurang mampu di Kaltara yang sulit terjangkau dengan cara mendatangi langsung ke KPM dengan mengikutsertakan dokter dan tim kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat meningkat/membaik	Dinkes	14.238
3	Biaya transporasi, akomodasi dan uang harian (PP)	Membayar biaya transportasi, akomodasi dan uang harian bagi pasien yang dirujuk berobat ke rumah sakit yang berada diluar Kalimantan Utara agar peningkat derajat kesehatannya membaik	Biro Kesra	88 (43 pendamping, 45 pasien)
4	Biaya iuran PBI daerah (40% provinsi dan 60% kab/kota)	Membayar biaya iuran PBI daerah yang tidak masuk dalam pembayaran dari pemerintah (Kemenkes/Kemensos) agar masyarakat miskin dan kurang mampu memiliki KIS	Dinkes	

5	Sijempol (sistem layanan jemput antar pasien miskin dan kurang mampu) untuk berobat ke RSUD Tarakan	Melayani dan membayar biaya kesehatan warga masyarakat miskin dan kurang mampu yang berobat ke RSUD Tarakan, yang tidak memiliki eKTP dan KIS agar derajat kesehatan mereka meningkat/membaik	RSUD Tarakan	2334
6	Bedah rumah	Melayani dan memberikan biaya pembangunan dan atau perbaikan rumah tidak layak huni kepada warga masyarakat miskin dan kurang mampu. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola mandiri oleh KPM agar rumah mereka layak	DPUPRPerkim	
7	Sanitasi layak	Melayani dan memberikan biaya pembangunan dan atau perbaikan sanitasi layak (jamban) kepada warga masyarakat miskin dan kurang mampu. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola mandiri oleh KPM agar rumah sehat terpenuhi	DPUPRPerkim	
8	Bantuan profil tank	Melayani dan memberikan biaya pembelian profil tank bagi warga masyarakat miskin dan kurang mampu agar rumah sehat terpenuhi	DPUPRPerkim	

9	KUBE	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memberikan modal usaha kepada warga masyarakat miskin dan kurang mampu mereka cakap berwirausaha dan menjadi mandiri	Dinsos	1170
10	Subsidi ongkos angkut/SOA barang dan orang	Melayani dan memberikan biaya subsidi ongkos angkut barang maupun orang yang bermukim diperbatasan negara terutama miskin dan kurang mampu, disebabkan oleh keterisolasian sehingga pemenuhan kesejahteraan mereka membaik	Disperindagkop UKM Dishub	
11	Beasiswa Kaltara Cerdas	Melayani dan memberikan beasiswa (siswa SD s/d mahasiswa) terlebih untuk siswa dan mahasiswa kategori miskin dan kurang mampu, agar mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat waktu	Disdikbud Biro Kesra	21393
12	Pemberdayaan, peningkatan pengetahuan dan skill serta modal usaha dan pemberian	Meningkat pengetahuan dan skil masyarakat dan memberikan bantuan modal usaha dan sarana dan prasarana untuk usaha melalui KUBE, termasuk diantaranya adalah miskin dan	DPMD DPPPAPPKB DKP DistanKP Dishut Disperindagkop	

	bantuan sapras untuk usaha	kurang mampu.	UKM	
13	Fasilitasi, pembinaan, dan monev terhadap Pemkab/kota (dinas terkait PK)	Integrasi, harmonisasi, sinergisitas program PK parapihak (pemerintah, pemda, CSR, Baznas, filantropis)	TKPK Prov Baznas Forum TJSP Filantropis	

Sumber : data diolah, 2021

Adapun pelaksanaan dari program Sipelandukilat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara di daerah Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada tabel 4.9.

Tabel 4.9. Data realisasi pelaksanaan program sipelandukilat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kaltara tahun 2016-2021

Tahun	Jenis Pelayanan	Jumlah (KPM)	Biaya yang dikeluarkan (Rp)	Lokasi pelayanan
2017	Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	3.972	1.117.081.474,00	1. Kayan Hilir 2. Sungai Tubu 3. Long Lake 4. Krayan Barat 5. Krayan Selatan 6. Tulin Onsoi 7. Lumbis Ogong
	1 Perekaman KTP El	1.105		
	2 Pembagian Draft Dokumen KK	87		
	3 Perbaikan KK	45		
	4 Penerbitan KK	1.194		
	5 Penggantian KTP El	56		
	6 Perubahan Kaltim - Kaltara	227		
	7 Surat Keterangan KTP El	1.258		
	8 KIA	-		
	9 Pindah datang WNI	-		
	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	2.797		
	1 Akta Kelahiran	1.252		
	2 Kutipan II Akta Kelahiran	878		
	3 Akta Perkawinan	597		
	4 Kutipan II Akta Perkawinan	22		
	5 Akta Cerai	-		
	6 Akta Kematian	48		
	7 Kutipan Kematian	-		
	8 Akta Pengesahan Anak	-		
2018	Pelayanan Dokumen Pendaftaran	3.304	768.381.897,00	1. Kayan Selatan

	Penduduk			2. Kayan Hulu 3. Pujungan 4. Bahau Hulu 5. Malinau Selatan 6. Sebatik barat 7. sebatik Timur
	1 Perekaman KTP El	1.433		
	2 Pembagian Draft Dokumen KK	-		
	3 Perbaikan KK	-		
	4 Penerbitan KK	1.063		
	5 Penggantian KTP El	-		
	6 Perubahan Kaltim - Kaltara	304		
	7 Surat Keterangan KTP El	504		
	8 KIA	-		
	9 Pindah datang WNI	-		
	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	1.566		
	1 Akta Kelahiran	-		
	2 Kutipan II Akta Kelahiran	1.181		
	3 Akta Perkawinan	-		
	4 Kutipan II Akta Perkawinan	270		
	5 Akta Cerai	-		
	6 Akta Kematian	-		
	7 Kutipan Kematian	115		
	8 Akta Pengesahan Anak	-		
-	Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	2.217	885.657.098,00	1. Kayan Hilir 2. Kayan Hulu 3. Mentarang Hulu 4. Malinau Selatan Hilir 5. Tulin Onsoi 6. Sebuku 7. Krayan Timur 8. Krayan Barat
	1 Perekaman KTP El	468		
	2 Pembagian Draft Dokumen KK	-		
	3 Perbaikan KK	-		
	4 Penerbitan KK	418		
	5 Penggantian KTP El	199		
	6 Perubahan Kaltim - Kaltara	-		
	7 Surat Keterangan KTP El	378		
	8 KIA	754		
	9 Pindah datang WNI	-		
	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	788		
	1 Akta Kelahiran	-		
	2 Kutipan II Akta Kelahiran	662		
	3 Akta Perkawinan	-		
	4 Kutipan II Akta Perkawinan	114		
	5 Akta Cerai	-		
	6 Akta Kematian	-		
	7 Kutipan Kematian	12		
	8 Akta Pengesahan Anak	-		
2020	Pelayanan Dokumen Pendaftaran	3.685	1.262.489.650,00	1. Bunyu

	Penduduk			2. Tanjung Palas Timur 3. Kayan Hulu 4. Sungai Boh 5. Lumbis Ogong 6. Lumbis Pansiangan 7. Lumbis Hulu 8. Sebatik Timur 9. Sebatik Barat
	1 Perekaman KTP El	1.045		
	2 Pembagian Draft Dokumen KK	-		
	3 Perbaikan KK	-		
	4 Penerbitan KK	1.491		
	5 Penggantian KTP El	377		
	6 Perubahan Kaltim - Kaltara	-		
	7 Surat Keterangan KTP El	-		
	8 KIA	704		
	9 Pindah datang WNI	68		
	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	1.441		
	1 Akta Kelahiran	-		
	2 Kutipan II Akta Kelahiran	1.080		
	3 Akta Perkawinan	-		
	4 Kutipan II Akta Perkawinan	216		
	5 Akta Cerai	1		
	6 Akta Kematian	-		
	7 Kutipan Kematian	82		
	8 Akta Pengesahan Anak	62		

Sumber: Disdukcapil Prov. Kaltara, 2021

Adapun pelaksanaan dari program Dokter Terbang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara di daerah Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4.10. Data realisasi pelaksanaan program Dokter Terbang Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014-2020

Tahun	Jumlah pasien yang dilayani (KPM)	Total biaya yang dikeluarkan (Rp)
2014	264,00	250.000.000,00
2015	767,00	632.000.000,00
2016	475,00	500.000.000,00
2017	1.872,00	753.000.000,00
2018	2.677,00	665.000.000,00
2019	3.329,00	739.000.000,00
2020	4.854,00	3.500.000.000,00
Jumlah	14.238,00	7.039.000.000,00
Rata-rata	2.034,00	1.005.571.428,57

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kaltara, 2021

Program dokter terbang dilaksanakan sejak tahun 2014 dan dilanjutkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021. Sejak tahun 2014 hingga 2020 terdapat 14.238 pasien yang dilayani (KPM) dari pelaksanaan program ini, dengan total anggaran sebesar Rp.7.039.000.000 atau rata-rata per tahun 2.034 KPM dan Rp.1.005.571.428,57,-.

Selain program dokter terbang yang ada di Dinas Kesehatan, juga terdapat program Sijempol yang dilaksanakan oleh RSUD Tarakan. Program ini meringankan biaya berobat bagi keluarga miskin dan kurang mampu yang berdomisili di Kalimantan Utara dan tidak memiliki identitas (e-KTP) dan KIS (asuransi kesehatan). Adapun data dari pelaksanaan program Sijempol ini sebagaimana disajikan pada tabel 4.11.

Tabel 4.11. Pelaksanaan program Sijempol di RSUD Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2020

No	Bulan/tahun	Jumlah Pasien		Total Tagihan (Rp)	
		Rawat Jalan	Rawat Inap	TARIF PERDA	TARIF INA-CBG
1	Januari 2017	79	35	243.671.812	201.738.600
2	Februari 2017	38	37	369.022.406	197.204.700
3	Maret 2017	3	50	372.419.438	302.089.600
4	April 2017	1	44	338.019.007	277.015.100
5	Mei 2017	8	43	345.194.705	287.324.577
6	Juni 2017	9	28	246.394.243	160.674.252
7	Juli 2017	11	35	243.990.134	188.880.200
8	Agustus 2017	11	46	276.513.999	234.022.800
9	September 2017	18	37	5.570.146	-
	Jumlah	178	355	2.440.795.890	1.848.949.829

Sumber : data diolah, BLUD/RSUD Tarakan, 2021

No	Bulan/tahun	Jumlah Pasien		Total Tagihan (Rp)	
		Rawat Jalan	Rawat Inap	TARIF PERDA	TARIF INA-CBG
1	Januari 2018	4	24	255.782.043	203.693.300
2	Februari 2018	8	31	302.525.283	166.368.543
3	Maret 2018	9	34	308.732.376	233.317.300
4	April - Mei 2018	13	54	449.162.343	320.584.800
5	Juni - Agustus 2018	23	78	345.194.705	287.324.577
6	September 2018	2	21	756.827.701	505.420.500
7	Oktober 2018	10	25	223.946.134	120.767.700
8	Nopember 2018	0	24	239.391.190	178.884.100
	Jumlah	75	286	2.881.561.775	2.016.360.820

Sumber : data diolah, BLUD/RSUD Tarakan, 2021

No	Bulan/tahun	Jumlah Pasien		Biaya Perawatan (Rp)
		Rawat Jalan	Rawat Inap	
1	Januari 2019	12	24	168.338.100,00
2	Februari 2019	2	21	128.456.000,00
3	Maret 2019	5	21	89.167.400,00
4	April 2019	0	22	93.035.200,00
5	Mei 2019	2	23	103.734.200,00
6	Juni 2019	1	21	121.429.900,00
7	Juli 2019	1	21	85.628.200,00
8	Agustus 2019	3	24	95.594.000,00
9	September 2019	3	10	110.066.300,00
10	Oktober 2019	7	27	224.696.200,00
11	Nopember 2019	4	28	155.233.400,00
12	Desember 2019	4	38	284.145.900,00
Jumlah		44	280	1.659.524.800,00

Sumber : data diolah, BLUD/RSUD Tarakan, 2021

No	Tahun	Kab/Kota	Sisa Tagihan (Rp)	Jumlah Pasien
1	2020	Tarakan	5.306.867.034	1.083
2		Nunukan	36.068.010	9
3		Malinau	13.690.381	6
4		Bulungan	311.411.510	60
5		Tana Tidung	138.352.910	31
6		Berau	4.333.000	2
		Jumlah	5.810.722.845	1.191

Sumber : Surat Direktur RSUD Tarakan, No.900/9.1-5877/RSUDTrk/2021, 5 April 2021

Berdasarkan tabel 4.11 terlihat bahwa program Sijempol telah dilaksanakan pada sejak tahun 2017 hingga 2020, dan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara adalah tahun 2017-2019, sedangkan pada tahun 2020 belum dibayarkan. Data menunjukkan bahwa di tahun 2017 total biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp.1.848.949.829,-, di tahun 2018 sebesar Rp.2.016.360.820,- dan di tahun 2019 sebesar Rp.1.659.524.800,-, serta biaya yang belum dibayarkan dari pelaksanaan program ini di tahun 2020 hingga 2021 disusunnya dokumen ini adalah sebesar Rp.5.810.722.645.

Apabila program Sijempol ini disinkronkan dengan ketaatan pasien terhadap kepemilikan identitas diri (e-KTP) dan KIS maka akan diperoleh efisiensi anggaran sebagaimana disajikan pada tabel 4.12.

Tabel 4.12. Efiesiensi biaya (Rp) atas pelaksanaan program Sijempol di RSUD Tarakan apabila pasien memiliki identitas diri dan KIS

Tahun	Jumlah pasien yang mencapat pelayanan perawatan	Anggaran telah/akan dibayarkan (Rp)	Rata-rata biaya (Rp)/ pasien	diasumsikan jika dibayarkan Iuran PBI daerah @Rp.23.000/jiwa /bulan dalam 1 tahun dan memiliki e-KTP	Efisiensi biaya yang akan terjadi (Rp)/pasien	total efisiensi biaya yang akan terjadi (Rp)
2017	533	2.440.795.890	4.579.354,39	282.000	4.297.354,39	2.290.489.890
2018	286	2.881.561.775	10.075.390,82	282.000	9.793.390,82	2.800.909.775
2019	324	1.659.524.800	5.121.990,12	282.000	4.839.990,12	1.568.156.800
2020*	1191	5.810.722.845	4.878.860,49	282.000	4.596.860,49	5.474.860.845
	2.334	12.792.605.310	5.480.979,14	282.000	5.881.898,96	12.134.417.310

Sumber : Hasil analisis, 2021, 2020* belum dibayar oleh Pemerintah Provinsi Kaltara

Dari tabel 4.12 terlihat bahwa terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp.12.134.417.310 dari pelaksanaan sejak tahun 2017 hingga 2020. Oleh sebab itu, RSUD Tarakan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil perlu melakukan upaya-upaya strategis untuk menangani bidang pelayanan ini.

Bukan hanya membayarkan asuransi kesehatan, biaya perawatan/berobat saja yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tetapi biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk berobat ke luar RSUD Tarakan juga dilakukan. Program ini diampuh dan telah dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.13. Data realisasi program bantuan biaya akomodasi dan transportasi (Rp) berobat bagi keluarga miskin dan kurang mampu yang dirujuk berobat/dirawat ke rumah sakit di luar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2021

Tahun	Nama (KPM)		Nominal (Rp)	Status pencairan biaya
	Pendamping	Pasien		
2018	6	7	70.809.993	cair
2019	19	19	161.111.794	cair
2020	15	16	139.142.719	cair
2021	3	3	24.708.800	pengajuan telaahan staf

Jumlah	43	45	395.773.306
Rata-rata	10,75	11,25	98.943.327

Sumber : data diolah, Biro Kesra Setdaprov. Kaltara, 2021

Bukan hanya membayarkan asuransi kesehatan, biaya perawatan/berobat saja yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, tetapi biaya transportasi dan biaya akomodasi untuk berobat ke luar RSUD Tarakan juga dilakukan. Program ini diampuh dan telah dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada tabel 4.13.

Tabel 4.14. Data daerah asal penerima manfaat dari program rujukan berobat/dirawat ke rumah sakit di luar Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018-2021

Tahun	Daerah Asal KPM	Tujuan Rujukan Berobat ke
2018	Bulungan	RS Samarinda Medika Citra
Cair	Bulungan	RS Harapan Kita Jakarta
	Tarakan	RS Harapan Kita Jakarta
	Bulungan	RSCM Jakarta
	Bulungan	RSUD Dr. Wahidin S. Hudodo Makassar
	Tana Tidung	RS Aws Samarinda
	Bulungan	RS Darmais Jakarta
2019	Tarakan	RS Harapan Kita Jakarta
Cair	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Bulungan	RS Harapan Kita Jakarta
	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Bulungan	RS Universitas Hasanuddin
	Malinau	RS Harapan Kita Jakarta
	Tarakan	RSWS Makassar
	Bulungan	RS Soetomo Jawa Timur
	Bulungan	RS Islam Faisal Makassar
	Bulungan	RSCM Kiara Jakarta
	Tana Tidung	RS Harapan Kita Jakarta
	Tarakan	Siloam Hospital Kab. Tangerang
	Bulungan	RS Harapan Kita Jakarta

	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Malinau	RS Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
	Tarakan	RS Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan
	Bulungan	RSI Sultan Agung Semarang
	Bulungan	RS AWS Samarinda
2020	Tarakan	RS AWS Samarinda
Cair	Tarakan	RS AWS Samarinda
	Tarakan	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
	Tarakan	RS AWS Samarinda
	Tarakan	RS AWS Samarinda
	Tarakan	RSUD Kanujoso Djatiwibowo Kota Balikpapan
	Bulungan	RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta
	Tarakan	Siloam Hospital Kab. Tangerang
	Tarakan	RSUP. Dr. Wahidin S Husodo Kota Makassar
	Bulungan	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Bulungan	RSUP Harapan Kita Jakarta
	Nunukan	RSUD Dr. Soetomo Surabaya
	Bulungan	RS AWS Samarinda
	Bulungan	RS AWS Samarinda
2021	Malinau	RS Unhas-Kota Makassar
Proses	Bulungan	RSUD Ulin Banjarmasin
TS	Nunukan	RSUP Dr. Sardjito - Kab. Sleman

Sumber : data diolah, Biro Kesra Setdaprov. Kaltara, 2021

Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan (Persen)

Kabupaten/Kota dan Provinsi	BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)			BPJS Kesehatan Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI)			Jamkesda			Asuransi Swasta			Perusahaan atau Kantor		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Malinau	58,35	60,00	62,96	21,58	21,14	27,71	1,71	0,12	-	0,77	0,48	0,51	0,54	0,24	0,31
Bulungan	14,74	30,44	36,20	34,51	38,01	41,31	91,94	100,00		1,13	0,54	0,05	5,17	4,84	7,07
Tana Tidung	40,94	44,91	45,63	24,88	33,48	36,44				0,13	0,04	0,18	7,31	3,91	74,46
Nunukan	36,87	37,34	50,78	29,29	30,68	37,01	1,19			0,14	0,07	0,10	0,87	0,40	0,48
Tarakan	19,05	21,53	23,20	57,00	61,54	60,01	-	-	-	2,02	1,11	0,47	4,70	1,99	2,95
Kalimantan Utara	28,91	30,91	38,15	39,67	48,27	42,23	8,17	19,22	-	1,10	0,56	0,28	3,21	3,28	2,41

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret

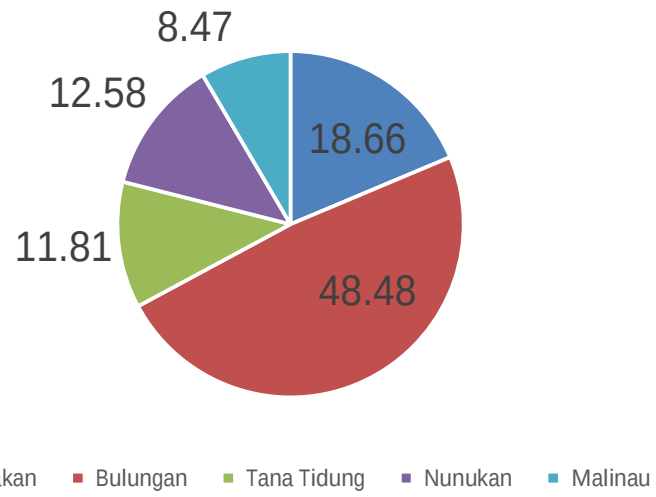
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui APBD nya telah memenuhi amanat Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada pasal 1 ayat 24 yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni sebagaimana disajikan pada tabel 4.15

Tabel 4.15. Data Rekapan Program Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020

No	Kab.kota	Satuan	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Tarakan	UNIT	55	94	79	85	313
2	Bulungan	UNIT	186	308	161	158	813
3	Tana Tidung	UNIT	63	42	58	35	198
4	Nunukan	UNIT	-	36	88	87	211
5	Malinau	UNIT		56	50	36	142
	TOTAL	UNIT	304	536	436	401	1.677
	TOTAL	(Rp. 1.000)	4.262.750	7.232.500	6.345.000	6.015.000	23.855.250

Sumber: DPUPRPerkim Prov. Kaltara, 20221

Grafik 4.14. Distribusi Persentase Jumlah Program Peningkatan Kualitas Bantuan Rumah Swadaya APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020 ke Kabupaten Kota



Tabel 4.16. Data Realisasi Program Bantuan Peningkatan Kualitas Sanitasi yang dibiayai APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020

Kab.kota	Satuan	2018	2019	2020	Total
Tarakan		-	-	-	-
Bulungan		114	47	50	211
Tana Tidung		-	-	-	-
Nunukan		-	-	-	-
Malinau		-	-	-	-
TOTAL	UNIT	114	47	50	211
TOTAL	(Rp. 1.000)	1.605.000	657.500	750.000	3.012.500

Sumber: DPUPRPerkim Prov. Kaltara, 20221

Tabel 4.17. Data jumlah realisasi anggaran pelaksanaan Program Kube dari APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017-2020 menurut daerah, jumlah kelompok penerima manfaat dan rata-ratanya

Kabupaten / Kota	2017		2018		2019		2020	
	Kube	KK	Kube	KK	Kube	KK	Kube	KK
Kota Tarakan	28	260	0	0	6	60	0	0
Kabupaten Bulungan	19	190	0	0	5	50	15	74
Kabupaten Malinau	20	200	0	0	0	0	7	35
Kabupaten Nunukan	0	0	8	77	9	90	12	57
Kabupaten Tana Tidung	0	0	7	51	0	0	5	26
Total	67	650	15	128	20	200	39	192

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kaltara, 2021

Kabupaten / Kota	Jumlah total (2017-2020)		Rata-rata	
	Kube	KK	Kube	KK
Kota Tarakan	34	320	8,50	80,00
Kabupaten Bulungan	39	314	9,75	78,50
Kabupaten Malinau	27	235	6,75	58,75
Kabupaten Nunukan	29	224	7,25	56,00
Kabupaten Tana Tidung	12	77	3,00	19,25
Total	141	1170	35,25	292,50

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kaltara, 2021

Tahun	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	511.000.000	19,34	358.832.500	17,20
2018	678.890.000	25,69	452.258.315	21,68
2019	452.080.000	17,11	445.926.875	21,37
2020	1.000.615.000	37,87	829.293.256	39,75
Jumlah	2.642.585.000	100,00	2.086.310.946	100,00
Rata-rata	528.517.000	20,00	417.262.189	20,00

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kaltara, 2021

Tabel 4.18 data realisasi program beasiswa Kaltara Cerdas bagi pelajar dan mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara menurut tahun, jumlah penerima/KPM, rata-rata per tahun dan persentasenya

Tahun	Jumlah KPM		Total	Realisasi (Rp)	Persentase
	Pelajar	Mahasiswa			
2016	0	1483	1483	7.270.000.000	14,22
2017	588	2373	2961	10.960.000.000	21,43
2018	317	4373	4690	11.000.000.000	21,51
2019	693	4311	5004	12.000.000.000	23,46
2020	1083	6760	7843	9.913.000.000	19,38
Jumlah	2.681	19.300	21.981	51.143.000.000	100,00
Rata-rata	893,67	3.860	4.396	10.228.600.000	20

Sumber : data diolah, Dewan Pendidikan dan Disdikbud Prov.Kaltara, 2021

Tabel 4.19 data realisasi program beasiswa Kaltara Cerdas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 menurut jenjang pendidikan, tempat kuliah, jumlah KPM dan persentasenya

No	Jenjang	Jumlah Penerima (KPM)	Persen tase	Jumlah beasiswa yang diterima (Rp)	Persen tase
1	Mahasiswa Dalam Wilayah				
	Diploma Prestasi Umum	173	2,21	173.000.000	1,75
	Diploma Kurang Mampu Umum	28	0,36	28.000.000	0,28
	Diploma Prestasi Kesehatan	192	2,45	192.000.000	1,94
	Diploma Kurang Mampu Kesehatan	7	0,09	7.000.000	0,07
		400	5,10	400.000.000	4,03
2	Mahasiswa Luar Wilayah				
	Diploma Prestasi Umum	66	0,84	66.000.000	0,67
	Diploma Kurang Mampu Umum	1	0,01	1.000.000	0,01

	Diploma Prestasi Kesehatan	79	1,01	79.000.000	0,80
	Diploma Kurang Mampu Kesehatan	2	0,03	2.000.000	0,02
		148	1,89	148.000.000	1,49
3	Mahasiswa S1/S2 Dalam Wilayah				
	S2 Umum Prestasi	3	0,04	6.000.000	0,06
	S1 Umum Prestasi	3.033	38,67	4.549.500.000	45,89
	S1 Umum Kurang Mampu	293	3,74	439.500.000	4,43
		3.329	42,45	4.995.000.000	50,39
4	Mahasiswa S1/S2 Luar Wilayah				
	S2 Umum Prestasi	75	0,96	150.000.000	1,51
	S1 Umum Prestasi	1.856	23,66	2.784.000.000	28,08
	S1 Umum Kurang Mampu	82	1,05	123.000.000	1,24
	S2 Kesehatan Prestasi	5	0,06	10.000.000	0,10
	S1 Kesehatan Prestasi	291	3,71	436.500.000	4,40
	S1 Kesehatan Kurang Mampu	7	0,09	10.500.000	0,11
		2.316	29,53	3.514.000.000	35,45
5	Mahasiswa Kerjasama Politeknik S1	7	0,09	35.000.000	0,35
6	Beasiswa Prestasi Akademik	560	7,14	280.000.000	2,82
7	Beasiswa Pelajar Tidak Mampu	662	8,44	331.000.000	3,34
8	Beasiswa Prestasi Non - Akademik	421	5,37	210.500.000	2,12
	Jumlah Total	7.843	100,00	9.913.500.000	100,00

Sumber : Disdikbud Prov.Kaltara, 2021

Tabel 4.20 data realisasi anggaran program Kube Provinsi Kalimantan Utara tahun 2017-2020 dan persentasenya

Tahun	Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	511.000.000	19,34	358.832.500	17,20
2018	678.890.000	25,69	452.258.315	21,68
2019	452.080.000	17,11	445.926.875	21,37
2020	1.000.615.000	37,87	829.293.256	39,75
Jumlah	2.642.585.000	100,00	2.086.310.946	100,00
Rata-rata	528.517.000	20,00	417.262.189	20,00

Sumber: Dinas Sosial Prov. Kaltara, 2021

Gambar 4.6 Program Bantuan DKP 2015-2020



4.8. Prioritas Program Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021-2026

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada Bab I subbab latar belakang, Bab II, Bab III, dan Bab IV subbab 4.1 s/d 4,6, maka kegiatan yang akan dilaksanakan parapihak terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai prioritas program penanggulangan kemiskinan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.21. Target prioritas progam penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2016-2021

No	Prioritas program	Indikasi capaian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	SIKNG modul Puskesos SLRT	Meningkatnya program SIKNG modul Puskesos						

		SLRT						
2	program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu	Meningkatnya program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu yang 3T (tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat)						
3	program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	Meningkatnya program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang 3T (tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat)						
4	program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan	Meningkatnya program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan						

	masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan	kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan yang 3T (tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat)						

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut,maka dapat disusun program, kegiatan, sub kegiatan sesuai Kepmendari Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dituangkan oleh pemangku program dengan sasaran prioritas adalah keberpihakan terhadap orang miskin dan kurang mampu di Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana disajikan pada lampiran 4.1.

4.6. Target Capaian Indikator Penanggulangan Kemiskinan tahun 2021-2026

Berdasarkan lampiran 4.1, untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemikskinan, maka perlu disusun target capaian indikator penanggulangan kemiskinan tahun 2021-2026 (lampiran 4.2).

Kebijakan penanggulangan kemiskinan akan dimonev (monitor dan evaluasi) untuk mengetahui sampai seberapa jauh keberhasilan atas pelaksanaan dari rencana aksi tahunan (RAT) tahun berkenaan. Selanjutnya, hasil monev ini akan disusun menjadi Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemskinan Provinsi Kalimantan Utara tahun berkenaan, yang disampaikan ke Wakil Presiden RI dan instansi terkait sebagai pertanggungjawaban dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara.

4.6. Kolaborasi parapihak

Kaloborasi parapihak (pemerintah, pemda, dunia usaha dan dunia industri/Dudi, Baznas, dan filantropis) menjadi kunci utama atas keberhasilan dari pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ini. Selain itu, yang tak kala penting adalah peran dari pemerlu peningkatan kesejahteraan sosial (PPKS) itu sendiri untuk terus meningkatkan kemandiriannya, serta kemudahan dan percepatan realisasi investasi parapihak menjadi kunci percepatan peningkatan kesejahteraan bagi PPKS bisa terwujud.

BAB V
LOKASI PRIORITAS

Lokasi prioritas adalah lokasi yang telah ditentukan untuk diintervensi penduduk miskin dan orang kurang mampu yang ada di kabuten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Data yang digunakan adalah data yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial RI, dimana data yang diusulkan untuk ditetapkan berasal dari pemerintah kabupaten/kota, kemudian diverivali oleh pemerintah kabupaten/kota, yang terdapat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Pusdatin Kemensos.

Lokasi prioritas yang dimaksud dokumen RPKD ini adalah penduduk miskin dan kurang mampu yang memilikii e-KTP maupun tidak memiliki KTP yang tercatat sebagai warga penduduk di Provinsi Kalimantan Utara, baik yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara ataupun tidak berdomisi di Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk meningkatkan kualitas data fakir miksin dan kurang mampu yang terdapat di dalam DTKS, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Kurang Mampu. Dalam pelaksanaan regulasi ini, di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal, karena minimnya dukungan dan komitmen parapihak terutama Kepala Daerah. Yang terpenting adalah bagaimana di tingkat desa selaku pionir pelaksana kegiatan ini terbentuknya pusat kesejahteraan sosial (puskesos) di desa-desa Kalimantan Utara dan berperan aktif, meluas, merata dan berkesinambungan.

Terkait pelayanan untuk pendataan, pendaftaran dan verivali penduduk miskin dan kurang mampu yang terdapat dalam DTKS adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Provinsi hanya melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, baik terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota maupun terhadap pelaku pemberdayaan sosial dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ada di Kalimantan Utara.

BAB VI
PENUTUP

Draf akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum dan DR. Yansen TP, M.Si. Dokumen ini menjadi acuan bagi perangkat daerah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan (dunia usaha dan dunia industri, Baznas, filantropis, dll) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) nya masing-masing terkait bidang penanggulangan kemiskinan.

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan mewujudkan Visi 3 yaitu "Sejahtera", dan mewujudkan Misi 3 yaitu "Pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan Wajib 16 Tahun dan berwawasan", dengan arah kebijakan 2 yaitu "menurunkan jumlah penduduk miskin".

Pembangunan dalam lima tahun ke depan yang digariskan dalam RPKD ini dilaksanakan melalui upaya seluruh komponen bangsa. RPKD 2021-2026 merupakan keberpihakan pemerintah provinsi terhadap orang miskin dan kurang mampu di Kalimantan Utara.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700103 200112 1 003

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan. Draf Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. 2021. Tanjung Selor.

Kementerian Dalam Negeri RI. Bahan Paparan "Peran dan Fungsi TKPK Dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020" disampaikan pada kegiatan Bimtek bagi TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui virtual meeting tanggal 3-5 Nopember. 2020. Jakarta.

Sekretariat Wakil Presiden RI/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Petunjuk Penggunaan Aplikasi Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. 2011. Jakarta.

Sekretariat Wakil Presiden RI/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan. 2014. Jakarta.

Sekretariat Wakil Presiden RI/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Aplikasi Situasi Kemiskinan dan Anggaran. 2020. Jakarta.

Sekretariat Wakil Presiden RI/Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Bahan Paparan "Penyusunan RPKD, RAT, dan LP2KD " disampaikan pada kegiatan Bimtek bagi TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui virtual meeting tanggal 3-5 Nopember. 2020. Jakarta.

Rangkuti, F. (2006). *Measuring Customer Satisfaction: Gaining Customer Relationship Strategy.* Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan & Analisis Kasus PLN – JP. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Shia, B.C., Chen, M., Ramdansyah, A.D., and Wang, S. (2016). Measuring Customer Satisfaction toward Localization Website by WebQual and Importance Performance Analysis (Case Study on AliexPress Site in Indonesia). *American Journal of Industrial and Business Management, 6, p117-128.* http://dx.doi.org/10.4236/ajibm.2016.62012

Internet :

https://kaltara.bps.go.id/

http://pengendalian.kaltaraprov.go.id/

https://www.bps.go.id/

https://www.facebook.com/pemprovkaltara/photos/

http://www.tnp2k.go.id/

https://tirto.id/isi-pasal-34-uud-1945-sebelum-setelah-amandemen-di-soal-tes-cpns-f8X5

https://pusdatin.kemensos.go.id/

https://kaltara.bps.go.id/indicator/6/431/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-.html

Lampiran 1.1. Indikator Penanggulangan Kemiskinan

No urut	No.	Indikator
	1	Indikator Konsumsi
		Indikator Utama
1	1.1	Tingkat Kemiskinan (%)
2	1.2	Garis Kemiskinan (Rp)
		Indikator Pendukung
3	1.3	Tingkat Kemiskinan - Kota (%)
4	1.4	Tingkat Kemiskinan - Desa (%)
5	1.5	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
6	1.6	Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa)
7	1.7	Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)
8	1.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)
9	1.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)
10	1.10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)
11	1.11	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)
12	1.12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)
13	1.13	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)
	2	Indikator Tenaga Kerja
		Indikator Utama
14	2.1	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
15	2.2	Jumlah Pekerja Informal (Jiwa)
16	2.3	Pekerja Kurang dari 14 Jam Seminggu (jiwa)
17	2.4	Pekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu (jiwa)
18	2.5	Setengah Pengangguran (%)
19	2.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
20	2.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
21	2.8	Tingkat Kesempatan Kerja (%)
	3	Indikator Kesehatan
		Indikator Utama
22	3.1	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
23	3.2	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
24	3.3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
25	3.4	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)
		Indikator Pendukung
26	3.5	Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)
27	3.6	Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)
28	3.7	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)
29	3.8	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)
30	3.9	Jarak Puskesmas Terdekat (km)
31	3.10	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

32	3.11	Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)
33	3.12	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)
34	3.13	Angka Morbiditas (%)
	4	Indikator Pendidikan
		Indikator Utama
35	4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)
36	4.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)
37	4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
38	4.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
39	4.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
40	4.6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
41	4.7	Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)
42	4.8	Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)
43	4.9	Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)
44	4.10	Angka Putus Sekolah SMK (%)
45	4.11	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)
46	4.12	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%)
47	4.13	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%)
		Indikator Pendukung
48	4.14	Jarak Fasilitas Pendidikan Terdekat
49	4.15	Jarak Sekolah Dasar SD/MI (km)
50	4.16	Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km)
51	4.17	Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km)
52	4.18	Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km)
53	4.19	Rasio Siswa/Kelas
54	4.20	Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa)
55	4.21	Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa)
56	4.22	Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa)
57	4.23	Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa)
58	4.24	Rasio Guru/Kelas
59	4.25	Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru)
60	4.26	Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru)
61	4.27	Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru)
62	4.28	Rasio Guru/Kelas SMK (Guru)
63	4.29	Rasio Siswa/Guru
64	4.30	Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa)
65	4.31	Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)
66	4.32	Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa)
67	4.33	Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa)
	5	Indikator Infrastruktur Dasar
		Indikator Utama
68	5.1	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)

69	5.2	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)
70	5.3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)
71	5.4	Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)
		Indikator Pendukung
72	5.5	Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)
73	5.6	Aksesibilitas Pasar Tradisional (km)
	6	Indikator Ketahanan Pangan
		Indikator Utama
74	6.1	Perkembangan Harga Beras (Rp)
75	6.2	Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%)
76	7	Indikator Ekonomi
		Indikator Utama
77	7.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)
78	7.2	Tingkat Inflasi (%)
	8	Indikator Daerah
		Indikator Utama
	9	Indikator Fiskal
79	9.1	Ruang Fiskal (%)
80	9.2	Ruang Fiskal (Rp Juta)
81	9.3	Derajat Otonomi Fiskal (%)
82	9.4	Kapasitas Fiskal
83	9.5	Pajak Perkapita (Rp)
84	9.6	SiLPA (%)
85	9.7	Pajak dan Retribusi Daerah (%)
86	9.8	Pendapatan Daerah
87	9.9	Pendapatan Asli Daerah (%)
88	9.10	Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)
89	9.11	Pajak Daerah (%)
90	9.12	Pajak Daerah (Rp Juta)
91	9.13	Retribusi Daerah (%)
92	9.14	Retribusi Daerah (Rp Juta)
93	9.15	Hasil Kekayaan Daerah (%)
94	9.16	Hasil Kekayaan Daerah (Rp Juta)
95	9.17	Lain-lain PAD yang Sah (%)
96	9.18	Lain-lain PAD yang Sah (Rp Juta)
97	9.19	Dana Perimbangan (%)
98	9.20	Dana Perimbangan (Rp Juta)
99	9.21	Dana Bagi Hasil (%)
100	9.22	Dana Bagi Hasil (Rp Juta)
101	9.23	Dana Alokasi Umum (%)
102	9.24	Dana Alokasi Umum (Rp Juta)
103	9.25	Dana Alokasi Khusus (%)

104	9.26	Dana Alokasi Khusus (Rp Juta)
105	9.27	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)
106	9.28	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp Juta)
107	9.29	Belanja Daerah
108	9.30	Belanja Langsung (%)
109	9.31	Belanja Langsung (Rp Juta)
110	9.32	Belanja Pegawai Langsung (%)
111	9.33	Belanja Pegawai Langsung (Rp Juta)
112	9.34	Belanja Barang dan Jasa (%)
113	9.35	Belanja Barang dan Jasa (Rp Juta)
114	9.36	Belanja Modal (%)
115	9.37	Belanja Modal (Rp Juta)
116	9.38	Belanja Tidak Langsung (%)
117	9.39	Belanja Tidak Langsung (Rp Juta)
118	9.40	Belanja Pegawai Tidak Langsung (%)
119	9.41	Belanja Pegawai Tidak Langsung (Rp Juta)
120	9.42	Belanja Bunga (%)
121	9.43	Belanja Bunga (Rp Juta)
122	9.44	Belanja Subsidi (%)
123	9.45	Belanja Subsidi (Rp Juta)
124	9.46	Belanja Hibah (%)
125	9.47	Belanja Hibah (Rp Juta)
126	9.48	Belanja Bantuan Sosial (%)
127	9.49	Belanja Bantuan Sosial (Rp Juta)

Sumber: data diolah, 2021

MATRIKS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2022-2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	OPD Pengampu	2022		2023		2024		2025		2026		Keterangan
			pagu	jumlah penerima manfaat	pagu	jumlah penerima manfaat	pagu	jumlah penerima manfaat	pagu	jumlah penerima manfaat	pagu	jumlah penerima manfaat	
1.	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Biro Kesejahteraan Rakyat											
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar												
	Fasilitasi, Koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan		Rp 16.946.229.704	6.350 Mahasiswa	Rp 17.146.229.704	6.400 Mahasiswa	Rp 17.356.229.704	6.450 Mahasiswa	Rp 17.556.228.704	6.500 Mahasiswa	Rp 17.796.228.704	6.500 Mahasiswa	Biaya Operasional Kegiatan dan Beasiswa Kaltara Unggul
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan												Administrasi untuk Bantuan Transportasi dan Akomodasi Pengobatan Bagi Masyarakat Kurang Mampu melalui anggaran BTT (BKAD)
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial												Administrasi untuk Bantuan Sosial kepada Individu / Keluarga / Masyarakat yang terdampak Bencana Alam / Musibah melalui anggaran BTT (BKAD)
2	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	**Rp -**	**-**	**Rp 320.000.000**	**26 orang**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	
	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		**Rp -**	**-**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	**Rp 160.000.000**	**26 orang**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Rp -	-	Rp 160.000.000	26 orang	Rp 100.000.000	16 orang	Rp 100.000.000	16 orang	Rp 100.000.000	16 orang	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		Rp -	-	Rp -	0	Rp 60.000.000	10 orang	Rp 60.000.000	10 orang	Rp 60.000.000	10 orang	
3	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja												
	Job Fair/Bursa Kerja		Rp 8.400.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Kali
4	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi											
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi												
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		Rp 10.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Rp 50.000.000	10	Kasus
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		**Rp 19.759.654**	**1 SK UMP dan 5 SK UMK**	**Rp 50.000.000**	**1 SK UMP dan 5 SK UMK**	**Rp 50.000.000**	**1 SK UMP dan 5 SK UMK**	**Rp 50.000.000**	**1 SK UMP dan 5 SK UMK**	**Rp 50.000.000**	**1 SK UMP dan 5 SK UMK**	
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		Rp 19.759.654	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	Rp 50.000.000	1	SK
5	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**												

		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi														
		Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		Rp	20.000.000	10	Rp	100.000.000	100	Rp	100.000.000	100	Rp	100.000.000	100	Rp	110.000.000	100	Perusahaan
6	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral														
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan																
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		Rp	137.500.000	50	Rp	39.211.200.000	14.004	Rp	5.269.600.000	1.882	Rp	2.693.600.000	962	Rp	2.486.400.000	888	KK
7	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman														
	Pengelolaan dan Pengembang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota																
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan		Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	900.000.000	100	Rp	900.000.000	100	Rp	900.000.000	100	Meter
		Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan		Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	400.000.000	400	Rp	400.000.000	400	Rp	400.000.000	400	Meter
8	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman														
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi																
		Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana		Rp	417.485.000	5	Rp	256.270.000	2	Rp	70.000.000	2	Rp	350.000.000.000	2	Rp	350.000.000.000	2	Unit
		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	70.000.000	2	Rp	350.000.000.000	2	Rp	350.000.000.000	2	Unit
9	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman														
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi																
		Pembangunan Jalan		Rp	27.692.194.000	5,67	Rp	19.128.370.000	5,67	Rp	38.000.000.000	5,67	Rp	43.000.000.000	5,67	Rp	43.000.000.000	5,67	Km
		Pembangunan Jembatan		Rp	5.653.650.000	1	Rp	-	0	Rp	25.000.000.000	1	Rp	10.000.000.000	1	Rp	10.000.000.000	1	Km
10	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman														
	Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha																
		Perbaikan Rumah Tidak layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha		Rp	-	0	Rp	963.834.000	35	Rp	700.000.000	35	Rp	700.000.000	35	Rp	700.000.000	35	Unit
		Pelaksanaan Pembangunan, Pamugaran/Peremajaan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (Lima Belas) Ha		Rp	1.095.570.000	7,5	Rp	2.639.468.000	2,4	Rp	4.200.000.000	7,5	Rp	4.200.000.000	7,5	Rp	4.200.000.000	7,5	Ha
11	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman														
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman																
		Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		Rp	5.399.011.324	25	Rp	2.681.828.000	8	Rp	7.000.000.000	25	Rp	7.000.000.000	25	Rp	7.000.000.000	25	Permukiman
12	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Permukiman														
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi																
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		Rp	392.866.630	130	Rp	389.950.000	130	Rp	721.000.000	130	Rp	736.000.000	130	Rp	750.000.000	130	Orang
13	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**		Dinas Kesehatan														
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat																
		Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan		Rp	30.586.381.123	65.000	Rp	20.000.000.000	65.000	Rp	20.000.000.000	65.000	Rp	20.000.000.000	65.000	Rp	20.000.000.000	65.000	Orang

14	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**															
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan														
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp -	0	Rp 338.396.260,00	4	Rp 297.177.901,28	4	Rp 261.650.239,91	4	Rp 473.325.253,96	4	Dokumen			
15	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**															
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas															
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Rp -	0	Rp 66.158.186.102,00	6	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Unit			
	Penambahan Ruang Kelas Baru		Rp 27.318.291.940,00	30	Rp 36.832.400.000,00	43	Rp 6.869.384.435,57	9	Rp 4.704.115.520,18	7	Rp 4.419.911.221,51	7	Ruang			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp 4.184.523.000,00	10	Rp -	0	Rp 9.541.383.878,70	10	Rp 5.563.530.927,92	8	Rp 4.538.242.535,00	6	Ruang			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi		Rp 552.079.000,00	1	Rp -	0	Rp 4.508.641.458,63	4	Rp 3.969.632.715,68	4	Rp 3.729.803.001,23	4	Ruang			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika		Rp 552.079.000,00	1	Rp -	0	Rp 5.635.801.823,29	5	Rp 3.969.632.715,68	4	Rp 3.729.803.001,23	4	Ruang			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia		Rp 1.461.005.000,00	3	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Ruang			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer		Rp 839.004.000,00	3	Rp -	0	Rp 3.025.595.943,30	4	Rp 2.663.885.507,68	4	Rp 1.877.207.957,22	3	Ruang			
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa		Rp -	0	Rp -	0	Rp 3.781.994.929,13	5	Rp 4.661.799.638,44	7	Rp 3.754.415.914,44	6	Ruang			
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Rp 1.128.604.000,00	4	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Ruang			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Rp 1.130.004.000,00	3	Rp -	0	Rp 941.779.675,24	1	Rp 829.189.777,92	1	Rp 779.093.368,02	1	Ruang			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp 52.468.287.518,00	9	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	unit			
	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Rp 5.041.000.000,00	78	Rp 3.870.000.000,00	43	Rp 1.367.422.892,74	942	Rp 952.389.445,05	746	Rp 759.668.099,60	626	Unit			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Rp 249.998.498,00	1230	Rp 1.112.248.020,00	1450	Rp 876.644.682,39	1500	Rp 833.501.967,77	1650	Rp 841.080.043,28	1800	Siswa			
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Rp 1.995.000.000,00	1230	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	paket			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		Rp 34.615.576.000,00	20324	Rp 18.397.332.095,00	20647	Rp 16.823.984.159,63	21003	Rp 15.087.022.369,98	21392	Rp 14.455.163.925,95	21814	Siswa			
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		Rp 54.500.540.000,00	30971	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	siswa			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan															
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Unit			
	Penambahan Ruang Kelas Baru		Rp 14.021.404.000,00	38	Rp 6.915.631.602,00	19	Rp 5.667.842.930,10	9	Rp 4.990.251.482,43	9	Rp 3.125.839.977,18	6	Ruang			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp -	0	Rp 4.174.958.576,00	12	Rp 7.027.301.319,15	9	Rp 3.044.728.443,35	4	Rp 2.171.616.265,19	2	Ruang			
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa		Rp 13.638.427.779,00	14	Rp 14.971.713.390,00	12	Rp 16.541.221.392,01	7	Rp 12.483.185.113,53	6	Rp 11.728.999.793,22	6	Ruang			
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 5.547.953.590,00	18	Rp 3.449.025.879,00	9	Rp 4.493.765.230,47	5	Rp 3.956.534.942,76	5	Rp 4.496.589.912,65	4	Ruang			
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Rp 309.624.000,00	1	Rp 2.073.775.923,00	4	Rp 1.883.559.350,48	2	Rp -	0	Rp -	0	Ruang			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp 1.647.450.000,00	14	Rp 2.987.333.598,00	2	Rp 2.774.988.715,02	1	Rp 629.700.621,14	1	Rp -	0	unit			
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah		Rp 3.160.000.000,00	9	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	ruang			
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Rp 289.664.000,00	4	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	unit			
	Pengadaan Mebeluer Sekolah		Rp 6.924.000.000,00	86	Rp 916.298.348,00	757	Rp 975.512.735,59	783	Rp 585.977.796,79	533	Rp 332.860.342,81	322	Unit			
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Rp 249.528.000,00	500	Rp 725.380.000,00	500	Rp 572.162.621,65	500	Rp 503.760.496,91	500	Rp 473.325.253,96	500	Siswa			
	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Rp 29.464.882.200,00	20	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	paket			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		Rp 22.429.848.000,00	10390	Rp 9.420.295.539,00	10600	Rp 8.671.124.531,16	10825	Rp 7.803.753.857,70	11065	Rp 7.501.258.624,82	11320	Siswa			
	Pengelolaan Pendidikan Khusus															
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		Rp -	0	Rp 8.745.108.765,00	2	Rp 1.830.920.389,29	1	Rp 1.712.785.689,51	1	Rp 1.703.970.914,27	1	unit			
	Penambahan ruang kelas baru sekolah		Rp 2.726.810.000,00	11	Rp 2.101.000.000,00	4	Rp 10.813.873.549,25	45	Rp 7.757.911.652,48	35	Rp 2.271.961.219,03	10	Ruang			

		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Rp -	0	Rp -	0	Rp 251.751.553,53	1	Rp 241.805.038,52	1	Rp 236.662.626,98	1	Ruang		
		Pembangunan Ruang unit Kesehatan Sekolah (UKS)		Rp -	0	Rp 527.000.000,00	1	Rp 400.513.835,16	1	Rp 403.008.397,53	1	Rp -	0	Ruang		
		Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Rp -	0	Rp 569.000.000,00	1	Rp 366.184.077,86	1	Rp -	0	Rp -	0	Ruang		
		Pembangunan Asrama Sekolah		Rp -	0	Rp -	0	Rp 915.460.194,65	1	Rp -	0	Rp -	0	Ruang		
		Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)		Rp -	0	Rp 527.000.000,00	1	Rp 400.513.835,16	1	Rp 372.782.767,72	1	Rp -	0	Ruang		
		Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)		Rp -	0	Rp 479.000.000,00	1	Rp 400.513.835,16	1	Rp 372.782.767,72	1	Rp -	0	Ruang		
		Pengadaaan Mebeluer sekolah		Rp 860.000.000,00	15	Rp 860.000.000,00	10	Rp 28.608.131,08	40	Rp 27.203.066,83	40	Rp 28.399.515,24	40	Unit		
		Pengadaan Perlengkapan Peserta didik		Rp 150.012.160,00	520	Rp 610.750.000,00	540	Rp 384.493.281,75	560	Rp 372.782.767,72	565	Rp 378.660.203,17	570	Siswa		
		Pengadaaan Sarana mobilitas Sekolah		Rp -	0	Rp 2.310.000.000,00	5	Rp 686.595.145,98	1	Rp 604.512.596,30	1	Rp 1.230.645.660,31	2	unit		
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		Rp 408.350.000,00	6	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	0	paket		
		Penyediaan Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		Rp 3.141.508.000,00	547	Rp 516.338.840,00	581	Rp 494.234.072,58	617	Rp 461.948.375,67	655	Rp 460.545.472,11	695	Siswa		
16	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		Dinas Pariwisata													
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi															
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Rp 5.208.244.272,00	Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Utara	-	-	Rp 7.000.000.000,00	Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Utara	Rp 7.000.000.000,00	Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Utara	Rp 7.000.000.000,00	Masyarakat dan Pelaku Ekonomi Kreatif Provinsi Kalimantan Utara			
17	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**		Dinas Pariwisata	Rp 243.898.270,00	100 Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 225.000.000,00	100 orang	Rp 1.350.000.000,00	600 orang	Rp 1.350.000.000,00	600 orang	Rp 950.000.000,00	400 orang			
	Penyedia Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			Rp 243.898.270,00	100 Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 225.000.000,00	100 orang	Rp 1.350.000.000,00	600 orang	Rp 1.350.000.000,00	600 orang	Rp 950.000.000,00	400 orang			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif		-	-	-	-	Rp 650.000.000,00	300 orang	Rp 650.000.000,00	300 orang	Rp 250.000.000,00	100 orang			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar		Rp 243.898.270,00	100 Orang Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 150.000.000,00	50 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		-	-	Rp 75.000.000,00	50 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang			
18	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		Dinas Pariwisata	Rp 243.770.616,00	100 Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rp -	-	Rp 1.500.000.000,00	500 orang	Rp 1.500.000.000,00	500 orang	Rp 1.515.000.000,00	500 orang			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			Rp 243.770.616,00	100 Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rp -	-	Rp 1.000.000.000,00	500 orang	Rp 1.000.000.000,00	500 orang	Rp 1.000.000.000,00	500 orang			
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		-	-	-	-	Rp 400.000.000,00	300 orang	Rp 400.000.000,00	300 orang	Rp 400.000.000,00	300 orang			
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		-	-	-	-	Rp 250.000.000,00	50 usaha	Rp 250.000.000,00	50 usaha	Rp 250.000.000,00	50 usaha			
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Rp 243.770.616,00	100 Orang Pelaku Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	Rp 350.000.000,00	150 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang	Rp 350.000.000,00	150 orang			
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			Rp -	-	Rp -	-	Rp 500.000.000,00	250 orang	Rp 500.000.000,00	250 orang	Rp 515.000.000,00	250 orang			
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		-	-	-	-	Rp 250.000.000,00	150 pelaku usaha	Rp 250.000.000,00	150 pelaku usaha	Rp 265.000.000,00	150 pelaku usaha			

Kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui 4 strategi :
1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan

		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha		Rp -	-	Rp -	-	Rp	250.000.000,00	100 orang	Rp	250.000.000,00	100 orang	Rp	250.000.000,00	100 orang	
19	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			Rp 366.334.143,00	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, BumDes, pokdarwis dan Masyarakat	Rp 175.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	Rp	1.250.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	Rp	2.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, BumDes, pokdarwis dan Masyarakat	Rp	2.000.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			Rp 174.254.974,00	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, BumDes, pokdarwis dan Masyarakat	Rp -	-	Rp	500.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	Rp	500.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, BumDes, pokdarwis dan Masyarakat	Rp	500.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dinas Pariwisata	Rp 174.254.974,00	35 orang	Rp -	-	Rp	500.000.000,00	2 kelompok	Rp	500.000.000,00	2 kelompok	Rp	500.000.000,00	2 kelompok	
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			Rp 192.079.169,00	Dinas Pariwisata Kab/kota, Pemerintah Desa, BUMDES	Rp 175.000.000,00	35 orang	Rp	500.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	Rp	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa, BumDes, pokdarwis dan Masyarakat	Rp	1.000.000.000,00	Pokdarwis dan Masyarakat	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Rp 192.079.169,00	35 Orang	Rp 175.000.000,00	35 orang	Rp	500.000.000,00	2 kelompok	Rp	1.000.000.000,00	4 kelompok	Rp	1.000.000.000,00	4 kelompok	
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah			Rp -	-	Rp -	-	Rp	250.000.000,00	Usaha Kepariwisataan	Rp	500.000.000,00	Usaha Kepariwisataan	Rp	500.000.000,00	Usaha Kepariwisataan	
		Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Rp -	-	Rp -	-	Rp	250.000.000,00	100 usaha kepariwisataan	Rp	500.000.000,00	150 usaha kepariwisataan	Rp	500.000.000,00	150 usaha kepariwisataan	
20	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN**			**Rp 50.000.000**		**Rp -**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak			**Rp 50.000.000**		**Rp -**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Dinas Sosial	Rp 50.000.000	10 Orang	Rp -	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	
21	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**Rp 222.000.000**		**Rp 75.000.000**		**Rp**	**75.000.000**		**Rp**	**75.000.000**		**Rp**	**75.000.000**		
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			**Rp 112.000.000**		**Rp 35.000.000**		**Rp**	**35.000.000**		**Rp**	**35.000.000**		**Rp**	**35.000.000**		
		Penyediaan Permakanan		Rp 34.000.000	100 Orang	Rp 25.000.000	100 Orang	Rp	25.000.000	100 Orang	Rp	25.000.000	100 Orang	Rp	25.000.000	100 Orang	
		Penyediaan Sandang		Rp 28.000.000	80 Orang	Rp 10.000.000	20 Orang	Rp	10.000.000	20 Orang	Rp	10.000.000	20 Orang	Rp	10.000.000	20 Orang	
		Penyediaan Alat Bantu		Rp 50.000.000	10 Orang	Rp -	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti			**Rp 25.000.000**		**Rp 25.000.000**		**Rp**	**25.000.000**		**Rp**	**25.000.000**		**Rp**	**25.000.000**		
		Penyediaan Makanan		Rp 25.000.000	90 Orang	Rp 25.000.000	100 Orang	Rp	25.000.000	100 Orang	Rp	25.000.000	100 Orang	Rp	25.000.000	100 Orang	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti			**Rp 35.000.000**		**Rp 15.000.000**		**Rp**	**15.000.000**		**Rp**	**15.000.000**		**Rp**	**15.000.000**		
		Penyediaan Permakanan		Rp 35.000.000	100 Orang	Rp 15.000.000	60 Orang	Rp	15.000.000	60 Orang	Rp	15.000.000	60 Orang	Rp	15.000.000	60 Orang	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan			**Rp 50.000.000**		**Rp -**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		
		Pemulangan ke Daerah Asal		Rp 50.000.000	10 Orang	Rp -	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	
22	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**Rp 272.448.256**		**Rp 160.000.000**		**Rp**	**160.000.000**		**Rp**	**160.000.000**		**Rp**	**160.000.000**		
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan			**Rp 35.500.000**		**Rp -**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		**Rp**	**-**		
		Pengangkatan Anak antar WNI	Dinas Sosial	Rp 35.500.000	12 Orang	Rp -	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	Rp	-	0 Orang	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah			**Rp 236.948.256**		**Rp 160.000.000**		**Rp**	**160.000.000**		**Rp**	**160.000.000**		**Rp**	**160.000.000**		
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		Rp 236.948.256	5 Kelompok	Rp 160.000.000	5 Kelompok	Rp	160.000.000	5 Kelompok	Rp	160.000.000	5 Kelompok	Rp	160.000.000	5 Kelompok	
23	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**Rp 430.000.000**		**Rp 215.000.000**		**Rp**	**215.000.000**		**Rp**	**215.000.000**		**Rp**	**215.000.000**		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			**Rp 430.000.000**		**Rp 215.000.000**		**Rp**	**215.000.000**		**Rp**	**215.000.000**		**Rp**	**215.000.000**		
		Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial	Rp 180.000.000	400 Orang	Rp 125.000.000	1 Paket	Rp	125.000.000	1 Paket	Rp	125.000.000	1 Paket	Rp	125.000.000	1 Paket	
		Pelayanan Dukungan Psikososial		Rp 250.000.000	75 Orang	Rp 90.000.000	75 Orang	Rp	90.000.000	75 Orang	Rp	90.000.000	75 Orang	Rp	90.000.000	75 Orang	
24	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**																

		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Rp 500.000.000,00	5 Kelompok Tani	Rp 134.691.476,00	8 Kelompok Tani	Rp 100.561.071,00	10 Kelompok Tani	Rp 119.656.402,00	12 Kelompok Tani	Rp 120.000.000,00	15 Kelompok Tani		
25	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan													
		Pembentukan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani		Rp 250.000.000,00	3 Lokasi	Rp 120.000.000,00	5 Lokasi	Rp 120.000.000,00	5 Lokasi	Rp 105.000.000,00	5 Lokasi	Rp 105.000.000,00	5 Lokasi		
26	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman													
		Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		Rp 170.000.000,00	15 Kelompok	Rp 75.000.000,00	15 Kelompok	Rp 90.000.000,00	15 Kelompok	Rp 95.000.000,00	15 Kelompok	Rp 120.000.000,00	15 Kelompok		
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Tenak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				Rp 1.339.000.000,00	*5 Kelompok Tani*	Rp 1.384.250.000,00	*5 Kelompok Tani*	Rp 1.446.500.000,00	*5 Kelompok Tani*	Rp 1.514.750.000,00	*15 Kelompok Tani*		
		Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain				Rp 450.000.000,00	2 Kelompok Tani	Rp 460.000.000,00	2 Kelompok Tani	Rp 471.000.000,00	2 Kelompok Tani	Rp 480.000.000,00	2 Kelompok Tani		
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam (satu) Daerah Provinsi													
		Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak				Rp 70.000.000,00	1 Kelompok Tani	Rp 75.000.000,00	1 Kelompok Tani	Rp 85.000.000,00	1 Kelompok Tani	Rp 65.000.000,00	1 Kelompok Tani		
27	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi													
		Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		Rp 75.372.872,00	2 Kelompok	Rp 57.662.611,00	2 Kelompok	Rp 59.165.356,00	2 Kelompok	Rp 60.315.648,00	2 Kelompok	Rp 57.911.954,00	2 Kelompok		
28	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan													
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		Rp 400.000.000,00	3 Kelompok Tani	Rp 25.000.000,00	2 Kelompok Tani	Rp 37.502.360,00	2 Kelompok Tani	Rp 36.000.000,00	5 Kelompok Tani	Rp 34.000.000,00	5 Kelompok Tani		
29	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi													
		Pengendalian Risiko Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				Rp 104.805.727,00	5 Kab/Kota	Rp 105.441.596,00	5 Kab/Kota	Rp 120.000.000,00	5 Kab/Kota	Rp 125.000.000,00	5 Kab/Kota		
30	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**														

		Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Dinas Kelautan dan Perikanan													
		Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp	690.000.000	10	Rp	303.300.000	10	Rp	306.636.300	10	Rp	321.968.115	10	Rp	338.066.521	10	Unit
		Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah														
		Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Rp	-	0	Rp	202.200.000	10	Rp	204.424.200	10	Rp	206.946.268	10	Rp	208.946.268	10	Unit
31	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**		Dinas Kelautan dan Perikanan													
		Pengelolaan Perikanan Budidaya														
		Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Laut		Rp	642.500.000	5	Rp	303.300.000	2	Rp	306.636.300	3	Rp	310.009.299	3	Rp	313.419.402	3	Unit
		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Di Air Payau Dan Air Tawar Yang Penggunaannya Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan Oleh Daerah Provinsi Dan/Atau Manfaat Atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Rp	438.000.000	2	Rp	101.100.000	2	Rp	102.212.100	3	Rp	103.336.433	3	Rp	104.473.134	3	Unit
32	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KEGIATAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Rp	50.000.000	20 peserta lembaga kemasyarakatan desa	Rp	50.000.000	20 peserta lembaga kemasyarakatan desa	Rp	50.000.000	20 peserta lembaga kemasyarakatan desa	Rp	50.000.000	20 peserta lembaga kemasyarakatan desa	Rp	50.000.000	20 peserta lembaga kemasyarakatan desa	Kegiatan berupa Pelatihan dan Keterampilan sebagai Upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)
33	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB													
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender an Hak Anak Kewenangan Provinsi														
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		Rp	85.312.616	2 Kab/Kota (@ 40 Orang)	Rp	261.000.000	2 Kab/Kota (@ 40 Orang)		261.000.000	2 Kab/Kota (@ 40 Orang)		261.000.000	2 Kab/Kota (@ 40 Orang)		261.000.000	2 Kab/Kota (@ 40 Orang)	
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB													
		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
		Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB		Rp	59.966.090	1 Dok (25 Orang)	Rp	300.000.000	1 Dok (50 Orang)		300.000.000	1 Dok (50 Orang)		300.000.000	1 Dok (50 Orang)		300.000.000	1 Dok (50 Orang)	
35	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp	20.000.000	25%	Rp	17.600.000	25%	Rp	18.000.000	25%	Rp	9.000.000	-	Rp	9.000.000	-	
		Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas		Rp	20.000.000	1 Lokasi	Rp	17.600.000	1 Lokasi	Rp	18.000.000	1 Lokasi	Rp	9.000.000	1 Lokasi	Rp	9.000.000	1 Lokasi	
		penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi		Rp	20.000.000	17 Lokasi	Rp	17.600.000	17 Lokasi	Rp	18.000.000	17 Lokasi	Rp	9.000.000	17 Lokasi	Rp	9.000.000	17 Lokasi	
36	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Rp	1.600.000.000	6%	Rp	1.100.000.000	6%	Rp	1.100.000.000	6%	Rp	1.100.000.000	6%	Rp	1.100.000.000	6%	

		Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah provinsi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Rp	600.000.000	12 jenis	Rp	600.000.000	12 jenis	Rp	600.000.000	12 jenis	Rp	600.000.000	12 jenis	Rp	600.000.000	12 jenis	
		koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat distributor dan sub distributor		Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	
		koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang penting di tingkat distributor dan sub distributor		Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<13%	
		Pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan		Rp	1.000.000.000	6%	Rp	500.000.000	6%	Rp	500.000.000	6%	Rp	500.000.000	6%	Rp	500.000.000	6%	
		pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota		Rp	300.000.000	<15%	Rp	300.000.000	<15%	Rp	300.000.000	<13%	Rp	300.000.000	<15%	Rp	300.000.000	<15%	
		operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi		Rp	700.000.000	10 kali	Rp	200.000.000	10 kali	Rp	200.000.000	10 kali	Rp	200.000.000	10 kali	Rp	200.000.000	10 kali	
37	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,**		Dinas Kehutanan																
	kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan																		
		Sub kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan		Rp	8.598.377.354	15 KUPS	Rp	2.750.000.000	15 KUPS	Rp	2.750.000.000	15 KUPS	Rp	3.000.000.000	15 KUPS	Rp	3.000.000.000	15 KUPS	
38	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	206.868.107	468.181 Orang	Rp	252.985.347	477.545 Orang	Rp	227.827.547	487.096 Orang	Rp	410.466.279	496.837 Orang	Rp	439.130.543	506.774 Orang	1. Jumlah penduduk yang memiliki KTP-El
						129.081 Orang			131.663 Orang			134.296 Orang			136.982 Orang			139.722 Orang	2. Jumlah penduduk yang memiliki KIA
	Pelayanan Pendafataran Penduduk			Rp	18.450.000	694.512 Orang	Rp	20.150.000	708.402 Orang	Rp	22.250.000	722570 Orang	Rp	25.000.000	737022 Orang	Rp	32.000.000	751.762 Orang	Jumlah pelayanan pendaftaran penduduk
		Pendataan Penduduk non Permanen dan rentan administrasi bkependudukan lintas kabupaten/Kota dalam satu Provinsi		Rp	18.450.000	2 Kelompok	Rp	20.150.000	2 Kelompok	Rp	22.250.000	2 Kelompok	Rp	25.000.000	2 Kelompok	Rp	32.000.000	2 Kelompok	Jumlah pendataan penduduk non permanen
	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			Rp	154.934.000	5 Kab/Kota	Rp	189.585.347	5 Kab/Kota	Rp	170.800.000	5 Kab/Kota	Rp	205.233.000	5 Kab/Kota	Rp	219.656.000	5 Kab/Kota	Jumlah kabupaten/kota penyelenggara pendaftaran penduduk
		Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk		Rp	103.000.000	5 Kab/Kota	Rp	126.000.000	5 Kab/Kota	Rp	113.900.000	5 Kab/Kota	Rp	205.233.000	5 Kab/Kota	Rp	219.656.000	5 Kab/Kota	
		Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk		Rp	51.934.000	5 kali	Rp	63.585.347	5 kali	Rp	56.900.000	5 kali		-	5 kali		-	5 kali	
39	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	260.500.579	97%	Rp	318.574.141	98%	Rp	286.893.948	99%	Rp	516.883.463	99,50%	Rp	5.552.979.202	99,70%	1. Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan untuk anak usia 0-18 tahun
						100%			100%			100%			100%			100%	2. Persentase penduduk yang memiliki akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
						100%			100%			100%			100%			100%	3. Persentase penduduk yang memiliki buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
						100%			100%			100%			100%			100%	4. Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan
	Pelayanan Pencatatan Sipil			Rp	160.600.579	5 Kab/Kota	Rp	188.574.141	5 Kab/Kota	Rp	186.893.948	5 Kab/Kota	Rp	266.883.463	5 Kab/Kota	Rp	302.979.202	5 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pelayanan pencatatan sipil
		Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		Rp	100.000.000	7 Kecamatan	Rp	128.574.141	7 Kecamatan	Rp	126.893.948	7 Kecamatan	Rp	206.883.463	7 Kecamatan	Rp	242.979.202	7 Kecamatan	Jumlah kecamatan yang terfasilitasi pelayanan pencatatan sipil
	Penyelenggaraaan Pencatatan Sipil di Provinsi			Rp	40.000.000	5 Kab/Kota	Rp	50.000.000	5 Kab/Kota	Rp	40.000.000	5 Kab/Kota	Rp	110.000.000	5 Kab/Kota	Rp	110.000.000	5 Kab/Kota	Jumlah Kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pencatatan sipil

				Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil		Rp	30.000.000	5 Kab/Kota	Rp	40.000.000	5 Kab/Kota	Rp	30.000.000	5 Kab/Kota	Rp	60.000.000	5 Kab/Kota	Rp	80.000.000	5 Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang disosialisasi terkait pencatatan sipil

Target dan Capaian Indikator Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

No.	Indikator	2021		2022		2023	2024	2025	2026	OPD Pengampu	KETERANGAN
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	Target	Target		
A	INDIKATOR KONSUMSI										
	Indikator Utama										
1	Tingkat Kemiskinan (%)		6,83		6,77					Dinas Sosial	Rilis BPS September 2021 dan Maret 2022
2	Garis Kemiskinan (Rp)		730.342		772.914					Dinas Sosial	
	Indikator Pendukung										
3	Tingkat Kemiskinan - Kota (%)		5,32		5,66					Dinas Sosial	
4	Tingkat Kemiskinan - Desa (%)		9,31		8,75					Dinas Sosial	
5	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		49.490		49.460					Dinas Sosial	
6	Jumlah Penduduk Miskin - Kota (Jiwa)		23.880		26.550					Dinas Sosial	
7	Jumlah Penduduk Miskin - Desa (Jiwa)		25.610		22.910					Dinas Sosial	
8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)		0,893		0,890					Dinas Sosial	
9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Kota (Indeks)		0,785		0,741					Dinas Sosial	
10	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) - Desa (Indeks)		1,068		1,155					Dinas Sosial	
11	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)		0,173		0,186					Dinas Sosial	
12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Kota (Indeks)		0,170		0,151					Dinas Sosial	
13	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa (Indeks)		0,179		0,250					Dinas Sosial	
B	Indikator Tenaga Kerja										
	Indikator Utama										
14	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	391.257	354.376	406.735	349.892	376.052	385.509	395.080	404.641	Disnakertrans	
15	Jumlah Pekerja Informal (Jiwa)	156.388	171.571	162.207	166.584	188.881	197.450	201.567	209.282	Disnakertrans	
16	Pekerja Kurang dari 14 Jam Seminggu (jiwa)	52.799	43.687	56.657						Disnakertrans	
17	Pekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu (jiwa)	126.002	125.472	132.498	83.572	133.832	137.471	139.185	142.121	Disnakertrans	
18	Setengah Pengangguran (%)		7,16		2,23					Disnakertrans	
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,56	66,24	69,86	64,52	67,05	67,21	67,38	67,54	Disnakertrans	
20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8-5,5	4,58	4,56	4,62	4,45	4,33	4,22	4,11	Disnakertrans	
21	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,35	95,42	96,77	95,38	96,68	97,25	96,70	96,85	Disnakertrans	
C	INDIKATOR KESEHATAN										
	Indikator Utama										
22	Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,2	10,24	11,6	4,02	14	13	12	11	Dinas Kesehatan	
23	Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)		0,127		0,079					Dinas Kesehatan	
24	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) (Per 1.000 Kelah	19	29	18	12	24	23	22	20	Dinas Kesehatan	
25	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	15%	17,60%	14%	13,83%	13%	12%	0	0	Dinas Kesehatan	
	Indikator Pendukung										
26	Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)	75	164,7982063	75	158,0717489	75	75	75	75	Dinas Kesehatan	
27	Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)	25,3	23,96300448	26	20,59977578	26,6	27,2	28	28	Dinas Kesehatan	
	Rasio Dokter Spesialis (Per 100.000 Penduduk)	101,3	50,16816143	103,9	19,47869955	106,5	109,2	112	112		
	Rasio Dokter gigi (Per 100.000 Penduduk)	11	11,21076233	11	2,242152466	11	11	11	11		
28	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	7,80%	6,80%	7,50%	5,90%	7,30%	7%	0	0	Dinas Kesehatan	
29	Prevalensi Balita Gizi Kurang (%)	15%	17,60%	14%	13,83%	13%	12%	0	0	Dinas Kesehatan	
30	Jarak Puskesmas Terdekat (km)									Dinas Kesehatan	
31	Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)									Dinas Kesehatan	
32	Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)									Dinas Kesehatan	
33	Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)									Dinas Kesehatan	
34	Angka Morbiditas (%)									Dinas Kesehatan	
D	INDIKATOR PENDIDIKAN										
	Indikator Utama										
35	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	94,19	97,58	100,00	91,92	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	
36	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	94,19	90,92	100,00	82,25	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	
37	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)	94,19	90,54	100,00	87,95	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	
38	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	66,22	87,88	100,00	87,88	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	
39	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	66,22	67,55	100,00	67,55	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	
40	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)	66,22	63,20	100,00	73,82	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan	
41	Angka Putus Sekolah Usia 7-12 (%)	0,00	0,42	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	
42	Angka Putus Sekolah Usia 13-15 (%)	0,00	0,07	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	
43	Angka Putus Sekolah Usia 16-18 (%)	0,00	0,10	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	

44	Angka Putus Sekolah SMK (%)	0,00	0,05	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	
45	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15+ (%)	0,00	3,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	
46	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15-44 (%)	0,00	0,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	
47	Angka Buta Huruf Penduduk Usia 45+ (%)	0,00	8,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Dinas Pendidikan	
	Indikator Pendukung										
48	Jarak Fasilitas Pendidikan Terdekat	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
49	Jarak Sekolah Dasar SD/MI (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
50	Jarak Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
51	Jarak Sekolah Menengah Atas SMA/MA (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
52	Jarak Sekolah Menengah Kejuruan SMK (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
53	Rasio Siswa/Kelas	25	22	25	21	26	26	26	26	Dinas Pendidikan	
54	Rasio Siswa/Kelas SD/MI (Siswa)	25	19	25	19	26	26	26	26	Dinas Pendidikan	
55	Rasio Siswa/Kelas SMP/MTs (Siswa)	25	25	25	23	26	26	26	26	Dinas Pendidikan	
56	Rasio Siswa/Kelas SMA/MA (Siswa)	25	27	25	27	26	26	26	26	Dinas Pendidikan	
57	Rasio Siswa/Kelas SMK (Siswa)	25	26	25	23	26	26	26	26	Dinas Pendidikan	
58	Rasio Guru/Kelas	2	2	2	1	2	2	2	2	Dinas Pendidikan	
59	Rasio Guru/Kelas SD/MI (Guru)	2	2	2	1	2	2	2	2	Dinas Pendidikan	
60	Rasio Guru/Kelas SMP/MTs (Guru)	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan	
61	Rasio Guru/Kelas SMA/MA (Guru)	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan	
62	Rasio Guru/Kelas SMK (Guru)	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Pendidikan	
63	Rasio Siswa/Guru	15	13	15	14	15	15	15	15	Dinas Pendidikan	
64	Rasio Siswa/Guru SD/MI (Siswa)	15	13	15	14	15	15	15	15	Dinas Pendidikan	
65	Rasio Siswa/Guru SMP/MTs (Siswa)	15	13	15	13	15	15	15	15	Dinas Pendidikan	
66	Rasio Siswa/Guru SMA/MA (Siswa)	15	16	15	14	15	15	15	15	Dinas Pendidikan	
67	Rasio Siswa/Guru SMK (Siswa)	15	13	15	13	15	15	15	15	Dinas Pendidikan	
E	INDIKATOR INFRASTRUKTUR DASAR										
	Indikator Utama										
68	Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPRPerkim	Masih dalam tahap Konfirmasi ke Kabupaten/Kota
69	Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPRPerkim	Masih dalam tahap Konfirmasi ke Kabupaten/Kota
70	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	167.300 KK	174.527 KK	177.382 KK	183.955 KK	187.639KK	198.045KK	203.374KK	208.295KK	Dinas ESDM	
71	Proporsi Desa Dengan Akses Jalan R4 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	DPUPRPerkim	Masih dalam tahap Konfirmasi ke Kabupaten/Kota
	Indikator Pendukung										
72	Proporsi Desa dengan Jaringan Listrik (%)	69,98%	71,16%	75,73%	75,52%	79,05%	86,72%	93,15%	100,00%	Dinas ESDM	
73	Aksesibilitas Pasar Tradisional (km)									Disperindagkop UKM	
F	INDIKATOR KETAHANAN PANGAN										
	Indikator Utama										
74	Perkembangan Harga Beras (Rp)									Disperindagkop UKM	
75	Perkembangan Harga Bahan Kebutuhan Pokok Utama (%)									Disperindagkop UKM	
G	INDIKATOR EKONOMI										
	Indikator Utama										
76	Pertumbuhan Ekonomi (%)	2.52-3.53%	3.98%	5.4%	4.73%* *= Data sementara C-to-C Tr-II	5.6%	6.01%	5.20%	5.30%	Biro Ekonomi	
77	Tingkat Inflasi (%)									Bapppeda dan Litbang	
H	INDIKATOR DAERAH										
	Indikator Utama										
I	INDIKATOR FISKAL										
78	Ruang Fiskal (%)									BKAD	
79	Ruang Fiskal (Rp Juta)									BKAD	
80	Derajat Otonomi Fiskal (%)	26,17%	25,97%	27,72%	23,57%	23,57%	23,57%	23,57%		BKAD	
81	Kapasitas Fiskal									BKAD	
82	Pajak Perkapita (Rp)									Bapenda	
83	SiLPA (%)									BKAD	
	SiLPA (Juta)	97.103.147.651,00	47.254.756.068,14	273.631.407.390,00	155.862.722.472,92	175.757.190.587,41	190.927.978.510,60	198.977.705.407,75			
84	Pajak dan Retribusi Daerah (%)	17,19%	15,29%	19,44%	15,48%	15,48%	15,48%	15,48%		Bapenda/BKAD	
85	Pendapatan Daerah	2.536.758.560.876,00	2.609.501.844.013,92	2.146.310.514.982,00	3.262.544.100.680,54	3.452.422.228.247,13	3.621.724.750.253,57	3.810.411.597.153,03		Bapenda/BKAD	
86	Pendapatan Asli Daerah (%)	26,17%	25,97%	27,72%	23,57%	23,57%	23,57%	23,57%		Bapenda/BKAD	
87	Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)	663.872.372.982,00	677.803.723.304,94	594.972.372.982,00	769.038.732.385,93	813.796.329.532,64	853.703.896.417,76	898.180.687.866,25		Bapenda/BKAD	

88	Pajak Daerah (%)	16,97%	15,05%	19,17%	15,42%	15,42%	15,42%	15,42%		Bapenda/BKAD	
89	Pajak Daerah (Rp Juta)	430.384.170.522,00	392.686.405.543,00	411.384.170.522	503.167.819.142,57	532.451.887.158,89	558.562.670.076,90	587.663.012.118,41		Bapenda/BKAD	
90	Retribusi Daerah (%)	0,23%	0,24%	0,27%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%		Bapenda/BKAD	
91	Retribusi Daerah (Rp Juta)	5.750.000.000,00	6.212.686.828,00	5.850.000.000,00	1.907.330.588,53	2.018.336.095,16	2.117.312.804,43	2.227.621.871,11		Bapenda/BKAD	
92	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (%	0,32%	0,31%	0,38%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%		BKAD	
93	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dipisahkan (Rp Jut	8.205.702.460,00	8.205.702.460,00	8.205.702.460,00	5.709.721.748,30	6.042.024.160,48	6.338.317.562,84	6.668.535.135,42		BKAD	
94	Lain-lain PAD yang Sah (%)	8,65%	10,37%	7,90%	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%		BKAD	
95	Lain-lain PAD yang Sah (Rp Juta)	219.532.500.000,00	270.698.928.473,94	169.532.500.000,00	258.253.860.906,53	273.284.082.118,11	286.685.595.973,59	301.621.518.741,31		BKAD	
96	Dana Perimbangan (%)									BKAD	
97	Dana Perimbangan (Rp Juta)									BKAD	
98	Dana Bagi Hasil Pajak (%)	3,73%	5,41%	4,04%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%		BKAD	
99	Dana Bagi Hasil Pajak (Rp)	94.518.951.246,00	141.163.908.009,00	86.604.805.000,00	118.081.565.718,36	124.953.842.661,39	131.081.424.775,74	137.910.585.585,46		BKAD	
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (%)	9,92%	9,33%	9,02%	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%			
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (Rp)	251.750.584.048,00	243.360.751.954,00	193.616.419.000,00	259.224.796.857,44	274.311.525.964,29	287.763.424.397,00	302.755.500.533,83			
100	Dana Alokasi Umum (%)	42,55%	41,31%	50,29%	47,62%	47,62%	47,62%	47,62%		BKAD	
101	Dana Alokasi Umum (Rp Juta)	1.079.265.408.000,00	1.077.878.230.685,00	1.079.281.761.000,00	1.553.477.754.195,09	1.643.889.236.179,77	1.724.503.533.963,90	1.814.347.781.312,59		BKAD	
102	Dana Alokasi Khusus (%)	14,77%	13,65%	8,31%	10,81%	10,81%	10,81%	10,81%		BKAD	
103	Dana Alokasi Khusus (Rp Juta)	374.739.871.600,00	356.250.599.693,00	178.256.254.000,00	352.831.582.893,97	373.366.171.312,96	391.675.587.211,74	412.081.343.213,29		BKAD	
104	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (%)	0,01%	1,56%	0,02%	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%		BKAD	
105	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (Rp Juta)	315.000.000,00	40.748.257.367,98	350.000.000,00	124.475.885.304,23	131.720.307.846,70	138.179.709.056,51	145.378.680.652,99		BKAD	
106	Belanja Daerah	2.612.861.708.527,00	2.372.645.890.287,06	2.404.941.922.372,00	2.721.916.122.382,15	2.866.848.031.366,81	2.998.171.011.267,15	3.151.964.577.452,64		BKAD	
107	Belanja Langsung (%)									BKAD	
108	Belanja Langsung (Rp Juta)									BKAD	
109	Belanja Pegawai Langsung (%)									BKAD	
110	Belanja Pegawai Langsung (Rp Juta)									BKAD	
	Belanja Pegawai (%)	26,46%	26,91%	34,89%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%			
	Belanja Pegawai (Rp)	691.237.518.838,00	638.555.013.259,27	839.068.749.256,00	452.930.209.050,20	477.047.057.947,44	498.899.364.214,43	524.490.803.829,41			
	Belanja Operasi (%)	68,76%	69,43%	64,80%	66,07%	66,07%	66,07%	66,07%			
	Belanja Operasi (Rp)	1.796.515.517.869,00	1.647.219.558.627,47	1.558.299.318.485,00	1.798.459.281.507,38	1.894.220.548.637,07	1.980.989.949.844,88	2.082.606.404.616,58			
111	Belanja Barang dan Jasa (%)	33,64%	33,18%	28,30%	34,96%	34,96%	34,96%	34,96%		BKAD	
112	Belanja Barang dan Jasa (Rp Juta)	878.963.832.664,00	787.157.711.061,20	680.585.477.291,00	951.445.980.902,13	1.002.106.940.354,19	1.048.010.897.643,27	1.101.769.450.022,07		BKAD	
113	Belanja Modal (%)	17,44%	16,48%	19,43%	33,92%	33,92%	33,92%	33,92%		BKAD	
114	Belanja Modal (Rp Juta)	455.707.744.415,00	390.900.388.868,39	467.342.760.249,00	923.215.701.624	972.373.503.710,78	1.016.915.448.273,69	1.069.078.934.849,80		BKAD	
	Belanja Tidak Terduga (%)	0,56%	0,50%	0,70%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%			
	Belanja Tidak Terduga (Rp)	14.550.000.000,00	11.924.306.413,00	16.858.418.452,00	241.139.250,81	253.979.018,96	265.613.148,58	279.237.986,26			
	Belanja Transfer (%)	13,25%	13,60%	15,07%	17,96%	17,96%	17,96%	17,96%			
	Belanja Transfer (Rp)	346.088.446.243,00	322.601.636.378,20	362.441.425.186,00	488.744.976.963,16	514.768.829.033,93	538.349.073.207,64	565.964.117.016,05			
115	Belanja Tidak Langsung (%)									BKAD	
116	Belanja Tidak Langsung (Rp Juta)									BKAD	
117	Belanja Pegawai Tidak Langsung (%)									BKAD	
118	Belanja Pegawai Tidak Langsung (Rp Juta)									BKAD	
119	Belanja Bunga (%)									BKAD	
120	Belanja Bunga (Rp Juta)									BKAD	
121	Belanja Subsidi (%)	0,82%	0,89%	0,36%	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%		BKAD	
122	Belanja Subsidi (Rp Juta)	21.470.000.000,00	21.167.303.205,00	8.625.330.000,00	17.639.324.733,82	18.578.553.164,07	19.429.589.192,85	20.426.245.421,02		BKAD	
123	Belanja Hibah (%)	7,78%	8,39%	1,23%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%		BKAD	
124	Belanja Hibah (Rp Juta)	203.404.166.367	199.114.237.682	29.580.761.938,00	374.039.769.583,73	393.955.996.022,95	412.002.113.145,76	433.136.089.165,98		BKAD	
125	Belanja Bantuan Sosial (%)	0,06%	0,05%	0,02%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%		BKAD	
126	Belanja Bantuan Sosial (Rp Juta)	1.440.000.000,00	1.225.293.420,00	439.000.000,00	2.403.997.237,51	2.532.001.148,41	2.647.985.648,56	2.783.816.178,10		BKAD	

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan taraf hidup yang layak, aman, sejahtera dan tercapainya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan;

b. bahwa dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan di daerah yang terarah dan sistematis yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah disingkat RPKD adalah Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021-2026.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
6. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan pedoman dalam upaya peningkatan pembangunan sumberdaya manusia di bidang penanggulangan kemiskinan daerah pada tahun 2021-2026 dalam bentuk kebijakan daerah.

Pasal 3

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
a. Bab I Pendahuluan;
b. Bab II Kondisi Umum Daerah;
c. Bab III Profil Kemiskinan Daerah;
d. Bab IV Prioritas Program;
e. Bab V Lokasi Prioritas; dan
f. Bab VI Penutup.

Pasal 4

Dokumen RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP 19700703 200112 1 003

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3